



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan sesuai Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

8. Program

8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran program RPJMD, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta Kaidah Pelaksanaannya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pedoman dalam :
 - a. Penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017; dan
 - b. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan RKPD Tahun 2017 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2017 meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang; Dasar Hukum; Hubungan Antar Dokumen; dan Sistematika Dokumen RKPD; serta Maksud dan Tujuan.
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah; Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
 - c. BAB III

- c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan.
 - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
Memuat Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial; Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah; Prioritas Pembangunan Spasial Tahun 2017 serta Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan.
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Mei 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyesuaian dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasarat yang saling berkausalitas tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian

tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjarangan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun, dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA SKPD. RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2017 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD tahun 2016 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Memberikan gambaran penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2016

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD Provinsi Jawa Timur.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian mengenai arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai acuan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Tahun 2017.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 yang merupakan gambaran prioritas pembangunan RPJMD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Provinsi.

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Jawa Timur yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2016 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2017;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Administrasi

Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah mencapai 47.995 Km², merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Pulau Bali;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Secara administratif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa.

Sementara itu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan.



Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kotase Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
		Kelurahan	Desa	Jumlah
Kabupaten				
01. Pacitan	12	5	166	171
02. Ponorogo	21	26	281	307
03. Trenggalek	14	5	152	157
04. Tulungagung	19	14	257	271
05. Blitar	22	28	220	248
06. Kediri	26	1	343	344
07. Malang	33	12	378	390
08. Lumajang	21	7	198	205
09. Jember	31	22	226	248
10. Banyuwangi	24	28	189	217
11. Bondowoso	23	10	209	219
12. Situbondo	17	4	132	136
13. Probolinggo	24	5	325	330
14. Pasuruan	24	24	341	365
15. Sidoarjo	18	31	322	353
16. Mojokerto	18	5	299	304
17. Jombang	21	4	302	306
18. Nganjuk	20	20	264	284
19. Madiun	15	8	198	206
20. Magetan	18	28	207	235
21. Ngawi	19	4	213	217
22. Bojonegoro	28	11	419	430
23. Tuban	20	17	311	328
24. Lamongan	27	12	462	474
25. Gresik	18	26	330	356



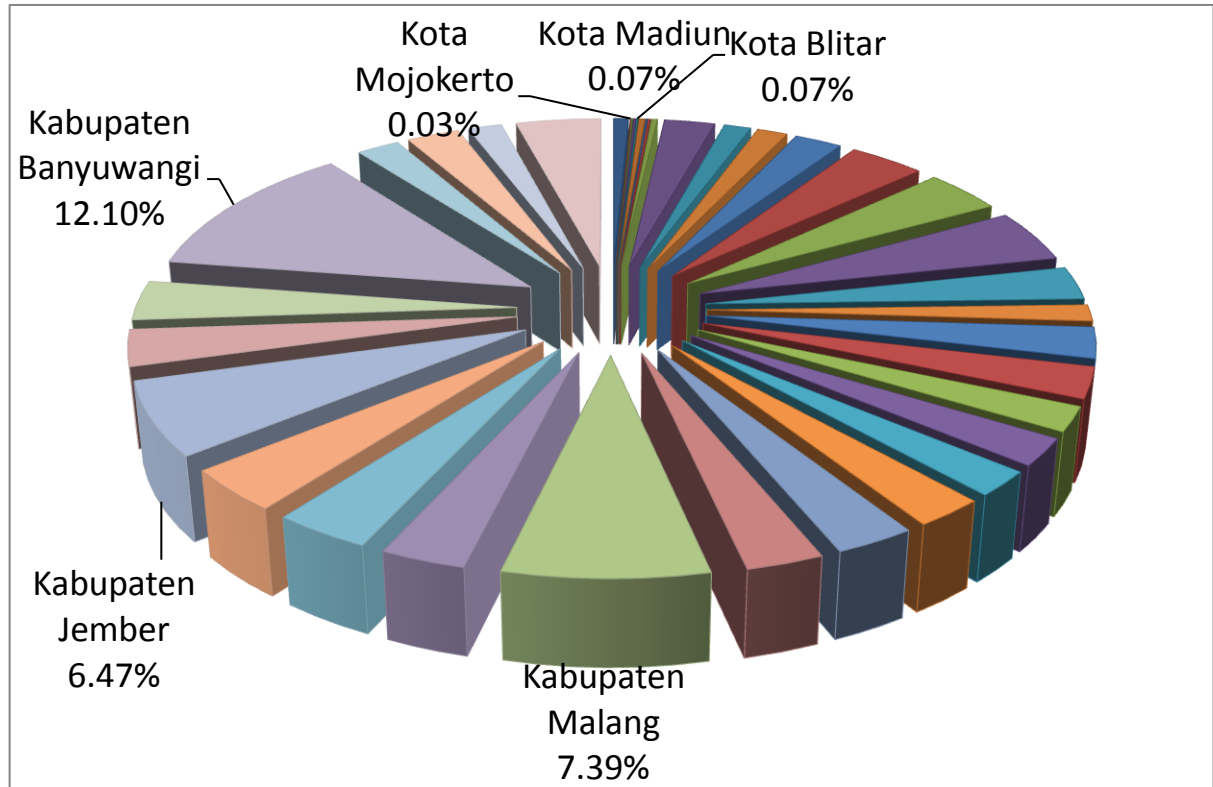
Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
		Kelurahan	Desa	Jumlah
26. Bangkalan	18	8	273	281
27. Sampang	14	6	180	186
28. Pamekasan	13	11	178	189
29. Sumenep	27	4	330	334
Kota				
30. Kediri	3	46	0	46
31. Blitar	3	21	0	21
32. Malang	5	57	0	57
33. Probolinggo	5	29	0	29
34. Pasuruan	4	34	0	34
35. Mojokerto	2	18	0	18
36. Madiun	3	27	0	27
37. Surabaya	31	154	0	154
38. Batu	3	5	19	24
Jumlah	664	777	7.724	8.501

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 578.240 Ha atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 1.647 Ha setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut ini.



Gambar 2.1
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten dan Kota Administrasi



Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031

b. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa (selain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak antara 111,0°-114,4° Bujur Timur dan 7,12°-8,48° Lintang Selatan. Jatim dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jatim daratan dan Kepulauan Madura.

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah



pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 4 aspek antara lain kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir, kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan.

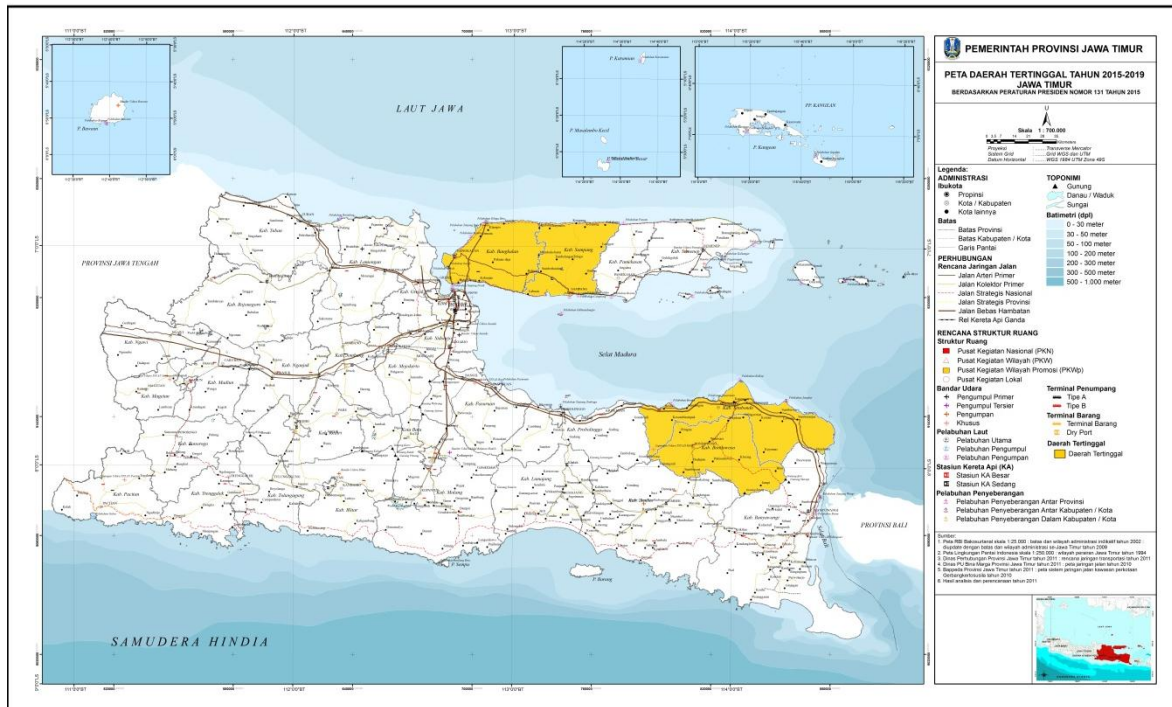
Kawasan Tertinggal

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal mengamanatkan bahwa daerah tertinggal ditetapkan setiap lima tahun secara nasional dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat Empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu: Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowoso merupakan bagian dari 122 Kabupaten diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya secara nasional. Daerah Tertinggal rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal.



Gambar 2.2
Peta Kawasan Tertinggal di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

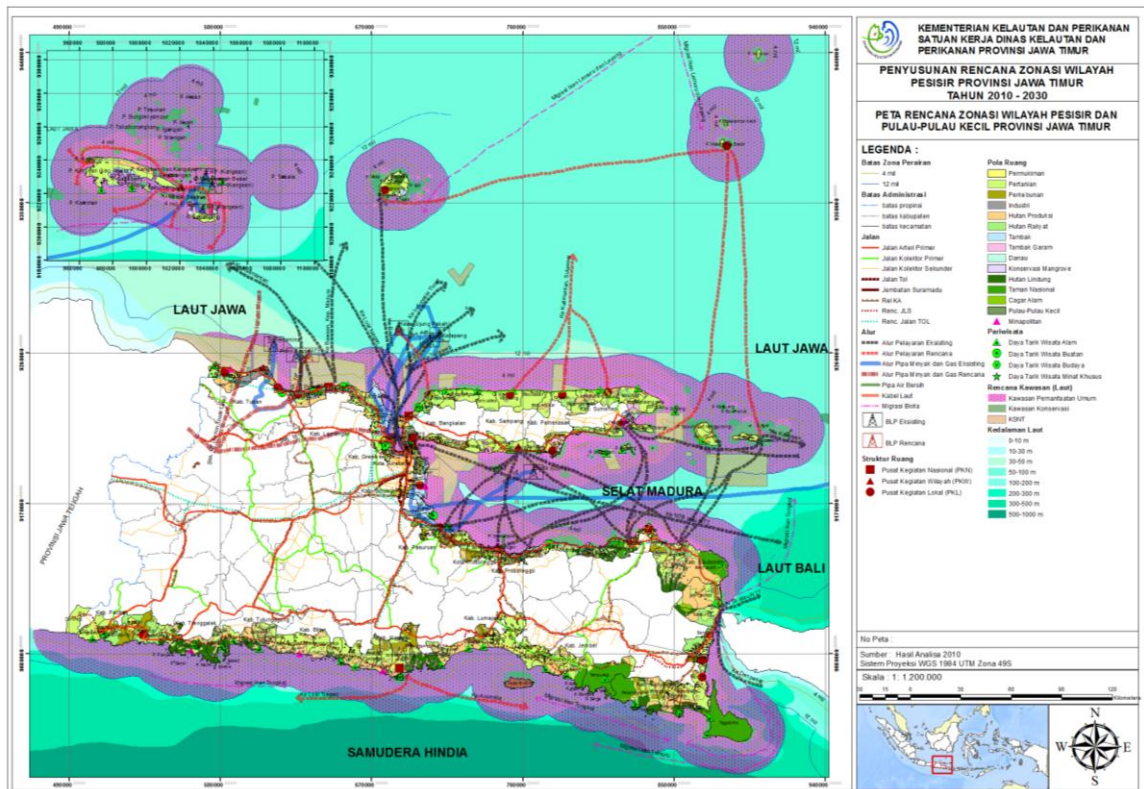
Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara



bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari laut sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.

Gambar 2.3
Peta Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur



Sumber : RZWP3K Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032 dimantakan untuk wilayah pesisir bagian laut menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU), Kawasan Konservasi, dan Kawasan Strategis



Nasional Tertentu (KSNT). Sedangkan untuk wilayah pesisir bagian darat arahan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten/Kota yang berlaku.

Kawasan Pegunungan

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung.

Kawasan Kepulauan

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

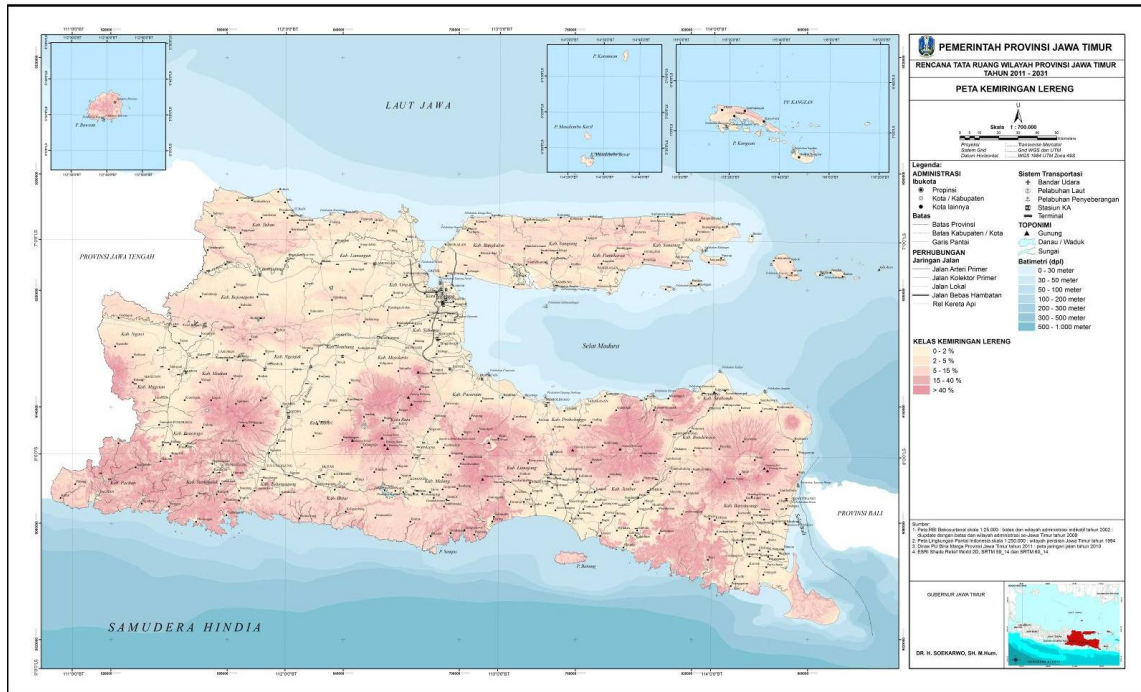
c. Topografi

Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar berada pada kawasan Jawa Timur Bagian Selatan.



Gambar 2.4
Peta Kemiringan lereng Provinsi Jawa Timur



Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut: meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

d. Geologi

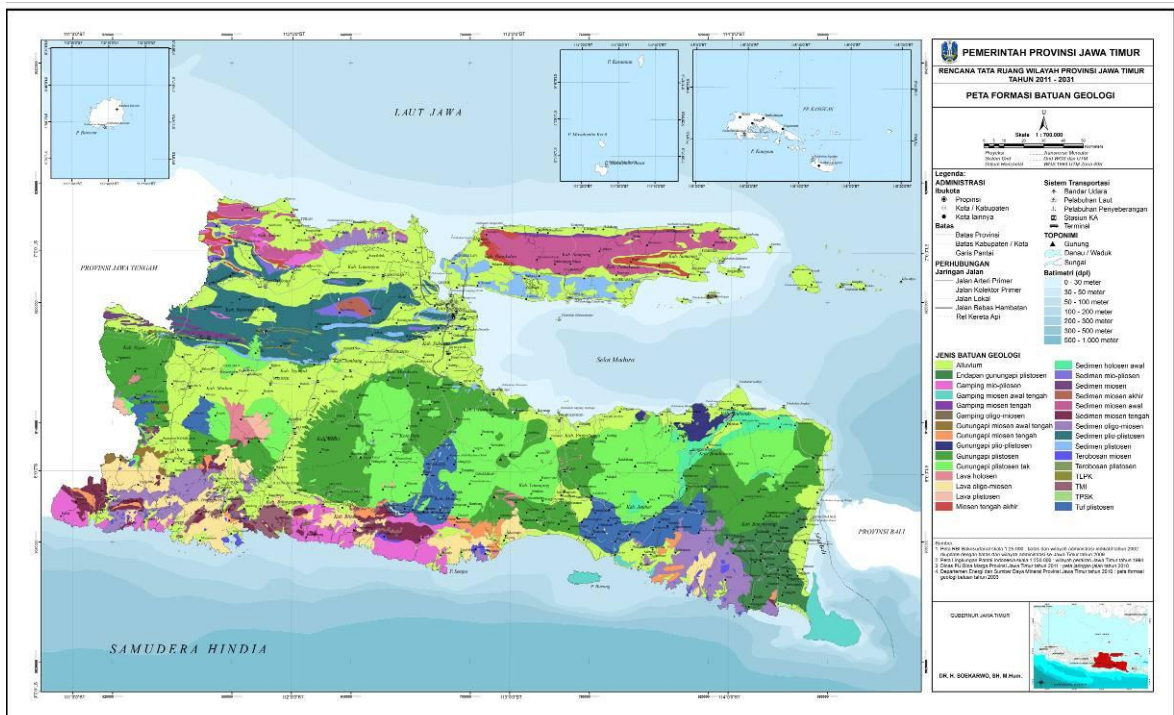
Struktur dan Karakteristik

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Holosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartar



yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian.

Gambar 2.5
Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur

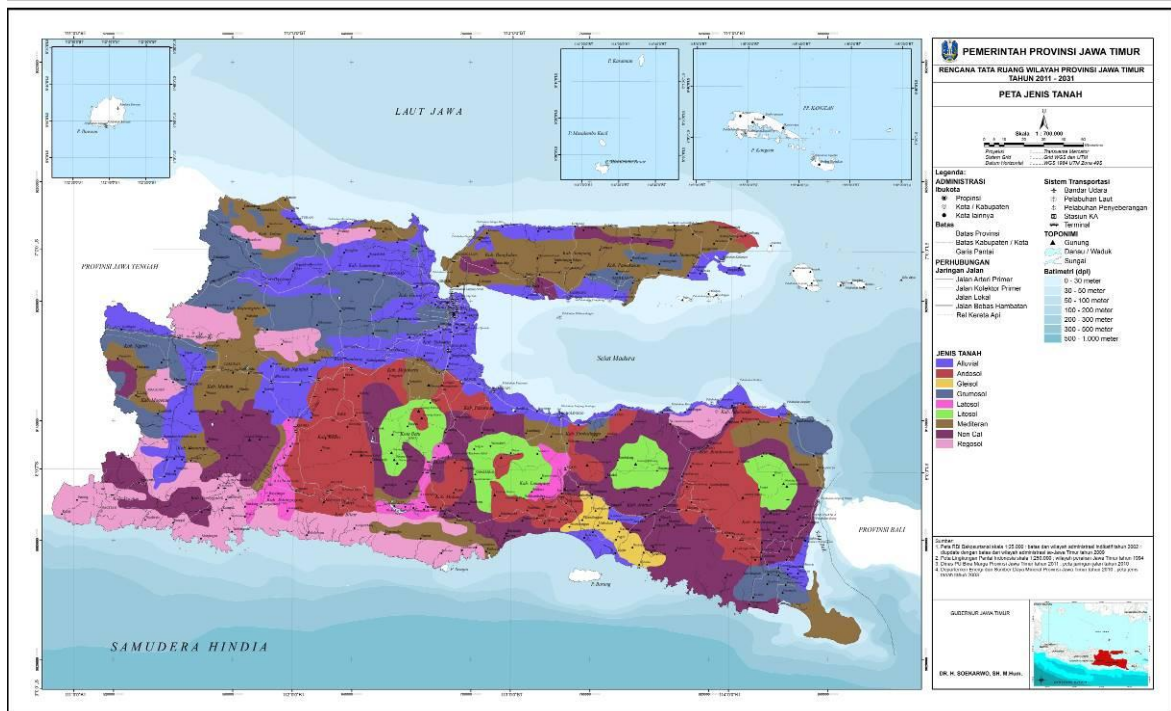


Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur.



Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

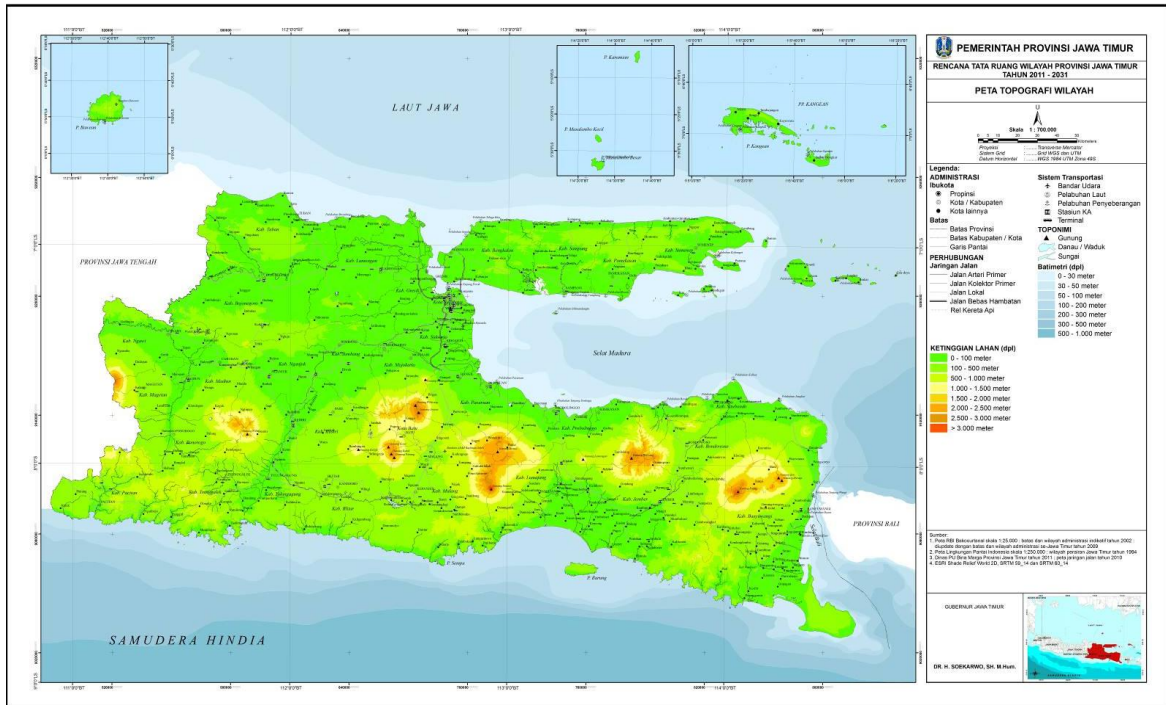
Potensi Kandungan

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumberdaya mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu:

- Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;
- Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping;
- Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan
- Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.



Gambar 2.7
Peta Kemiringan lereng Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

e. Hidrologi

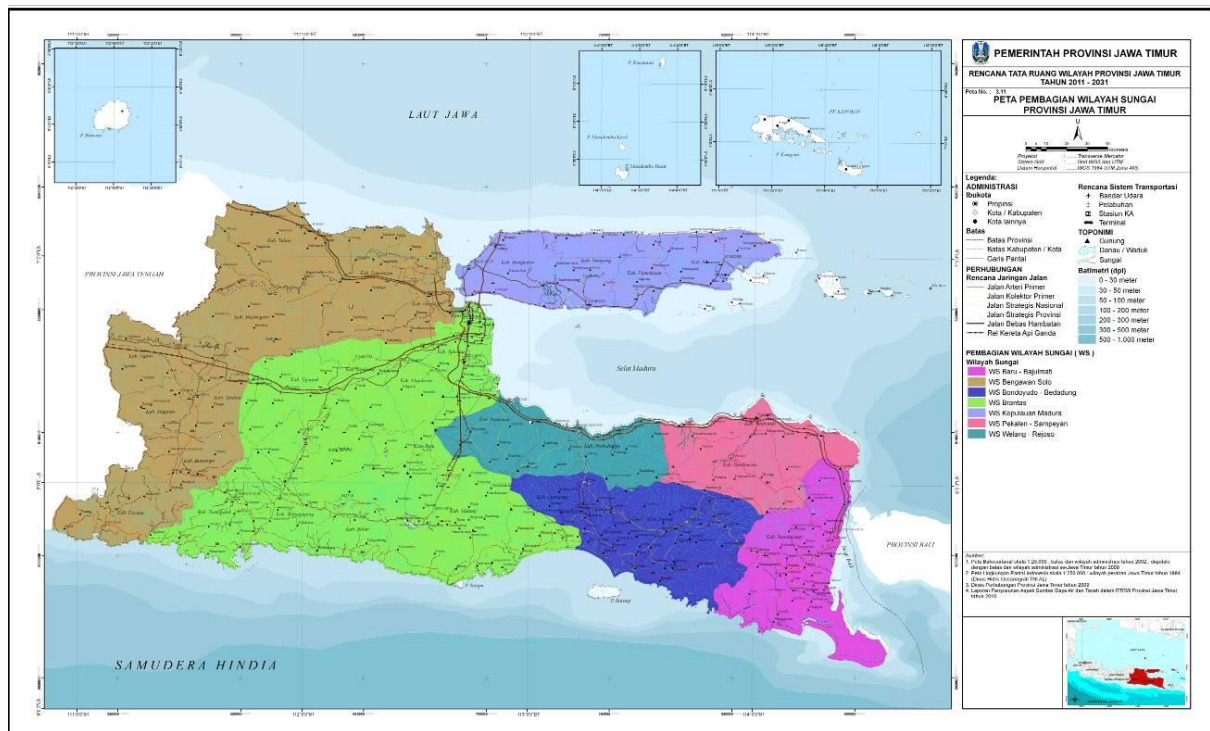
Provinsi Jawa Timur dialiri oleh dua daerah aliran sungai terpenting yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar di Jawa Timur dengan panjang ± 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Sungai Brantas yang bersumber pada lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui kota Malang, lalu membelok ke arah selatan. Di kota Kapanjen Kali Brantas membelok ke arah barat dan di sini Kali Lesti yang bersumber dari Gunung Semeru bersatu dengan Kali Brantas. Setelah itu bersatu dengan Kali Ngrowo di Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui kota Kediri.

Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah Surabaya dan ke Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.



Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai (WS), dan Waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian WS di meliputi tujuh WS yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang – Rejoso, WS Pekalen – Sampean, WS Baru – Bajulmati, WS Bondoyudo – Bedadung, dan WS Madura.

Gambar 2.8
Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur



Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031

Luas Catchment area tertinggi di provinsi Jawa Timur berada pada Wilayah Sungai Brantas dengan luas 13.880 km² dan terendah di Wilayah Sungai Welang – Rejoso dengan luas 13.880 km² seperti tertuang dalam tabel dibawah ini.



Tabel 2.2
Luas Catchment Area (km²) pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur

No	Wilayah Sungai	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bengawan Solo	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
2	Brantas	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
3	Welang – Rejoso	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
4	Pekalen – Sampean	3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00
5	Baru – Bajulmati	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
6	Bondoyudo – Bedadung	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
7	Madura	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00

Sumber : Pengairan dalam angka dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Catchment area ini berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan baik ke danau, sungai maupun ke laut, sehingga menciptakan suatu ekosistem, catchment area ini erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Provinsi Jawa Timur memiliki 686 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercakup dalam wilayah sungai, WS Bengawan Solo memiliki 94 DAS, WS Brantas memiliki 220 DAS, WS Welang – Rejoso memiliki 36 DAS, WS Pekalen – Sampean memiliki 56 DAS, WS Baru – Bajulmati memiliki 60 DAS, WS Bondoyudo – Bedadung memiliki 47 DAS, dan WS Madura memiliki 173 DAS.

f. Klimatologi

Temperatur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 tertinggi mencapai 35,0 derajat Celcius di bulan April dan Oktober dan terendah 31,3 derajat Celcius di bulan November. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret sebesar 455,1 mm. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus dan terendah di bulan Desember. Sedangkan kecepatan angin tertinggi di bulan Januari dan Februari mencapai 22 knots dan terendah di bulan September mencapai 15 knots.



Tabel 2.3
Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2014

Bulan	Temperatur - Max (°C)	Temperatur - Min (°C)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari	Kecepatan Angin Maks
Januari	33,4	22,6	258,7	42,0	22,0
Februari	34,0	22,4	247,1	40,0	22,0
Maret	33,5	23,1	455,1	74,0	18,0
April	35,0	23,4	273,0	54,0	16,0
Mei	33,0	23,2	104,7	86,0	17,0
Juni	34,0	23,3	201,8	89,0	17,0
Juli	32,0	21,2	41,8	90,0	16,0
Agustus	32,0	21,1	-	99,0	19,0
September	34,0	21,0	-	67,0	15,0
Oktober	35,0	22,5	-	98,0	18,0
November	31,3	28,7	72,4	81,0	16,0
Desember	34,8	22,8	319,6	33,0	18,0

Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda, Surabaya tahun 2014

g. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu :

Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.374 Ha atau sekitar 12,10% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih



27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas \pm 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011).

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
A	Kawasan Lindung	578.571,30	12,11
1	Hutan Lindung	344.742,00	7,21
2	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	233.829,30	4,90
	a. Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	b. Cagar Alam	10.958,00	0,23
	c. Taman Nasional	176.696,00	3,70
	d. Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	e. Taman Wisata Alam	298,00	0,01
B	Kawasan Budidaya	4.201.403,70	87,89
1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00	16,38
2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570,30	7,56



No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
3	Kawasan Pertanian	2.020.490,71	42,27
	a. Pertanian Lahan Basah	911.863,00	19,08
	b. Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/Kebun Campur	1.108.627,71	23,19
4	Kawasan Perkebunan	359.481,00	7,52
5	Kawasan Industri	7.403,80	0,15
6	Kawasan Pemukiman	595.255,00	12,45
7	Lainnya	74.430,89	1,56
Total		4.779.975,00	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Timur



Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031



2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Potensi Pertanian

Potensi Pertanian Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Luas eksisting kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 ha dengan rincian pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha.

Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa Sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03% dari luas Jawa Timur dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis tersebar di masing-masing wilayah sungai.

Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi.

Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut Provinsi Jawa Timur menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215,191.83 Ha.

b. Potensi Perikanan

Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri :



- Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng dan garam;
- Perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi;
- Perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.

c. Potensi Pertambangan

Potensi Pertambangan di Jawa Timur dibagi menjadi potensi pertambangan mineral (logam, bukan logam, batuan dan batubara), potensi pertambangan minyak dan gas bumi dan potensi panas bumi.

Potensi Pertambangan Mineral

- Potensi pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah : Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung. potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan.
- Potensi pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa.
- Potensi pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api, diantaranya batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff.
- Potensi Potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung



Potensi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan migas yang cukup potensial, dimana cadangan migas yang telah terbukti maupun yang masih terduga masih sangat besar. Jawa Timur menduduki posisi peringkat ke-3 (tiga) sebagai daerah penghasil pertambangan migas setelah Riau dan Kalimantan Timur yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja. Sedangkan potensi panas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur

No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
1	Gunung Lawu	195	Kab. Karanganyar, Sragen, Wonogiri (Prov. Jawa Tengah), Kab. Ngawi, Magetan (Prov. Jawa Timur) kewenangan Pusat	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2518 K/30/MEM/2014 13 Agustus 2012 Lelang oleh Pemerintah Pusat
2	Arjosari	18,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim
3	Melati	13,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim
4	Ngebel - Wilis	165	Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun	Eksplorasi Ijin Usah Pertambangan (IUP)



No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
				188/63/KPTS/119.3/2011 16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya Geothermal
5	Gunung Wilis	50	Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2775 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
6	Gunung Pandan	60	Kab. Madiun dan Kab. Bojonegoro	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2774 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
	Songgoriti	35	Kota Batu dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2776 K/30/MEM/2014 2 Juni 2014
8	Arjuno - Welirang	185	Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014)
9	Bromo - Tengger	-	Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang dan Kota Malang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) 2903 K/30/MEM/2013 30 Juli 2013 PT. Hitay Renewable Energy
10	Krucil-Tiris	147	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) PT. Hitay Rawas Energy



No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
11	Iyang - Argopuro	295	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 1521K/034/M.PE/1990 30 Oktober 1990 PT. Pertamina Geothermal Energy
12	Gunung Raung	-	Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi	Pelaksanaan Survey Pendahuluan Panasbumi (PSP) PT. Hitay Runcing Energy
13	Blawan - Ijen	110	Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 188/62/KPTS/119.3/2011 25 Mei 2011 PT. Bakrie Dharmakarya Energy
14	Pulau Bawean	14,5	Kabupaten Gresik	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim
15	Gunung Kelud	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Blitar dan Kediri	Terdapat Sumber air panas yang diduga berasal dari kawah Gunung Kelud
16	Parengan – Kec. Rengel	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Tuban	Terdapat sumber air panas: 1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec. Singgahan T = 46,6 ⁰ C pH = 6,9 2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec. Parengan T = 43,8 ⁰ C pH = 6,99

Sumber : Dinas ESDM Prov Jatim, 2014



d. Potensi Industri

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi: Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dan sentra industri. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pada dasarnya setiap daerah akan dikembangkan kawasan industri. Area industrialisasi di Jawa Timur masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukkan adanya kawasan industri yang berkembang di wilayah pantura dan wilayah selatan Jawa Timur. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan, industri manufaktur, industri pertambangan.

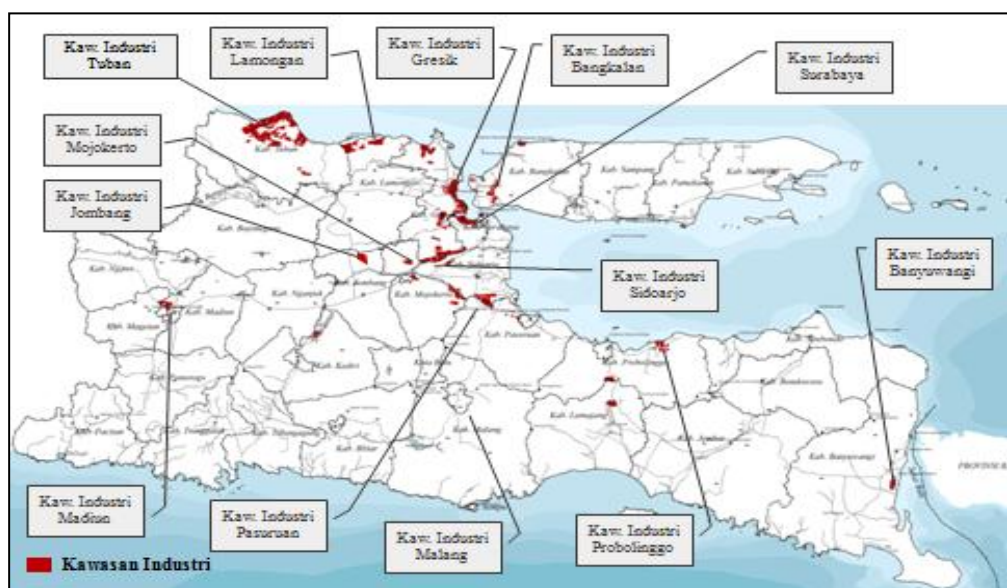
Potensi pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara besar. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan di wilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan di wilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.

Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara



Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbangkertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

Gambar 2.10
Peta Persebaran Kawasan Industri di Jawa Timur



Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031

e. Potensi Pariwisata

Potensi Pariwisata Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya Tarik wisata hasil buatan manusia.

Daya Tarik Wisata Alam, daya tarik wisata alam di Provinsi Jawa Timur meliputi:

- Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto;
- Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk;



- Air Terjun Madakaripura, Bromo-Ngadisari, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo;
- Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto, Kota Batu;
- Api Abadi di Kabupaten Pamekasan;
- Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso;
- Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, dan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;
- Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;
- Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang;
- Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik;
- Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi;
- Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kabupaten Trenggalek;
- Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan;
- Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
- Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung;
- Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang;
- Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kab Ngawi;
- Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan;
- Kayangan di Kabupaten Bojonegoro;
- Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso;
- Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep;
- Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
- Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan;
- Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember;
- Pemandian Air Panas Cangar Tahura R. Soerjo di Kota Batu;
- Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu;
- Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo;
- Telaga Ngebel dan Tirta Manggolo di Kabupaten Ponorogo; dan Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.



Daya Tarik Wisata Budaya, daya tarik wisata budaya di Provinsi Jawa Timur meliputi:

- Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid Agung, dan Museum di Kabupaten Sumenep;
- Candi Jabung di Kabupaten Malang;
- Candi Jabung Tirta di Kabupaten Probolinggo;
- Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung;
- Candi Penataran di Kabupaten Blitar;
- Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri;
- Gua Akbar, Makam Bektî Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
- Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang;
- Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan;
- Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo;
- Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar;
- Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang;
- Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya;
- Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan;
- Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik;
- Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto;
- Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang; dan Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto.
- Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia
- Daya tarik wisata hasil buatan manusia di wilayah Jawa Timur meliputi:
 - Bendungan Widas dan Taman Umbul Kab Madiun;
 - Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya;
 - Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya;
 - Kebun Raya Purwodadi & Pemandian Banyubiru di Kab Pasuruan;
 - Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto;
 - Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember;
 - Pemandian Talun & Waduk Pondok Kabupaten Ngawi;



- Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang;
- Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal, & Tirtosari di Kab Magetan;
- Taman Safari di Kabupaten Pasuruan;
- Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo Kab Malang;
- Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi;
- Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri;
- Waduk Gondang dan Wisata Bahari Lamongan Kabupaten Lamongan; dan
- Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung.

3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung. Dengan adanya bencana ini dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

a. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Wilayah rawan longsor di Jawa Timur dengan potensi gerakan tanah dengan klasifikasi menengah-tinggi sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2.6
Wilayah Potensi Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
Kabupaten Ngawi	Widodaren, Jogorogo Pitu, Kedunggalar, Paron	Menengah-Tinggi
Kabupaten Tuban	Bancar, Tambakboyo, Kerek, Rengel, Montong	Menengah
Kabupaten Bojonegoro	Ngambon, Purwosari	Menengah
Kabupaten Magetan	Poncol, Magetan, Panekan, Plaosan, Parang	Menengah-Tinggi
Kabupaten Madiun	Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan	Menengah-Tinggi
Kabupaten Nganjuk	Loceret, Gondang, Sawahan	Menengah
Kabupaten Ponorogo	Ngrayun, Sawoo, Sampung, Sambit, Slahung, Bungkal, Badegan, Soko, Mlarak, Pulung, Ngebel	Menengah-Tinggi
Kabupaten Pacitan	Nawangan, Bandar, Tegalombo, Ngadirejo Tulakan, Arjosari, Kebonagung, Pacitan Pringkuku, Punung, Donorejo	Menengah-Tinggi
Kabupaten Trenggalek	Bendungan, Munjungan, Tugu, Durenan, Karangan, Pule, Panggul, Dongko, Kampak, Watulimo, Munjungan	Menengah-Tinggi
Kabupaten Kediri	Grogol, Semen, Mojo	Menengah-Tinggi
Kabupaten Tulungagung	Pagerwojo, Sendang, Kauman, Karangrejo, Bandung, Kalidawir, Rejotangan, Besuki	Menengah-Tinggi
Kabupaten Blitar	Bakung, Wonotirto, Kademangan, Sutojayan, Panggunrejo	Menengah-Tinggi
Kabupaten Malang	Poncokusumo, Jabung, Sumberma Njing, Batu, Pau, Kalipare	Menengah



Kabupaten/Kota	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
Kabupaten Lumajang	Tempursari, Pronojiwo, Senduro, Randugung, Klakah	Menengah-Tinggi
Kabupaten Pasuruan	Lumbang, Tuttur, Tolasari	Menengah
Kabupaten Probolinggo	Lumbang, Sukapura, Sumber, Gading, Krucil	Menengah-Tinggi
Kabupaten Jember	Panti, Tempurejo, Tanggul, Jeblug, Bangsalsari, Arjasa, Rambipuji, Munjulsari, Sukorambi	Menengah-Tinggi
Kabupaten Situbondo	Bungatan, Sumbermalang, Jatibanteng, Banyuglugur, Kendit	Menengah-Tinggi
Kabupaten Bondowoso	Pakem, Curah Dami, Grujugan, Maesan, Klabang	Menengah-Tinggi
Kabupaten Banyuwangi	Kalipiro, Wongsorejo	Menengah-Tinggi
Kota Batu	Junrejo, Batu, Bumiaji	Menengah-Tinggi

Sumber: RTRW Jawa Timur

Keterangan:

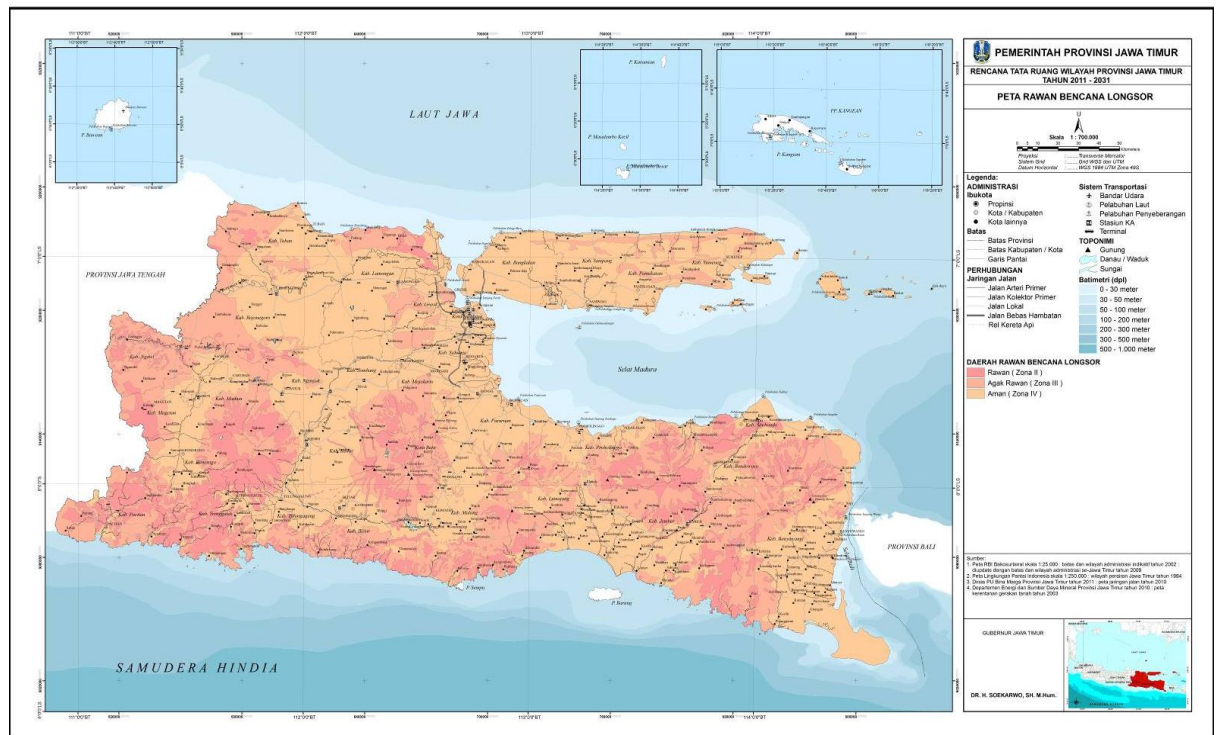
- Menengah : Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
- Tinggi : Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi Gerakan Tanah jika curah hujan diatas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jawa Timur terbagi dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah dengan kelerengan menengah hingga curam atau berada pada bentang



alam berupa gunung dan perbukitan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Longsor



Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031

b. Wilayah Rawan Gelombang Pasang

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang



berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.

c. Wilayah Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Secara detail lokasi terjadinya banjir beserta tingkat potensi bahaya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Area/Kecamatan	Tingkat Potensi Banjir
Bangkalan	Bangkalan	Potensi Menengah
Banyuwangi	Glagah	Potensi Menengah
Blitar	Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben	Potensi Menengah
Bojonegoro	Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro	Potensi Menengah
Bondowoso	Grujugan, Tegalampel, Cerme	Potensi Menengah
Gresik	Gresik	Potensi Tinggi
Jember	Silo	Potensi Menengah
Jombang	Megaluh	Potensi Menengah
Kediri	Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates	Potensi Menengah
Lamongan	Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Deket, Lamongan, Sukodadi	Potensi Tinggi
Lumajang	Tempeh, Tempursari, Pronojiwo	Potensi Menengah



Kabupaten/Kota	Area/Kecamatan	Tingkat Potensi Banjir
Madiun	Kebonsari, Sawahan, Wonosari	Potensi Menengah
Magetan	Plaosan, Bendo, Kawedanan	Potensi Menengah
Malang	Kepanjen, Pakisaji	Potensi Menengah
Mojokerto	Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, Pungging	Potensi Menengah
Nganjuk	Rejoso	Potensi Menengah
Ngawi	Ngrambe, Padas	Potensi Menengah
Pacitan	Ngadirojo, Kebonagung	Potensi Menengah
Pasuruan	Purwosari, Kraton	Potensi Menengah
Ponorogo	Jetis, Kauman, Siman	Potensi Menengah
Probolinggo	Kota Anyar, Paiton	Potensi Menengah
Sampang	Sreseh, Jrengik, Sampang	Potensi Menengah
Sidoarjo	Krian, Taman, Sidoarjo	Potensi Menengah
Situbondo	Sumbermalang, Situbondo	Potensi Menengah
Sumenep	Sumenep	Potensi Rendah
Trenggalek	Pule	Potensi Menengah
Tuban	Jatirogo, Bancar, Tuban	Potensi Menengah
Tulungagung	Pagerwojo, Gondang, Kalidawir	Potensi Menengah
Kota Pasuruan	Rejoso	Potensi Rendah
Kota Surabaya	sebagian besar wilayah Kota Surabaya	Potensi Menengah
Kota Malang	Wilayah Kota Bagian tengah dan timur	Potensi Rendah

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur

d. Wilayah Rawan Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik - titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran



magma/lava/lahar dari letusan gunung berapi di vegetasi hutan dan objek lainnya maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur umumnya terjadi pada kawasan Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan - kawasan lainnya dengan potensi angin puting beliung.

e. Wilayah Rawan Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung berapi merupakan kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi terancam bahaya letusan gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi daerah terlarang, daerah bahaya I, dan daerah bahaya II. Kawasan rawan letusan gunung berapi di Jawa Timur berada pada lereng gunung berapi yang masih aktif. Terdapat 7 gunung api aktif di Jawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayah rawan. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi: Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

Tabel 2.8
Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Jawa Timur

No	Gunung Api	Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Pengamatan
1	Ijen	Bondowoso dan Banyuwangi	Pos pengamatan Gunung Api Kawah Ijen, Dusun Panggung Sari, Desa taman Sari, Licin, Kec. Glagah, Kab.Banyuwangi
2	Semeru	Malang dan Lumajang	Pos Pengamatan Gunung Api di Gunung Sawur Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kab.Lumajang.
3	Bromo	Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan	Pos Pengamatan Gunung Api di Cemoro Lawang Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab.Probolinggo
4	Lamongan	Lumajang dan Probolinggo	Pos Pengamatan di Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang.



No	Gunung Api	Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Pengamatan
5	Arjuno-Welirang	Pasuruan dan Mojokerto	Pos Pengamatan Gunung Api di Kasiman, Desa Sukoreno, Kecamatan prigen, Kabupaten Pasuruan
6	Kelud	Kediri, Blitar dan Malang	Pos Pengamatan Gunung Api di Dusun Margomulyo, Desa Sugih Waras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri
7	Raung	Banyuwangi, Bondowoso dan Jember	Pos Pengamatan Gunung Api di Kp.Mang Desa Sragi, Kecamatan Songon Kabupaten Banyuwangi

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Gunung Berapi



Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031



f. Wilayah Rawan Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuh batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung.

g. Wilayah Rawan Tsunami

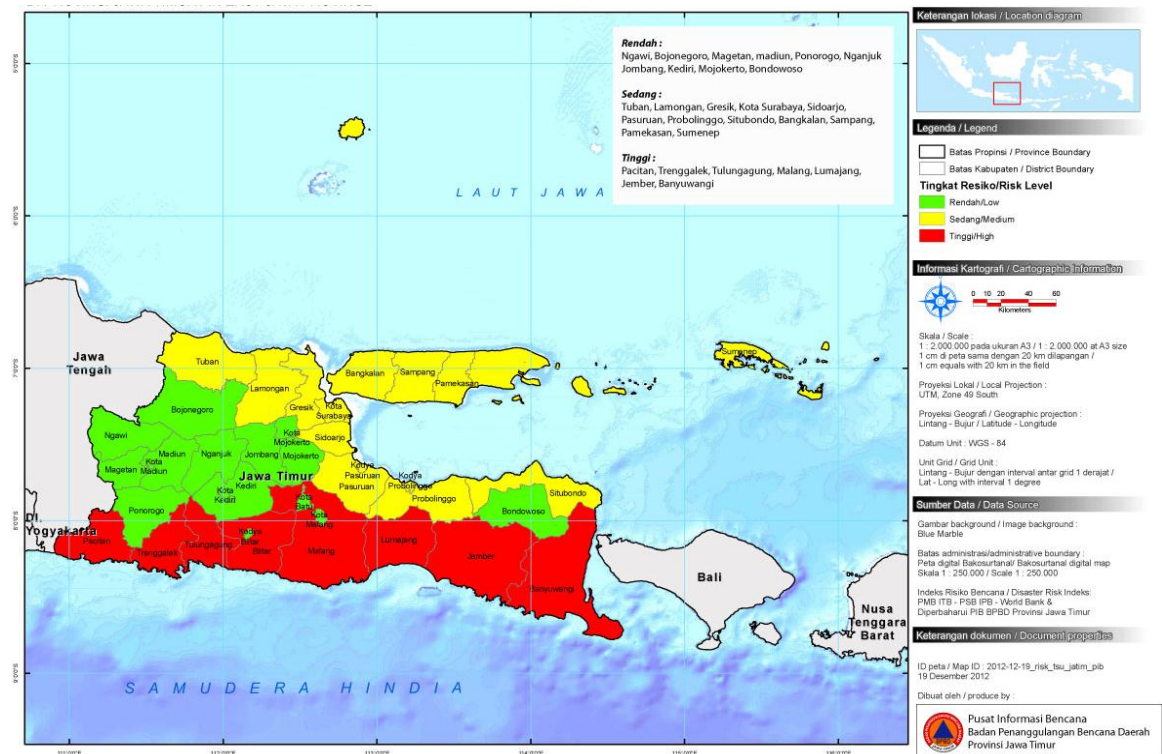
Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” yang melintasi Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami. Tingkat resiko tsunami di Jawa timur diklasifikasikan menjadi:

- a) Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten



- umajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
- b) Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.
- c) Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso.

Gambar 2.13
Peta Rawan Bencana Tsunami



Sumber : BPBD Provinsi Jawa Timur, 2012

h. Wilayah Rawan Luapan Lumpur

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Arah pengelolaan kawasan luapan lumpur dibagi menjadi :



- 1) Penanganan luapan lumpur meliputi :
 - Peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur berfungsi melindungi permukiman dan infrastruktur vital;
 - Pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk melancarkan aliran endapan lumpur.
- 2) Penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur meliputi:
 - Penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase baru;
 - Normalisasi saluran drainase utama;
 - Perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong dan perbaikan sebagian ruas Jalan Arteri Porong.
 - Peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang \pm 14 km untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong;
 - Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya-Gempol;
 - konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya.
- 3) Pengamanan Kali Porong meliputi:
 - Penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong;
 - Penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan memasang perlindungan tebing sungai/tanggul.
- 4) Penanganan dampak sosial masyarakat akibat luapan lumpur meliputi:
 - Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur maupun penurunan tanah;
 - Perlindungan sosial terhadap hak-hak masyarakat atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur;
 - Pemulihan sosial masyarakat yang terkena luapan lumpur.

i. Wilayah Rawan Kekeringan

Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan dapat diklasifikasikan menjadi :

- 1) Kekeringan Alamiah, meliputi:
 - Kekeringan Meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim;



- Kekeringan Hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah;
 - Kekeringan Pertanian berhubungan dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas;
 - Kekeringan Sosial Ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian
- 2) Kekeringan Antropogenik adalah kekeringan yang disebabkan karena ketidak-patuhan pada aturan, terjadi karena :
- Kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidak-patuhan pengguna terhadap pola tanam/pola penggunaan air;
 - Kerusakan kawasan tangkapan air, sumber-sumber air akibat perbuatan manusia

Gejala terjadinya kekeringan sebagai berikut : 1) kekeringan berkaitan dengan menurunnya tingkat curah hujan dibawah normal dalam satu musim. pengukuran kekeringan Meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan; 2) Terjadinya kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau dan air tanah. Kekeringan Hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan; 3) Kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas yang menyebabkan tanaman menjadi kering dan mengering.

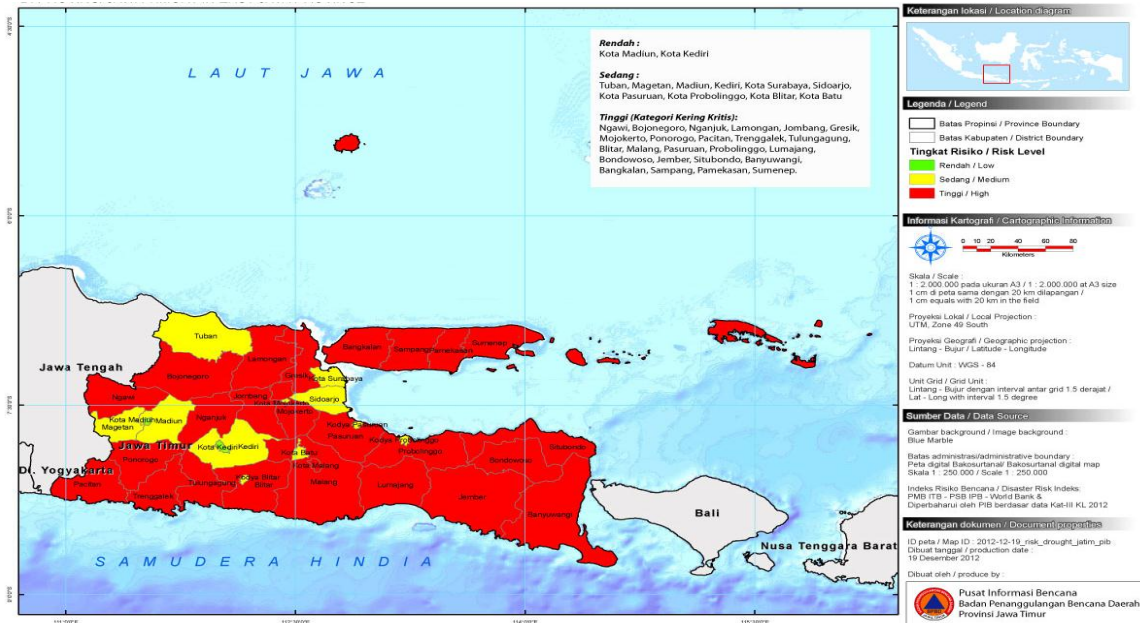
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012, tingkat resiko bencana kekeringan terbagi dalam:

- a) Resiko Kekeringan Rendah, meliputi Kota Madiun, dan Kota Kediri
- b) Resiko Kekeringan Sedang, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu.
- c) Resiko Kekeringan Tinggi, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten Pasuruan,



Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep

Gambar 2.14
Peta Rawan Bencana Kekeringan



Sumber : BPBD Provinsi Jawa Timur, 2012

4. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Selama periode 2011-2015 Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 penduduk Jawa Timur sebanyak 37,8 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 38,8 juta jiwa pada tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir cenderung melambat tiap tahun dari 0,73 persen pada tahun 2011 menjadi 0,61 persen pada tahun 2015. Seiring terjadinya pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk juga semakin meningkat. Pada tahun 2015 kepadatan penduduk mencapai 810 jiwa per km².



Tabel 2.9
Indikator Kependudukan Jawa Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	37.841	38.107	38.363	38.610	38.847
2	Pertumbuhan penduduk (%)	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61
3	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	789	794	800	805	810
4	Sex ratio (L/P) (%)	97,49	97,46	97,43	97,40	97,44
5	Jumlah rumah tangga (ribu rumah tangga)	10.511	10.585	10.656	10.725	10.676
6	Rata-rata anggota rumah tangga (jiwa per rumah tangga)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,62
7	Persentase penduduk menurut kelompok umur					
	0-14 tahun (%)	24,32	24,04	23,75	23,47	24,66
	15-64 tahun (%)	68,64	68,84	69,04	69,20	68,44
	>65 tahun (%)	7,04	7,12	7,21	7,33	6,90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pengertian lainnya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.



Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,67	0,64	0,61

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Tahun 2013 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38,3 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 38,8 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan pertumbuhan penduduknya cenderung melambat, yaitu dari 0,67 persen pada tahun 2013 menjadi 0,61 persen tahun 2015.

c. Ketenagakerjaan

Kondisi perekonomian dunia dan Indonesia sangat berpengaruh terhadap kondisi dunia usaha dan pasar kerja di Jawa Timur, hal tersebut jelas tergambar dalam kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur yang terefleksi dari hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2014 sebelumnya sempat mengalami penurunan di banding periode sebelumnya hingga hanya 20,15 juta orang, namun pada Agustus 2015 kembali menjadi 20,27 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi angkatan kerja, telah terjadi penambahan atau peningkatan sekitar 120 ribu orang. Dari sisi penyerapan angkatan kerja pun, pada Agustus 2014 tercatat adanya tambahan penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 19,37 juta orang atau tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan pekerjaan bertambah sebanyak 61 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2014. Tentunya hal ini memberikan gambaran yang positif tentang adanya geliat investasi di Jawa Timur dengan adanya lahan pekerjaan baru yang tersedia.



Tabel 2.11
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Jawa Timur Tahun 2012–2015

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015
1	Angkatan kerja	Ribu orang	20.238,06	20.432,45	20.149,99	20.274,68
2	Bekerja	Ribu orang	19.411,26	19.553,91	19.306,51	19.367,78
3	Pengangguran	Ribu orang	826,80	878,54	843,49	906,90
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,57	69,78	68,12	67,84
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,09	4,3	4,19	4,47
6	Pekerja tidak penuh	Ribu orang	6.390,92	6.472,06	6.481,52	6.244,39
	Setengah penganggur	Ribu orang	2.245,22	1.946,38	1.674,50	1.628,96
	Paruh waktu	Ribu orang	4.145,70	4.526,68	4.807,02	4.615,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Namun demikian, tingginya penambahan angkatan kerja pada Agustus 2015 baik mereka yang benar-benar baru terjun ke pasar kerja maupun mereka yang memutuskan untuk beralih pekerjaan dan keluar dari pekerjaan lamanya ternyata tidak seiring dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada Agustus 2015, tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di Jawa Timur sebanyak 63 ribu orang dibanding periode yang sama pada tahun 2014 menjadi 906 ribu orang. Selain hal di atas, penyebab lain bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Jawa Timur yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Jawa Timur.



Secara umum, distribusi penduduk Jawa Timur yang bekerja menurut sektor dari jenis kegiatan utama pada Agustus 2015 tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur masih didominasi oleh sektor Pertanian sebanyak 7,08 juta orang (36,57 persen), walaupun tiap tahun terlihat adanya pengurangan tenaga kerja di sektor ini. Hal ini dikarenakan perekonomian Jawa Timur untuk saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian walaupun sedikit mulai bergeser ke sektor Perdagangan dan Jasa Masyarakat.

d. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2013-2015, telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 8,5 persen tahun 2013 menjadi 8,7 persen pada tahun 2015, selanjutnya Angka Melek Huruf pada tahun 2013 sebesar 95,17 persen meningkat menjadi 96,06 persen tahun 2015. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), juga menunjukkan peningkatan pada semua jenjang pendidikan.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.



Untuk perhitungan PDRB hingga tahun 2013 BPS menggunakan metode lama dengan tahun dasar 2000 yang terbagi menjadi 9 sektor lapangan usaha. Dengan berkembangnya kondisi ekonomi global, PBB merekomendasikan penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (System National Account) 2008. Menindak-lanjuti permintaan PBB, maka pada tahun 2014 BPS memulai menghitung PDRB menggunakan metode baru dengan tahun dasar 2010. Konsekuensi penghitungan berdasarkan SNA 2008, maka terjadi perubahan metodologi dan cakupan yang semakin luas, yang terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 metode baru dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.12
Pertumbuhan PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	1.382,43	1.540,70	1.689,88
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1.192,84	1.262,70	1.331,42
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,08	5,86	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jatim tahun 2013 Rp. 1.382,43 triliun; Rp. 1.540,70 triliun pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 1.689,88 triliun. Sedangkan jika dihitung menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jatim tahun 2013 sebesar Rp. 1.192,84 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.262,70 triliun pada tahun 2014 dan Rp. 1.331,42 triliun pada tahun 2015.



Dari angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dihitung berdasar perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Ini menunjukkan karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa sehingga sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Dari metodologi itu, pada tahun 2013 perekonomian Jawa Timur tercatat tumbuh 6,08 persen, berikutnya tahun 2014 menjadi 5,86 persen, dan pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2015 bila dibandingkan Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,44 persen, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Perlambatan ini lebih dikarenakan faktor eksternal seperti menguatnya dolar, ketidak stabilan harga minyak mentah dunia, krisis ekonomi Yunani dan naiknya harga pangan dunia. Meskipun demikian capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2015 termasuk cukup tinggi melampaui pertumbuhan Nasional yang hanya mencapai 4,79 persen.

Dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,00 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,92 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,91 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Net Ekspor Antar Daerah sebesar 13,39 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,73 persen. Kemudian komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang masing-masing tumbuh sebesar 3,36 persen dan 2,20 persen. Sementara komponen lainnya mengalami kontraksi.

2) PDRB Per Kapita

Salah satu proxy melihat kesejahteraan penduduk adalah PDRB per kapita. Angka ini diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi angka PDRB per kapita semakin besar kemungkinan kesejahteraan masyarakat suatu daerah semakin baik. Dari hasil perkembangan PDRB per kapita tiga tahun terakhir, menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dari tahun ke



tahun cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRBnya setiap tahun meningkat.

Tabel 2.13
PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.382.434,9	1.540.696,5	1.689.882,40
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	38.363.195	38.610.202	38.847.561
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	36.035,45	39.903,87	43.500,35

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Apabila diikuti perkembangannya selama tiga tahun terakhir, PDRB perkapita penduduk Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 36,04 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 39,90 juta pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 PDRB per kapita Jawa Timur meningkat kembali menjadi Rp. 43,50 juta. Ini juga mengartikan bahwa dari total PDRB Jawa Timur, dapat dimaknai setiap penduduk mempunyai kontribusi terhadap geliat ekonomi sebesar Rp. 43,50 juta, suatu angka yang sangat membanggakan.

Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan karena perekonomian Jawa Timur tumbuh cukup baik, bahkan lebih tinggi daripada Nasional. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin baik.

3) Indeks Gini

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.



Tabel 2.14
Gini Rasio Jawa Timur

Gini Rasio	Tahun		
	2013	2014	2015
Jawa Timur	0,36	0,37	0,41

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket : $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
 $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
 $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Indeks Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2013-2015 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Selama tahun 2013-2015 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan tren kearah peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 0,37 dan meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2015. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi pengeluaran penduduk Jawa Timur. Pengeluaran penduduk kelompok 40 % terendah dan 20 % teratas masih menunjukkan adanya perbedaan.

4) Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Cara lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan masyarakat adalah dengan menggunakan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Kategori ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang



berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokannya adalah sebagai berikut :

- a) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/ menengah.
- c) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Tabel 2.15
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur

Tahun	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
2013	19,82	34,55	45,63
2014	18,63	35,22	46,15
2015	18,77	36,05	45,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan skala kesenjangan yang telah ditetapkan, pada tahun 2015 penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 18.77 persen, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur masuk kategori rendah.

5) Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja



perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan. Upaya tersebut diantaranya mengurangi penduduk miskin dengan meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

Tabel 2.16
Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Penduduk Miskin	12,73	12,28	12,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir secara gradual (2013-2015) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 12,73 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.893,01 ribu jiwa, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 12,28 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.748,42 ribu jiwa dan tahun 2015 angkanya tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 12,28 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.775,97 ribu jiwa.

Turunnya persentase penduduk miskin selama periode tahun 2013-2015, sebagai wujud upaya keras Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan memberikan kontribusi penurunan kemiskinan dengan tetap meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

6) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.



Tabel 2.17
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiiskinan	87,27	87,72	87,72

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Penurunan dan kenaikan angka kemiskinan memberikan pengaruh pada persentase penduduk diatas garis kemiskinan. persentase penduduk di atas garis kemiskinan selama 3 tahun menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan di tahun 2013 sebesar 87,27 persen, kemudian menjadi 87,72 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015 angkanya tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 87,72 persen.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran dasar terhadap akses pendidikan, melek huruf juga menjadi dasar bagi setiap manusia, agar dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Melek Huruf	95,17	95,49	96,06

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



Perlu diketahui bahwa sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini menjadi sasaran global dan nasional. Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama kurun waktu 2013-2015 terjadi peningkatan dari 95,17 persen di tahun 2013 menjadi 96,06 persen di tahun 2015. Kenaikannya dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 0,89 persen.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Dalam menggambarkan tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.

Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.19
Angka Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,5	8,6	8,7

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2013-2015 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 8,5 pada tahun 2013 menjadi 8,7 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Jawa Timur.

3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni Jawa Timur

Angka Partisipasi Murni	Tahun		
	2013	2014	2015
SD/MI	97,83	98,00	98,35
SMP/MTs	86,36	87,60	87,64
SMA/MA/SMK	59,78	65,78	65,83

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Secara umum dalam tiga tahun terakhir 2013-2015, terjadi peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berkisar pada angka 97,83 hingga 98,35 persen. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2013-2015 terus mengalami



peningkatan mulai 86,36 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 87,64 persen ditahun 2015. Sementara APM SLTA, mulai tahun 2013 terus meningkat mulai dari 59,78 persen hingga pada tahun 2015 sebesar 65,83 persen.

4) Angka Partisipasi Kasar

Salah satu indikator kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar/APK (lihat Renstra Depdiknas 2006-2010). Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Kondisi ini dapat tercermin dari APK untuk setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada suatu tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 tahun untuk SD sederajat, 13-15 tahun untuk SLTP sederajat dan 16-18 tahun untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang penting sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar Jawa Timur

Angka Partisipasi Kasar	Tahun		
	2013	2014	2015
SD/MI	112,70	112,72	112,79
SMP/MTs	102,22	102,85	102,90
SMA/MA/SMK	78,21	78,23	79,14

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



b. Kesehatan

1) Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir (2013-2015) menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 70,34 (2013) menjadi 70,61 (2015).

Tabel 2.22
Angka Harapan Hidup Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	70,34	70,45	70,61

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



2) AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Tabel 2.23
Angka Kematian Bayi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Kematian Bayi	27,23	26,66	25,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan angka kematian bayi selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2013 angkanya mencapai 27,23, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2015 menjadi 25,82 Per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

3) AKI (per 100.000 Kelahiran Hidup)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena kecelakaan per 100.000 kelahiran hidup.



Tabel 2.24
Angka Kematian Ibu di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Angka Kematian Ibu	97,39	93,52	89,60

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Informasi mengenai tingginya angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Secara umum angka kematian ibu (AKI) di Jawa Timur selama tahun 2013-2015 terus menunjukkan penurunan, yaitu masing-masing 97,39 (tahun 2013), 93,52 (tahun 2014), dan 89,60 (tahun 2015) per 100.000 kelahiran hidup.

4) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah balita. Kondisi ini dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- rendah = jika gizi kurang di bawah 10 %



- sedang = jika gizi kurang 10-19 %
- tinggi = jika gizi kurang 20-29 %
- sangat tinggi = jika gizi kurang 30 % atau lebih

Tabel 2.25
Persentase Balita Gizi Buruk di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Balita Gizi Buruk	2,2	2,0	2,2

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Jumlah balita status gizi buruk di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 2,2 persen, kemudian menurun menjadi 2,0 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 2,2 persen artinya diantara 100 balita 2 diantaranya mengalami gizi buruk.

5) Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan (%)

Penanggulangan kasus balita gizi buruk dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu bagi balita gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda komplikasi medis dilakukan penanganan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Theurapeutic Feeding Centre (TFC) maupun Rumah Sakit. Sedangkan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan melalui rawat jalan dengan pembinaan oleh petugas kesehatan dan kader Posyandu. Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu 100 %. Hal ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan gizi buruk.

Tabel 2.26
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Cakupan Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



c. Ketenagakerjaan

1) Rasio Penduduk Yang Berkerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.27
Rasio Penduduk Yang Berkerja di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Penduduk Yang Berkerja	95,67	95,81	95,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio penduduk yang bekerja di Jatim selama tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2013 Rasio penduduk yang bekerja mencapai 95,67 persen, kemudian mengalami kenaikan tahun 2014 menjadi 95,81 persen dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin menjadi 95,53 persen.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di bidang pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi



sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar untuk SD/MI pada periode tahun 2013-2015 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu dari 99,92 persen pada tahun 2013 menjadi 99,94 persen tahun 2015, demikian juga untuk jenjang SMP/MTs dari 98,29 persen pada tahun 2013 menjadi 98,99 persen tahun 2015 dan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dari 69,95 pada tahun 2013 menjadi 72,14 tahun 2015. Dengan semakin meningkatnya APS pendidikan dasar maka program wajar 9 tahun akan segera tercapai, sedangkan meningkatnya APS pendidikan menengah ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Sekolah Jawa Timur

Angka Partisipasi Sekolah	Tahun		
	2013	2014	2015
SD/MI	99,92	99,93	99,94
SMP/MTs	98,29	98,39	98,99
SMA/MA/SMK (16-18 Tahun)	69,95	71,23	72,14

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

b. Pekerjaan Umum

1) Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap

Kriterianya adalah jalan provinsi memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik



dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Tabel 2.29
Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (km)

Jalan Provinsi	Tahun		
	2013	2014	2015
Mantap:	1556,62	1543,93	1574,82
a. Baik	717,55	1.185,38	727,14
b. Sedang	839,07	358,55	847,68
Tidak Mantap	204,29	1778,31	186,09
a. Rusak Ringan	181,79	199,59	135,99
b. Rusak Berat	22,50	17,40	50,10
Total	1.760,91	1.760,91	1.760,91

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Panjang Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik

Kriterianya jembatan Provinsi, kondisinya terbagi menjadi 3 yaitu kondisi baik; rusak; dan rusak berat. Panjang jembatan di Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 14.952,90 m dan menurun pada tahun 2015 menjadi 13.708,28 m. Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2015 mencapai 13.708,28. Dengan meningkatnya kondisi jembatan dalam kondisi baik, tentunya akan meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di Jawa Timur.

Tabel 2.30
Panjang Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (meter)

Jembatan Provinsi	Tahun		
	2013	2014	2015
Kondisi:			
a. Baik (M)	13.965,98	13.747,08	13.708,28



b. Rusak (M)	945,92	894,74	894,74
c. Rusak Berat (M)	41,00	41,00	79,80
Total	14.952,90	14.682,82	14.682,82

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Panjang Jalan Yang Terbangun

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan jalan baru sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Jawa Timur. Rencana pembangunan tersebut meliputi :

- Jalan Tembus Lawang Batu sepanjang 33,907 Km
- Jalan Akses PIMPA sepanjang 3,300 Km
- Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sepanjang 64,00 Km

Tabel 2.31
Panjang Jalan Yang Terbangun (km)

Jalan	Tahun		
	2013	2014	2015
Panjang Jalan Terbangun (km)	0	0	0

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Sampai dengan tahun 2015 rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam tahap pra konstruksi, yaitu :

- Jalan Tembus Lawang Batu sampai saat ini pada tahap penyusunan Fs dan AMDAL.
- Jalan Akses PIMPA sampai saat ini pada tahap pembuatan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).
- Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sampai saat ini masih pada tahapan Kajian.



Panjang jembatan yang terbangun

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan jembatan baru sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Jawa Timur. Rencana pembangunan tersebut meliputi :

- Jembatan Tembus Lawang Batu sepanjang 385,00 Meter
- Jembatan pada Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sepanjang 45,00 Meter

Sampai dengan tahun 2015 rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam tahap pra konstruksi, yaitu

- Jalan Tembus Lawang Batu sampai saat ini pada tahap penyusunan penyusunan Fs dan AMDAL.
- Jalan Akses PIMPA sampai saat ini pada tahap dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).
- Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sampai saat ini masih pada tahapan Kajian.

-

Tabel 2.32
Panjang Jembatan Yang Terbangun (meter)

Jalan	Tahun		
	2013	2014	2015
Panjang Jembatan Terbangun (m)	0	0	0

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Panjang Jalan Lintas Selatan Yang Terbangun

Panjang Jalan Lintas Selatan (JLS) yang direncanakan 673,872 Km, saat ini sudah terbangun jalan baru sepanjang 109,565 Km, jalan lama eksisting sepanjang 253,455 Km dengan total panjang yang sudah terbangun 363,020 km. Sedangkan yang belum terbangun 310,852 Km. Status pembebasan tanah sampai dengan tahun 2015 yaitu sudah terealisasi seluas 418,82 Km, sedangkan yang belum dibebaskan seluas 255,049 Km.



Tabel 2.33
Panjang Jalan JLS Yang Terbangun (km)

Jalan JLS	Tahun		
	2013	2014	2015
Jalan (Aspal + Rigid)	330,995	330,995	363,020
Total	330,995	330,995	363,020

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Panjang Jembatan JLS Yang Terbangun (M)

Panjang jembatan JLS yang terbangun pada tahun 2013 mencapai 2.378 m dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 4.373 m. Permasalahan yang terjadi pada Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur yaitu :

- Terjadi kelangkaan bahan baku material pasir mulai tanggal 29 September 2015 s/d 8 Desember 2015 (70 hari kalender).
- Paket terdampak pada Paket Jalan Kalimujur – Bts. Jember Kab. Lumajang dan Paket Jalan Glenmore – Kendenglembu Kab. Banyuwangi.
-

Tabel 2.34
Panjang Jembatan JLS Yang Terbangun (meter)

Jembatan JLS	Tahun		
	2013	2014	2015
Jembatan (Bangunan Atas + Bawah)	2.378	4.113	4.373

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

2) Layanan Irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat di tingkat Provinsi diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per



satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Tabel 2.35
Luas Layanan Irigasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Luas Layanan Irigasi (Ha)	2.055.362	2.055.362	2.055.362

Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

Rasio Kondisi Fisik saluran irigasi

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

Tabel 2.36
Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi (%)	67,88	68,07	68,35

Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

Penyediaan Layanan Air minum

Penyediaan layanan air minum layak adalah tersedianya air minum yang bersumber dari sumber air perpipaan ataupun sumber air lain (pompa, sumur, mata air) yang terlindungi. Proporsi rumah tangga dengan akses air



minum layak di Provinsi Jawa Timur telah mencapai 75,64% pada tahun 2014 dengan capaian 82,83% di daerah perkotaan dan 69,69% di daerah pedesaan. Hasil capaian tersebut akan terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai goals universal access pada tahun 2019.

Penyediaan Layanan Sanitasi

Penyediaan layanan sanitasi mencakup 3 hal yaitu air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan. Capaian akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Timur telah mencapai 63,70% pada tahun 2014 dengan capaian 78,74% di daerah perkotaan dan 50,30% di daerah pedesaan.

Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah

Pola hidup bersih bertujuan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan limbah berbahaya lainnya. Pola hidup bersih merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesehatan. Karena itu keberadaan sanitasi menjadi sangat penting didalam setiap rumah tangga. Salah satu tujuan pengelolaan dan pengolahan air limbah adalah menekan berkembangnya penyakit yang ditularkan dan menyebar melalui air permukaan (sungai, waduk) dan air tanah (sumur gali/pompa). Semakin terkontaminasi air di suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan terjangkitnya penyakit melalui air.

Tabel 2.37
Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah di Jawa Timur

Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	Tahun (%)		
	2013	2014	2015
Perkotaan	74,66	78,09	78,10
Pedesaan	44,22	46,59	48,66

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpresentasikan dengan tingkat pelayanan sanitasi di perkotaan dan pedesaan yang membandingkan antara jumlah KK yang membutuhkan pasarana sanitasi di perkotaan dan di pedesaan.



Pencapaian indikator tersebut senantiasa menunjukkan peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2013 s/d 2015. Tingkat pelayanan air limbah pada tahun 2015 terjadi peningkatan baik di perkotaan maupun di pedesaan, di perkotaan meningkat sebesar 0.01 % dibanding tahun 2014, sedangkan di pedesaan capaian pada tahun 2015 terjadi peningkatan 2,07% dibanding tahun 2014 sedangkan capaian SDGs Tingkat Nasional sebesar 61,06%.

Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir. Kegunaan dengan adanya saluran drainase:

- Meringankan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
- Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
- Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan.
- Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

-

Tabel 2.38

Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	79,87	79,96	80,07

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur



Cakupan pelayanan drainase di perkotaan tahun 2013 sebesar 79,87%, tahun 2014 sebesar 79,96%, dan tahun 2015 sebesar 80,07% ada peningkatan sebesar 0,11% sedangkan capaian SDG's 2015 tingkat nasional pada tahun 2015 sebesar 57,75%.

Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan masalah yang hampir dijumpai pada setiap wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Sampah telah menjadi masalah, terutama pada daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk, berkembangnya perekonomian, urbanisasi, dan naiknya standar hidup merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah sampah dan tingkat kompleksitas masalah pengelolaan sampah.

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut, memberikan dampak sangat besar bagi manusia dan lingkungan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu bau yang tidak sedap akan memberikan efek buruk bagi daerah di sekitarnya.

Pengelolaan sampah meliputi proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Sampah yang sudah dikumpulkan, diangkut ketempat penampungan sampah sementara (TPS). Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh dinas kebersihan dengan sistem pembagian lokasi, setiap truk pengangkut sampah mempunyai tugas di wilayah tertentu.

Tabel 2.39
Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan
di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	82,78	82,96	84,14

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur



Cakupan capaian layanan persampahan di perkotaan tahun 2013 sebesar 82,78% dan pada tahun 2014 sebesar 82,96%, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan drainase di wilayah perkotaan meningkat menjadi 84,14% ada peningkatan sebesar 1,42%, sedangkan capaian SDG's 2015 tingkat nasional pada tahun 2015 sekitar 86,73%.

c. Perumahan

Urusan perumahan menjadi urusan wajib dalam pembangunan daerah, karena ketersediaannya tempat tinggal yang layak huni merupakan hak dasar masyarakat sebagai warga negara. Penyediaan perumahan di Jawa Timur telah dilaksanakan melalui beberapa program sehingga dapat mengurangi backlog hingga 191.225 unit dan Renovasi RTLH hingga 79.202 unit pada tahun 2014.

Di sisi lain, kurang meratanya pembangunan mengakibatkan pembangunan hanya terpusat pada area perkotaan. Di Provinsi Jawa Timur, masih terdapat permukiman kumuh perkotaan 3,51% pada tahun 2014 yang akan terus dikurangi hingga 0% pada tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

d. Penataan Ruang dan Pertanian

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Luas Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dihasilkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau seluas 58.750,46 Ha dan luas kawasan perkotaan seluas 361.541,30 Ha, sehingga di dapatkan rasio Ruang Terbuka Hijau per Luas Kawasan Perkotaan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 16,25.

2. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Izin Mendirikan Bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gdeung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.



Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dihasilkan bahwa Jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 4.038.982 dan jumlah seluruh bangunan sebanyak 6.439.704 sehingga didapatkan rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 62,72.

3. Ruang Publik yang berubah peruntukannya secara spasial ruang publik didefinisikan sebagai tempat dimana setiap orang memiliki hak untuk memasukinya tanpa harus membayar uang masuk atau uang lainnya. Ruang publik dapat berupa jalan (termasuk pedestrian), tanah perkerasan (pavement), public squares, dan taman (park). Hal ini berarti bahwa ruang terbuka hijau (open space) publik seperti jalan dan taman serta ruang terbuka non-hijau publik seperti tanah perkerasan (plaza) dan public squares dapat difungsikan sebagai ruang publik.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dihasilkan bahwa Luasan Ruang Publik seluas 582,23 dan luasan ruang publik berubah fungsi seluas 114 sehingga didapatkan nilai Ruang Publik yang berubah peruntukannya untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 19,58%.

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan pertanahan di provinsi meliputi pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota. Kemudian urusan pertanahan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi menjadi semakin berkembang pasca ditetapkannya Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain:

1. Izin Lokasi: Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.



3. Sengketa Tanah Garapan: Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan: Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
5. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee: Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6. Tanah Ulayat: Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
7. Tanah Kosong: a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
8. Penggunaan Tanah: Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

4. Perhubungan

1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.40
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur	82,06	85,88	74,41

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur



Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2014 menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat 14 (Empat belas) unsur variable sebagai dasar penilaian yaitu Prosedur pelayanan (U1), Persyaratan pelayanan (U2), Kejelasan petugas pelayanan (U3), Kedisiplinan petugas pelayanan (U4), Tanggung jawab petugas pelayanan (U5), Kemampuan petugas pelayanan (U6), Kecepatan pelayanan (U7), Keadilan mendapatkan pelayanan (U8), Kesopanan dan keramahan petugas (U9), Kewajaran biaya pelayanan (U10), Kepastian biaya pelayanan (U11), Kepastian jadwal pelayanan (U12), Kenyamanan lingkungan (U13), Keamanan pelayanan (U14), Sedangkan pada pengukuran IKM di tahun 2015 terjadi perubahan dasar variable dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian terdiri dari Persyaratan pelayanan (U1), Prosedur pelayanan (U2), Waktu pelayanan (U3), Biaya/Tarif pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9), dimana pada tahun 2015 maklumat pelayanan terkait layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang belum dipublikasikan, sehingga berpengaruh terhadap variabel penilaian Indeks Kepuasan masyarakat. Maklumat pelayanan dimaksud merupakan bentuk komitmen yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, pengaduan dan melakukan pengawasan.

2) Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota

Penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai perwujudan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan.



Jawa Timur merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang menerima Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana, penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang telah lima kali berturut – turut memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama,

Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Disamping kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan.

Tabel 2.41
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Penghargaan	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Plakat Wahana Tata Nugraha	Kab/kota	5	1	8
2	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas	Kab/kota	11	21	18
3	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan	Kab/kota	-	2	-
4	Piala Wahana Tata Nugraha	Kab/kota	5	-	1
5	Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya	Kab/kota	-	-	-
Jumlah Kab/Kota Berpredikat WTN		Kab/kota	21	24	27
Jumlah Kab/Kota Di Jawa Timur		Kab/kota	38	38	38
% Kab/Kota Berpredikat WTN Di Jawa Timur		Kab/kota	55%	63%	71%

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Dibandingkan tahun 2014, kabupaten/kota di Jawa Timur yang menerima penghargaan WTN kali ini mengalami peningkatan jumlah. Jika tahun 2014 berjumlah 24 kabupaten/kota, Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yakni sebanyak 27 Kabupaten/Kota dengan rincian Kota Penerima Plakat WTN Tahun 2015 Kab. Sidoarjo (kategori sedang), Kab.



Pasuruan (kategori sedang), Kab. Bojonegoro (kategori kecil), Kab. Lamongan (kategori kecil), Kab. Gresik (kategori kecil), Kab. Ngawi (kategori kecil), Kab. Mojokerto (kategori kecil) dan Kab. Nganjuk (kategori kecil). Selain itu, ada beberapa Kab/Kota penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2015 yakni Kota Surabaya (kota metropolitan), Kota Malang (besar), Kota Mojokerto (sedang), Kab. Malang (sedang), Kota Blitar (sedang), Kota Pasuruan (sedang), Kab. Jember (sedang), Kota Kediri (sedang), Kab. Jombang (sedang), Kab. Banyuwangi (sedang), Kab. Tulungagung (kecil), Kab. Tuban (kecil), Kab. Lumajang (kecil), Kab. Magetan (kecil), Kab. Trenggalek (kecil), Kab. Pacitan (kecil), Kab. Blitar (kecil), dan Kab. Situbondo (kecil). Sedangkan Kota Penerima Piala WTN Tahun 2015 diraih Kota Probolinggo (sedang)

3) Jumlah Alarm Early Warning System terpasang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) di perlintasan rel Kereta Api (KA) yang tidak berpaling pintu. Sistem ini diyakini bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api.

Tabel 2.42
Perkembangan Alarm Early Warning System Terpasang (Titik)

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Daop 7 Madiun	62	73	92
Daop 8 Surabaya	41	55	68
Daop 9 Jember	42	60	76
Total	145	188	236

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Perkembangan *alarmearly warning system* (AEWS) terpasang di perlintasan rel kereta api Jawa Timur selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 145 titik (2013); 188 titik (2014); dan 236 titik (2015). Sedangkan untuk jumlah pemasangan AEWS tertinggi ada di Daop 7 Madiun dan terendah di Daop 8 Surabaya.



5. Lingkungan Hidup

1) Penurunan beban pencemaran (BOD dan COD)

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Sesuai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat+ 1.004 buah dengan jumlah industri potensi pencemar + 483 buah, dikali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, limbah pertanian dan sebagainya sebesar 10%.

Selama periode 2014-2015, menunjukkan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi BOD dari 4,27 mg/l menjadi 4,14 mg/l dan COD dari 12,45 mg/l menjadi 11,88 mg/l. Dengan demikian pada tahun 2015 terdapat kenaikan kualitas air.

Tabel 2.43
Penurunan beban pencemaran (BOD dan COD) di Jawa Timur

Parameter (mg/l)	Tahun		
	2013	2014	2015
BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>)	3,60	4,27	4,14
COD (<i>Chemichal Oxygen Demand</i>)	10,92	12,45	11,88

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

2) Cakupan Penghijauan (Konservasi) Sumber Mata Air (Titik)

Mata air menjadi sumber utama masyarakat mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari hari seperti minum, mandi, mencuci dan juga irigasi.



Namun akhir akhir ini banyak daerah di Indonesia mengalami kekeringan pada musim kemarau karena sumber air yang mengering.

Berkurangnya daerah serapan air karena pembangunan dan juga kerusakan vegetasi di daerah tangkapan air menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya sumber air. Selain itu peningkatan jumlah penduduk meningkatkan konsumsi air bersih. Melihat permasalahan tersebut diperlukan adanya pemeliharaan terhadap sumber air untuk menjamin ketersediaannya bagi berbagai macam kebutuhan manusia.

Tabel 2.44
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Cakupan penghijauan (konservasi) sumber mata air (titik)	4	4	5

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Untuk merehabilitasi lingkungan yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, selain tetap berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan konservasi terhadap mata air yang mengalami penurunan debit air atau mata air yang sudah mati. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Demplot Pelestarian Sumber Mata Air dengan Vegetasi. Pada tahun 2015 ditargetkan ada 5 (lima) daerah yang terkonservasi dan terealisasi sebanyak 5 lokasi, yaitu:

- Desa Karanguko, Kec. Pagelaran, Kab Malang
- Dusun Pager Gunung, Ds. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab Pasuruan
- Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Kab Jombang
- Desa Medowo, Kec. Kandangan, Kab Kediri
- Ds. Krisik, Kec. Gandungsari, Kab Blitar

Selama periode 2013 – 2015, secara bertahap melakukan peningkatan jumlah lokasi kegiatan demplot dalam rangka perlindungan sumber mata air,



terutama di sepanjang wilayah DAS Brantas. Hal ini didasarkan pada semakin kritisnya sumber mata air di wilayah tersebut.

3) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Kewenangan Provinsi)

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh banyaknya industri dan maraknya bisnis properti dan atau kegiatan usaha lainnya. Namun pertumbuhan industri ini tidak dibarengi dengan pemeliharaan kualitas lingkungan yang baik di Jawa Timur. Hal ini akan memberikan dampak pencemaran pada kualitas lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian sosial ekonomi yang sangat besar bagi penduduk yang bermukim di wilayah itu khususnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya mutlak diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan.

Tabel 2.45
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (kewenangan Prov) (%)	80	73	69.56

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan maka dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh para pelaku usaha. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan dokumen izin lingkungan/AMDAL. Pada tahun 2015 target jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi sebanyak 255 dan dapat terealisasi 345 perusahaan atau capaian sebesar 135 %. Dari hasil pengawasan yang dilakukan diperoleh hasil sebanyak 240 perusahaan yang tergolong taat dan



105 perusahaan belum taat atau sebesar 69,56% cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Selama tahun 2014 hingga 2015 terus dilakukan peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh industri dan/atau kegiatan. Tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan ketaatan industri terhadap pelaksanaan dokumen amdal.

4) Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup Dengan sanksi administrasi

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pada tahun prosentase tidak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diterima sebesar 80 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti secara keseluruhan atau sudah 100(%). Dari hasil rekomendasi penyelesaian kasus pengaduan, ada 1 kasus pencemaran yang kurang mendapat respon pelaku usaha sehingga dilakukan setelah dilakukan koordinasi antar instansi terkait di buat sanksi administrasi. Sehingga terkait persentase penyelesaian kasus LH dengan sanksi administrasi sebanyak 100%. Penerapan sanksi ini diharapkan meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.46

Persentase penyelesaian kasus LH dg sanksi administrasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase penyelesaian kasus LH dg sanksi administrasi (%)	66.67	100	100

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur



6. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Tabel 2.47
Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Indeks Pemberdayaan Gender	70,77	68,17	69,17

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket : **) Angka Estimasi Sementara BPPKB Prov. Jatim

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2013 sebesar 70,77, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 68,17 dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 69,17. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender.

2) Indeks Pembangunan Gender

Salah satu indikator pemerintahan yang responsif gender dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara



laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.48
Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Indeks Pembangunan Gender	90,22	90,83	91,29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket : **) Angka Sangat Sementara

Indeks pembangunan gender (IPG) dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2013-2015, berturut-turut mencapai 90,22 (2013); 90,83 (2014), dan 91,29 (2015).

Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program-program Pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.

7. Ketenagakerjaan

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.



Berdasarkan data BPS Agustus 2015 (hasil Sakernas 2015), jumlah Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) sebanyak 29,880 juta orang. Dari jumlah Penduduk Usia Kerja tersebut, angkatan kerjanya sebesar 67,84 persen. TPAK sebesar 67,84 persen artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, 67-68 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Angka TPAK di Jawa Timur sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun, dari 69,78 tahun 2013 menjadi 67,84 tahun 2015.

Tabel 2.49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tahun		
	2013	2014	2015
Pedesaan	73,79	70,20	69,27
Perkotaan	65,39	65,85	66,56
Pedesaan + Perkotaan	69,78	68,12	67,84

Sumber : Sakernas 2013 – 2015, BPS Jawa Timur

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK di pedesaan lebih besar dibandingkan TPAK di daerah perkotaan. Hal ini diduga karena ada daerah pedesaan, anggota rumah tangga berperan sebagai pekerja keluarga baik dibayar maupun tidak dibayar, khususnya pada sektor informal.

8. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan.



Tabel 2.50
Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah Koperasi	30.741	30.866	31.171
Jumlah Koperasi Aktif	27.031	27.156	27.461
Persentase Koperasi Aktif	87,93	87,98	88,09

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Persentase koperasi aktif di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 persentase koperasi aktifnya sebesar 87,93 persen, meningkat pada tahun 2014 menjadi 87,98 persen dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 88,09 persen dengan rincian dari jumlah total 31.171 unit terdapat 27.461 unit koperasi yang aktif.

2) Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dimaksudkan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Dengan semakin bertambahnya minat serta kemampuan untuk berwirausaha dan daya saing koperasi dan UMKM, maka diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian berbasis kemasyarakatan di Jawa Timur.

Tabel 2.51
Pertumbuhan Wirausaha Baru di Jawa Timur

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	4	4	10

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program ini antara lain Fasilitasi pemberdayaan UMKM melalui Inkubator



bisnis sebanyak 120 calon pelaku UMKM, kegiatan pelatihan ketrampilan UMKM sebanyak 5.355 calon pelaku UMKM, sehingga pada akhir Tahun 2013 telah dilakukan penumbuhan jiwa kewirausahaan sebanyak 12.195 calon pelaku UMKM. Diproyeksikan bahwa sekitar 5% dari jumlah calon pelaku UMKM yang telah ditumbuhkembangkan jiwa kewirausahaannya sehingga menjadi wirausaha baru maka di Tahun 2014 diprosikan jumlah Wirausaha baru sekitar 635 UMKM dan pada Tahun 2013 diprosikan jumlah Wirausaha baru sekitar 610 UMKM. Sehingga pertumbuhan wirausaha baru pada Tahun 2014 adalah 4 % didapat dari penambahan WUB di tahun 2014 sebesar 35 WUB dibagi jumlah WUB tahun 2013. Pada tahun 2015, jumlah wirausaha baru bertumbuh 10% dengan capaian selama kurun waktu tersebut sebesar 111,1%.

3) Rasio Perputaran Modal Kopwan

Program pembentukan Koperasi Wanita (Kopwan) dimulai sejak tahun 2009 dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan kredit usaha dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 25 juta per kelompok wanita di setiap desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2010 sudah terbentuk 8.506 Kopwan disetiap Desa/Kelurahan. Selanjutnya tahun 2011-2014, diberikan bantuan perkuatan permodalan kembali untuk koperasi yang berkinerja baik.

Tabel 2.52
Rasio Perputaran Modal Kopwan

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Perputaran Modal Kopwan	1,36	1,39	2,1

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

KSP/Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita penerima bantuan hibah APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 8.506 Unit, 35.083 orang pengelola koperasi dan 501.639 orang anggota koperasi. Sampai dengan tahun 2015 modal sendiri mencapai Rp. 578.200.233.000,-, sedangkan modal luar sebesar Rp. 103.746.208.000,-, total Asset sebesar Rp. 682.221.441.000,- dan



volume pinjaman sebesar Rp. 772.833.446.000,-, sehingga Perputaran modal sebesar 2,1 kali, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 1,36 dan 1,39.

9. Penanaman Modal

1) Pertumbuhan Investasi (Persentase Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB ADHB)

Salah satu indikator pertumbuhan investasi adalah PMTB. PMTB menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal yang dicatat dalam PMTB meliputi bangunan dan non bangunan. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2014 mengalami sedikit perlambatan 4,37 persen dari 4,88 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2015, PMTB mengalami percepatan menjadi 5,73 persen. Komponen bangunan pada tahun 2015 tumbuh 3,03 persen, sedangkan non bangunan tumbuh 4,71 persen.

Tabel 2.53
Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan PMTB terhadap PDRB (%)	4,88	4,37	5,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

10. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumberdaya alam, kualitas sumber daya manusia, perubahan teknologi, kewirausahaan dan kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, tariff dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI Rate), kebijakan



pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak dan perkembangan situasi perekonomian global.

Tabel 2.54
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi	6,08	5,86	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2013-2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dasar tahun 2010 masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 6,08 persen pad tahun 2013, melambat pada tahun 2014 menjadi 5,86 persen dan pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen.

2) Predikat Opini BPK

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.55
Predikat Opini BPK

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Predikat Opini BPK	WTP	WDP	-

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur



Pada tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini dikarenakan masih ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan yang masih berulang pada Temuan Sistem Pengendalian Intern serta Temuan Kepatuhan Perundangan – Undangan dalam pengelolaan keuangan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk opini BPK Tahun 2015 belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan bulan mei tahun 2016. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK juga disampaikan di hadapan DPRD Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni.

Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

1) Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.



Tabel 2.56
Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan	1,38	2,98	3,39

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari data PDRB tiga tahun terakhir, pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan (tanaman pangan) mengalami pertumbuhan yang cukup baik atau meningkat tiap tahun. Pada tahun 2013 tercatat mengalami pertumbuhan 1,38 persen, dan selanjutnya tumbuh sebesar 2,98 persen pada tahun 2014, dan mencapai 3,39 persen di tahun 2015.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selalu berupaya agar sub sektor tanaman bahan makanan ini bisa tumbuh semakin cepat tidak kalah dengan sub sektor lainnya.

2) Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Tabel 2.57
Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Sub Sektor Tanaman Perkebunan	1,81	4,97	1,61

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



Pada tahun 2013 sub sektor tanaman perkebunan tercatat sebesar 1,81 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 4,97 persen dan pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 1,61 persen.

3) Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Tabel 2.58
Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Sub Sektor Peternakan	1,07	1,15	2,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Meskipun pertumbuhan sub sektor peternakan di bawah 3 persen, namun pertumbuhan selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 sub sektor peternakan hanya mampu tumbuh 1,05 persen dan kemudian merangkak naik tipis menjadi 1,15 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 sub sektor ini kembali mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya mencapai 2,01 persen.



b. Kehutanan

1) Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Sub kategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicapuk juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Tabel 2.59
Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Sub Sektor Kehutanan	6,54	0,12	4,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berbeda dengan sub sektor lainnya, sub sektor kehutanan tumbuh tinggi pada tahun 2013 sebesar 6,54 persen. Pada tahun 2014 melambat cukup drastis dan hanya mampu tumbuh 0,12 persen. Pada tahun 2015 sub sektor kehutanan kembali tumbuh cukup baik sebesar 4,43 persen.

2) Rehabilitasi Kawasan Hutan (ha)

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Rehabilitasi hutan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pada tahun 2013 rehabilitasi kawasan hutan di Jawa Timur mencapai 14.637 ha, kemudian meningkat menjadi 24.675,5 ha pada tahun 2014 dan pada



tahun 2015 menjadi 24.660,4 Ha. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Tabel 2.60
Rehabilitasi Kawasan Hutan Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rehabilitasi Kawasan Hutan (Ha)	14.637	24.675,5	24.660,4

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

3) Rehabilitasi lahan kritis (lokasi)

Lahan kritis adalah lahan yang sangat tandus dan gundul dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan ini masih dapat dikelola walaupun produktivitasnya rendah. Bahkan dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya. Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, lahan tersebut akan menjadi padang pasir dan bukit-bukit batu atau cadas. Kegiatan rehabilitasi lahan pada lahan kritis merupakan salah satu upaya peningkatan sumber daya alam yang ada untuk dapat dikembangkan dan dilestarikan.

Tabel 2.61
Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rehabilitasi Lahan Kritis (Lokasi)	5	5	5

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur



Dalam upaya penanganan lahan kritis telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya pembinaan Menuju Provinsi Hijau (MPH) dan pelaksanaan demplot di 5 lokasi dengan total luas lahan yang terehabilitasi sekitar 15 Ha. Jenis tanaman yang digunakan antara lain : cengkeh, apokat, durian dan polo. Demplot Menuju Provinsi Hijau (MPH) Berbasis Masyarakat Tahun 2015 dilaksanakan di :

- Desa Panduman, Kec. Jelbuk, Kab. Jember
- Dsn. Dawuhan, Ds. Sucolor, Kec. Maesan, Kab Bondowoso
- Desa Sumber Bening, Kec. Dongko, Kab Trenggalek
- Desa Joho, Kec. Semen, Kab. Kediri (MPH)
- Desa Segawe, Kec. Pager Wojo, Kab Tulungagung

4) Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (ha)

Reboisasi adalah Tindakan penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat di tebang atau akibat bencana alam, reboisasi memiliki tujuan yang sangat mulya untuk peningkatan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya alam. Dengan kembalinya fungsi hutan maka dapat menghindarkan lingkungan dari polusi udara, kembalinya ekosistem hutan, penyerapan karbondioksida yang optimal dan hasil hutan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Reboisasi sangat erat kaitannya dengan kata penghijauan, dengan menggalakkan penghijauan maka lingkungan sekitar tempat tinggal akan menjadi sejuk, ketersediaan air tanah akan terjamin dan meningkatnya kesuburan tanah. selain itu Reboisasi juga menurunkan fenomena Global Warming.

Tabel 2.62
Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)	350	315	650

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur



Reboisasi Taman Hutan Raya R. Soerjo dilakukan melalui penanaman dengan jenis tanaman endemik maupun bukan endemik seperti Cemara Gunung dan Akasia. Tahun 2015, luas kawasan Tahura R. Soerjo yang direboisasi lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut sebagai dampak adanya El Nino yang berkepanjangan di Tahun 2014 yang menyebabkan kawasan Tahura R. Soerjo mengalami kebakaran yang cukup luas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

5) Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)

Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan Kebakaran Hutan merupakan suatu usaha Perlindungan Hutan agar kebakaran hutan yang berdampak negatif tidak meluas. Kebakaran hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia maupun faktor alam.

Tabel 2.63
Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)	1.353,97	10.876,7	1.950

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Gangguan hutan yang umumnya terjadi karena faktor alam adalah kebakaran hutan. Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran hutan yang cukup luas khususnya di dalam hutan yang disebabkan oleh EL Nino seluas 10.876,7 Ha. Namun demikian, pada Tahun 2015 luas kebakaran hutan dapat ditekan menjadi 1.950 Ha. Hal tersebut disebabkan adanya antisipasi dari kejadian sebelumnya, sehingga pada Tahun 2015 dirasa perlu melibatkan semua pihak baik masyarakat, pengelola kawasan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, kejadian kebakaran hutan dapat diminimalisir.



c. Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu : pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Tabel 2.64
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	1,31	3,11	7,92

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kinerja sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Tercatat pertumbuhan pada tahun 2013 hanya mencapai 1,31 persen, meningkat pada tahun 2014 sebesar 3,11 persen. Pada tahun 2015 sektor pertambangan dan penggalian kembali tumbuh cepat lebih dari dua kali tahun sebelumnya atau sebesar 7,92 persen.

2) Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (ha)

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.



Tabel 2.65
Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (Ha)	1.164,48	985,65	974,15

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan menjadikan adanya penurunan jumlah luas PETI dari tahun 2013 sebesar 1.164,48 Ha menjadi 974, 15 Ha pada tahun 2015. Namun adanya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang menuntut penyediaan bahan tambang (batuan) menyebabkan sulitnya untuk melakukan penertiban pertambangan tanpa izin di Jawa Timur.

3) Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI (Kab/Kota)

Pertambangan tanpa ijin atau yang dikenal dengan sebutan PETI merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini menimbulkan kerugian negara, terlebih permasalahan lingkungan yang ditimbulkan karena PETI karakteristiknya tidak mematuhi good mining practice sehingga menimbulkan eksekse seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air dengan merkuri, tidak dilakukan reklamasi setelah pasca tambang dan sebagainya.

Tabel 2.66
Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI	237,83	245,28	474,97

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur



Pengurangan PETI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertambah, yaitu dari 237,83 Ha pada tahun 2013 meningkat menjadi 474,97 Ha pada tahun 2015, hal ini diakibat oleh adanya peningkatan kesadaran masyarakat, penertiban yang dilakukan oleh kabupaten / kota dan adanya program percepatan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

d. Pariwisata

1) Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB

Pertumbuhan berbagai sektor di Jawa Timur juga diikuti dengan pertumbuhan di sektor Jasa akomodasi, sektor ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur. Yang dimaksud jasa akomodasi adalah hotel, dimana terbagi menjadi Hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya.

Tabel 2.67
Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB	9,10	8,12	8,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi dari sub sektor hotel atau pemberi akomodasi sebesar 9,10 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan sub sektor hotel masih terjaga tinggi mencapai 8,12 persen. Kondisi ini tidak jauh beda dengan capaian tahun 2015 sebesar 8,10 persen.

Sub sektor hotel ini cukup menjanjikan. Beberapa tahun terakhir, pembangunan tempat-tempat akomodasi cukup marak di Jawa Timur. Di Surabaya sendiri, muncul hotel-hotel berbintang baru dengan menawarkan harga yang menarik bagi konsumen.



2) Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.68
Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB	5,25	8,21	8,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Seiring meningkatnya perkembangan ekonomi di Jawa Timur, sub sektor restoran juga berkembang cukup baik. Pada tahun 2013 sub sektor restoran tumbuh 5,25 persen dan selanjutnya tumbuh lebih cepat di tahun 2014 atau mencapai 8,21 persen. Pada tahun 2015 sub sektor ini mengalami perlambatan tipis atau mencapai 8,10 persen. Dari angka tiga tahun terakhir ini, dapat disimpulkan sub sektor restoran ini semakin berkembang dari tahun ke tahun mengikuti semakin berkembangnya kebutuhan makanan saji dalam masyarakat.

e. Kelautan dan Perikanan

1) Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan



umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah).

Tabel 2.69
Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	11,58	6,77	5,58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dibandingkan sub sektor lainnya dalam kategori A, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan perikanan maka sub sektor perikanan dalam kontribusinya, tumbuh lebih tinggi. Bahkan pada tahun 2013 mencapai dua digit atau 11,58 persen.

Meskipun demikian, pada dua tahun terakhir yakni 2014 dan 2015 mengalami perlambatan atau masing-masing mencapai 6,77 persen dan 5,58 persen. Cuaca yang ekstrim dan tidak menentu, diduga menyebabkan perlambatan pertumbuhan pada sub sektor ini.

f. Perdagangan

1) Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Secara geografis Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis sebagai transit antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sehingga tidak mengherankan jika lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Lapangan usaha kategori ini merupakan salah satu tulang punggung utama perekonomian Jawa Timur.

Tabel 2.70
Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,21	4,78	6,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



Sektor unggulan Jawa Timur salah satunya adalah perdagangan. Menurut PDRB tahun dasar baru atau 2010, pertumbuhan sektor ini pada tahun 2013 mencapai 6,21 persen. Kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan seperti menguatnya mata uang dolar dan ketidak stabilan harga minyak dunia, berimbas pada pelemahan pertumbuhan pada tahun 2014 yang mencapai 4,78 persen. Beruntung pada tahun 2015 kinerja sektor ini kembali membaik dengan tumbuh 6,00 persen meski masih di bawah capaian 2013. Tingginya pertumbuhan sektor ini sangat dibutuhkan, karena terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhannya, semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

g. Perindustrian

1) Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Lapangan usaha kategori industri pengolahan memiliki peranan sangat strategis, disamping mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, sektor ini dapat dilakukan ekspansi secara cepat. Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Tabel 2.71
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,85	7,79	5,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sektor ini merupakan loko perekonomian Jawa Timur dan mempunyai kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Jawa Timur. Pada tahun 2013 sektor ini mampu tumbuh 5,85 persen dan kembali tumbuh dengan cepat



pada tahun 2014 sebesar 7,79 persen. Pada tahun 2015 sektor ini sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya atau mencapai 5,53 persen. Pertumbuhan industri di Jatim terutama didukung oleh wilayah-wilayah industri yang tersebar di kabupaten kota sekitar Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2) Daya Beli Masyarakat/PPP (Rp.000)

Daya beli masyarakat atau PPP (*Purchasing Power Parity*) merupakan salah satu indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terutama kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan). Kemampuan memenuhi kebutuhan secara ekonomi tercermin dari indeks PPP (*Purchasing Power Parity*) atau indeks daya beli. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 2.72
Daya beli masyarakat/PPP di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015**)
Daya beli masyarakat/ PPP	9.978,00	10.012,16	10.055,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: **) angka sangat sementara

Daya beli yang ditunjukkan dari angka pengeluaran per kapita pertahun yang disesuaikan menunjukkan mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2013 mencapai Rp. 9.978,00 naik menjadi Rp. 10.012,16 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali naik menjadi Rp. 10.055,10. Dengan



kondisi tersebut, mengindikasikan kesejahteraan penduduk Jawa Timur mengalami perbaikan.

3) Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp.)

Kebutuhan manusia pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kebutuhan makanan dan non makanan. Kebutuhan manusia akan makanan tentunya ada batas-batas tertentu namun kebutuhan akan non makanan tidak ada batasnya.

Semakin tinggi tingkat pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan lebih kecil dibanding pengeluaran non makanan, dan sebaliknya kelompok masyarakat bawah pada kondisi ekonomi rendah, pengeluaran makanan akan selalu lebih tinggi dibanding pengeluaran non makanan.

Tabel berikut memberikan gambaran perkembangan Kebutuhan/pengeluaran makanan penduduk Jatim mulai tahun 2013 sampai 2015. Dari tabel terlihat bahwa pengeluaran makanan penduduk Jatim semakin meningkat, begitu juga pengeluaran untuk non makanan. Kalau dibandingkan dari total pengeluaran tahun 2015 pengeluaran untuk makanan sebesar 45.88 persen sedangkan untuk non makanan sebesar 54.12 persen.

Tabel 2.73
Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.)	296.362	333.945	380.993
Pengeluaran konsumsi Non.pangan per kapita per bulan (Rp.)	290.045	340.635	449.479
Total Pengeluaran konsumsi per kapita per bulan (Rp.)	586.407	674.580	830.472

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



b. Pertanian

1) Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan factor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Tabel 2.74
Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
NTP Jawa Timur	104,59	104,75	104,83
NTP Tanaman Pangan	103,25	99,57	100,34
NTP Hortikultura	102,77	104,87	103,85
NTP Perkebunan	104,73	103,72	101,28
NTP Peternakan	107,81	111,17	111,35
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,67	106,68	105,63
NTN	102,5	106,54	106,69

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

NTP Jawa Timur tahun 2015 naik sebesar 0,08 persen dibanding data tahun 2014 yaitu dari 104,75 menjadi 104,83. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani dibanding laju indeks harga yang dibayar petani. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2015 secara umum masih lebih baik dibanding kondisi tahun 2014.



Jika dilihat NTP masing-masing sub sektor pada tahun 2015, NTP tertinggi terjadi pada sub sektor peternakan sebesar 111,35 sedangkan NTP terendah terjadi pada sub sektor tanaman pangan sebesar 100,34. Kenaikan NTP terjadi pada sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 0,77 persen dan sub sektor peternakan naik 0,16 persen. Sedangkan pada sub sektor tanaman hortikultura dan sub sektor perkebunan rakyat mengalami penurunan NTP. Meskipun demikian NTP pada kedua sub sektor tersebut masih terjaga di atas 100. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2015 juga mengalami kenaikan tipis 0,08 persen dibanding tahun lalu atau mencapai 106,69.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Penataan Ruang

1. Ketaatan terhadap RTRW

Dalam hal mengelola wilayahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur wilayah darat dan wilayah lautnya berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032. Sedangkan dalam hal penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, sampai dengan tahun 2015 masih dalam proses mendapatkan persetujuan substansi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang/Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75
Progress Penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
Tahun 2010 s.d 2015 Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Perda RTRW Kabupaten/Kota	11	16	33	36	37	38
2.	Perda RDTR/RTR KSK	-	-	-	-	2	6
3.	Persub RDTR/RTR KSK	-	-	-	-	4	24

Sumber data : Bappeprov Jatim dan DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2015



Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data realisasi RTRW Provinsi seluas 1.267.559,40 dari rencana peruntukan seluas 1.591.211,90 sehingga dihasilkan bahwa Ketaatan terhadap RTRW untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 79,66.

2. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah produktif seluas 2.605.856,30 Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah produktif Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 61,74.

3. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah industri seluas 12.602 Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah industri untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 0,30.

4. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah banjir seluas 366.465,48 Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah banjir untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 8,68.

5. Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan



Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah kekeringan seluas 28.166 Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah kekeringan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 0,67.

6. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW, Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah perkotaan seluas 361.541,30Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah perkotaan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 8,57.

b. Lingkungan Hidup

1) Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat urgent karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 95,20. Jadi dalam hal ini pada tahun 2015 masih ada sekitar 5 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

Tabel 2.76
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	95,01	95,52	95,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



c. Komunikas dan Informatika

2) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Energi listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan modern manusia, tanpa listrik aktivitas menjadi lumpuh. Hampir seluruh aspek kehidupan akan terpengaruh termasuk roda pemerintahan dan perekonomian secara khusus bisa terganggu bila tidak ada listrik, hampir seluruh aktivitas kehidupan modern sangat bergantung pada listrik. Menyadari hal tersebut, Pemerintah terus berupaya menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat, bahkan Pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

Tabel 2.77
Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Ketersediaan Daya Listrik	80,51	83,60	86,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

PT PLN (Persero) yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam menyediakan listrik bagi masyarakat harus terus meningkatkan kapasitasnya agar mampu mengimbangi tingginya pertumbuhan permintaan listrik di Jawa Timur. Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Pada tahun 2013 rasio elektrifikasi mencapai 80,51, meningkat pada tahun 2014 menjadi 82,70 dan pada tahun 2015 menjadi 86,68. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 87 persen kebutuhan listrik sudah dikonsumsi/dinikmati oleh pelanggan, baik rumahtangga, swasta, industri, instansi, lembaga perusahaan lainnya. Selebihnya sebesar 17 persen adalah ketersediaan listrik yang diusahakan sendiri (captive power) yang diusahakan untuk berbagai



kepentingan baik swasta maupun masyarakat, termasuk yang masih dalam proses untuk bisa menikmati listrik bagi kehidupan sehari-hari.

3) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Saat ini ketersediaan energi listrik menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses berbagai kebutuhan lain. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi listrik kepada masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Tabel 2.78
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	99,64	99,69	99,70

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga berlistrik baik melalui PLN maupun Non PLN meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yaitu dari 99,64 persen tahun 2013 menjadi 99,70 persen pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran daerah tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Pengembangan Pemanfaatan Energi dan Kelistrikan dengan menyediakan sumber energi listrik dari energi terbarukan bagi masyarakat di daerah terpencil dan



penyediaan listrik melalui bantuan sambungan rumah/instansi rumah bagi masyarakat kurang mampu di tempat-tempat yang telah ada jaringan distribusi listrik PLN.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Angka kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tabel 2.79
Angka kriminalitas di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015*
Angka kriminalitas	3,80	3,60	4,68

Sumber : Polda Jawa Timur

Ket : *) Angka Sementara

Berdasarkan data Polda Jatim, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2013-2015 angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan yaitu dari 3,80 tahun 2013 menjadi 3,60 tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 angka kriminalitas menjadi 4,68 atau naik 1,08 poin dibandingkan tahun sebelumnya, ini berarti selama 1 tahun terakhir terjadi sedikit penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas sebesar 4,68 menunjukkan bahwa terjadi hampir 5 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.



4. Fokus Sumber Daya manusia

a. Ketenagakerjaan

1) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun, dan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Tabel 2.80
Rasio Ketergantungan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Ketergantungan	44,85	44,50	44,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio ketergantungan atau Dependency ratio (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan



1. URUSAN PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSA NA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			17.878.320. 550			14.856.191. 584	83, 10		DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR
1.01.15. 001		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	79,54		79,58		100, 05		Melebihi Target	DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSA NA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										TIMUR
1.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			64.202.089. 200			57.469.863. 816	89, 51		DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR
1.01.16. 001		Angka Partisipasi Murni (APM)	94,76		94,76	100, 00			Memenu hi Target	DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSA NA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.17.	Program Pendidikan Menengah			124.817.55 6.200			114.691.83 9.702	91, 89		DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR
1.01.17. 001		Angka Partisipasi Kasar (APK)	80,05	%		79,14	%	98,8 6	Tidak Memenu hi Target	DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR
1.01.18.	Program			22.039.280.			16.499.183.	74,		DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSA NA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pendidikan Non Formal			500			334	86		PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR	
1.01.18. 001		Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 - 59 tahun	94,59	%		96,06	%	101, 55		Melebihi Target	DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR
1.01.20.	Program Peningkatan				77.520.000. 000			72.410.363. 532	93, 41		DINAS PENDIDI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSA NA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									KAN PROVINS I JAWA TIMUR	
1.01.20. 001		Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	577.8 90	gur u		609.7 20	gur u	105, 51		Melebihi Target	DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR
1.01.23.	Program Pendidikan Tinggi				2.134.575.0 00				2.072.481.0 00	97, 09	DINAS PENDIDI KAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSA NA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												PROVINS I JAWA TIMUR
1.01.23. 001		Terjalannya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaraan Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun	2.000	ora ng		1.950	ora ng	97,5 0			Tidak Memenu hi Target	DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR
1.01.32.	Program				11.625.646.				10.202.297.	87,		DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSA NA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)			850			269	76		PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR	
1.01.32. 001		Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)Kabupate n/Kota	28,95	%		31,57	%	109, 05		Melebihi Target	DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR



2. URUSAN KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			7.132.445.740			5.303.638.540	74,36		DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.16.001		Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar	15 (144)	% PM KS		30 PM KS	20,8 3		Tidak Menuhi Target	DINAS KESEHATAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(%)								JAWA TIMUR
1.02.16 .002		Cakupan Ponkesdes sesuai standar (%)	46	%	100	%	217, 39		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.16 .003		Cakupan Pelayanan Kesehatan	65	%	31,87	%	49,0 3		Tidak Memenu hi	DINAS KESEHATA N



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Remaja (%)							Target	PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.16 .004		Cakupan pelayanan kesehatan USILA (%)	54	%		40	%	74,0 7	Tidak Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.16 .005		Cakupan Peserta KB Aktif	67	%		65	%	97,0 1	Tidak Memenu	DINAS KESEHATA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(%)							uhi Target	N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.16 .006		Cakupan Pelayanan Bayi (%)	95	%	73,64	%	77,5 2		Tidak Memen uhi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.16		Prosentase	100	%	100	%	100,		Memen	DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.007		Kasus Pasung ditangani (%)					00		uhi Target	KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.16 .008		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes (%)	94	%		71,84	%	76,4 3	Tidak Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			4.997.528.4 50			4.271.998. 195	85, 48		DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.19 .001		Persentase rumah tangga sehat	50	%		50,62	%	101, 24	Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.19 .002		Prosentase Posyandu Puri	64	%		70,23	%	109, 73		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.19 .003		Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu	41	%		37,93	%	92,5 1		Tidak Memen uhi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			2.483.921.9 00			2.208.703. 840	88, 92		DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.20 .001		Prevalensi balita kurang gizi	11,7	%		17,8	%	65,7 3	Tidak Memen uhi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.20 .002		Pesentase Balita Stunting	28,2	%		26	%	108, 46		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.21	Program Pengembanga n Lingkungan Sehat				2.131.507.0 00			1.840.366. 690	86, 34		DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.21 .001		prosentase akses masy memilki akses thd jamban sehat	73	%		78,01	%	106, 86		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.21 .002		persentase akses masy memilki akses thd sarana air minum yg mmenuhi syarat	81,5	%		82,32	%	101, 01		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		kesehatan									
1.02.21 .003		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung	81,5	%		82,32	%	101, 01		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.21 .004		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	71	%		78,01	%	109, 87		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sanitasi dasar/jamban sehat								JAWA TIMUR
1.02.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan			3.900.046.5 00			2.046.131. 045	52, 46		DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.33 .001		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	65	%		65	%	100, 00	Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.33 .002		Persentase RSUD menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai	50	%	50	%	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		standar								
1.02.33 .003		Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar	75	%	75	%	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.33 .004		Berfungsinya Rumah Sakit Tersier sebagai TOP Referral >50 %	%							DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
1.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				1.370.302.7 00			771.920.3 50	56, 33		DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.34 .001		Persentase termanfaatkan ya dokumen kesehatan untuk	100	%		%					DINAS KESEHATA N PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		bahan penentuan kebijakan								JAWA TIMUR	
1.02.44	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan			10.090.296. 400			7.141.877. 022	70, 78		DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR	
1.02.44 .001		Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	96	%		96	%	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.44 .002		Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat	67	%	65	%	97,0 1		Tidak Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.44 .003		Persentase produk makanan	68	%	70	%	102, 94		Melebi hi	DINAS KESEHATA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang memenuhi syarat							Target	N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.44 .004		Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat	62	%	60	%	96,7 7		Tidak Memenuhi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.46	Program				49.776.756.			40.500.61	81,	DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan			890			0.756	36		KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.46 .001		Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk (Rasio x jumlah	SpOG : 1 (355 dr.SpO G) SpA : 1 (317 dr		SpOG : 1 (441 dr.SpOG) SpA : 1 (317 dr SP.A) Dr : 17				Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		penduduk/100.000)	SP.A) Dr : 17 (6.632 dr) Bdn : 46(17. 652 bidan) Pwt : 81 (30.69 9 peraw		(6.660 dr) Bdn : 46(17.652 bidan) Pwt : 81 (33.155pe rawat Ntr : 5 (1.886 nutrisioni s)					



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			at Ntr : 5 (1.961 nutrisi onis)								
1.02.49	Program Pengendalian Penyakit				6.732.902.4 46			5.333.685. 155	79, 22		DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.49		Persentase	20	%		19,60	%	98,0		Tidak	DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.001		Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi				0			Memenu hi Target	KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.49 .002		Persentase KLB Pasca Bencana	0	%		0	%		Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.49 .003		Persentase RFT Rate (%)	90	%	91,2	%	101, 33		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.49 .004		Persentase ODHA dengan ARV	75	%	75	%	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.49 .005		Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT	95	%		100	%	105, 26		Melebi hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.49 .006		Persentase penderita suspect pes yang tertangani	100	%		100	%	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.49 .007		Insiden rate DBD (%)	<51		51,1		97,8 5		Tidak Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.49 .008		Persentase penyakit menular wabah dilakukan PE	100	%	100	%	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.49 .009		Persentase cakupan Diare (%)	75	%	60,46	%	80,6 1		Tidak Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.49 .010		Persentase penurunan KLB penyakit bersumber binatang	10	%	10	%	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.49 .011		Persentase keberhasilan pengobatan TB	90	%		88,2	%	98,0 0		Tidak Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.02.49 .012		Persentase Cakupan Pneumonia	40	%		33,3	%	83,2 5		Tidak Memenu hi Target	DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			206.697.40 8.834			185.737.7 68.414	89, 86		RSUD Dr. SOETOMO SURABAY A
1.02.47 .001		Pemanfaatan sarana prasarana oleh pelanggan	841,96	Or ang		Or ang				RSUD Dr. SOETOMO SURABAY A



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			1.039.327.7 79.783			995.843.8 44.808	95, 82		RSUD Dr. SOETOMO SURABAY A
1.02.48 .001		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.9							RSUD Dr. SOETOMO SURABAY A
1.02.47	Program Peningkatan			153.444.62 6.497			148.654.5 01.840	96, 88		RSUD Dr. SAIFUL



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)									ANWAR MALANG
1.02.47 .001		Prosentase pemenuhan sarana prasarana termasuk alat kedokteran RS	65	%	65	%	100, 00		Memenu hi Target	RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			633.003.52 5.822			559.717.5 35.629	88, 42		RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
1.02.48 .001		Prosentase penyelesaian pendidikan di RS	100	%		100	%	100, 00	Memenu hi Target	RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
1.02.48 .002		Persentase Indikator	85	%		81,06	%	95,3 6	Tidak Memenu	RSUD Dr. SAIFUL



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target							uhi Target	ANWAR MALANG
1.02.48 .003		Bed Occupancy Rate (BOR)	70		66,83	95,4 7			Tidak Memenu hi Target	RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
1.02.48 .004		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5		84,55	105, 03			Melebi hi Target	RSUD Dr. SAIFUL ANWAR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										MALANG	
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			43.550.000. 000			41.738.94 6.086	95, 84		RSUD Dr. SOEDONO MADIUN	
1.02.47 .001		Prosentase pemenuhan pengadaan,	95	%		94	%	98,9 5		Tidak Memen uhi	RSUD Dr. SOEDONO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		peningkatan sarana prasarana sesuai standart							Target	MADIUN
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			212.617.74 2.654			177.798.0 33.788	83, 62		RSUD Dr. SOEDONO MADIUN
1.02.48 .001		Prosentase pelayanan yang	95	%		74,42	%	78,3 4	Tidak Memen	RSUD Dr. SOEDONO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		memenuhi standart pelayanan minimal							uhi Target	MADIUN
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			26.585.000. 000			25.020.35 8.344	94, 11		RUMAH SAKIT HAJI SURABAY A



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.47 .001		Kepuasan pasien/masyara kat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS	100		79,23	79,23			Tidak Memenu hi Target	RUMAH SAKIT HAJI SURABAY A
1.02.48 .	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			169.961.80 8.818			162.360.3 63.093	95, 53		RUMAH SAKIT HAJI SURABAY A



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.48 .001		Kepuasan pasien/masyara kat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS	100		100		100, 00		Memenu hi Target	RUMAH SAKIT HAJI SURABAY A	
1.02.16 .	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				271.200.00 0			269.519.4 15	99, 38	Progra m	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1.02.16		Persentase	80	%		21,32	%	26,6		Tidak	RUMAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.001		pasien pasung terlayani					5			Memenu hi Target	SAKIT JIWA MENUR
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			4.079.932.0 00			3.915.909. 665	95, 98	Progra m	RUMAH SAKIT JIWA MENUR	
1.02.47		Indeks Kepuasan	85	%		78	%	91,7		Tidak	RUMAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.001		Masyarakat					6			Memenu hi Target	SAKIT JIWA MENUR
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			43.197.257. 725			38.959.07 7.619	90, 19	Progra m	RUMAH SAKIT JIWA MENUR	
1.02.48 .001		Bed Occupancy Rate (BOR)	72	%		78,51	%	109, 04		Melebi hi Target	RUMAH SAKIT JIWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										MENUR
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			176.793.16 0			107.848.5 00	61, 00	PROGR AM	RUMAH SAKIT KARSA HUSADA BATU
1.02.16 .001		Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu	75	%		80	%	106, 67	MELEBI HI TARGET	RUMAH SAKIT KARSA HUSADA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										BATU
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			32.500.000. 000			30.399.00 7.406	93, 54	PROGR AM	RUMAH SAKIT KARSA HUSADA BATU
1.02.47 .001		Meningkatnya sarana dan Prasarana RS.	75	%		65	%	86,6 7	TIDAK MEME NUHI	RUMAH SAKIT KARSA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Paru Batu dengan Standar RS. sesuai Kemenkes							TARGET	HUSADA BATU
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			33.965.520. 824			31.274.17 4.725	92, 08	PROGR AM	RUMAH SAKIT KARSA HUSADA BATU
1.02.48 .001		Meningkatnya Kinerja	65	%		65	%	100, 00	MEME NUHI	RUMAH SAKIT



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan Rumah Sakit							TARGET	KARSA HUSADA BATU
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			128.700.00 0			86.443.60 0	67, 17		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1.02.16 .001		Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan	100	%		100	%	100, 00	Memenu hi Target	RUMAH SAKIT PARU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		di RS Paru Jember								JEMBER
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			60.003.246. 600			57.241.40 6.237	95, 40		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1.02.47 .001		prosentase responden yang	80	%	74,44	%	93,0 5		Tidak Memen	RUMAH SAKIT



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		puas terhadap fasilitas/sarana prasarana RS yang tersedia							uhi Target	PARU JEMBER
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			22.336.480. 643			18.951.01 6.655	84, 84		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1.02.48 .001		tingkat kebutuhan	12	bul an		12	bul an	100, 00	Memenu hi	RUMAH SAKIT



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kegiatan operasional rumah sakit							Target	PARU JEMBER
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			189.797.50 0			165.995.6 80	87, 46		RUMAH SAKIT KHUSUS PARU- PARU DUNGUS MADIUN
1.02.16 .001		(%) Angka keberhasilan	72,5	%		75	%	103, 45	Melebi hi	RUMAH SAKIT



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pengobatan penyakit TB dan paru lainnya							Target	KHUSUS PARU- PARU DUNGUS MADIUN
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah			10.893.339. 900			10.744.26 6.695	98, 63		RUMAH SAKIT KHUSUS PARU- PARU DUNGUS MADIUN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(BLUD)										
1.02.47 .001		(%) Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungsus	77,5	%		81,94	%	105, 73		Melebi hi Target	RUMAH SAKIT KHUSUS PARU- PARU DUNGUS MADIUN
1.02.48 .	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan				8.819.073.8 08			6.684.585. 111	75, 80		RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umum Daerah (BLUD)									PARU DUNGUS MADIUN
1.02.48 .001		Jumlah Kunjungan Pasien	12.064	ora ng		ora ng				RUMAH SAKIT KHUSUS PARU- PARU DUNGUS MADIUN KHUSUS PARU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			262.575.02 2			212.244.7 75	80, 83		RUMAH SAKIT KHUSUS KUSTA KEDIRI
1.02.16 .001		Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta								RUMAH SAKIT KHUSUS KUSTA KEDIRI
1.02.47	Program			3.241.153.0			3.063.829.	94,		RUMAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			00			800	53		SAKIT KHUSUS KUSTA KEDIRI
1.02.47 .001		Presentase pemenuhan sarana prasarana rumah sakit	75		96,25		128, 33		Melebi hi Target	RUMAH SAKIT KHUSUS KUSTA KEDIRI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			7.871.840.8 63			6.133.453. 948	77, 92		RUMAH SAKIT KHUSUS KUSTA KEDIRI
1.02.48 .001		Presentase meningkatnya kinerja pelayanan Rumah Sakit	70		85		121, 43		Melebi hi Target	RUMAH SAKIT KHUSUS KUSTA KEDIRI
1.02.16	Program			279.823.50			218.772.5	78,		RUMAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	Upaya Kesehatan Masyarakat			0			63	18		SAKIT KUSTA SUMBERG LAGAH MOJOKER TO
1.02.16 .001		Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	301	Ana k		146	Ana k	48,5 0	Tidak Memen uhi Target	RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERG LAGAH MOJOKER



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										TO
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			24.281.288. 468			23.991.91 1.719	98, 81		RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERG LAGAH MOJOKER TO
1.02.48 .001		Sarana, prasarana dan kebutuhan	75	%		70	%	93,3 3	Tidak Memenu hi	RUMAH SAKIT KUSTA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		operasional Rumah Sakit terpenuhi							Target	SUMBERG LAGAH MOJOKER TO
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			132.278.80 0			93.666.77 0	70, 81		RUMAH SAKIT MATA MASYARA KAT SURABAY A
1.02.16		Terjangkaunya	20	%		90	%	450,	Melebi	RUMAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.001		pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur					00		hi Target	SAKIT MATA MASYARA KAT SURABAY A
1.02.16 .002		terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di	20	%		%				RUMAH SAKIT MATA MASYARA KAT SURABAY



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		provinsi jawa timur								A
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			24.676.650. 933			23.675.92 1.369	95, 94		RUMAH SAKIT MATA MASYARA KAT SURABAY A
1.02.48 .001		Tersedianya kebutuhan operasional	85	%		100	%	117, 65	Melebi hi Target	RUMAH SAKIT MATA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik									MASYARA KAT SURABAY A
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			13.586.842. 000			12.416.72 4.165	91, 39	Progra m	RUMAH SAKIT PARU SURABAY A	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.47 .001		Jumlah sarana dan prasarana, peralatan yang ada/jumlah sarana prasarana, peralatan sesuai standar pelayanan x 100%	80	%		71	%	88,7 5		Tidak Memenu hi Target	RUMAH SAKIT PARU SURABAY A
1.02.47 .002		sarana prasarana rumah sakit	70	%			%			Progra m	RUMAH SAKIT PARU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sesuai standar								SURABAY A
1.02.48 .001	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			15.785.864. 288			11.768.67 1.850	74, 55	Progra m	RUMAH SAKIT PARU SURABAY A
1.02.48 .001		Persentase capaian SPM sesuai standar	0.55						Progra m	RUMAH SAKIT PARU SURABAY



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										A
1.02.48 .002		Capaian SPM sesuai target	70 %						Progra m	RUMAH SAKIT PARU SURABAY A
1.02.16 .	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				302.673.75 0			154.323.0 15	50, 99	RUMAH SAKIT ASY- SAAFI PAMEKAS AN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.16 .001		Pencapaian target indikator nasional program penanggulangan pasien TB (9 indikator)	9		5	55,5 6			Tidak Memenu hi Target	RUMAH SAKIT ASY- SAAFI PAMEKAS AN
1.02.47 .	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan			9.000.000.0 00			8.188.890. 322	90, 99		RUMAH SAKIT ASY- SAAFI PAMEKAS AN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umum Daerah (BLUD)									
1.02.47 .001		Pemenuhan pembangunan/r ehabilitasi gedung RS dan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit	95		95		100, 00		Memenu hi Target	RUMAH SAKIT ASY- SAAFI PAMEKAS AN
1.02.48 .	Program Peningkatan			17.755.549. 323			15.445.85 9.119	86, 99		RUMAH SAKIT ASY-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)									SAAFI PAMEKAS AN
1.02.48 .001		Persentase indeks kepuasan dan peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat	87		86,99		99,9 9		Tidak Memen uhi Target	RUMAH SAKIT ASY- SAAFI PAMEKAS AN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			255.388.850			202.395.744	79,25		RUMAH SAKIT PARU MANGUN HARJO MADIUN
1.02.16 .001		Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB	1128	ora ng		1128	ora ng	100, 00	Memenu hi Target	RUMAH SAKIT PARU MANGUN HARJO MADIUN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			25.000.000. 000			24.019.36 1.623	96, 08		RUMAH SAKIT PARU MANGUN HARJO MADIUN
1.02.47 .001		Persentase Pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan	100	%		96	%	96,0 0	Tidak Memen uhi Target	RUMAH SAKIT PARU MANGUN HARJO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		sesuai SPM (5 thn)								MADIUN	
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			3.339.259.7 92			3.296.435. 916	98, 72		RUMAH SAKIT PARU MANGUN HARJO MADIUN	
1.02.48 .001		Jumlah pasien	8800	ora ng		10430	ora ng	118, 52		Melebi hi Target	RUMAH SAKIT PARU MANGUN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										HARJO MADIUN
1.02.48 .	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			3.278.585.1 26			2.618.823. 684	79, 88		UPT AKADEMI KEPERAW ATAN MADIUN
1.02.48 .001		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85		85		100, 00		Memenu hi Target	UPT AKADEMI KEPERAW ATAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										MADIUN	
1.02.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			303.000.00 0			297.435.7 30	98, 16		UPT AKADEMI GIZI SURABAY A	
1.02.47 .001		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan	80	%		80	%	100, 00		Memenu hi Target	UPT AKADEMI GIZI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD									SURABAY A
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			2.619.114.9 83			2.426.718. 577	92, 65			UPT AKADEMI GIZI SURABAY A
1.02.48 .001		Terlaksananya kegiatan	80	%		80	%	100, 00		Memenuhi	UPT AKADEMI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		peningkatan pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat							Target	GIZI SURABAYA
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			292.311.400			229.714.005	78,59	Program	UPT PELATIHAN KESEHATAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										MASYARA KAT MURNAJA TI LAWANG
1.02.16 .001		Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	100	%	86	%	86,0 0		Tidak Memenu hi Target	UPT PELATIHA N KESEHATA N MASYARA KAT MURNAJA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										TI LAWANG
1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			8.073.852.3 97			7.208.350. 510	89, 28	Progra m	UPT PELATIHA N KESEHATA N MASYARA KAT MURNAJA TI LAWANG



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.48 .001		Persentase capaian SPM sesuai target	85	%		86	%	101, 18		Melebi hi Target	UPT PELATIHA N KESEHATA N MASYARA KAT MURNAJA TI LAWANG



3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan									DINAS PEKERJA AN UMUM BINA MARGA PROVIN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										SI JAWA TIMUR
1.03.15.001		Panjang jalan yang terbangun	0,1	k m		k m				DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
1.03.15.002		Panjang jembatan yang	1	m		m				DINAS PEKERJAAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terbangun								UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
1.03.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			592.698.512.985			587.997.996.227	99,21		DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
1.03.18. 001		Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km)	1.620,00	k m		1.574,823	k m	97,2 1		Tidak Memenu hi Target	DINAS PEKERJA AN UMUM BINA MARGA PROVIN SI JAWA TIMUR
1.03.18. 002		Panjang jembata n dalam	12.997	m		12.997	m	100, 00		Memenu hi Target	DINAS PEKERJA AN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kondisi baik								UMUM BINA MARGA PROVIN SI JAWA TIMUR
1.03.39.	Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			43.952.663. 415			42.903.746. 741	97, 61		DINAS PEKERJA AN UMUM BINA MARGA PROVIN SI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										TIMUR
1.03.39.001		Panjang jalan JLS yang terbangun	1.1 Km							DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
1.03.39.002		Panjang jembatan JLS	110 M							DINAS PEKERJAAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang terbangu n								UMUM BINA MARGA PROVIN SI JAWA TIMUR
1.03.47.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan			229.992.14 4.600			228.788.11 1.984	99, 48		DINAS PEKERJA AN UMUM BINA MARGA PROVIN SI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										TIMUR
1.03.42.	Program Konservasi Sumber Daya Air			42.863.634. 160			39.092.201. 860	91, 20		DINAS PEKERJA AN UMUM PENGAI RAN PROVIN SI JAWA TIMUR
1.03.42. 001		Volume resapan air (M3)	12.800.000	m 3		11.781.429 m 3	92,0 4		Tidak Memenu hi Target	DINAS PEKERJA AN UMUM



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PENGAI RAN PROVIN SI JAWA TIMUR
1.03.43.	Program Pendayagunaan Sumber Daya Air			167.973.38 9.325			162.756.52 4.123	96, 89		DINAS PEKERJA AN UMUM PENGAI RAN PROVIN SI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.03.43. 001		Ketersedi aan air baku (M3)	19.343.000 .000	m 3		19.413.567 .429	m 3	100, 36		Melebi hi Target	DINAS PEKERJA AN UMUM PENGAI RAN PROVIN SI JAWA TIMUR
1.03.44.	Program Pengendalian Daya Rusak Air				46.088.270. 225			43.581.391. 481	94, 56		DINAS PEKERJA AN UMUM PENGAI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										RAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.03.44.001		Luas genangan pada daerah rawan banjir (Ha)	900	ha	400	ha	225,00		Melebihi Target	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAI RAN PROVINSI JAWA TIMUR



4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.15.	Program Pengembangan Perumahan			147.959.104.2 00			136.270.526.6 50	92,1 0	Program	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
1.04.15.0 01		Persentase Rusun	44,2 7	%		36,7 1	%	82,92	Tidak Memenu	DINAS PEKERJAA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terbangun							hi Target	N UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
1.04.15.0 02		Jumlah PSU Perumahan Permukiman	43,2 2		47,2 7	109,3 7			Melebihi Target	DINAS PEKERJAA N UMUM CIPTA KARYA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSA NA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		an dan Dokumen Monev RTLH								DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerj a	Rp	Kinerja	%	Rp	%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA A
			Kinerj a	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.15.	Program Perencanaan Tata Ruang			4.082.500.0 00			3.707.519.1 55	90,8 1	Program	DINAS PEKERJAA N UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
1.05.15.0 01		Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang	69, 2	%		62,3 2	%	90,06	Tidak Memenu hi Target	DINAS PEKERJAA N UMUM CIPTA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
		tersusun								KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
1.05.15.002		Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota	7		14	200,00			Melebihi Target	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerj a	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
										TIMUR	
1.05.16.	Program Pemanfaatan Ruang			2.869.275.0 00				2.473.737.6 60	86,2 1	Program	DINAS PEKERJAA N UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
1.05.16.0 01		Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan	25	%		56,4 5	%	225,8 0		Melebihi Target	DINAS PEKERJAA N UMUM CIPTA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
		pemanfaatan tata ruang								KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
1.05.17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			647.672.500			545.059.941	84,16	Program	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
										TIMUR	
1.05.17.001		Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	%			100,00			Memenuhi Target	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR



6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.06.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			4.471.526. 300			4.000.542. 900	89, 47		BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	
1.06.21. 001		Persentase usulan kegiatan yang	30	%		46, 5	%	155, 00		Melebihi Target	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
		diakomodir dalam dokumen perencanaan									NAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				5.726.600.000			5.291.272.959	92,40		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.22.		Persentase	46	%		46	%	100,		Memenu	BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
001		usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan					00			hi Target	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.36.	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan			8.213.150.000				7.330.769.907	89,26		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
										DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	
1.06.36.001		persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan	72	%		97,89	%	135,96		Melebihi Target	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.36.002		persentase program	80	%		97,01	%	121,26		Melebihi Target	BADAN PERENCANA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
		dan kegiatan RKPD dalam APBD									AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.36. 003		persentase SKPD Provinsi dan kab/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan	60	%		77, 11	%	128, 52		Melebihi Target	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
		program pembangunan secara tepat waktu									TIMUR
1.06.37.	Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah				7.937.890.500			7.032.305.486	88,59		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.37.001		Jumlah Kegiatan	13	kegiatan		13	kegiatan	100,00		Memenuhi Target	BADAN PERENCANA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
		yang difasilitasi								AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.38.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah			6.388.628. 500			6.140.197. 818	96, 11		BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
										TIMUR	
1.06.38. 001		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaa n	32	%		32	%	100, 00		Memenu hi Target	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.39.	Program				5.313.988.			4.672.948.	87,		BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
	Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan				000				394	94		PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.39.001		Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan	10	%		95	%	95,0			Tidak Memenuhi Target	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
		Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaa n								JAWA TIMUR
1.06.40.	Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional			7.070.500. 000			6.929.685. 160	98, 01		BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
										TIMUR	
1.06.40. 001		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengemban gan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaa n	28	%		28	%	100, 00		Memenu hi Target	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1.06.43.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan			5.011.616. 000				3.716.191. 828	74, 15		BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.06.43. 001		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintah	20	%		20	%	100, 00		Memenu hi Target	BADAN PERENCANA AN PEMBANGU NAN DAERAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
		an Kemasyarak atan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaa n								PROVINSI JAWA TIMUR

7. URUSAN PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang	Indikator	Target	Realisasi	Keterang	SKPD
------	---------------	-----------	--------	-----------	----------	------



	Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program (Outcome)	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%	an	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.07.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			98.653.038.270			94.853.216.063	96,15		DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.15.001		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubunga	80		73	91,25			Tidak Memenuhi Target	DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		n LLAJ Prov. Jatim (indeks nilai)								JAWA TIMUR
1.07.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			54.588.018.680			53.521.592.420	98,05		DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.16.001		Prosentase jumlah	50	%		50	%	100,00	Memenuhi Target	DINAS PERHUBUNG



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		prasarana dan fasilitas terpelihara dibandingka n jumlah prasarana dan fasilitas yang dimiliki								AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			20.631.505.5 50			18.959.752.7 67	91,9 0		DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA	
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JAWA TIMUR	
1.07.17.0 01		Prosentase peserta Mudik Balik Gratis terakomoda si (%)	1,5	%		2,06	%	137,3 3		Melebihi Target	DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.19.	Program Pengendalian dan				114.213.862. 775			110.232.779. 278	96,5 1		DINAS PERHUBUNG



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengamanan Lalu Lintas									AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.19.001		rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan	24,18	%	45,42	%	187,84		Melebihi Target	DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		n kebutuhan								JAWA TIMUR
1.07.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			1.586.905.00 0			1.278.711.85 4	80,5 8		DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.20.0 01		Prosentase penurunan	10	%		24	%	240,0 0	Melebihi Target	DINAS PERHUBUNG



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan) yang melibatkan bus								AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.21.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian			75.825.802.0 00			74.498.967.2 52	98,2 5		DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA	
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JAWA TIMUR	
1.07.21.0 01		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api	10	%		55	%	550,0 0		Melebihi Target	DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.22.	Program Pembangunan dan				55.633.006.0 00			52.653.785.8 59	94,6 4		DINAS PERHUBUNG



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA	
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan									AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR	
1.07.22.0 01		Prosentase pertumbuha n penumpang pada lintas penyeberan gan Jawa	3	%		-7	%	- 233,3 3		Tidak Memenu hi Target	DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Timur								JAWA TIMUR
1.07.23.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut			177.348.444. 000			174.534.177. 457	98,4 1		DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA	
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.07.23.0 01		Prosentase pertumbuha n bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur	5	%		-3	%	- 60,00		Tidak Memenu hi Target	DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.24.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara				38.927.695.3 00			37.372.884.4 96	96,0 1		DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA	
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JALAN PROVINSI JAWA TIMUR	
1.07.24.0 01		Prosentase pertumbuha n penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang	5	%		7,97	%	159,4 0		Melebihi Target	DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.07.29.	Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi			36.138.996.0 00			34.626.336.1 27	95,8 1		DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.07.29.0 01		Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperole	55 %		71 %	129,0 9			Melebihi Target	DINAS PERHUBUNG AN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerj a	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		h predikat Wahana Tata Nugraha dibandingka n jumlah peserta dari Kab/Kota								JALAN PROVINSI JAWA TIMUR

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang	Indikator	Target	Realisasi	Keterang	SKPD
------	---------------	-----------	--------	-----------	----------	------



	Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program (Outcome)	Kinerja		Rp	Kinerja		%	Rp	%	an	PELAKSANA
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.08.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				9.175.531.250				8.388.350.452	91,42		BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
1.08.16.001		Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas air (menggunakan metode STORET atau	32	%		4,35	%	13,59			Tidak Memenuhi Target	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		metode indeks pencemaran air) (%)									
1.08.16.002		Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (menggunakan metode indeks pencemara	10	%		5	%	50,00		Tidak Memenuhi Target	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		n udara) (%)									
1.08.16.0 03		Cakupan pengawasa n industri dan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaa n AMDAL dan hukum lingkungan kewenanga n provinsi (%)	82	%		69,56	%	84,83		Tidak Memenu hi Target	BADAN LINGKUNG AN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.08.16.004		Rasio penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi (%)	60	%		100 %	166,67		Melebihi Target	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR	
1.08.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber				8.286.929.000			7.427.952.476	89,63		BADAN LINGKUNGAN HIDUP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Daya Alam									PROVINSI JAWA TIMUR	
1.08.17.001		Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi (titik)	5	loka si		5	loka si	100,00		Memenuhi Target	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
1.08.17.002		Persentase tindak lanjut pengaduan	100	%		166,67	%	166,67		Melebihi Target	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		masyarakat akibat adanya dugaan pencemara n dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)								JAWA TIMUR
1.08.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam			1.126.419. 750			971.972.36 9	86,2 9		BADAN LINGKUNG AN HIDUP PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
1.08.18.0 01		Cakupan lahan kritis yang terehabilitasi (lokasi)	5	loka si		5	loka si	100,0 0		Memenu hi Target	BADAN LINGKUNG AN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
1.08.31.	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim				1.421.720. 000				1.303.016. 850	91,6 5	BADAN LINGKUNG AN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.08.31.0 01		Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (juta ton eq CO2) (juta ton)	4	juta ton eq. CO2		4,48	juta ton eq. CO2	112,0 0		Melebihi Target	BADAN LINGKUNG AN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang	Indikator	Target	Realisasi	Keterang	SKPD PELAKSANA
------	---------------	-----------	--------	-----------	----------	----------------



	Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program (Outcome)	Kinerja		Rp	Kinerja		%	Rp	%	an	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1.10.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan				2.819.425.000				2.805.380.810	99,50		
1.10.15.001		% kepemilikan dokumen kependudukan e-KTP	92	%		90	%	97,83			Tidak Memenuhi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.10.15.002		% kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kelahiran	73	%		76,3	%	104,52			Melebihi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.10.15.0		%	40	%		90	%	225,			Melebihi	DINAS TENAGA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03		kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kematian				00			Target	KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		



1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.11.1 5.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				1.436.80 0.000				1.307.57 2.125	91, 01		BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR
1.11.1 5.001		Jumlah Peraturan Perundang- undangan Perlindungan Perempuan dan Anak yg diterbitkan Kab/Kota	3	%		0	%	0			Tidak Memenuhi Target	BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR
1.11.1 6.	Program Penguatan Kelembagaan				2.477.45 0.000				2.372.15 0.796	95, 75		BADAN PEMBERDA YAAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengarusutamaa n Gender dan Anak									PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR	
1.11.1 6.001		Prosentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan	15	%		18	%	12 0,0 0		Melebihi Target	BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Anak (PUA) (%)									
1.11.1 6.002		Prosentase Kab/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja- PUG)	10	%		8	%	80, 00		Tidak Memenuhi Target	BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR
1.11.1 7.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan				3.908.24 2.250			3.668.54 6.170	93, 87		BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Perempuan									N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR	
1.11.1 7.001		Prosentase Penanganan Korban KDRT, Non KDRT, dan Trafficking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) (%)	100	%		100	%	10 0,0 0		Memenuhi Target	BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.1 8.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			1.364.83 6.700			1.297.75 9.364	95, 09		BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR
1.11.1 8.001		Prosentase Partisipasi Perempuan Didalam Lembaga Pemerintah (%)	20	%		26	%	13 0,0 0	Melebihi Target	BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										I JAWA TIMUR
1.12.1 7.	Program Pelayanan Kontrasepsi			450.000. 000			407.584. 250	90, 57		BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR
1.12.1 7.001		Jumlah Akseptor Baru (Akseptor)	500	aksep tor		500	akse ptor	10 0,0	Memenuhi Target	BADAN PEMBERDA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0				YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR
1.12.2 0.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			724.900. 000			717.442. 422	98, 97		BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
1.12.2 0.001		Jumlah Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar (%)	100	%		100	%	10 0,0 0		Memenuhi Target	BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR
1.12.2 4.	Program Pengembangan Model				815.847. 750			737.799. 240	90, 43		BADAN PEMBERDA YAAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Operasional BKB- Posyandu-PADU									PEREMPUAN DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR	
1.12.2 4.001		Jumlah Kader Taman Posyandu yang dilatih tentang Perlindungan Anak (Kelompok)	500	kelo mpok		500	kelo mpo k	10 0,0 0		Memenuhi Target	BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUAN DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12.2 5.	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			1.287.91 0.000			1.246.01 3.215	96, 75		BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS I JAWA TIMUR
1.12.2 5.001		Cakupan KB Aktif (%)	64	%		75, 7	% 11 8,2 8		Melebihi Target	BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN KBPROVINS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										I JAWA TIMUR

11. URUSAN SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13.21.	Program Pemberdayaan			1.491.817. 000			1.447.803. 140	97, 05		DINAS SOSIALPRO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										VINSI JAWA TIMUR
1.13.21. 001		Prosentase (%) lembaga atau kelompok yang memperoleh program pemberdayaan kelembagaan keajahteraan sosial (SPM: 60%)	2.1 66	PS KS		2.4 16	PS KS	111, 54		Melebi hi Target	DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR
1.13.35.	Program Pemberdayaan				3.252.523. 000				2.515.810. 316	77, 35	DINAS SOSIALPRO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sosial									VINSI JAWA TIMUR	
1.13.35. 001		Persentase (%) orang atau kelompok yang memperoleh program pemberdayaan sosial (SPM: 80%)	0,1 4	%		0,1 37	%	97,8 6		Tidak Memen uhi Target	DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR
1.13.36.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial				4.986.100. 000				4.901.817. 215	98, 31	DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.13.36. 001		Persentase (%) Orang atau Kelompok yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial (SPM 80%)	0,1 1	%		0,1 5	%	136, 36		Melebih i Target	DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR	
1.13.37.	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial				1.247.000. 000				1.149.635. 215	92, 19		DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR
1.13.37. 001		Persentase pemahaman tentang peraturan	0,2 2	%		0,1 3	%	59,0 9		Tidak Memen uhi	DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		perundangan penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan, terlindunginya korban tindak kekerasan dan anak bermasalah dengan hukum secara sosial dan psikologis, terjaminnya ibu hamil dan anak usia sekolah dari							Target	TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		keluarga miskin.									
1.13.38.	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat			3.239.000. 000			3.160.529. 550	97, 58		DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR	
1.13.38. 001		persentase peningkatanketera mpilan dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana	0,0 7	%		0,0 7	%	100, 00		Memenu hi Target	DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13.39.	Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial			1.710.000. 000			1.677.593. 791	98, 10		DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR
1.13.39. 001		Prosentase (%) orang atau Kelompok yg memperoleh kesejahteraan sosial	50	jiw a	50	jiw a	100, 00		Memenuhi Target	DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR
1.13.41.	Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti			49.647.191 .095			48.884.541 .918	98, 46		DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sosial									TIMUR	
1.13.41. 001		Persentase (%) Panti Sosial yang menangani klien PMKS sesuai target (SPM 60%)	0,5 9	%		0,5 3	%	89,8 3		Tidak Memen uhi Target	DINAS SOSIALPRO VINSI JAWA TIMUR

12. URUSAN KETENAGAKERJAAAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kiner ja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.14.18.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			3.066.308.6 25			2.668.024.3 55	87, 01		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.14.18. 001		Presentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yg	46	%		54,6 8	%	118, 87	Melebihi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		diselesaikan melalui perjanjian bersama								TIMUR
1.14.18.002		% upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL)	106	%	114,98	%	108,47		Melebihi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.14.20.	Program Peningkatan Kualitas dan			45.981.581.643			43.822.517.634	95,30		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Produktifitas Tenaga Kerja									DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR	
1.14.20.001		% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	84	%		48,39	%	57,61		Tidak Memenuhi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.14.20.002		% tenaga kerja yg	47,5	%		47,5	%	100,00		Memenuhi	DINAS TENAGA KERJA,



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mendapatkan pelatihan kewirausahaan							Target	TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.14.20.003		% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	80	%	60,61	%	75,76		Tidak Memenuhi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.14.21.	Program			6.978.883.9			6.567.263.4	94,		DINAS TENAGA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja			00			74	10		KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR	
1.14.21.001		% kasus pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yg ditangani	83	%		74,7	%	90,0		Tidak Memenuhi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.14.21.002		% pekerja yg menjadi peserta program jamsostek aktif	48	%	46,09	% 96,02			Tidak Memenuhi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.14.22.	Program Perluasan dan Penempatan Kerja			9.638.944.650			8.433.935.025	87,50		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.14.22.001		% pencari kerja yg ditempatkan	62	%	62,5	%	100,81		Melebihi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.14.22.002		% TKI yg ditempatkan pada jabatan formal	38	%	32,83	%	86,39		Tidak Memenuhi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.14.22.003		rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal	1 : 4		1 : 5	101,56			Melebihi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPR OVINSI JAWA TIMUR

13. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan	SKPD
------	---------------	-----------	--------	-----------	------------	------



	Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program (Outcome)	Kinerja		Rp	Kinerja		%	Rp	%	gan	PELAKSANA
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.15.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				14.714.447.000				13.451.224.458	91,42		DINAS KOPERASI DAN UMKMPROV INSI JAWA TIMUR
1.15.15.001		Jumlah UMKM yg mendapatkan legalisasi usaha (unit)	150	Unit		65	Unit	43,33			Tidak Memenuhi Target	DINAS KOPERASI DAN UMKMPROV INSI JAWA TIMUR
1.15.16.	Program Pengembangan				25.227.922.000				21.845.592.479	86,59		DINAS KOPERASI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah									DAN UMKMPROV INSI JAWA TIMUR	
1.15.16.001		Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	9,25	%		7,97	%	86,16		Tidak Memenuhi Target	DINAS KOPERASI DAN UMKMPROV INSI JAWA TIMUR
1.15.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung				44.312.373.400			37.253.356.838	84,07		DINAS KOPERASI DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah									UMKM PROV INSI JAWA TIMUR	
1.15.17.001		Perputaran modal Kopwan	2,2	(kali per tahun)		1,8	(kali per tahun)	81,82		Tidak Memenuhi Target	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV INSI JAWA TIMUR
1.15.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan				38.089.333.390				22.723.456.680	59,66	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Koperasi									INSI JAWA TIMUR	
1.15.18.001		Persentase koperasi aktif (%)	80,13	%		79,83	%	99,63		Tidak Memenuhi Target	DINAS KOPERASI DAN UMKMPROV INSI JAWA TIMUR
1.15.19.	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro				9.217.285.600			7.594.290.082	82,39		DINAS KOPERASI DAN UMKMPROV INSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
1.15.19.001		Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro yang ada di Sentra (%)	4,25	%		3,5	%	82,35		Tidak Memenuhi Target	DINAS KOPERASI DAN UMKMPROV INSI JAWA TIMUR
1.15.21.	Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi				20.150.661.800			15.072.456.540	74,80		DINAS KOPERASI DAN UMKMPROV INSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pro gram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
1.15.21. 001		Return SHU Koperasi terhadap Volume (%)	12,5	%		12,7 7	%	102, 16		Melebihi Target	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV INSI JAWA TIMUR

14. URUSAN PENANAMAN MODAL

Kode	Urusan/Bidang	Indikato	Target	Realisasi	Keteran	SKPD
------	---------------	----------	--------	-----------	---------	------



	Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	r Kinerja Program (Outcome)	Kinerja		Rp	Kinerja		%	Rp	%	gan	PELAKSANA
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.16.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				12.648.685.000				10.291.917.283	81,37		BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR
1.16.15.001		Jumlah minat investasi PMA dan PMDN berdasarkan Izin Prinsip	104,86	(Trilyun Rupiah)		172,57	(Trilyun Rupiah)	164,57			Melebihi Target	BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.16.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				5.980.470.000				4.988.757.145	83,42		BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR
1.16.16.001		Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN berdasar	80,31	(Trilyun Rupiah)		67,91	(Trilyun Rupiah)	84,56			Tidak Memenuhi Target	BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
		kan LKPM										
1.16.17.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah				1.306.000.000				1.096.011.766	83,92		BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR
1.16.17.001		Jumlah potensi dan peluang investasi	4	Project Prospektus		2	Project Prospektus	50,00			Tidak Memenuhi Target	BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JAWA TIMUR	
1.16.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa				11.229.130.000			10.679.402.541	95,10		BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR
1.16.18.001		Persentase paket pengadaan	100	%		112,62	%	112,62		Melebihi Target	BADAN PENANAMAN MODAL



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		barang/jasa yang diselesaikan sesuai rencana umum pengadaan (%)								PROVINSI JAWA TIMUR
1.16.19.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu			15.461.060.000			13.797.875.341	89,24		BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikato r Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSA NA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												TIMUR
1.16.19. 001		Persenta se pelayana n perizinan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	%		100	%	100, 00			Memenu hi Target	BADAN PENANA MAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

15. URUSAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.17.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya			2.565.276.500			2.460.451.538	95,91		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
1.17.15.001		Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya	515,3	orang, lembaga		515,3	orang, lembaga	100,00	Memenuhi Target	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang mendapatkan penghargaan								TIMUR
1.17.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			12.262.640.000			12.013.916.609	97,97		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.17.16.001		Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara dan naskah kuno yang dikelola oleh museum	1268	benda		1774	benda	139,91		Melebihi Target	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.17.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			31.687.812.500			31.174.421.674	98,38		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
1.17.17.001		Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni	195	kali		195	kali	100,00	Memenuhi Target	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budaya, pameran dan perfilman								JAWA TIMUR

16. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.18.16.	Program Peningkatan Peran			9.140.235.00			8.377.788.160	91,66		DINAS KEPEMUDAAN



	Serta Kepemudaan											DAN KEOLAHRAGA AN PROVINSI JAWA TIMUR
1.18.16.0 01		Prosentase Pemuda berprestasi yang dibina	50	%		43,3 3	%	86,6 6			Tidak Memenuhi Target	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGA AN PROVINSI JAWA TIMUR
1.18.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				10.585.800.000			9.801.368.214	92,59			DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGA AN PROVINSI JAWA TIMUR
1.18.20.0 01		Prosentase jumlah	43,4 7	%		39,7 8	%	91,5 1			Tidak Memenuhi	DINAS KEPEMUDAAN



		Atlet Pelajar Berprestasi yang dibina								hi Target	DAN KEOLAHRAGAN PROVINSI JAWA TIMUR
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

17. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.19.17.	Program Pengembangan Wawasan			962.500.000			925.551.479	96,16		BADAN KESATUAN BANGSA DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Kebangsaan											POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.17. 001		Jumlah terbentukny a Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) (Kab/kota)	18	Kab/Ko ta		26	Kab/Ko ta	144, 44			Melebih i Target	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga				1.891.100 .000				1.767.351 .350	93, 46		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ketertiban dan Keamanan									PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.19.001		jumlah kab/kota yang menindaklanjuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	14	kab/kota kab/kota	0	kab/kota kab/kota	0		Tidak Memenuhi Target	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.25.	Program Peningkatan Kesadaran				927.000.000			843.248.515	90,97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Hukum dan HAM									POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR	
1.19.25.001		Jumlah kejadian terkait Politik	0	Kab/Kota		53	Kab/Kota			Tidak Memenuhi Target	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.25.002		jumlah kejadian terkait HAM	0	Kejadian		52	Kejadian			Tidak Memenuhi Target	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.26.	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi				1.969.426 .950				1.942.583 .224	98, 64		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.26. 001		Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar	98 3	ormas		889	ormas	90,4 4			Tidak Memen uhi Target	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JAWA TIMUR	
1.19.26. 002		jumlah ormas/LSM yang terdaftar	10 33	organi sasi		organi sasi					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.26. 003		verifikasi bantuan keuangan partai politik	10	Parpol		8 Parpol	80,0 0			Tidak Memen uhi Target	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.19.32.	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				863.900.0 00				701.030.3 25	81, 15		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.32. 001		Jumlah kejadian terkait Poleksosbud , TIBMAS dan terbentukny a FKDM	26 4	kec			kec					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.19.32.002		jumlah kejadian terkait POLEKSOSB UD dan TIBMAS	0	Kejadian	331	Kejadian					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.32.003		terbentuknya FKDM	2643088	kec, desa/kel organisasi	2582126	kec, desa/kel organisasi	97.7368.85		Melebihi Target		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.33.	Program				592.000.0			528.594.5	89,		BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
	Perbaikan Proses Politik				00				32	29		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.33.001		Jumlah kejadian terkait konflik politik	0	Kejadian		53	Kejadian				Tidak Memenuhi Target	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.35.	Program Peningkatan				747.500.000				717.387.030	95,97		BADAN KESATUAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	Kerukunan Umat Beragama											BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.35.001		Jumlah kejadian terkait keagamaan	0	Kejadian		17	Kejadian				Tidak Memenuhi Target	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.35.002		Jumlah kejadian terkait	18	Kab/Kota			Kab/Kota					BADAN KESATUAN BANGSA DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		keagamaan									POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			2.260.091.520			1.915.699.259	84,76			SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.15.001		Persentase penurunan gangguan terhadap kegiatan	90	%		83	%	92,22		Tidak Memenuhi Target	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		pemerintah an								JAWA TIMUR	
1.19.16.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			1.945.615 .480			1.848.450 .300	95, 01		SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.19.16. 001		persentase menurunnya pelanggaran Perda Prov. Jatim	90	%		82, 9	%	92,1 1		Tidak Memen uhi Target	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JAWA TIMUR	
1.19.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			721.050.0 00			707.682.4 75	98, 15		SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.19.19. 001		Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat yang sigap	50 0	Orang		480	Orang	96,0 0		Tidak Memen uhi Target	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan tanggap dalam Pamswakarsa dan penanggulangan bencana								
1.19.36.	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			2.357.760.000			1.988.181.430	84,33		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.19.36. 001		Terselengga ranya pelatihan optimalisasi manajemen supply logistik; Sosialisasi penguatan dasawisma dalam penanggula ngan bencana	10	%		84	%	84,0	0		Tidak Memenu hi Target	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.37.	Program				1.709.000				1.597.319	93,		BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana				.000				.374	47		PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.37.001		Terselenggaranya workshop rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial dan	10	%	0	93,	%	93,4	6		Tidak Memenuhi Target	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ekonomi (BPBD kab/kota, instansi terkait)								
1.19.38.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			2.232.800.000			2.148.675.428	96,23		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.38.001		Rakor fasilitasi	100	%		96	%	96,00		Tidak Memen BADAN PENANGGULA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRB; Bintek fasilitator desa tangguh; Fasilitasi Desa Tangguh Bencana							uhi Target	NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.19.39.	Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana			436.970.000			425.092.700	97,28		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JAWA TIMUR	
1.19.39. 001		Terselengga ranya sistem koordinasi dan integrasi program BPBD vertikal dan horizontal berbasis kebutuhan dan kondisi lokal,	10 0	%		97 %	97,0 0			Tidak Memenuhi Target	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terbangunnya Pusdalops di BPBD								

18. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM ,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH , PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.20.54	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			11.966.36 5.500			9.949.854. 705	83, 15		BIRO ADMINISTR ASI PEMERINTA HAN UMUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.54 .001		Tersedianya dokumen Tata Kelola Pemerintahan	38	Kabupate n/Kota		38	Kabupate n/Kota	100 ,00		Meme nuhi Target	BIRO ADMINISTR ASI PEMERINTA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yg baik								HAN UMUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.69	Program Penyempurna an dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi			1.841.094. 500			1.743.163. 010	94, 68		BIRO ADMINISTR ASI PEMERINTA HAN UMUM SETDA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										JAWA TIMUR
1.20.69 .001		Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur	16	Prov/Kab/ Kota	19	Prov/Kab/ Kota	118 ,75		Melebi hi Target	BIRO ADMINISTR ASI PEMERINTA HAN UMUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.20.64	Program Peningkatan Kerjasama			17.401.22 4.500			16.544.48 8.653	95, 08		BIRO ADMINISTR ASI KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.64 .001		Naskah Kerjasama (PKS & KSB) antar Pemerintah	12 5	Naskah		11 8	Naskah	94, 40		Tidak Meme nuhi Target	BIRO ADMINISTR ASI KERJASAMA SETDA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dalam Negeri									PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.64 .002		Naskah Kerjasama dengan Luar Negeri	12	Naskah	10	Naskah	83, 33			Tidak Meme nuhi Target	BIRO ADMINISTR ASI KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.20.64 .003		Naskah Kerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional	17	Naskah		15	Naskah	88, 24		Tidak Meme nuhi Target	BIRO ADMINISTR ASI KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.36 .	Program Pembentukan Produk Hukum				4.105.030. 000			3.730.129. 846	90, 87		BIRO HUKUM SETDA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												JAWA TIMUR
1.20.36 .001		Persentase ketepatan waktu pembentukan produk hukum Jawa Timur	60	%		11 3	%	188 ,33			Melebi hi Target	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.38 .	Program Profesionalism e bagi Aparat Hukum				2.612.999. 800				1.736.990. 982	66, 47		BIRO HUKUM SETDA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												JAWA TIMUR
1.20.38 .001		Persentase ketepatan waktu penanganan perkara	80	%		19 2,4	%	240 ,50			Melebi hi Target	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.80 .	Program Peningkatan Informasi dan				1.554.000. 000				1.509.614. 775	97, 14		BIRO HUKUM SETDA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
	Kesadaran Hukum											PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.80 .001		Persentase waktu upload produk hukum melalui website	75	%		11 8,4	%	157 ,87			Melebi hi Target	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.39 .	Program Koordinasi,				42.547.19 7.423			39.099.47 7.993	91, 90			BIRO ADMINISTR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian									ASI PEREKONO MIAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.39 .001		Rumusan dan Evaluasi Kebijakan	7	Dokumen		9	Dokumen	128 ,57		Melebi hi Target	BIRO ADMINISTR ASI PEREKONO MIAN SETDA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.84	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan			30.562.93 3.000			27.367.03 3.480	89, 54		BIRO ADMINISTR ASI PEMBANGU NAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.84		Prosentase	10	%		99,	%	99,		Tidak	BIRO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.001		Tingkat Pelayanan Administrasi Pembangunan	0			87		87		Meme nuhi Target	ADMINISTR ASI PEMBANGU NAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.91	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA				16.830.77 3.750			11.591.83 8.273	68, 87		BIRO ADMINISTR ASI SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
											JAWA TIMUR
1.20.91 .001		Rumusan dan Evaluasi Kebijakan (Dokumen)	7	Dokumen		5	Dokumen	71, 43		Tidak Meme nuhi Target	BIRO ADMINISTR ASI SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.81 .	Program Dukungan				10.056.75 0.000			9.718.860. 754	96, 64		BIRO ADMINISTR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat									ASI KESEJAHTER AAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.81 .001		Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan	10 0	%		96, 66	96, 66		Tidak Meme nuhi Target	BIRO ADMINISTR ASI KESEJAHTER AAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rakyat								RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.83	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan			23.476.92 3.190			22.032.11 8.107	93, 85		BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
											TIMUR
1.20.83 .001		Dukungan Layanan Lingkup Administrasi Kemasyarakata n	75	%			%				BIRO ADMINISTR ASI KEMASYAR AKATAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.85 .	Program Peningkatan				3.723.838. 000			2.955.253. 738	79, 36		BIRO HUMAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kualitas dan Penyebarluasa n Informasi									DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.85 .001		Prosentase tersebarluasnya informasi kehumasan dan keprotokolan (persen)	60	%		10 0	%	166 ,67		Melebi hi Target	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										TIMUR
1.20.86	Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi			11.502.18 0.000			10.392.32 2.865	90, 35		BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.86 .001		Persentase tersebar	96	%		96	%	100 ,00		Meme nuhi BIRO HUMAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		luasnya informasi ke masyarakat							Target	DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.87	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan			4.000.830. 000			3.739.612. 871	93, 47		BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												JAWA TIMUR
1.20.87 .001		Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan	88	%		90	%	102 ,27			Melebi hi Target	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.54 .	Program Penerapan				3.386.004. 000				3.154.056. 775	93, 15		BIRO ORGANISAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik											I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.54 .001		Persentase SAKIP Kab/Kota di Jatim yang berpredikat A (sangat baik)	40	%		0	%	0,0 0			Tidak Meme nuhi Target	BIRO ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.54 .002		Persentase SAKIP SKPD	60	%		42, 37	%	70, 62			Tidak Meme	BIRO ORGANISAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Prov. Jatim yang berpredikat A (sangat baik)							nuhi Target	I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.54 .003		Persentase SKPD Prov dan SKPD Kab/Kota yang memiliki KBK	10	%		82	%	820 ,00	Melebi hi Target	BIRO ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.73	Program				1.969.825.			1.722.538.	87,	BIRO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
.	Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				000				312	45		ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.73 .001		Persentase kelembagaan Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	10 0	%		79, 31	%	79, 31			Tidak Meme nuhi Target	BIRO ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.20.74	Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur				1.705.371. 000				1.675.330. 201	98, 24		BIRO ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.74 .001		Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab/Kota dan SKPD Prov.	20	%		36	%	180 ,00		Melebi hi Target		BIRO ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Jatim									
1.20.77	Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik			3.419.550. 000			2.983.103. 398	87, 24		BIRO ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.77 .001		Persentase Kab/Kota dan SKPD Prov yang telah menerapkan	10 0	%		10 0	%	100 ,00		Meme nuhi Target	BIRO ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ketatalaksana an pemerintah sesuai ketentuan									TIMUR
1.20.77 .002		Persentase Kab/Kota dan SKPD Prov yang telah menyusun SOP dan menerapkan Pelayanan	48	%		49	%	102 ,08		Melebi hi Target	BIRO ORGANISAS I SETDA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Prima									
1.20.93	Program Dukungan Pelayanan Umum			1.220.500. 000			1.175.609. 005	96, 32		BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.93 .001		Prosentase Komposisi Surat Masuk / Keluar Secara Online	10 0	%		99, 88	%	99, 88		Tidak Meme nuhi Target	BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												TIMUR
1.20.93 .002		Prosentase Pengiriman / Penerimaan RDG di Jawa Timur	10 0	%		99, 88	%	99, 88			Tidak Meme nuhi Target	BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.93 .003		Tercatatnya Nilai Aset yang dikelola di Lingkungan	10 0	%		10 0	%	100 ,00			Meme nuhi Target	BIRO UMUM SETDA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Setda									JAWA TIMUR
1.20.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				97.035.60 6.234			73.623.68 5.908	75, 87		SEKRETARIA T DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.15 .001		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang	4	Perda		12	Buah	300 ,00		Melebi hi Target	SEKRETARIA T DPRD PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah (Ranperda)									TIMUR
1.20.33	Program Penelitian dan Pengembang an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			21.575.50 0.000			21.279.97 4.457	98, 63			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.20.33 .001		Jumlah Penelitian yang dihasilkan	97	dokumen		96	dokumen	98, 97		Tidak Meme nuhi Target	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.71 .	Program Diseminasi Hasil Penelitian dan				1.363.300. 000			1.342.909. 440	98, 50		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengembanga n Serta Kajian									NGAN PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.71 .001		Persentase hasil penelitian dan pengembanga n serta kajian yang didiseminasika n langsung ke	35	%		44, 33	%	126 ,66		Melebi hi Target	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		masyarakat									
1.20.76	Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa Timur			461.700.0 00			402.531.4 90	87, 18		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.76 .001		Persentase Cakupan fasilitasi dalam	13	%		24	%	184 ,62		Melebi hi Target	BADAN PENELITIAN DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pelaksanakan SIDa Jatim								PENGEMBA NGAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan			1.937.010. 500			1.703.632. 219	87, 95		INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
	Kebijakan KDH											
1.20.20 .001		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	100	%		93,29	%	93,29			Tidak Memenuhi Target	INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur				1.219.199.000				1.164.985.265	95,55		INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
	Pengawasan											
1.20.21 .001		persentase aparatur pengawasan dengan nilai post test minimal 70	40	%		10 0	%	250 ,00			Melebi hi Target	INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.22 .	Program Penataan dan Penyempurna an Kebijakan Sistem dan				392.764.0 00				91.625.30 0	23, 33		INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Prosedur Pengawasan										
1.20.22 .001		Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan	2	buah		2	buah	100 ,00		Meme nuhi Target	INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.79 .	Program Pencegahan Korupsi				751.605.0 00			487.318.1 00	64, 84		INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
1.20.79 .001		Penilaian WBK, WBBM	2	SKPD		2	SKPD	100 ,00		Meme nuhi Target	INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.92 .	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan				11.911.71 0.000			10.787.74 8.602	90, 56		INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja										
1.20.92 .001		Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur	WT P			W DP				Tidak Meme nuhi Target	INSPEKTOR AT PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.17 .	Program Peningkatan				81.565.57 5.481			68.948.17 3.360	84, 53		DINAS PENDAPATA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah										N PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.17 .001		Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30, 48	%		32, 29	%	105 ,94		Melebi hi Target	DINAS PENDAPATA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.20.17 .002		Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan)Pa jak Kendaraan Bermotor (PKB)	40	%		45, 56	%	113 ,90			Melebi hi Target	DINAS PENDAPATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.17 .003		Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87, 50			88, 99		101 ,70			Melebi hi Target	DINAS PENDAPATA N PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
1.20.17 .004		Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan SMM ISO 9001-2008	1		2,0 0		200 ,00			Melebi hi Target	DINAS PENDAPATA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.17 .005		Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan	25		51, 93		207 ,72			Melebi hi Target	DINAS PENDAPATA N PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Samsat Unggulan								TIMUR
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah			34.945.77 4.250			30.660.75 4.203	87, 74		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.17 .001		Rancangan Peraturan	3	Perda		3	Perda	100 ,00		Meme nuhi BADAN PENGELOLA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Daerah (APBD, PAPBD, Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD)							Target	KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.17 .002		Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungja	3	Pergub	3	Pergub	100 ,00		Meme nuhi Target	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		waban Pelaksanaan APBD									JAWA TIMUR
1.20.17 .003		Jumlah sertipikat aset tetap tanah	15 0	Sertifikat		72 Sertifikat	48, 00			Tidak Meme nuhi Target	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.18	Program				4.642.302.			4.097.377.	88,		BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
.	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Ko ta				000				266	26		PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.18 .001		Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan APBD, P-APBD,	38	Kab./Kota		38	Kab./Kota	100 ,00			Meme nuhi Target	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim								PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.88	Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan			1.139.940. 000			1.138.944. 467	99, 91		KANTOR PERWAKILA N PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.20.88 .001		Prosentase layanan lingkup layanan kantor perwakilan	10 0	%		10 0	%	100 ,00			Meme nuhi Target	KANTOR PERWAKILA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.95 .	Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah				10.724.68 4.500				10.711.06 5.000	99, 87		KANTOR PERWAKILA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.95		Prosentase	10	%		10	%	100			Meme	KANTOR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
.001		pelaksanaan promosi potensi daerah	0			0		,00			nuhi Target	PERWAKILA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.96	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggara an Pemerintahan dan				3.286.955. 494				2.978.515. 995	90, 62	Progra m	BAKORWIL I MADIUNPR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
	Pembangunan											
1.20.96 .001		Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti	55	%		54	%	98, 18			Tidak Meme nuhi Target	BAKORWIL I MADIUNPR OVINSI JAWA TIMUR
1.20.97 .	Program pengembanga n Data Informasi				564.714.2 86				451.052.7 21	79, 87	Progra m	BAKORWIL I MADIUNPR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.20.97 .001		Prosentase jumlah keterisian data dan informasi	57	%		57	%	100 ,00			Meme nuhi Target	BAKORWIL I MADIUNPR OVINSI JAWA TIMUR
1.20.96 .	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggara an Pemerintahan				2.587.126. 000			2.312.887. 495	89, 40			BAKORWIL II BOJONEGO RO PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Pembangunan									
1.20.96 .001		Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti	50		10 0		200 ,00		Melebi hi Target	BAKORWIL II BOJONEGO RO PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.97 .	Program pengembang an Data			578.842.0 00			554.421.9 40	95, 78		BAKORWIL II BOJONEGO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Informasi									RO PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.97 .001		Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan	50		10 0		200 ,00		Melebi hi Target	BAKORWIL II BOJONEGO RO PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.20.96	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggara an Pemerintahan dan Pembangunan				2.604.396. 500			2.437.709. 302	93, 60		BAKORWIL III MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.96 .001		Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan	60	%		57, 58	%	95, 97		Tidak Meme nuhi Target	BAKORWIL III MALANG PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		monev yang ditindaklanjuti								TIMUR	
1.20.97	Program pengembang an Data Informasi			582.713.8 33			576.377.8 45	98, 91		BAKORWIL III MALANG PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.97 .001		Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang	62	%		42, 03	%	67, 79		Tidak Meme nuhi Target	BAKORWIL III MALANG PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		dilaksanakan									TIMUR
1.20.96	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggara an Pemerintahan dan Pembangunan			2.756.394. 048			2.272.867. 143	82, 46			BAKORWIL IV PAMEKASA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.96 .001		Prosentase (%) Jumlah	54, 5	%		54, 17	%	99, 39		Tidak Meme	BAKORWIL IV



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti							nuhi Target	PAMEKASA N PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.97	Program pengembang an Data Informasi			1.079.714. 286			1.042.981. 385	96, 60		BAKORWIL IV PAMEKASA N PROVINSI JAWA TIMUR	
1.20.97		Prosentase (%)	55	%		67,	%	122		Melebi	BAKORWIL



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.001		Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan				11		,02		hi Target	IV PAMEKASA N PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.41	Program Pembinaan dan Pengembang an Aparatur				3.886.653. 500			3.592.442. 785	92, 43		BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.41		Prosentase	10	%		10	%	100		Meme	BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.001		penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel	0		0		,00		nuhi Target	KEPEGAWAI AN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.94	Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur			6.858.628.880			5.920.508.446	86,32		BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												TIMUR
1.20.94 .001		Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan	10 0	%		70	%	70, 00			Tidak Meme nuhi Target	BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.97 .	Program pengembanga n Data Informasi				2.335.536. 000			2.226.129. 051	95, 32			BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												JAWA TIMUR
1.20.97 .001		Persentase database yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan	10 0	%		10 0	%	100 ,00			Meme nuhi Target	BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.50	Program				109.265.7				101.365.0	92,		BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.100				88.942	77		PENDIDIKA N DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.50 .001		% alumni Diklat Kepemimpinan ;	10 0	%		97, 05	%	97, 05			Tidak Meme nuhi Target	BADAN PENDIDIKA N DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
												TIMUR
		% alumni Diklat Teknis;	10 0	%		95, 82	%	95, 82			Tidak Meme nuhi Target	BADAN PENDIDIKA N DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR
		% alumni Diklat Fungsional;	10 0	%		98, 02	%	98, 02			Tidak Meme nuhi	BADAN PENDIDIKA N DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Target	PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.98	Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur			7.000.000. 000			4.819.222. 080	68, 85		BADAN PENDIDIKA N DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
1.20.98 .001		% Pemenuhan standart kompetensi aparatur	10 0	%		71, 37	%	71, 37			Tidak Meme nuhi Target	BADAN PENDIDIKA N DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.99 .	Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan				9.573.412. 125				8.447.967. 974	88, 24		SEKRETARIA T DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Ketera ngan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	unit KORPRI									JAWA TIMUR	
1.20.99 .001		Persentase pelaksanaan pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI	75	%		75	%	100 ,00		Meme nuhi Target	SEKRETARIA T DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI JAWA TIMUR
1.20.99 .002		prosentase layanan Dewan	70	%		70	%	100 ,00		Meme nuhi Target	SEKRETARIA T DEWAN PENGURUS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur bagi Anggota Aparatur Sipil Negara yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa								KORPRI PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Timur								

19. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.21.24.	Program			28.400.00			26.254.52	92,		BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Peningkatan Ketahanan pangan				0.000			0.571	45		KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.24.001		Ketersediaan Pangan Beras	7.741.873	(Ton)		7.439.770	(Ton)	96,10		Tidak Memenuhi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.24.002		Ketersediaan Pangan	6.346.034	(Ton)		5.342.606	(Ton)	84,19		Tidak Memenuhi	BADAN KETAHANAN PANGANPR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jagung (Ton)							Target	OVINSI JAWA TIMUR
1.21.24.003		Ketersediaan Pangan Kedelai (Ton)	439.137	(Ton)		317.086	(Ton)	72,21	Tidak Memenuhi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.24.004		Ketersediaan Pangan Daging	349.945	(Ton)		184.284	(Ton)	52,66	Tidak Memenuhi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		(Ton)									JAWA TIMUR
1.21.24.005		Ketersediaan Pangan Telur (Ton)	337.599	(Ton)		323.221	(Ton)	95,74		Tidak Memenuhi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.24.006		Ketersediaan Pangan Susu (Ton)	406.178	(Ton)		671.520	(Ton)	165,33		Melebihi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
											TIMUR	
1.21.24. 007		Ketersediaan Pangan Ikan (Ton)	1.389. 298	(Ton)		742.39 3	(Ton)	53,4 4			Tidak Memenuhi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.24. 008		Ketersediaan Pangan Gula (Ton)	1.336. 770	(Ton)		1.232. 090	(Ton)	92,1 7			Tidak Memenuhi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	
1.21.24.009		Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen (%)	8	%		4	%	200,00			Melebihi Target	BADAN KETAHANAN PANGAN PR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.24.010		Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) (Ton)	200			203,78		101,89			Melebihi Target	BADAN KETAHANAN PANGAN PR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.21.24.011		Stabilnya harga pangan (gabah) di tingkat produsen	3.700		4.660	125,95			Melebihi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.24.012		Penurunan wilayah rawan pangan (%)	2	%	3,39	%	169,38		Melebihi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.21.25.	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan				10.132.500.000			9.770.682.900	96,43		BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.25.001		Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi	325	(orang)		554,00	(orang)	170,46		Melebihi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.25.		Jumlah	396	kelom		376	kelom	94,9		Tidak	BADAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
002		kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok		pok		pok	5			Memenuhi Target	KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR
1.21.26.	Program Peningkatan Diversifikasi				21.942.170.000			21.433.315.962	97,68		BADAN KETAHANAN PANGANPR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Pangan										OVINSI JAWA TIMUR
1.21.26. 001		Skor PPH	83,3		82,7		99,2 8			Tidak Memenu hi Target	BADAN KETAHANAN PANGANPR OVINSI JAWA TIMUR



20. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.22.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			8.525.634.690			7.407.916.588	86,89		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR
1.22.17.001		Prosentase Desa/Kel. Yang telah menerapkan	75	%		78	%	104,00	Melebihi Target	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sistim Manajemen Perencanaa n Partisipatif (SMPP)								AT PROVINSI JAWA TIMUR
1.22.22.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA			9.385.604. 356			8.832.363. 794	94, 11		BADAN PEMBERDA YAAN MASYARAK AT PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.22.22.001		Jumlah Komunitas masyarakat yang mampu mendayagunakan dan memanfaatkan SDA dan TTG	50	(Komunitas)	70	(Komunitas)	140,00		Melebihi Target	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR
1.22.23.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat				14.906.154.161			14.144.272.124	94,89	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										PROVINSI JAWA TIMUR	
1.22.23. 001		Prosentase lembaga ekonomi desa yang terfasilitasi pengemban gan usahanya	6 0	%		58, 7	%	97,8 3		Tidak Memen uhi Target	BADAN PEMBERDA YAAN MASYARAK AT PROVINSI JAWA TIMUR
1.22.24.	Program Peningkatan				17.571.482 .646			14.489.965 .134	82, 46		BADAN PEMBERDA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan									YAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR	
1.22.24.001		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif	60	%		88	%	146,67		Melebihi Target	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR



21. URUSAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.24.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				1.644.502. 500				1.641.536. 140	99, 82		BADAN PERPUSTAK AAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.24.15. 001		Jumlah SDM Pengelol a Kearsipa	120	orang		113	orang	94,1 7			Tidak Memenu hi Target	BADAN PERPUSTAK AAN DAN KEARSIPAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		n (orang)								JAWA TIMUR	
1.24.15.002		Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku (SKPD)	10	SKPD		10	SKPD	100,00		Memenuhi Target	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.24.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip				3.705.497.500			3.686.221.842	99,48		BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
	Daerah											PROVINSI JAWA TIMUR
1.24.16.001		Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi	6	daftar inventaris		6	daftar inventaris	100,00			Memenuhi Target	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.24.18.	Program Peningkatan Kualitas				1.700.000.000				1.687.804.010	99,28		BADAN PERPUSTAKAAN DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pelayanan Informasi (Kearsipan)									KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR	
1.24.18.001		Indeks kepuasan masyarakat layanan kearsipan	77,85	%		78,02	%	100,22		Melebihi Target	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

22. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSAN A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.25.25.	Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			2.566.375. 000			2.215.141. 287	86, 31		DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.25.25. 001		Jumlah Telecenter yang terbangun	8	unit		8	unit	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
										PROVINSI JAWA TIMUR	
1.25.26.	Program Pengembangan Teknologi Informatika			8.310.625. 000			8.198.165. 012	98, 65		DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.25.26. 001		Jumlah SKPD yang terlayani Data Center	56	SKPD		56	SKPD	100, 00		Memenu hi Target	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
										TIKA PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.27.	Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)			1.420.625.000			1.283.655.557	90,36		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.27.001		Jumlah pemeliharaan jaringan	4	SKPD		4	SKPD	100,00	Memenuhi Target	DINAS KOMUNIKASI DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
		TIK skpd prov jatim								INFORMA TIKA PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.28.	Program Pos dan Telekomunikasi			925.000.0 00			900.164.3 48	97, 32		DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.28. 001		Jumlah Ijin Penyelenggara	5	(izin)		5	(izin)	100, 00	Memenu hi	DINAS KOMUNIK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
		raan Pos							Target	ASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.30.	Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi				3.958.625.000			3.934.854.597	99,40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.30.		Jumlah	12	(jenis)		12	(jenis)	100,	Memen	DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
001		layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat					00			uhi Target	KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.31.	Program Fasilitas Komisi Informasi Provinsi			2.244.500. 000			2.174.057. 765	96, 86			DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1.25.31. 001		persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap sengketa informasi (%)	10 0	%		95 %	95,0 0		Tidak Memenu hi Target	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.25.33.	Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi				2.313.875. 000			2.275.820. 421	98, 36		DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
										TIMUR	
1.25.33.001		Jumlah lembaga komunikasi dan informasi yang diberdayakan	150	(kelompok)	150	(kelompok)	100,00		Memenuhi Target	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR	
1.25.32.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran				1.044.975.000			1.016.248.600	97,25		SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
										(KPID) PROVINSI JAWA TIMUR	
1.25.32.001		Persentase tindak lanjut materi penyiaran terhadap jumlah pengaduan	100	%		100	%	100,00		Memenuhi Target	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.34.	Program Fasilitas				1.685.025.			1.583.245.	93,		SEKRETARI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA A		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
	KPID				000				003	96		AT KOMISI PENYIARA N INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI JAWA TIMUR
1.25.34. 001		Persentase cakupan fasilitasi KPID Jatim	10 0	%		10 0	%	100, 00			Memenu hi Target	SEKRETARI AT KOMISI PENYIARA N INDONESIA DAERAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
										(KPID) PROVINSI JAWA TIMUR

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.26.15.	Program Pengembangan			30.039.620.000			29.603.930.879	98,55		BADAN PERPUSTAKA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									AN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.26.15.001		Indeks Minat dan Budaya Baca (indeks)	58		65,25	112,50			Melebihi Target	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
1.26.15.002		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5		80,33	101,04			Melebihi Target	BADAN PERPUSTAKAAN DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		at (indeks)								KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

24. URUSAN PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.01.19.	Program			85.483.747			72.216.900	84,		DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				.400			.495	48		PERTANIANPRO VINSI JAWA TIMUR
2.01.19.001		Jumlah produksi Padi (Ton)	12.863.245	(Ton)		13.054.511	(Ton)	101,49		Melebihi Target	DINAS PERTANIANPRO VINSI JAWA TIMUR
2.01.19.002		Jumlah produksi Jagung (Ton)	7.167.301	(Ton)		6.038.433	(Ton)	84,25		Tidak Memenuhi Target	DINAS PERTANIANPRO VINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.01.19.003		Jumlah produksi Kedelai (Ton)	480.148	(Ton)	350.066	(Ton)	72,91		Tidak Memenuhi Target	DINAS PERTANIANPROVINSI JAWA TIMUR
2.01.19.004		Jumlah produksi Sayuran (Ton)	1.989.782	(Ton)	1.468.733	(Ton)	73,81		Tidak Memenuhi Target	DINAS PERTANIANPROVINSI JAWA TIMUR
2.01.19.005		Jumlah Produksi Buah-buahan (Ton)	3.859.884	(Ton)	2.874.749	(Ton)	74,48		Tidak Memenuhi Target	DINAS PERTANIANPROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.01.40.	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian			56.217.687.600			45.525.878.351	80,98		DINAS PERTANIANPRO VINSI JAWA TIMUR
2.01.40.001		persentase nilai tambah usaha tani tanaman pangan (padi)	64,72	%		64,72	%	100,00	Memenuhi Target	DINAS PERTANIANPRO VINSI JAWA TIMUR
2.01.43.	Program Peningkatan Kapasitas SDM			14.458.565.000			12.808.770.183	88,59		DINAS PERTANIANPRO VINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Non Aparatur Pertanian									TIMUR	
2.01.43.001		Jumlah kelompok petani yang menerapkan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (Kelompo	11,92	%		28,3	%	237,42		Melebihi Target	DINAS PERTANIANPROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		k)									
2.01.38.	Program peningkatan Produksi Perkebunan				86.463.276 .000			72.937.742 .873	84, 36		DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA TIMUR
2.01.38.001		Produksi tanaman perkebunan Tebu (Ton)	1.350.000	(Ton)		1.217.333	(Ton)	90,17		Tidak Memenuhi Target	DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA TIMUR
2.01.38.002		Produksi tanaman perkebunan Kopi	60.000	(Ton)		60.914	(Ton)	101,52		Melebihi Target	DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		(Ton)								TIMUR		
2.01.38.003		Produksi tanaman perkebunan Kakao (Ton)	40.000	(Ton)		32.482	(Ton)	81,21		Tidak Memenuhi Target	DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA TIMUR	
2.01.41.	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan				18.620.739.000				15.097.048.332	81,08		DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA TIMUR
2.01.41.001		Prosentase peningkatan	3,47	%		3,91	%	112,68		Melebihi Target	DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		an nilai tambah komoditi perkebunan (kopi arabika)								TIMUR
2.01.41.002		Prosentase peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan (kakao)	1,59	%	1,67	%	105,03		Melebihi Target	DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.01.44.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan			4.738.885.000			3.958.416.113	83,53		DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA TIMUR
2.01.44.001		Persentase peningkatan pemberdayaan petani perkebunan	5	%		5	%	100,00	Memenuhi Target	DINAS PERKEBUNANP ROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.01.39.	Program peningkatan Produksi Peternakan				142.719.59 5.000				130.048.50 0.451	91, 12	DINAS PETERNAKANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.01.39.001		Produksi Daging (Ton)	401.203	(Ton)		391.972	(Ton)	97,70		Tidak Memenuhi Target	DINAS PETERNAKANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.01.39.002		Produksi Telur (Ton)	356.079	(Ton)		442.312	(Ton)	124,22		Melebihi Target	DINAS PETERNAKANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.01.39.		Produksi	433.92	(Ton)		453.57	(Ton)	104,		Melebi	DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
003		Susu (Ton)	6	n)		7	n)	53		hi Target	PETERNAKANPR OVINSI JAWA TIMUR	
2.01.42.	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan				6.794.660.000				6.342.428.189	93,34		DINAS PETERNAKANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.01.42.001		Persentase nilai tambah produk peternakan (daging	22	%		27	%	122,73		Melebihi Target	DINAS PETERNAKANPR OVINSI JAWA TIMUR	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sapi)								
2.01.45.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan			28.943.550 .000			28.163.153 .825	97, 30		DINAS PETERNAKANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.01.45.001		Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas	57		57	100, 00			Memenuhi Target	DINAS PETERNAKANPR OVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kemampuan kelompok								

25. URUSAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.02.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				23.597.931 .581			19.555.744 .178	82, 87		DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.02.15. 001		Produksi Kayu Hutan Negara	400.0 00	(m 3)		355.920 ,06	(m 3)	88,9 8		Tidak Memenu hi Target	DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.02.15. 002		Produksi Getah Pinus (ton)	30.00 0	(Ton)		40.806, 87	(Ton)	136, 02		Melebi hi Target	DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikato r Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
2.02.15. 003		Produks i Getah Damar (ton)	200	(To n)		167,56	(To n)	83,7 8		Tidak Memenu hi Target	DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.02.15. 004		Produks i Daun Kayu Putih (ton)	14.00 0	(To n)		12.826, 97	(To n)	91,6 2		Tidak Memenu hi Target	DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.02.15.		Produks	2.000	(To		2.000	(To	100,		Memenu	DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikato r Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
005		i Porang (Ton)		n)		n)	00			uhi Target	KEHUTANANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.02.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan				13.352.464 .000			12.494.621 .565	93, 58		DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.02.17. 001		Reboisa si kawasa n	450	Ha		650	Ha	144, 44		Melebihi Target	DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Tahura R. Soerjo (Ha)									TIMUR
2.02.23.	Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan				1.666.570. 419			1.404.695. 182	84, 29		DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA TIMUR
2.02.23. 001		Rehabili tasi kawasa n hutan	10.00 0	Ha		24.660, 40	Ha	246, 60		Melebi h Target	DINAS KEHUTANANPR OVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikato r Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ha)								TIMUR

26. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteranga n	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.25.	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan			5.305.000.000			4.577.826.676	86,29		DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR
2.03.25.001		Rasio ketersediaan listrik (%)	72,53	%		%				DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteranga n	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.25.00 2		Persentase rumah tangga (RT) yang menggunaka n listrik (%)	99,6 1	%		%				DINAS ENERGI DAN SUMBERDAY A MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR
2.03.27.	Program Pengelolaan Air Tanah				4.200.000.0 00			3.442.202.5 52	81,9 6	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAY A MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.27.00 1		Jumlah sumur bor di daerah sulit air	5							DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR
2.03.28.	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi			2.800.000.000			2.182.925.552	77,96		DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Progr am Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteranga n	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerj a	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.28.00 1		Jumlah Rekomendas i Hasil Kajian Geologi	24							DINAS ENERGI DAN SUMBERDAY A MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR
2.03.29.	Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas			4.550.000.0 00			3.153.462.3 27	69,3 1		DINAS ENERGI DAN SUMBERDAY A MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.29.001		Pertambahan tanpa ijin (ha)	200 ha							DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

27. URUSAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.04.1 5.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			9.663.500.000				9.159.221.980	94,78		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
2.04.1 5.001		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Orang)	344 511	orang		521 933	orang	15 1,50		Melebihi Target	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
2.04.1 6.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			13.285.330.000				13.082.117.415	98,47		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteranga n	SKPD PELAKSANA A	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JAWA TIMUR	
2.04.1 6.001		Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US\$)	244, 54	US\$		417	US\$	17 0,5 2		Melebihi Target	DINAS KEBUDAYA AN DAN PARIWISAT A PROVINSI JAWA TIMUR
2.04.1 6.002		Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB Jatim (%)	5	%		5,48	%	10 9,6 0		Melebihi Target	DINAS KEBUDAYA AN DAN PARIWISAT



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteranga n	SKPD PELAKSAN A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										A PROVINSI JAWA TIMUR
2.04.2 0.	Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata			7.020.0 00.000			6.827.372.0 67	97, 26		DINAS KEBUDAYA AN DAN PARIWISAT A PROVINSI JAWA TIMUR
2.04.2 0.001		Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih disektor	865	orang		137 1	oran g 15 8,5 0		Melebihi Target	DINAS KEBUDAYA AN DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteranga n	SKPD PELAKSANA A
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		formal dan non formal kepariwisataan (Orang)								PARIWISAT A PROVINSI JAWA TIMUR

28. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.05.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Program Pengembangan Perikanan Budidaya)				95.514.643.402				94.371.046.409	98,80		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.05.20.001		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.056.412	Ton		1.074.815,48	Ton	101,74			Melebihi Target	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.05.21.	Program				166.670.99				162.715.68	97,		DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengembangan Perikanan Tangkap				4.280			4.941	63		PERIKA NAN DAN KELAUT AN PROVIN SI JAWA TIMUR
2.05.21. 001		Produks i Perikan an	394.05 1,69	Ton		302.822, 4	Ton	76,8 5		Tidak Memen uhi Target	DINAS PERIKA NAN DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Tangka p (Ton)									KELAUT AN PROVIN SI JAWA TIMUR
2.05.31.	Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan				9.121.372.1 98			8.438.296.7 69	92, 51		DINAS PERIKA NAN DAN KELAUT AN PROVIN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										SI JAWA TIMUR
2.05.31. 001		Jumlah kelomp ok yang terakse s (kelomp ok)	5751	kelom pok	6230	kelom pok	108, 33		Melebi h Target	DINAS PERIKA NAN DAN KELAUT AN PROVIN SI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA		
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.05.32.	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau- pulau Kecil dan Pengawasan				23.548.703. 580				22.741.447. 138	96, 57		DINAS PERIKA NAN DAN KELAUT AN PROVIN SI JAWA TIMUR
2.05.32. 001		Rehabili tasi Mangro	45	Ha		45	Ha	100, 00			Memenu hi Target	DINAS PERIKA NAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ve (Ha)								DAN KELAUT AN PROVIN SI JAWA TIMUR	
2.05.32. 002		Rehabili tasi Terumb u Karang (Ha	8	Ha		8	Ha	100, 00		Memenu hi Target	DINAS PERIKA NAN DAN KELAUT AN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PROVIN SI JAWA TIMUR
2.05.33.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			41.880.852. 100			39.167.500. 051	93, 52		DINAS PERIKA NAN DAN KELAUT AN PROVIN SI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.05.33. 001		Persent ase nilai tambah produk perikan an	2	%		10	%	500, 00		Melebih i Target	DINAS PERIKA NAN DAN KELAUT AN PROVIN SI JAWA TIMUR
2.05.34.	Program Pemberdayaan Usaha Garam				4.090.000.0 00			3.983.972.9 00	97, 41		DINAS PERIKA NAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Rakyat										DAN KELAUT AN PROVIN SI JAWA TIMUR
2.05.34. 001		Produks i garam rakyat (Ribu Ton)	971	ribu Ton	1089	ribu Ton	112, 15			Melebi h Target	DINAS PERIKA NAN DAN KELAUT AN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKS ANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										PROVIN SI JAWA TIMUR

29. URUSAN PERDAGANGAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			42.125.770.000			34.476.068.751	81,84		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.06.15.001		Jumlah standarisasi mutu barang dan alat ukur (unit)	1.045.445	UTT P		1.840.771	UTT P	176,08	Melebihi Target	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										TIMUR	
2.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				23.816.026.000			19.834.682.612	83,28		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.06.18.001		Net Ekspor Perdagangan	93,13	Triliun Rp		99,83	Triliun Rp	107,19		Melebihi Target	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dalam Negeri (Trilyun Rupiah)									GAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.06.22.	Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor				19.819.942.000			16.921.131.947	85,37		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.06.22.		Net	-0,59	Mily		0,85	Mily	244,		Melebihi	DINAS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcom e)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
001		ekspor non migas (Milyar US\$)		ar US\$		ar US\$	07			i Target	PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GAN PROVINSI JAWA TIMUR

30. URUSAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan	SKPD
------	---------------	-----------	--------	-----------	------------	------



	Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program (Outcome)	Kinerja		Rp	Kinerja		%	Rp	%	gan	PELAKSANA
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
2.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				12.867.660.000				11.636.252.992	90,43		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.07.16.001		Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi untuk peningkatan	4.816	unit		1.593	unit	33,08			Tidak Memenuhi Target	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		an daya saing (unit)									TIMUR
2.07.18.	Program Penataan Struktur Industri				1.923.192.080			1.698.552.850	88,32		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.07.18.001		Luas kawasan industri	1.938	Ha		1.900	Ha	98,04		Tidak Memenuhi Target	DINAS PERINDUSTRIAN DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang terpakai (Ha)								PERDAGAN GAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.07.31.	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri			33.347.255. 500			31.063.770. 649	93, 15		DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GAN PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.07.31.001		Jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan teknis (unit)	10.008	IKM		2.974	IKM	29,72		Tidak Memenuhi Target	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.07.32.	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				5.995.064.000				4.925.620.317	82,16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										JAWA TIMUR	
2.07.32. 001		Jumlah IKM yang mendapat kan pembinaa n dan pelatihan (unit)	1.92 9	IKM		1.72 4	IKM	89,3 7		Tidak Memenu hi Target	DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.07.33.	Program Peningkatan Standarisasi				11.465.078. 000			10.276.314. 905	89, 63		DINAS PERINDUST RIAN DAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keteran gan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Industri									PERDAGAN GAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.07.33. 001		Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standardis asi industri (unit)	4.15 1	IKM		380 IKM	9,15		Tidak Memenu hi Target	DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GAN PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.07.34.	Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam			20.584.292.600			4.937.080.439	23,98		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	
2.07.34.001		Nilai produksi industri agro (Triliun Rupiah)	230,9	Triliun Rp		405,94	Triliun Rp	175,81		Melebihi Target	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										JAWA TIMUR

31. URUSAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.08.18.	Program Ketransmigrasian			4.752.575.300			4.523.893.195	95,19		DINAS TENAGA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterangan	SKPD PELAKSANA	
			Kinerja	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
										KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR	
2.08.18.0 01		% penempatan transmigran yg telah mendapat pelatihan (KK)	64	%		53,6	%	83,86		Tidak Memenuhi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prog ram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA	
			Kinerj a	Rp	Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.08.18.0 02		% transmigran yg berhasil meningkatk an taraf ekonomi dan sosial (KK)	62	%		82	%	132,2 6		Melebihi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRA SI DAN KEPENDUDUK AN PROVINSI JAWA TIMUR
2.08.18.0 03		% Penduduk potensial yang mendapatk an	40	%		65,8	%	164,7 0		Melebihi Target	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRA SI DAN KEPENDUDUK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Prog ram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target		Realisasi				Keterang an	SKPD PELAKSANA
			Kinerj a	Rp	Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		pelatihan								AN PROVINSI JAWA TIMUR



2.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Pembangunan Jawa Timur tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Jawa Timur 2014-2019. Kinerja pembangunan tahun 2015 diukur berdasarkan capaian pada 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana termuat dalam RPJMD, yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Kualitas Air Sungai (BOD dan COD).

Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ditetapkan, terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial akibat dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut juga berimbas di Jawa Timur, sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan sebagaimana dimaksud, maka telah ditentukan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.81
Matrik Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama		Target					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,56 - 6,87	6,88 - 7,19	7,20 - 7,49	7,5 - 8,00	8,01 - 8,10	8,11 - 8,20
2	Indeks Gini	0,363 - 0,360	0,359 - 0,356	0,355 - 0,352	0,351 - 0,348	0,347 - 0,344	0,343 - 0,340
3	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah)	20,41 - 20,75	20,76 - 20,89	20,90 - 20,95	20,96 - 21,01	21,02 - 21,08	21,09 - 21,14



Indikator Kinerja Utama		Target					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,72 - 12,22	12,21 - 11,73	11,72 - 11,22	11,21 - 10,71	10,70 - 10,20	10,19 - 9,69
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,32 - 4,23	4,22 - 4,13	4,12 - 4,03	4,02 - 3,93	3,92 - 3,83	3,82 - 3,73
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,15 - 73,45	73,46 - 73,76	73,77 - 74,07	74,08 - 74,38	74,39 - 74,69	74,70 - 75,00
7	Indeks Pembangunan Gender	67,18 - 67,78	67,79 - 68,39	68,40 - 69,00	69,01 - 69,61	69,62 - 70,22	70,23 - 70,83
8	Kualitas Air Sungai						
	a. BOD (mg/l)	3,59 - 3,57	3,58 - 3,56	3,57 - 3,55	3,56 - 3,54	3,55 - 3,53	3,54 - 3,52
	b. COD (mg/l)	10,91 - 10,86	10,87 - 10,83	10,84 - 10,80	10,81 - 10,77	10,78 - 10,74	10,75 - 10,71

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Jawa Timur lima tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Di samping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur diupayakan mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, perubahan teknologi, kewirausahaan dan kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI Rate), dan kebijakan pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak serta perkembangan situasi perekonomian global. Dalam sistem ekonomi terbuka seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi tidak saja dipengaruhi oleh kinerja internal perekonomian wilayah Jawa Timur, namun juga ditentukan kinerja ekonomi eksternal. Ketika perekonomian global bergejolak maka akan berimbas pada seluruh wilayah, termasuk Jawa Timur.

Tabel 2.82
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

No	Pertumbuhan Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Nasional	6,17	6,03	5,58	5,02	4,79
2	Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir (tahun 2011-2015) berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2011 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 6,44 persen, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 6.64 persen dan turun kembali pada tahun 2013 menjadi 6,08 persen.

Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 5,86 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015 berada pada level 5,44 persen, lebih tinggi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai angka 4,79 persen.



Capaian pertumbuhan ekonomi 2015 memang lebih lambat dibanding target dalam RPJMD, hal ini karena asumsi yang digunakan didalam perencanaan tersebut sudah mengalami perubahan yang signifikan. Pada saat RPJMD dirancang indikasi terjadinya perlambatan sudah mulai terlihat, namun dengan optimisme membaiknya perekonomian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diharapkan mengalami percepatan. Namun yang terjadi adalah belum membaiknya perekonomian global dan nasional yang berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan perubahan asumsi dasar makro ekonomi global yang sedang bergejolak maka ditetapkanlah revisi perubahan target pertumbuhan ekonomi tahun berjalan dari dokumen RKPD.

b. Indeks Gini

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Indeks gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat 3 kelompok ketimpangan, tinggi jika nilai koefisien gini 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,3-0,5 dan rendah jika kurang dari 0,3.

Tabel 2.83
Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Jawa Timur
Tahun 2011-2015

Tahun	Status Wilayah	Gini Rasio Jawa Timur	Gini Rasio Nasional
2011	Kota	0.38	0,38
	Desa	0.30	
	Kota+Desa	0.37	
2012	Kota	0.38	0,41
	Desa	0.27	



Tahun	Status Wilayah	Gini Rasio Jawa Timur	Gini Rasio Nasional
	Kota+Desa	0.36	
2013	Kota	0,39	0,41
	Desa	0,29	
	Kota+Desa	0,36	
2014	Kota	0.38	0,41
	Desa	0,31	
	Kota+Desa	0,37	
2015	Kota	0.43	0,40
	Desa	0,33	
	Kota+Desa	0,40	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2011 nilai indeks gini Jawa Timur sebesar 0,37, kemudian menunjukkan penurunan pada tahun 2012-2013 yaitu masing-masing 0,36 dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 0,37. Dan terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,40 pada tahun 2015. Namun demikian, termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (antara 0,3- 0,5).

Melebarnya indeks Gini pada periode tahun 2015 perlu dicermati bersama. Jika dilihat dari sisi kewilayahan, ternyata pelebaran indeks Gini terjadi di daerah perkotaan dari 0,39 (Maret 2014) menjadi 0,44 (Maret 2015). Sedangkan di pedesaan ketimpangan relatif stabil. Ini mengindikasikan pendapatan penduduk di pedesaan cenderung lebih merata dibanding perkotaan.

Salah satu faktor ketimpangan di perkotaan adalah penduduk usia kerja yang mengadu nasib di perkotaan dan belum terserap di lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan yang sangat nyata. Perkotaan merupakan wilayah favorit bagi semua orang untuk mencari pekerjaan. Wajar, jika di perkotaan tingkat penganggurannya umumnya lebih tinggi dibanding pedesaan.

Dari sisi ketenagakerjaan tercatat bahwa jumlah tenaga kerja di beberapa sektor ekonomi selama tahun 2015 banyak yang mengalami



penurunan. Seperti tenaga kerja di sektor pertanian turun -2,45 persen, pertambangan dan penggalian (-12,23 persen), industri (-2,77 persen), LGA (-18,5 persen), pengangkutan dan komunikasi (-7,40 persen) dan perbankan (-2,58 persen). Dari data Susenas berkurangnya tenaga kerja di sektor strategis seperti industri, pengangkutan dan komunikasi, pertambangan dan penggalian sebagian besar tertampung di sektor konstruksi yang mengalami kenaikan sebesar 19,90 persen, dan sebagian besar mereka adalah tenaga lepas dengan upah yang sangat rendah, kondisi ini juga bisa menyebabkan indeks Gini semakin melebar.

c. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen ke bawah, 40 persen menengah dan 20 persen ke atas. Jika distribusi pengeluaran penduduk berkategori 40 persen ke bawah adalah kurang dari 17 persen, maka wilayah tersebut dikatakan mempunyai ketimpangan pemerataan pendapatan yang tinggi, artinya kue ekonomi dalam wilayah itu tidak banyak dinikmati oleh masyarakat berpendapatan 40 persen ke bawah.

Tabel 2.84
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk
Jawa Timur Tahun 2011-2014

Tahun	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
2011	21,09	38,57	40,34
2012	20,15	34,38	45,47
2013	19,82	34,55	45,63
2014	18,63	35,22	46,15
2015	18,77	36,05	45,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pengukuran pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, menunjukkan bahwa kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori



pendapatan 20 persen ke atas pada tahun 2011 sebesar 40,34 persen, meningkat menjadi 46,15 persen pada tahun 2014, dan sedikit menurun sebesar 45,18 persen tahun 2015. Untuk kelompok pendapatan 40 persen menengah pada tahun 2011 sebesar 38,57 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 35,22 persen, sedang tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 36,05 persen. Selanjutnya 40 persen terbawah di Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 21,09 persen, kemudian menurun menjadi 18,63 persen pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan sebesar 18,77 persen tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ketimpangan pendapatan 40 persen terendah yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2015 termasuk kategori rendah.

Jika ditelaah lebih mendalam, data Susenas 2015 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita 40 persen penduduk bawah (menurut pendapatannya) mengalami kenaikan hanya 10 persen atau dari Rp. 314.148 (2014) menjadi Rp. 344.838 (2015). Sementara untuk rata-rata pengeluaran per kapita 20 persen penduduk atas (menurut pendapatannya) mengalami kenaikan 30 persen. Ini menunjukkan kenaikan pendapatan 20 persen penduduk atas, jauh lebih cepat atau tiga kali dibanding 40 persen penduduk bawah, dengan demikian jarak pendapatan tersebut semakin melebar. Namun demikian perlu digaris bawahi, pada kelompok penduduk 40 kebawah masih ada kenaikan pengeluaran perkapita sebesar 10 persen, artinya ada perbaikan tingkat kesejahteraan pada kelompok tersebut.

d. Tingkat Kemiskinan (%)

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan. Upaya tersebut diantaranya mengurangi penduduk miskin dengan meningkatkan tingkat kesejahtraannya.



Tabel 2.85
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase (%)	13,85	13,08	12,73	12,28	12,28
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	5.251,45	4.992,75	4.893,01	4.784,42	4.775,97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2011-2015 menunjukkan tren penurunan. Jumlah penduduk miskin nampak terjadi penurunan dari 13,85 persen pada tahun 2011 menjadi 12,28 persen pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 5,25 juta orang. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2015 yang berjumlah 4,77 juta orang, berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 475 ribu orang. Turunnya persentase penduduk miskin selama periode tahun 2011-2015, sebagai wujud upaya keras Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan memberikan kontribusi penurunan kemiskinan dengan tetap meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

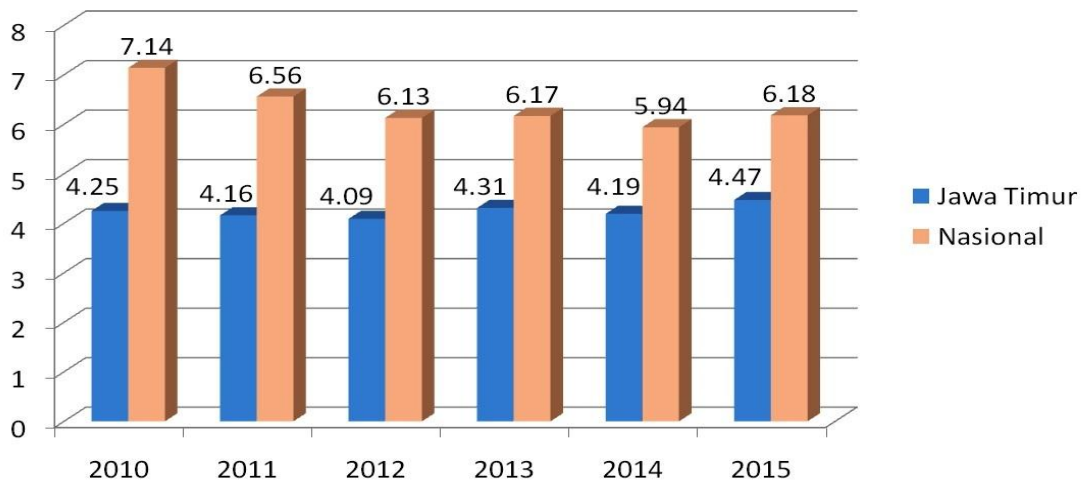
Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode tahun 2010-2012 menunjukkan tren penurunan yaitu dari 4,25 persen tahun 2010 menjadi 4,09 persen tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 4,30 persen dan tahun 2014 menurun kembali menjadi



4,19 persen. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja, pada tahun 2010 mencapai 19,52 juta orang, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 20,14 juta orang dan meningkat lagi bulan Agustus tahun 2015 menjadi 40,47 % atau 20.274,680 orang.

GAMBAR 2.15
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Di Jawa Timur Tahun 2010-2015



Sumber : BPS Prov Jatim

f. Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM adalah indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup. Pada tahun 2015, IPM dihitung dengan menggunakan metode baru.

Perubahan mendasar perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menggantikan indikator

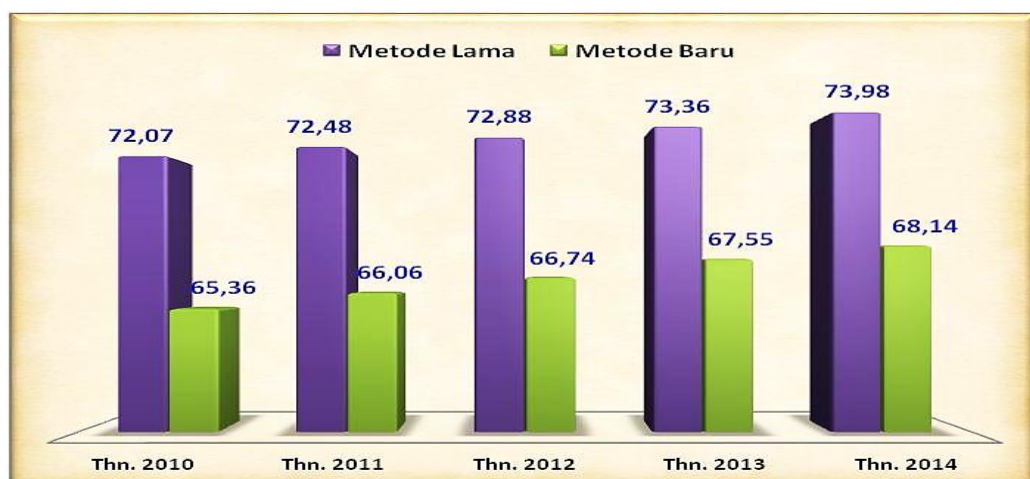


Angka Melek Huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup. Selain merupakan kesepakatan global, metode baru ini diharapkan dapat memotret perkembangan pembangunan manusia dengan lebih tepat. Peningkatan IPM di Jawa Timur mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.

Secara umum angka IPM di Jawa Timur selama periode 2011-2014 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2011 angka IPM sebesar 66,06, dan selanjutnya meningkat 66,74 (2012); 67,55 (2013). Di tahun 2014, melalui metode penghitungan baru ini, secara keseluruhan komponen IPM di Jawa Timur mengalami peningkatan sehingga berdampak positif terhadap capaian IPM menjadi 68,14. Yang terdiri dari : Indeks Kesehatan tahun 2014 mencapai 0,78 meningkat 0,01 poin dibandingkan di tahun 2013, Indeks Pendidikan tahun 2014 mencapai 0,58 meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun 2013, Indeks Purchasing Power Parity (PPP – daya beli) tahun 2014 mencapai 0,70 dibandingkan tahun 2013.

Kenaikan IPM ini diantaranya disebabkan oleh adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana lainnya. Keberhasilan program juga tergantung pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

Gambar 2.16
IPM Jawa Timur Tahun 2010-2014 Metode Lama dan Baru



Gambar 2.17
Komponen IPM Jawa Timur Tahun 2010-2014 Metode Baru

Tahun	Indeks Kesehatan	Tahun	Indeks Pendidikan	Tahun	Indeks Daya beli
2010	0,77	2010	0,54	2010	0,67
2011	0,77	2011	0,55	2011	0,68
2012	0,77	2012	0,55	2012	0,70
2013	0,77	2013	0,57	2013	0,70
2014	0,78	2014	0,58	2014	0,70

g. Indeks Pembangunan Gender

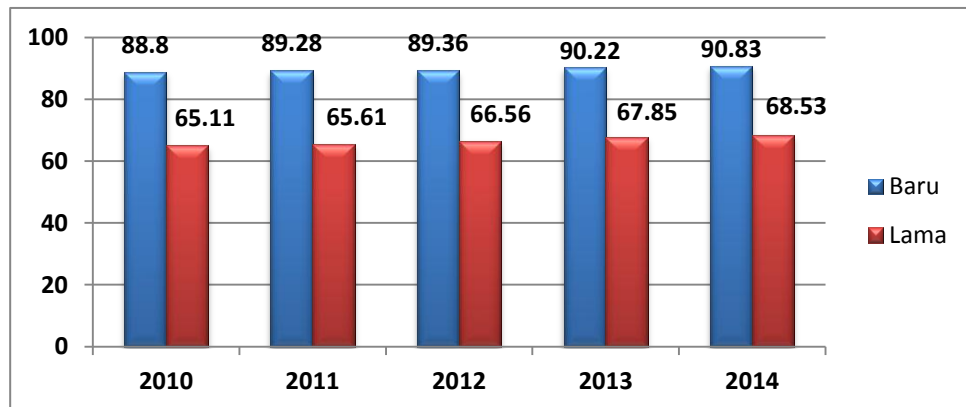
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Ukuran yang dipakai untuk menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat terjelaskan.

Indeks pembangunan gender (IPG) dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2010-2014, dimana berturut-turut mencapai 65,11 (2010); 65,61 (2011); 66,56 (2012); 67,16 (2013) dan 68,53 (2014). Sedangkan jika menggunakan metode baru, capaian IPG Jawa Timur berturut-turut dari tahun 2010 s/d 2014 adalah 88,80; 89,28; 89,36; 90,22; dan 90.83.

Indeks pembangunan gender (IPG) dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2010-2014, dimana berturut-turut mencapai 65,11 (2010); 65,61 (2011); 66,56 (2012); 67,16 (2013) dan 68,53 (2014). Sedangkan jika menggunakan metode baru, capaian IPG Jawa Timur berturut-turut dari tahun 2010 s/d 2014 adalah 88,80; 89,28; 89,36; 90,22; dan 90.83.



Gambar 2.18
IPG Jawa Timur Tahun 2010-2014 Metode Lama dan Baru



Sumber : BPS Pusat

Jika dilihat dari segi komponen IPG Tahun 2014, maka capaiannya adalah sebagai berikut AHH L: 68,56 P: 72,44; HLS = L: 12,6, P: 13,31; RLS = L: 7,69, P: 6,45; dan Pengeluaran = L: 14,287, P: 9,207.

Gambar 2.19
Komponen IPG Jawa Timur Tahun 2014 Metode Baru

Tahun	AHH		HLS		RLS		PPP	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2014	68,56	72,44	12,6	13,31	7,69	6,45	14,287	9,207

Sumber : BPS Pusat

Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program-program Pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.



h. Kualitas Air Sungai

Sesuai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat ± 1.004 buah dengan jumlah industri potensi pencemar ± 483 buah, dikali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, limbah pertanian dan sebagainya sebesar 10%. Terkait hal tersebut kondisi kualitas air belum mencapai baku mutu lingkungan yang ditetapkan, sehingga perlu adanya penurunan beban pencemar. konsentrasi BOD dan COD sebagai indikator perubahan kualitas air sungai di DAS Brantas. Kedua parameter ini dapat mewakili keterukuran cemaran material organik yang dihasilkan oleh berbagai jenis sumber pencemar seperti: domestik, industri, pertanian, dan kegiatan usaha lain. Semakin besar nilai BOD dan COD berarti semakin besar pula tingkat pencemarannya.

Tabel 2.86
Kualitas Air Sungai (BOD dan COD)

No	Kualitas Air Sungai (Mg/L)	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BOD (Biological Oxygen Demand)	4,41	4,33	3,60	4,27	4,14
2	COD (Chemichal Oxygen Demand)	15,45	13,64	10,92	12,45	11,88

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Selama periode 2011-2015, menunjukkan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi BOD dari 4,41 mg/l menjadi 4,14 mg/l dan COD dari 15,45 mg/l menjadi 11,88 mg/l. Jika dilihat dari konsentrasi BOD dan COD, dapat dicermati bahwa konsentrasi BOD dan COD pada tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun 2015, berarti bahwa terdapat penurunan kondisi kualitas air.

7) Indeks Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir



kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dimaksud tidak hanya terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya serius dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat akan merasa sejahtera, jika pembangunan yang terjadi memberikan implikasi pada tercapainya umur panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan ketentuan UNDP (*United Nation Development Program*), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan geometric mean. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM lebih rendah dibanding metode lama. Tetapi perlu diingat bahwa hasil penghitungan metode baru tidak bisa dibandingkan lagi dengan metode lama, karena sudah berbeda metodologi.

Tabel 2.87
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015*
Indeks Pembangunan Manusia	67,55	68,14	68,95

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket : *) Angka Sangat Sementara

Selama tiga tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan



tren yang menggembirakan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2013 sebesar 67,55 meningkat terus tiap tahun, hingga mencapai 68,14 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, angka IPM Jawa Timur meningkat kembali menjadi 68,95 (angka sangat sementara). Meningkatnya IPM ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat di Jawa Timur.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Oleh karena itu dan permasalahan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan tahun berjalan ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pendidikan

- 1) Angka Partisipasi Kasar SMP masih rendah dibanding rata-rata APK SMP Provinsi Jawa Timur, tingginya angka putus sekolah, faktor ekonomi orang tua rendah, perkawinan dini, maupun akibat dari keluarga kurang harmonis (broken home), Adanya daerah terpencil yang relatif sulit dijangkau, namun dengan jumlah penduduk yang sedikit
- 2) Angka melek huruf yang masih rendah, Data ABH tidak valid
- 3) Belum semua desa mempunyai pendidikan anak usia dini (PAUD), Kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD masih kurang, Kompetensi guru PAUD Non Formal yang masih rendah
- 4) Masih banyaknya ruang kelas yang rusak, dan jumlah ruang kelas tidak sebanding dengan rombongan belajar dan siswa, terutama terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), jumlah lembaga sekolah masih terbatas keberadaannya, belum semua memiliki Laboratorium (sains, komputer, dan bahasa), dan perpustakaan
- 5) Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan.
- 6) Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi serta belum semua memiliki sertifikat sebagai pendidik, Tenaga pendidik tidak sesuai bidang studi yang ditempuh dengan bidang studi yang diajarkan, Masih terdapat guru yang belum



berkualifikasi 'S-1/D4', dan sertifikat sebagai pendidik, Belum semua guru memiliki semangat mau mengabdikan di daerah terpencil/terisolir/jauh dari ibu kota kecamatan

- 7) Belum optimalnya pendataan terhadap semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah, Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus, Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga masyarakat belum mau mengirim anaknya yang cacat ke sekolah, Fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai;
- 8) Masih terjadi kesenjangan layanan pendidikan diniyah dengan pendidikan umum.
- 9) Belum optimalnya peran serta masyarakat dan orangtua sebagai supporting, controlling, dan advisory bagi pendidikan putra-putrinya
- 10) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pendidikan Keayah Bundaan
- 11) Kewenangan Pendidikan Menengah kembali menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Bidang Urusan Kesehatan

- 1) Belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, belum semua bayi memperoleh pelayanan neonatal (0-28 hari) secara memadai serta adanya penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian bayi
- 2) Adanya penolakan imunisasi dikarenakan masyarakat takut adanya efek samping vaksinasi dan ragu tentang kehalalan vaksin, Desa Non Universal Coverage Immunization (UCI) masih 111 Desa (30%)
- 3) ANC tidak sesuai standar sehingga kemungkinan deteksi dini terhadap penyakit tertentu tidak ditata laksana dengan baik, kurangnya pendampingan petugas terhadap bumil resiko tinggi di wilayah, kurang kepatuhan petugas terhadap SOP APN, terlambat penanganan di tempat rujukan karena diagnosis kurang tepat sehingga penanganan kurang memenuhi syarat
- 4) Masih adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Balita



- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang terdapat di desa (Ponkesdes, Poskesdes, Polindes)
- 6) Pola asuh orang tua tentang gizi yang kurang tepat
- 7) Belum semua masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- 8) Minimnya puskesmas, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling dalam kondisi baik
- 9) Masih Banyak Masyarakat yang tidak tercover BPJS Kesehatan (sebagai Penerima PBI) seperti Balita Gizi Buruk, bayi dari keluarga miskin, Pasung, PMKS.
- 10) Belum semua Pekerja Formal di Jawa Timur Tercover oleh Program Jaminan Sosial baik Kesehatan maupun ketenagakerjaan
- 11) Masih adanya beberapa daerah kumuh yang memiliki sanitasi buruk dengan sosialisasi dan fasilitasi pola hidup sehat.
- 12) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan produktif serta menjaga lingkungan terhadap timbulnya penyakit menular;
- 13) Masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki jamban sehat.
- 14) Belum optimalnya penanganan Penyakit menular yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta makin meningkatnya kasus penyakit degeneratif, terutama pada usia lanjut seiring dengan bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.
- 15) Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) khususnya untuk daerah yang menjadi endemic
- 16) Kasus HIV/AIDS yang meningkat secara signifikan di beberapa daerah
- 17) Belum adanya Data yang valid terkait berapa penderita HIV –AIDS
- 18) Masih belum maksimalnya program dan kegiatan dalam penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza)
- 19) Kurangnya tenaga medis dan paramedis (dokter, dokter spesialis, bidan, perawat)
- 20) Masih kurangnya sarana/prasarana kesehatan di puskesmas dan



jaringannya.

- 21) Sebagian besar Poskesdes masih berstrata pratama;
- 22) Sarana dan prasarana yang masih terbatas di tingkat poskesdes;

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kurangnya penambahan panjang jalan baru.
- 2) Penambahan kapasitas jalan melalui peningkatan struktur maupun peningkatan lebar jalan sudah tidak lagi mampu mengimbangi laju Pertumbuhan kendaraan di perkotaan, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas jalan melalui penambahan panjang jalan baru.
- 3) Kurang memadainya kapasitas jalan akses menuju kawasan bandara Abdulrachman Saleh dan pelabuhan utama maupun panjang Ramp/Exit Jalan Tol.
- 4) Beberapa Ramp/Exit Jalan Tol Surabaya-Mojokerto terlalu pendek sehingga berpotensi menimbulkan rugi ekonomi Jawa Timur akibat kemacetan.
- 5) Minimnya alokasi pendanaan dan penyelesaian pembebasan lahan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)
- 6) Kurangnya pembangunan Flyover dan Underpass untuk mengatasi kemacetan tengah kota
- 7) Kurangnya pembangunan drainase jalan
- 8) Kurangnya pembangunan Drainase Jalan dapat mempercepat kerusakan jalan akibat air yang tergenang maupun gerusan air yang mengalir
- 9) Meningkatnya laju erosi dan sedimentasi
- 10) Kekurangan ketersediaan air baku untuk keperluan domestik
- 11) Sulitnya penyelesaian pembebasan lahan pembangunan waduk pada lahan perhutani
- 12) Belum optimalnya pelayanan dan penyediaan air baku
- 13) Konflik masyarakat terhadap pengambilan air di sumber mata air
- 14) Kurangnya ketersediaan air khususnya pada musin kemarau
- 15) Tingginya volume air sumber yang terbuang terus menerus mengalir ke sungai
- 16) Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana sda di daerah hulu
- 17) Banjir dan longsor terjadi setiap tahun



- 18) Penanganan banjir bersifat parsial, sistem penanganan banjir terpadu belum optimal
- 19) Masih rendahnya Cakupan pelayanan dan fasilitas pelayanan air minum dan sanitasi
- 20) Keterbatasan sumber mata air dan semakin menurunnya kualitas sumber air
- 21) Masih lemahnya kelembagaan pengelola air minum dan sanitasi
- 22) Keterbatasan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
- 23) Belum optimalnya pendanaan untuk mendukung pembangunan air minum dan sanitasi
- 24) Masih rendahnya peran serta swasta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi
- 25) Belum terbatasnya pendataan dan teknologi informasi yang memadai
- 26) Kesenjangan Wilayah
- 27) Perencanaan Tata Ruang
- 28) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Kebutuhan rumah meningkat pesat, namun penyediaan tidak seimbang dengan permintaan (backlog).
- 2) Penyediaan rumah belum mencapai sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- 3) Desentralisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan
- 4) Kemampuan daya dukung lahan perkotaan menurun karena terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan
- 5) Terbatasnya lahan di perkotaan dan sulitnya memperoleh tanah dengan harga murah serta belum adanya mekanisme baru dalam pengendalian harga tanah
- 6) Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang perumahan dan permukiman
- 7) Belum adanya mobilisasi dana dan daya dunia usaha oleh masyarakat secara maksimal



5. Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- 1) Terbatasnya pedoman perencanaan responsif bencana
- 2) Belum terbangunnya persepsi tentang pentingnya penyusunan perencanaan yang peduli bencana
- 3) Kurangnya daerah Kabupaten / Kota yang menganggap perlu PERDA Penanggulangan Bencana.
- 4) Belum optimalnya penyebaran informasi tentang perlunya pembentukan Desa Tangguh
- 5) Belum tersusunnya rencana penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota di daerah rawan bencana
- 6) Belum terlatihnya aparat masalah Manajemen Logistik yang berbasis aplikasi
- 7) Pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana masih kurang
- 8) Sengketa berlatar belakang keyakinan, persaingan kelompok, masalah perburuhan, gesekan menjelang dan pasca PILKADA, menipisnya toleransi, sengketa pertanahan, pendirian tempat ibadah dilokasi mayoritas agama lain
- 9) Menurunnya pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan. semakin menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme, degradasi kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa,
- 10) Peredaran Miras, video porno, meningkatnya pengguna narkoba, kriminalitas, kurang berfungsinya linmas, PHK, banyaknya pelanggaran keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

6. Bidang Urusan Sosial

- 1) Masih besarnya jumlah PMKS utamanya 5 prioritas PMKS khususnya gelandangan, pengemis, gelandangan psykotik, anak jalanan dan WTS.
- 2) Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 3) Belum semua PMKS bisa tertangani, sesuai yang diharapkan disebabkan masih kurangnya aksesibilitas PMKS terhadap Pelayanan Sosial dasar
- 4) Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum menjangkau seluruh kasus



- 5) Masih banyaknya jumlah korban pasung dan penderita psikotik yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dan psikotik yang dipasung
- 6) Belum adanya pembagian tugas yang jelas untuk pelayanan mayat terlantar, gelandangan psykotik dan psykotik korban pasung dan penyandang HIV/AIDS
- 7) Terbatasnya daya tampung, kapasitas, serta permakanaan bagi klien di UPT Dinas Sosial, termasuk kondisi fisik Sarana dan Prasarana.
- 8) Tingkat kemiskinan di Jawa Timur tiap tahun mengalami penurunan namun cenderung mengalami perlambatan, masih Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Jawa Timur terutama di Madura dan beberapa daerah di Tapal kuda
- 9) Belum adanya sinkronisasi dan integrasi antara berbagai program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
- 10) Lemahnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar SKPD.
- 11) Banyaknya rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan.
- 12) Kurangnya sosialisasi Program perlindungan sosial yang meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).
- 13) Belum adanya pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan dari berbagai program perlindungan sosial (KIP, KIS dan KSKS)
- 14) Masih Banyak Masyarakat Jawa Timur yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- 15) Masih Banyak Masyarakat yang tidak terkover BPJS Kesehatan (sebagai Penerima PBI) seperti Balita Gizi Buruk, balita dari keluarga miskin, Pasung, PMKS.
- 16) Belum ada data yang valid terutama anak-anak yang tidak memiliki keluarga di Panti
- 17) Lemahnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar SKPD.
- 18) Masih Banyaknya rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan (KRTP)
- 19) Kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda antara satu kab/kota satu dengan lainnya.
- 20) Keterbatasan anggaran dalam penanggulangan kemiskinan.



- 21) Kenaikan harga BBM menyebabkan masyarakat dalam kategori tingkat kesejahteraan Desil 2 dan 3 (Hampir Miskin) menjadi miskin
- 22) Masyarakat dengan kategori hampir miskin lebih mudah jatuh miskin ketika terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti Sakit, PHK, bencana dan lain-lain.

7. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Terjadinya longsor dan banjir di beberapa wilayah Jawa Timur mengindikasikan masih adanya lahan kosong/kritis di dalam dan/atau luar kawasan hutan yang antara lain disebabkan oleh pembalakan liar dan alih fungsi lahan.
- 2) Kondisi DAS Brantas yang semula memiliki 1.577 sumber air dan yang berada di Malang Raya sejumlah 467, saat ini yang berfungsi hanya 230, serta yang berada di Kota Batu 118 yang berfungsi hanya 57 sumber air.
- 3) Tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama pada media air sungai utama Jawa Timur, yaitu Sungai Brantas, yang ditunjukkan oleh hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas pada Tahun 2014, khususnya pada parameter BOD yakni sebesar 4,27 mg/l yang berarti masih belum memenuhi baku mutu air kelas II yang dipersyaratkan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yakni sebesar 3 mg/l.
- 4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 5) Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Demikian juga Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), yang telah diturunkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2011 – 2020.
- 6) Adapun sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim juga telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim



(RAN API), yang juga perlu segera direspon dalam bentuk rumusan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim di tingkat Provinsi Jawa Timur.

8. Bidang Urusan Perhubungan

- 1) Lambatnya pembangunan sektor kereta api multimoda
- 2) Untuk meningkatkan daya saing distribusi logistik dibutuhkan integrasi antara Moda Kereta Api yang mempunyai efisiensi pemakaian BBM yang tinggi serta kapasitas daya angkut yang tinggi dengan Kapal Kontainer yang mampu melintasi samudera dengan kapasitas angkut yang tinggi
- 3) Kurangnya fasilitas keselamatan transportasi jalan, kereta api, angkutan perintis kepulauan dan bandara yang sudah beroperasi

9. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Minimnya pelatihan yang memicu kreatifitas dan inovasi pemuda, Belum terciptanya organisasi/kelompok pemuda yang kreatif dan mandiri, Belum optimalnya peran Pendidikan Nonformal dan Informal, Rendahnya daya saing tenaga kerja pemuda di pasaran dan dunia kerja, Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda
- 2) Pembentukan karakter dan kepribadian pemuda masih kurang optimal, Terbatasnya kegiatan yang terkait dengan kepemudaan, Masih banyak pengguna/pengedar narkoba dan miras yang belum terdeteksi, Masih Tingginya kasus Kenakalan remaja
- 3) Minimnya sarana prasarana olahraga, Minimnya jumlah pelatih yang profesional dan berlisensi, Belum adanya keterpaduan serta minimnya komunikasi dari masing-masing klub olah raga, Kurangnya penghargaan dan perhatian kepada atlit yang berprestasi

10. Bidang Urusan Penanaman Modal

- 1) Pemerataan investasi yang kurang merata terindikasi dari naiknya disparitas antar wilayah dari indicator Gini Ratio di tahun 2014 menjadi 0,40 (tahun 2013 : 0,37)
- 2) Belum optimalnya promosi investasi,
- 3) Belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi kabupaten / kota se Jawa Timur,
- 4) Masih lambatnya realisasi investasi (lag investasi)



11. Bidang Urusan Koperasi dan UMKM

- 1) Masih rendahnya daya saing produk UMKM
- 2) Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM
- 3) Belum optimalnya kelembagaan koperasi
- 4) Terbatasnya peran KUD dalam pengadaan pangan

12. Bidang Urusan Tenaga Kerja

- 1) Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan Pertambahan lapangan Kerja
- 2) Rendahnya kualitas dan ketrampilan Tenaga Kerja
- 3) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan terhadap ketersediaan lapangan kerja
- 4) Miss Match aturan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja
- 5) Masih rendahnya kemampuan dan Ketrampilan pencari kerja sehingga tidak mampu bersaing di bursa lokal, Nasional maupun Internasional
- 6) Kurangnya informasi pasar kerja dan rendahnya efektifitas bursa kerja karena lemahnya pendataan serta terbatasnya jaringan pelayanan bursa kerja
- 7) SDM angkatan kerja yang masih rendah, angkatan kerja mayoritas berpendidikan SD
- 8) Fungsi kelembagan industrial belum optimal
- 9) Tidak semua perusahaan mengikutkan karyawannya menjadi peserta BPJS.

13. Bidang Urusan Pangan

- 1) Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun), pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79), fluktuasi harga bahan pangan, masih adanya daerah / desa rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

14. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif; Masih kurangnya pelatihan keterampilan, motivasi dan peralatan bagi embrio kelompok usaha ekonomi produktif perempuan, Belum



semua masyarakat dan perempuan produktif terjangkau program peningkatan ketrampilan

- 2) Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Implementasi Peraturan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum Maksimal, Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak di segala sektor pembangunan, Belum optimalnya layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- 3) Belum optimalnya kelembagaan Pokja PUG dan PUHA (gugus tugas dan forum anak), Belum optimalnya penyusunan PPRG, belum semua SKPD menyusun data pilah sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan,
- 4) Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB belum optimal, Pola pikir tradisional yang di latarbelakangi oleh faktor keagamaan dan kultur budaya masyarakat berdampak kepada kurangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi, Rendahnya kesertaan ber-KB pria, Petugas KB sangat kurang, masih tingginya unmet need, Kurang maksimalnya konseling pada PUS yang belum ber-KB, Masih rendahnya keikutsertaan MKJP, Keluarga Pra-S dan KS I yang usia muda dengan anak lebih dari 2 masih mendapatkan kesempatan bantuan dan jaminan melahirkan dan pendidikan
- 5) Masih rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini,

15. Bidang Urusan Kebudayaan

- 1) Sangat terbatasnya cakupan sasaran pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok seni dan organisasi seni untuk mendorong kemandirian dan profesionalisme seniman dan lembaga seni, belum tergali dan terkelola secara optimal Peninggalan sejarah, seni dan budaya lokal/daerah, Belum adanya upaya dari kelompok, lembaga masyarakat maupun pemerintah untuk melindungi warisan seni/budaya bangsa/daerah,
- 2) Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan budaya daerah karena pengaruh budaya asing, dan lunturnya kearifan lokal, Masih terbatasnya SDM profesional dalam pengembangan kebudayaan.



16. Bidang Urusan Perpustakaan

- 1) Masih rendahnya budaya minat baca dan berkunjung ke perpustakaan
- 2) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai, serta masih kurangnya tenaga pustakawan yang profesional;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, kualitas pelayanan serta belum maksimalnya sarana dan prasarana Perpustakaan

17. Bidang Urusan Kearsipan

- 1) Rendahnya kualitas SDM tenaga Fungsional Arsiparis, masih kurangnya kesadaran/tertib SKPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen
- 2) Minimnya sarana & prasarana pendukung Arsip, belum tersedianya tanah untuk bangunan depo arsip daerah
- 3) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal, belum tersedianya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

18. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah, utamanya yang bernilai ekonomis tinggi;
- 2) Harga pakan pabrikan tinggi;
- 3) Masih ada sarana dan prasarana pelabuhan yang belum dapat dioperasikan secara optimal karena belum sempurna;
- 4) Terbatasnya ketersediaan bahan baku
- 5) Mutu hasil tangkapan masih rendah
- 6) Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal;
- 7) Produktivitas Garam masih rendah
- 8) BBM bersubsidi belum lancar distribusinya
- 9) SDI Menurun, utamanya di PANTURA Jawa Timur
- 10) Tingginya tingkat abrasi pantai
- 11) Masih sering terjadi pengrusakan wilayah pesisir dan sumber daya ikan oleh masyarakat;
- 12) Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
- 13) Masih belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan dan kelautan



- 14) Masih maraknya kegiatan IUU Fishing
- 15) Degradasi lingkungan wilayah pesisir

19. Bidang Urusan Pariwisata

- 1) Belum adanya gedung untuk pelatihan peningkatan ekonomi kreatif di candrawilwatikta, serta belum optimalnya pemasaran produk yang dihasilkan
- 2) Belum optimalnya Even wisata maupaun festival seni budaya unggulan yang bisa dilaksanakan secara kontinyu dan bisa menarik wisatawan asing dan domestik, Belum terjalin dengan baik hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan biro-biro perjalanan wisata, Pengelolaan pariwisata yang ada belum optimal, Belum terintegrasikannya berbagai program untuk mencapai layanan sektor kepariwisataan.
- 3) Fasilitas Umum Pariwisata yang masih minim, Masih adanya sengketa lahan objek wisata yang akan dibangun dan dikelola pemerintah, Belum terpetakannya penataan tempat Pariwisata yang strategis

20. Bidang Urusan Pertanian

- 1) Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit (0,36 Ha), sebanyak 76,16% pengguna lahan adalah petani gurem (<0,50 ha)
- 2) Rendahnya bahan organik tanah, masih terjadinya alih fungsi lahan,
- 3) Fluktuasi Perubahan iklim yang mengakibatkan gangguan produksi,
- 4) Belum optimalnya infrastruktur pertanian,
- 5) Masih terjadi kehilangan hasil pertanian
- 6) Daya saing produk pertanian relatif masih rendah.
- 7) Terbatasnya Petugas Lapangan Pertanian,
- 8) Kelembagaan petani yang masih berdasarkan alamat (by address).
- 9) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- 10) Belum optimalnya Perlindungan usahatani (asuransi pertanian baru tahap pilot project)
- 11) Produktivitas dan mutu yang masih rendah
- 12) Makin terbatasnya lahan subur, sementara lahan subur lebih diprioritaskan untuk pangan (beras
- 13) Rendahnya bahan organik tanah
- 14) Masih terbatasnya sarana prasarana perkebunan



- 15) Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi perkebunan
- 16) Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan
- 17) Produksi susu belum mencapai target peningkatan produksi
- 18) Peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan belum mencapai target jumlah kelahiran.
- 19) Pengembangan sistem budidaya ternak sapi secara koloni masih belum dianut sebagian besar kelompok
- 20) Kekurangan luas HMT sebesar 90,7% dari kebutuhan
- 21) Masih tingginya pemotongan ternak ruminansia betina produktif
- 22) Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) masih banyak yang belum memenuhi standar
- 23) Ketersediaan pusat pelayanan kesehatan hewan (puskeswan) masih minim
- 24) Ketersediaan pos pengawasan lalu lintas ternak (check point) belum mencapai sejumlah titik keluar masuk Provinsi
- 25) Situasi kesehatan hewan masih dihadapkan pada kondisi tingginya angka kematian ternak disebabkan penyakit hewan menular
- 26) Ketersediaan bibit ternak yang memenuhi standar masih belum memadai
- 27) Kelas kelompok tani subbidang usaha peternakan sebagian besar masih tingkat pemula
- 28) Aksesibilitas pinjaman dari lembaga keuangan perbankan terhambat karena dianggap usaha peternakan di tingkat kelompok tidak layak.
- 29) Masih banyak pengelola hutan rakyat yang belum mengerti sertifikasi ecolabeling s/d tahun 2014 sudah 31 FMU
- 30) Nilai tambah/jual hutan yang tersertifikasi masih belum dirasakan oleh masyarakat
- 31) Keterbatasan jumlah penyuluh kehutanan dalam memberikan penyuluhan tentang perkembangan kehutanan (425 orang) dan sebagian besar usia hampir pension
- 32) Masih sulitnya peluang memasarkan produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan yang daerahnya marjinal



21. Bidang Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

- 1) Ketergantungan akan bahan bakar fosil mengakibatkan menipisnya pasokan energi dan perlunya pengembangan Energi Baru dan Terbarukan seperti biogas, air, panas bumi, serta bahan bakar nabati.
- 2) Keterbatasan suplai energy dari jaringan listrik PLN, mengakibatkan beberapa desa/dusun di daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan di Jawa Timur belum berlistrik. Hal ini disebabkan karena beberapa wilayah permukiman tersebut jauh dari jangkauan infrastruktur/jaringan PLN dan jumlah calon pelanggan tidak signifikan atau terlampaui sedikit.
- 3) Rasio Elektrifikasi rumah tangga di Jawa Timur Tahun 2012-2014, masing-masing adalah sebesar 75,16%; 79,59% dan sampai dengan akhir Bulan Oktober 2014 sebesar 82,77% atau sebanyak 8.887.744 dari 10.737.880 rumah tangga.
- 4) Rasio Elektrifikasi desa di Jawa Timur sebesar 99,62% atau sebanyak 8.841 dari 8.513 desa. Adapun desa belum berlistrik adalah sebesar 0,32% atau sebanyak 32 desa, tersebar di Kabupaten Bangkalan sebanyak 1 desa, Kabupaten Bondowoso sebanyak 4 desa, dan Kabupaten Sumenep sebanyak 27 desa.
- 5) Terdapat kegiatan pertambangan yang belum berijin dan tidak sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat, yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan.
- 6) Berdasarkan karakteristik geologi, geografi dan morfologi wilayah, terdapat wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur yang merupakan cekungan air tanah, namun di lain juga terdapat daerah yang sulit air karena kurang memiliki potensi air tanah. Namun sampai dengan saat ini masih terdapat kegiatan pengambilan air tanah yang belum berijin dan indikasi meningkatnya intensitas pengambilan air tanah, yang dikhawatirkan meningkatkan intrusi air laut.

22. Bidang Urusan Perdagangan

- 1) Kurang lancarnya konektivitas/logistik ekspor-impor (dwellling time di pelabuhan antara 7 – 4 hari)
- 2) Kinerja net ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi hingga



mencapai Rp. 6,84 Trilyun, sebagai akibat krisis finansial global di Uni Eropa dan Amerika;

- 3) Belum optimalnya pemakaian system Resi Gudang; terkendala jumlah minimal yang dapat disimpan di gudang (20 ton GKG berdasar perhitungan Bappebti yang sulit dipenuhi petani individu)
- 4) Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan regional;
- 5) Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu;
- 6) Inefisiensi konektivitas perdagangan antar pulau dan asimetri informasi pada wilayah mitra dagang antar provinsi belum mampu maksimal diatasi 26 Kantor Perwakilan Dagang Jatim di Provinsi Mitra.

23. Bidang Urusan Industri

- 1) Meski telah mengalami penurunan, namun kandungan impor bahan baku/penolong masih relative tinggi (tahun 2012 : 86,34%, 2013 : 83,36 % dan di tahun 2014 : 82,45 %)
- 2) Menghadapi MEA 2016, daya saing industry jatim menurun (Selama 2007-2013 Jatim kehilangan keunggulan kompetitif di ASEAN pada hampir 100 produk (menurun dari US\$ 835 juta menjadi US\$ 73 Juta)
- 3) Kurangnya keterkaitan Struktur Industri, antara Industri Hulu, Antara dan Hilir, yang terindikasi dari kecilnya (23,63%) komoditas unggulan daerah dengan daya penyebaran dan daya kepekaan tinggi.
- 4) Relatif lemahnya daya saing IKM & Industri Kreatif sebagai akibat perubahan standarisasi di Negara tujuan ekspor dan masih relative sedikitnya IKM yang telah terstandarisasi (tahun 2014 baru 7,34 %)
- 5) Pembatasan pengembangan industry mamin adiktif yang mengakibatkan kontraksi pertumbuhan IKM hingga -15 %.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

3.1.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015

Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2015 tumbuh 5,44%, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,79%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2015 ini masih mengindikasikan terjadinya fase kontraksi yang ditandai dengan melambatnya kinerja ekonomi sejak tahun 2012 yang tumbuh 6,64%, tahun 2013 tumbuh 6,08% dan tahun 2014 tumbuh 5,86%. Dalam perekonomian terbuka (perekonomian empat sektor) faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia, antara lain Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang, yang berdampak pada kinerja ekspor Nasional dan Jawa Timur. Disamping itu melemahnya kurs rupiah terhadap US Dollar maupun Suku Bunga acuan Bank Indonesia (SBI) yang masih relatif tinggi di tahun 2015 sampai pada 7,50%, sangat mempengaruhi kinerja sektor riil. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada melambannya kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Meski pertumbuhan ekonominya melamban, namun kinerja daya saing Jawa Timur dibanding Provinsi-provinsi lain di Indonesia berdasarkan publikasi *Asia Competitiveness Institute – Singapore* tahun 2013 dan 2015 berturut-turut masih tetap menempati peringkat ke-2 di bawah Ibukota Negara DKI Jakarta.

Gambar 3.1 Daya Saing Ekonomi Wilayah di Indonesia



Sumber: Asia Competitiveness Institute. Tahun 2015

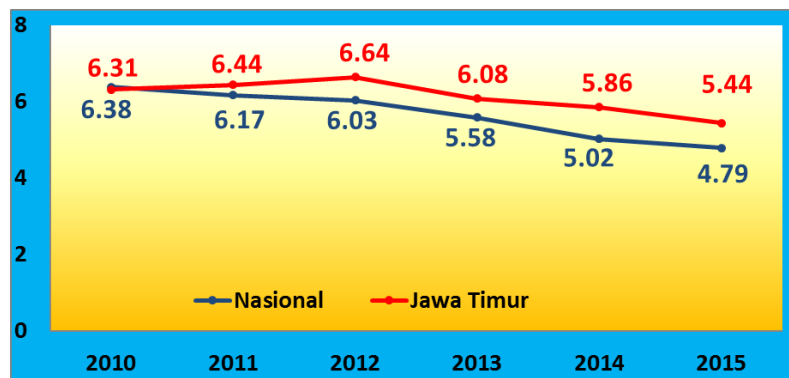


Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis & tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup & pembangunan infrastruktur. Guna lebih memperjelas kondisi ekonomi daerah di tahun 2015 berikut disampaikan beberapa sub-sub Bab yang ada keterkaitannya substansi perekonomian di Jawa Timur.

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2015 ditandai dengan nilai tambah bruto mencapai Rp 1.689,88 Triliun (ADHB) setelah di tahun 2014 kinerja yang sama tercatat Rp 1.540,7 Triliun. Dengan demikian pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 %. Kinerja pertumbuhan yang sama pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86 %. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2015 dimaksud lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 %. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sama dengan Jawa Tengah, tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta yang tumbuh sebesar 5,88 %.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2010 – 2015



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhannya, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,57 %, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,09



%; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,43 % dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,39 %. Total sumber pertumbuhan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 3,48 %.

Dari sisi produksi, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha pertambangan dan Penggalian sebesar 7,92 % diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 7,91 %. Secara lebih lengkap pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pada tiga tahun terakhir tersaji pada table 3.2 berikut

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2015 (%)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.06	3,63	3,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.31	3,65	7,92
3.	Industri Pengolahan	5.85	7,66	5,30
4.	Pengadaan Listrik , Gas dan Produksi Es	2.89	2,45	-3,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	4.15	0,25	5,28
6.	Konstruksi	8.05	5,44	3,60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.18	4,61	6,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	8.60	6,40	6,56
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.65	8,88	7,91
10.	Informasi dan Komunikasi	12.03	6,34	6,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.16	6,95	7,19
12.	Real Estate	7.37	6,97	4,97
13.	Jasa Perusahaan	7.45	8,52	5,44
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.26	0,58	5,38
15.	Jasa Pendidikan	8.60	6,48	6,26
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.96	8,17	6,46
17.	Jasa Lainnya	5.11	5,46	4,88
PDRB		6,08	5,86	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran selama tahun 2015 hanya terjadi pada 4 komponen pengeluaran saja, yaitu: komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan komponen net ekspor antar daerah yang tumbuh masing-masing sebesar 3,36 %, 2,20 %, 5,73 % dan 13,36 %, sementara komponen lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 13,36 %.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2015 (%)

Komponen	2013	2014	2015
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	6,57	6,33	3,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,85	13,31	-2,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,27	4,01	2,20
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,88	4,37	5,73
5. Perubahan Inventori	1.630,94	2.843,75	-17,60
6. Ekspor Luar Negeri	2,13	-2,14	-3,18
7. Impor Luar Negeri	6,46	8,19	-9,49
8. Net Ekspor Antar Daerah	17,60	-9,01	13,36
PDRB	6,08	5,86	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kontribusi tujuh belas lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Jawa Timur disajikan dalam Tabel 3.4. Selama tiga tahun terakhir struktur ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2015 masing-masing sebesar 29,27 %, 17,64 % dan 13,75 %. Total kontribusi ketiganya sebesar 60,66 %.



Tabel 3.3
Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2015 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,46	13,61	13,75
2. Pertambangan dan Penggalian	5,34	5,17	3,79
3. Industri Pengolahan	28,79	28,95	29,27
4. Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,37	0,36	0,35
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,09
6. Konstruksi	9,22	9,47	9,50
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,70	17,29	17,64
8. Transportasi dan Pergudangan	3,07	3,25	3,36
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,91	5,19	5,41
10. Informasi dan Komunikasi	4,78	4,54	4,56
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	2,68	2,75
12. Real Estate	1,63	1,57	1,63
13. Jasa Perusahaan	0,79	0,79	0,80
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,51	2,32	2,31
15. Jasa Pendidikan	2,73	2,73	2,72
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,63	0,63
17. Jasa Lainnya	1,36	1,38	1,43
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tumbuhnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) dan pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, ketika ekonomi global yang menjadi pendorong kinerja ekspor luar negeri mengalami perlambatan. Kontribusi ketiganya mencapai 1.154.588,57 Milyar rupiah atau



mencapai 68,32 %. Kondisi ini terindikasi di dalam PDRB menurut pengeluaran yang disajikan pada Tabel 3.3.

Kinerja Perdagangan

Secara absolut berdasarkan PDRB ADHB nilai ekspor luar negeri Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 189.705,94 milyar rupiah pada tahun 2014 menjadi 244.763,47 milyar rupiah pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 55.057,53 milyar rupiah. Nilai impor juga mengalami kenaikan sebesar 20.318,61 milyar rupiah dari 296.717,51 milyar rupiah menjadi 317.036,12 milyar rupiah pada tahun 2015. Berdasarkan PDRB ADHK selama tahun 2015 total ekspor dan impor Jawa Timur dari dan ke luar negeri dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Impor turun sebesar 9,49 %, terutama untuk impor jasa yang mengalami penurunan sebesar 27,83 %, sedangkan impor barang turun sebesar 7,66 %. Sementara ekspor juga mengalami penurunan sebesar 3,18 %, dengan komposisi ekspor barang turun sebesar 3,05 %, dan ekspor jasa turun 6,27 %.

Ekspor non-migas Jawa Timur 2015 mencapai US\$ 16.495,99 juta, turun 8,27 % dibanding ekspor non migas tahun 2014. Penurunan ekspor non migas terbesar terjadi pada bahan kimia organik, yang turun sebesar 37,95 % diikuti oleh tembaga dan kayu dan barang dari kayu masing-masing sebesar 27,93 % dan 27,62 %. Impor non-migas Jawa Timur selama tahun 2015 mencapai US\$ 15.649,53 juta, turun sebesar 12,62 % dibanding impor non migas tahun 2014. Tercatat seluruh komoditi utama barang impor mengalami penurunan, demikian juga barang-barang lainnya juga mengalami penurunan sebesar 8,67 %. Impor Jawa Timur Menurut Golongan Penggunaan Barang masih didominasi oleh bahan baku/penolong sebesar 80,52 %, namun dibandingkan dengan tahun 2014 proporsinya mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 82,87 %.

Perdagangan dalam negeri antar provinsi masih menjadi andalan dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Selama tahun 2015 baik ekspor maupun impor antar provinsi mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama ekspor dan impor barang-barang konsumsi dan bahan baku industri, sehingga total net ekspor selama tahun 2015 tercatat tumbuh 13,36 %. Secara absolut berdasarkan PDRB ADHB perdagangan antar daerah mengalami surplus sebesar 99.831,59 milyar rupiah.



Kinerja perdagangan tahun 2014 Jawa Timur secara total masih mengalami defisit sebesar 6,84 trilyun rupiah, namun pada tahun 2015 mengalami surplus sebesar 27,56 trilyun rupiah. Kondisi di atas tercermin dari data PDRB menurut penggunaan tahun 2015 yang disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4

Kinerja Perdagangan Jawa Timur 2012 -2015
(Miliar Rupiah)

KINERJA	2012	2013	2014	2015
Ekspor	523,658	585,516	664,954	696,968
❑ Luar Negeri	222,170	239,495	249,078	244,763
❑ Antar Daerah	301,488	346,021	415,876	452,204
Impor	473,206	531,787	593,924	669,409
❑ Luar Negeri	234,573	256,183	268,376	317,036
❑ Antar Daerah	238,633	275,604	325,548	352,373
Total Ekspor Impor	996,864	1.117,303	1.258,878	1.366,377
❑ Nett Eks-Imp LN	-12,403	-16,688	-19,298	-72,273
❑ Nett Eks-Imp DN	62,855	70,417	90,328	99,831
Total Nett Ekspor - Impor	50,452	53,729	71,030	27,588

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Surplus net ekspor terjadi dari besarnya kenaikan perdagangan antar daerah/pulau. Hal ini sejalan dengan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ketika pasar internasional sedang mengalami kelesuan, maka upaya menopang net ekspor adalah penguasaan pasar domestic melalui penguatan 26 Kantor Perwakilan Dagang di 26 Provinsi mitra se-Indonesia.

Kinerja Investasi

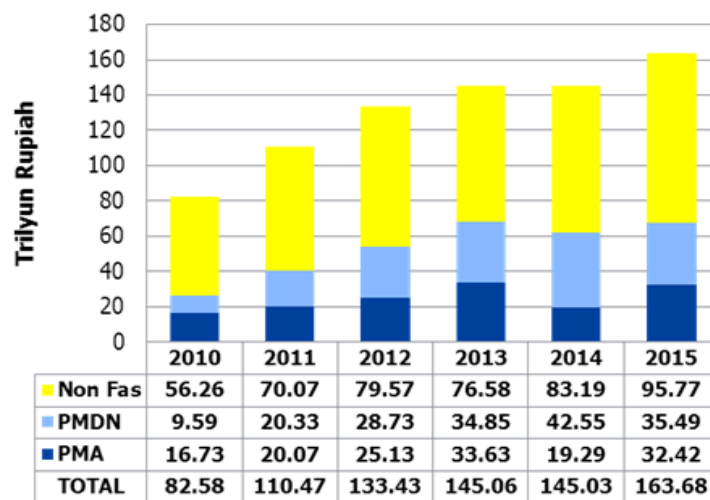
Sampai dengan tahun 2015, realisasi Investasi PMA/PMDN yang diukur berdasarkan pelaporan LKPM meningkat sebesar 12,68 % dibandingkan tahun 2014 sebesar 145,03 Trilyun rupiah. PMDN mengalami penurunan dari 42,55 trilyun rupiah menjadi 35,49 trilyun rupiah pada tahun 2015. PMA mengalami peningkatan dari 19,29 trilyun rupiah menjadi 32,42 trilyun rupiah. Peningkatan ini mengindikasikan optimisme penanaman modal di Jawa Timur, yang juga menjawab keawatiran



capital outflow sebagai dampak *Fed Fun Rate* (FFR). Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa iklim investasi yang dikondisikan di Jawa Timur tetap kondusif menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

Gambar 3.3

Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Penanaman Modal Jawa Timur

Tingkat Inflasi

Inflasi nasional bulan Desember 2015 sebesar 0,96 %, Jawa Timur sebesar 0,85 %, sedangkan laju inflasi tahun kalender (Desember 2015 terhadap Desember 2014), nasional sebesar 3,35 %, Jawa Timur sebesar 3,08 %. Selama Januari sampai Desember tahun 2015, inflasi tertinggi terjadi di bulan Desember sebesar 0,85 %, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan Desember tahun 2014 sebesar 2,38 %. Sehingga inflasi tahun kalender 2015 tercatat sebesar 3,08 %. Perkembangan Inflasi Jawa Timur selama kurun waktu 2010–2015 disajikan pada Tabel 3.6.



Gambar 3.4

Perkembangan Inflasi Jawa Timur Tahun 2010–2015



Sumber : BPS Jatim, 2016 diolah

Kinerja Perbankan

Berdasarkan laporan kinerja perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2015 meningkat dibandingkan triwulan III-2015, kinerja bank umum di Jawa Timur masih melambat. Aset secara tahunan (yoy) hanya tumbuh 11,73%, cenderung stabil dibandingkan triwulan III-2015 yang mencapai 11,62%. Demikian pula dengan DPK yang tumbuh melambat dari 10,80% menjadi 10,27%. Rendahnya pertumbuhan aset terutama dipengaruhi perlambatan kinerja penyaluran kredit yang hanya tumbuh 9,01% lebih rendah dari triwulan III-2015 yang mencapai 10,76%. Perlambatan pertumbuhan kredit ini antara lain disebabkan karena sebagian pelaku usaha melakukan efisiensi biaya dengan mengoptimalkan pembiayaan yang menggunakan dana sendiri untuk mengurangi beban pinjaman, mengingat biaya operasional yang tinggi dan menipisnya margin. Sedangkan LDR meningkat dari sebesar 88,01% menjadi 88,83% pada periode laporan.



Tabel 3.5
Perkembangan Indikator Bank Umum di Jawa Timur

INDIKATOR BANK UMUM (Miliar Rp)	2014				2015			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Aset	417.365	442.614	465.122	474.968	483.569	501.803	519.163	530.680
Growth Aset (%yoy)	15,19	16,64	14,32	12,95	15,86	13,37	11,62	11,73
Dana Pihak Ketiga	332.446	350.744	371.458	383.290	390.839	398.365	411.579	422.657
Growth DPK (%yoy)	13,33	16,72	17,04	14,31	17,56	13,58	10,80	10,27
Kredit Lokasi Bank	304.412	318.598	327.063	344.420	341.049	353.892	362.249	375.453
Growth Kredit (%yoy)	23,49	19,41	14,41	13,26	12,04	11,08	10,76	9,01
Kredit Lokasi Proyek	344.755	363.112	379.739	395.368	395.096	408.559	421.425	436.514
Growth Kredit (%yoy)	21,83	19,47	16,99	15,24	14,60	12,52	10,98	10,41
LDR Lokasi Bank (%)	91,57	90,83	88,05	89,86	87,26	88,84	88,01	88,83
LDR Lokasi Proyek (%)	103,70	103,53	102,23	103,15	101,09	102,56	102,39	103,28
NPL Lokasi Bank (%)	2,07	2,12	2,08	1,82	2,07	2,22	2,19	1,82
NPL Lokasi Proyek (%)	2,18	2,27	2,34	2,03	2,31	2,65	2,43	2,14

Sumber : Bank Indonesia, 2015

3.1.1.2. Perkiraan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2016

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian global dan domestik serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah maka beberapa proyeksi makro ekonomi Jawa Timur tahun 2016 diperkirakan akan mengalami deviasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan rencana jangka menengah yang sudah ditetapkan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memperkirakan kondisi makro ekonomi Jawa Timur adalah pada strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 dimaksud yang pada amanahnya menggariskan tiga strategi umum, sebagai berikut :

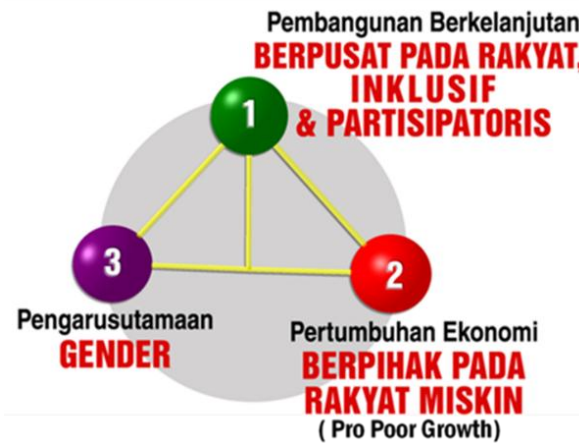
- 1) Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*).
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro - poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro - poor* , *pro job*, *pro - growth*, dan *pro - environment*.
- 3) Pengarusutamaan gender (*pro - gender*).

Ketiga strategi tersebut apabila digrafiskan hubungan saling keterikatannya tersaji seperti gambar berikut :



Gambar 3.5

Keterkaitan antar tiga Strategi Umum Pembangunan Jawa Timur 214-2019

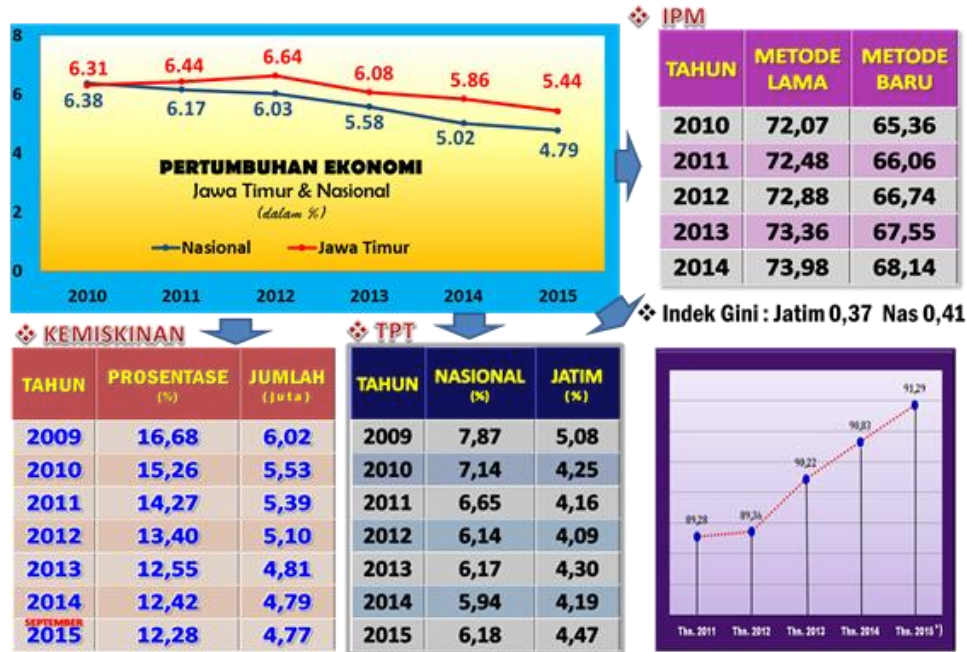


Dengan strategi tersebut maka dalam memprediksi dan merencanakan target pertumbuhan ekonomi yang Inklusif serta berpihak pada rakyat miskin harus mempertimbangkan capaian kinerja tidak saja dari capaian kinerja pertumbuhan ekonomi itu sendiri namun juga harus mempertimbangkan capaian kinerja dari beberapa indikator kinerja utama pembangunan lainnya. Capaian kinerja dimaksud tertuang seperti pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.6

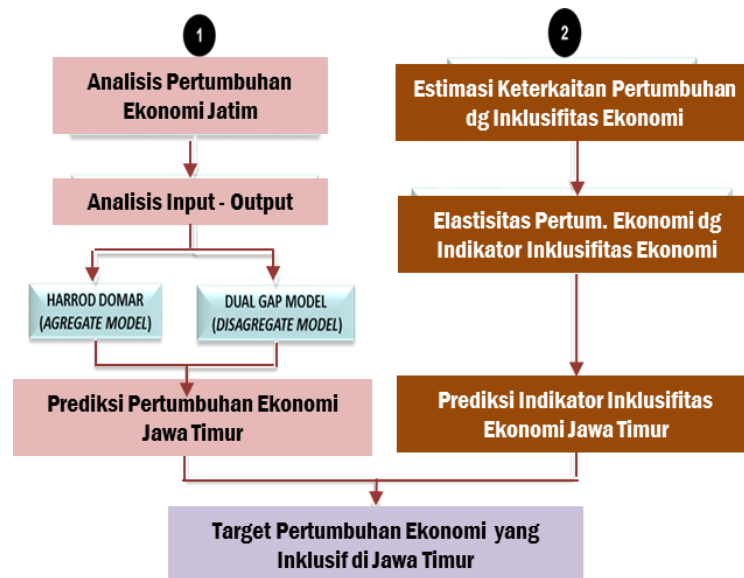
Capaian Kinerja Beberapa Indikator Kinerja Utama wa Timur



Data *time series* indikator kinerja utama yang terdiri dari kinerja Pertumbuhan Ekonomi, %tase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gender dianalisa keterkaitannya pula dengan data Input Output (I-O Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 dan Tahun 2010) mempergunakan pola pemikiran sebagai berikut :

Gambar 3.7

Pola Pemikiran Derivasi Prediksi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur



Analisis lengkap Pola Pikir dan pertimbangan-pertimbangan lain tersaji pada dokumen Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengaselerasikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur tahun 2017-2019 (kerjasama antara Bappeda Jawa Timur dengan FEB Universitas Brawijaya Malang tahun 2016). Dari hasil studi tersebut direkomendasikan hubungan keterkaitan kinerja antara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan beberapa indikator kinerja lain disarikan pada tabel *loading factor* sebagai berikut :

Tabel 3.6

Loading Faktor Keterkaitan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Kinerja Utama Lainnya Tahun 2009 – 2014

Loading Faktor	TPT	IPM	IGR
Dampak target kemiskinan terhadap TPT, IPM dan IGR	0.15	-0.41	0.15
Dampak target TPT, IPM dan IGR terhadap Pertumbuhan PDRB	-3.66	0.67	-1.10

Sumber : Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengaselerasikan Kualitas pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur tahun 2017-2019, Bappeda Prov Jatim, 2016.

Dengan loading factor tersebut diatas, maka dapat diperkirakan pertumbuhan ekonomi inklusif berdasar asumsi dari penurunan target kemiskinan (derivasi konkrit dari strategi berpihak pada rakyat miskin) 0,5 % per tahun, sebagai berikut :

Tabel 3.7

Prediksi Makro Ekonomi dan Keterkaitannya Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Lain (Inklusif) Jawa Timur 2016 - 2020

Tahun	Target Kemiskinan	Prediksi Capain TPT	Prediksi Capain IPM	Prediksi Capain IGR	Prediksi Pertumbuhan PDRB
2015	12.28	4.47	68.14	0.37	5.44
2016	12.00	4.39	68.28	0.36	5.45
2017	11.50	4.25	68.52	0.34	5.47
2018	11.00	4.10	68.78	0.32	5.50
2019	10.50	3.93	69.05	0.30	5.52

Sumber : Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengaselerasikan Kualitas pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur tahun 2017-2019, Bappeda Prov Jatim, 2016.



Prediksi tersebut diatas, di dapat dari perhitungan kuantitatif tren kinerja dari analisa tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Di sisi lain sebagaimana Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah 7,20% – 7,49%. Berdasarkan kondisi perekonomian terkini dan pertimbangan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dengan berpihak kepada rakyat miskin yang direalisasikan dari asumsi penurunan 0,5 % prediksi %tase kemiskinan tahun 2016 maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ditetapkan pada kisaran 5,45-5,47%.

Kondisi tersebut akan tercapai apabila sektor-sektor yang memberikan sumber pertumbuhan tinggi mampu berakselerasi lebih cepat dari capaian di tahun 2016. Tiga *leading* sektor yang diharapkan dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Jawa Timur. Kebijakan di bidang perijinan yang lebih atraktif juga diharapkan mampu menarik investasi di Jawa Timur.

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan yang pada tahun 2015 memberikan sumber pertumbuhan tertinggi kedua juga diproyeksikan akan lebih cepat pada tahun 2016. Membaiknya kemampuan daya beli masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan sektor ini. Ekspor luar negeri yang mengalami kontraksi di tahun 2015 diharapkan dapat meningkat kembali pada tahun 2016. Berbagai terobosan untuk lebih selektif dalam memilih pasar luar negeri yang secara umum saat ini sedang mengalami kelesuan dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor Jawa Timur. Nilai impor ditargetkan untuk menurun seiring dengan kebijakan pengembangan substitusi impor. Menguatnya nilai tukar rupiah juga diharapkan mampu menekan nilai impor Jawa Timur.

Net ekspor antar daerah ditargetkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai net ekspor antar daerah terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014 nilai net ekspor antar daerah mencapai 90,328 triliun rupiah dan pada tahun



2015 nilai surplusnya meningkat menjadi 99,832 triliun rupiah. Analisis terhadap kondisi eksternal yang masih belum stabil, maka memperkuat fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) merupakan strategi penting untuk mampu mendukung kinerja perdagangan domestik dan pertumbuhan ekonomi, ketika kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat masih cukup potensial mendorong sektor produksi.

Kontributor pertumbuhan terbesar berikutnya adalah pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Produksi dan produktivitas pada kategori yang juga dominan menjadi mata pencaharian masyarakat Jawa Timur ini diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan implementasi dua aspek ekonomi utama lainnya (pemasaran dan pembiayaan). Hal lain yang menjadi faktor pendorong adalah pembangunan infrastruktur.

Arus investasi pada tahun 2016 ditargetkan mengalami peningkatan. Kinerja realisasi PMA pada tahun 2015 memberikan optimisme terjadinya peningkatan realisasi investasi di 2016. Jaminan terhadap ketersediaan energi listrik, gas untuk industri, tenaga kerja yang demokratis, lahan dengan harga yang terjangkau, ketersediaan kawasan industri, pelayanan perijinan yang lebih transparan dan akuntabel, perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan faktor-faktor yang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi di Jawa Timur. Upaya-upaya promosi dan penyediaan prospectus investasi yang *reliable* juga dilaksanakan untuk menarik investor. Kondisi lalu-lintas di Jabodetabek yang semakin macet memberikan peluang tersendiri bagi Jawa Timur untuk menerima investor yang akan melakukan ekspansi usahanya.

Tingkat inflasi pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar $4,5 \pm 1$, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus ditingkatkan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas di Provinsi Jawa Timur.

Proyeksi-proyeksi tersebut akan tercapai selama asumsi-asumsi kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional berikut terjadi. Asumsi-asumsi tersebut meliputi:

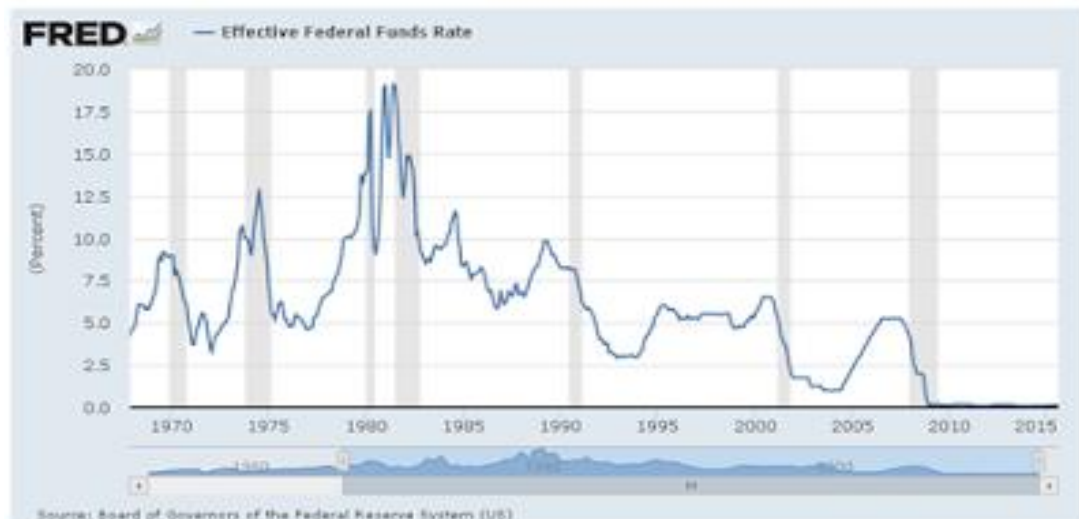
1) Lingkungan eksternal (Global)

Pertama, pengaruh rencana kenaikan suku bunga secara gradual oleh Bank Sentral Amerika The Fed (Fed Fun Rate).



Kebijakan moneter AS ini nampaknya menjadi potensi masalah baru, meskipun secara umum kebijakan ini telah memberikan kepastian bagi negara-negara lain. Langkah terbaru The Fed ini berpotensi untuk membuat nilai tukardolar AS terhadap sejumlah mata uang di dunia menguat. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan dolar AS di negara berkembang akan menemui kendala di sisi keuangannya, sehingga turut menekan perekonomian nasional. Namun demikian, ketidakpastian di pasar keuangan global mereda setelah kenaikan The Federal Fund Rate (FFR).

Gambar 3.8
Grafik Trend Fluktuasi Suku Bunga The Fed Tahun 1970 - 2015



Hingga Triwulan I – 2016 ini pemulihan ekonomi Amerika Serikat masih belum solid, yang diindikasikan oleh melemahnya konsumsi dan beberapa indikator ketenagakerjaan, serta masih rendahnya inflasi. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong The Fed untuk tetap berhati-hati dalam melakukan penyesuaian Fed Fund Rate (FFR).

Kedua, Pertumbuhan ekonomidunia

Pemulihan ekonomi Eropa masih terbatas dan dibayangi oleh isu kemungkinan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), dimana jika ini terjadi maka dalam kondisi tersebut, yang terjadi adalah kemungkinan menguatnya perdagangan dan



hubungan bilateral antara Inggris dengan negara-negara di Asia, termasuk ASEAN, tanpa perlu Uni Eropa turut campur. Hal ini tentu sangat menguntungkan perjanjian perdagangan yang telah dirintis oleh Inggris ke China, India, dan Amerika Serikat, dan juga ASEAN. Beberapa kasus lambannya perdagangan Uni Eropa-ASEAN antara lain disebabkan beberapa pasal yang terkait dengan situasi di Myanmar. Inggris misalnya dapat membuat kesepakatan dagang dengan Indonesia soal sawit dengan standarnya sendiri yang mungkin lebih longgar dibandingkan dengan Uni Eropa. Namun demikian, juga timbul kerugian. Selama ini perdagangan dengan Eropa diuntungkan dengan pasar tunggalnya. Namun bila Inggris tidak terikat lagi secara hukum dengan Uni Eropa, investasi yang dilakukan di Inggris akan menjadi berat apabila berharap masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dengan kata lain, hubungan kita dengan Inggris tidak lagi dapat menjadi batu loncatan untuk masuk ke satu pasar Eropa.

Sementara perekonomian Jepang juga masih berada pada kondisi terus tertekan. Konsumsi belum mengalami perbaikan, tercermin dari konsumsi rumah tangga yang melambat. Ekonomi Tiongkok mulai membaik meskipun masih beresiko, ditopang oleh sector konstruksi dan real estate.

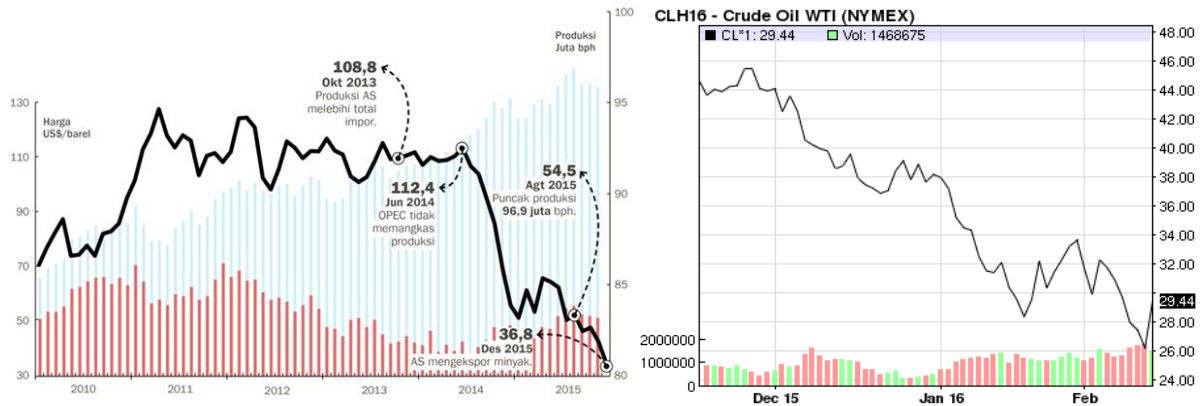
Ketiga, Harga komoditas dunia terutama minyak mentah terus mengalami penurunan drastis.

Membanjirnya pasokan minyak mentah secara global, terus menekan nilai dari minyak mentah ini. Sementara itu, konflik geopolitik yang terus memanas, dinilai tidak akan terlalu mampu mengerek harga komoditas tersebut (sumber : bisnis.com).



Gambar 3.9

Trend Fluktuasi Penurunan Harga Minyak Dunia Tahun 2010 – Maret 2016



Sumber : Nasdaq, 2016

Turunnya harga minyak dunia memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak negatif di antaranya penurunan kinerja ekspor migas, perubahan asumsi makro Indonesia Crude Price (ICP) yang terdapat dalam APBN, serta penurunan realisasi dalam APBN terkait pajak penghasilan minyak dan gas. Dampak positif di antaranya menurunnya biaya energi dan transportasi sehingga dapat meningkatkan ekspor manufaktur dan nonmigas menjadi lebih kompetitif. Bagi Jawa Timur momentum ini lebih berdampak negative mengingat sebagai daerah pengeksport Migas, bagi hasil pendapatan dari Migas ini dari Pemerintah menjadi berkurang dan berdampak pada kebijakan efisiensi anggaran. Menjadi negative juga disebabkan oleh pangsa pasar ekspor juga belum bergairah dan cenderung melemah. Ke depan seiring dengan kenaikan Indeks Tendensi Konsumen dan pertumbuhan perdagangan yang melebihi pertumbuhan PDRBnya diharapkan menjadi momen positif untuk optimisme tercapainya target akselerasi kembali pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Keempat, Implementasi penuh MEA

Implementasi penuh kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember 2015 sebagai pasar tunggal/pasar bersama masyarakat ASEAN diharapkan mampu menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas perdagangan serta dampak di sektor produksi domestik. Sehingga dengan potensi barang dan



jasa yang dimiliki, Indonesia menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama memposisikan dirinya menjadi pemain global sekaligus untuk meningkatkan daya saingnya sebagai bagian dari perekonomian dunia. Optimisme pengaruh positif implementasi MEA adalah dari kinerja Perdagangan dengan negara-negara ASEAN yang menunjukkan surplus pada hampir semua wilayah kecuali Thailand, seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Kinerja Perdagangan antara Jatim dan Negara-negara ASEAN (Jan-Maret 2016)

NO	NEGARA	EKSPOR	IMPOR	NERACA
1	MALAYSIA	248.755.206	157.267.937	91.487.269
2	SINGAPORE	430.690.822	310.604.744	120.086.078
3	THAILAND	125.738.283	309.272.052	-183.533.769
4	VIET NAM	134.932.645	131.192.245	3.740.400
5	PHILIPPINES	56.002.011	13.321.060	42.680.951
6	MYANMAR	11.318.526	1.022.540	10.295.986
7	CAMBODIA	2.023.392	261.198	1.762.194
8	BRUNEI DARUSSALAM	2.056.150	1.050	2.055.100
9	LAO PEOPLE'S DEM. REP.	579.502	135.199	444.303
	TOTAL	1.012.096.537	923.078.025	89.018.512
	MIGAS	47.107.453	215.776.785	(168.669.332)
	NON MIGAS	964.989.084	707.301.240	257.687.844

Sumber : BPS Jawa Timur, 2016

2) Lingkungan Internal (Nasional)

Pertama, Membaiknya Kondisi ekonomi nasional dan stimulus Paket regulasi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi nasional nampaknya menunjukkan kecenderungan ke arah pemulihan ekonomi setelah mengalami perlambatan. Kondisi ini dijelaskan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2015 mencapai 5,04%, meningkat cukup tinggi jika dibanding kuartal III yang mencapai 4,73%, kuartal II sebesar 4,67% dan kuartal I tumbuh 4,7%. Secara year on year (yoy), pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79%, meningkat cukup tinggi karena beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu



Pertama, jasa keuangan asuransi yang meningkat 12,52%, karena peningkatan pendapatan jasa keuangan. *Kedua*, lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 9,74%, karena penggunaan 4G LTE yang meningkat. *Ketiga*, konstruksi yang tumbuh 8,24%, sebagai dampak dari peningkatan pembangunan infrastruktur kuartal IV yang terjadi percepatan. Kondisi ini memberikan momentum bagi perekonomian nasional dan Jawa Timur untuk terus tumbuh seiring dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan melalui peningkatan daya saing, keterbukaan iklim investasi, menggairahkan sektor investasi, dan pemberian perlindungan kepada pelaku usaha di dalam negeri. Bagi Jawa Timur melalui langkah-langkah jangka pendek ini diharapkan mampu berdampak ke perbaikan ekonomi yang tak hanya menyentuh sisi suplai dan kesinambungan dunia usaha, tetapi juga sisi permintaan, daya beli masyarakat dan lapangan kerja. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Nasional 2016 diprediksi meningkat dengan didorong oleh stimulus fiskal, khususnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur yang semakin cepat. Pertumbuhan ekonomi Nasional setelah BI rate turun maka ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 5,3 % (Sumber: Kemenkeu RI, Tw I – 2016)

Kedua, Optimisme asumsi makro ekonomi nasional Tahun 2016

Beberapa indikator makro ekonomi nasional dalam APBN 2016 menunjukkan hal yang optimis ditengah kondisi global yang masih belum stabil. Beberapa indikator ekonomi tahun 2016 yang diharapkan sesuai dengan prediksi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 %, inflasi mencapai 4,7 %, suku bunga acuan (SPN 3 bulan) pada kisaran 5,5 %, nilai tukar Rupiah sebesar Rp 13.900, lifting minyak mencapai 830 ribu barel per hari, Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) mencapai 1.155 dan lifting harga minyak mentah 60 US Dollar per barel. Selengkapnya asumsi dasar makro ekonomi Nasional tersaji dalam table berikut :



Tabel 3.9
Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2016-208

INDIKATOR	2016*	2017**	2018**
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	6,0 – 7,2	6,2 – 7,8
Inflasi (% , yoy)	4,7	3,0 – 5,0	2,5 – 4,5
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,5	4,0 – 6,0	3,5 – 4,5
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.900	13.300 – 13.700	13.400 – 13.800
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	50	60 – 90	60 – 90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	830	750 - 780	700 - 730
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.155	1.100 – 1.200	1.100 – 1.300

Sumber : *) Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2016, Kementerian Keuangan RI

***) Dokumen Nota Keuangan beserta APBN TA 2016, Kementerian Keuangan RI

Ketiga, Kebijakan moneter dan fiskal.

Di bidang kebijakan moneter, BI rate semenjak ditetapkan mulai akhir tahun 2014 dari 7,0 % kemudian sempat berada diposisi 7,5% dan akhirnya pada Triwulan I-2016 diturunkan kembali pada level 6,75 %. Ini pertanda baik, bahwa kebijakan uang ketat sudah mulai bergeser untuk memacu kinerja sektor riil. Pemanfaatan ruang pelonggaran moneter dilakukan secara terukur dengan tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan akan didukung oleh upaya untuk menjaga nilai tukar yang sesuai fundamentalnya, memperkuat kecukupan cadangan devisa, dan mengelola aliran modal asing.



Gambar 3.10 Trend Kebijakan BI Rate Tahun 2006 - Tw I- 2016



Di bidang makroprudensial, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan, dan terus mendorong pendalaman pasar keuangan. Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien, termasuk melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran. Berbagai kebijakan tersebut akan disertai dengan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah dan institusi terkait sehingga stabilitas makroekonomi tetap terjaga, dengan struktur perekonomian yang lebih kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya memperkuat stimulus fiskal akan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan. Selanjutnya, upaya memperkuat daya tahan fiskal akan dilakukan dengan memperkuat bantalan fiskal, dan meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan penguatan payung hukum, sedangkan upaya menjaga kesinambungan fiskal akan dilakukan melalui pengendalian defisit anggaran terhadap PDB, pengendalian rasio utang terhadap PDB, penurunan net penambahan utang dan pengendalian keseimbangan primer.



3) Lingkungan Internal (Provinsi)

Pertama, Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2011 sebesar 7,22% terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,44 %. Namun demikian, meskipun mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2015, masih lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 4,79 %. Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas pada tahun 2015 akibat kondisi ekonomi global dan nasional, maka kebijakan pemerintah untuk fokus pada belanja di sektor yang lebih produktif diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kebijakan dimaksud diperkuat dengan strategi pembangunan ekonomi Jawa Timur dalam tiga aspek/aktivitas ekonomi utama yang mampu menghadapi tantangan perdagangan bebas, mengoptimalkan perdagangan dalam negeri maupun dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu (1) Aspek Produksi dari segmen UMKM dan segmen Besar, (2) Aspek Pembiayaan yang Kompetitif, (3) Aspek Pemasaran.

Kedua, reorientasi manajemen pembangunan dan menjaga stabilitas pemerintahan (pusat dan daerah) serta legislator (DPR dan DPR RI) melalui penataan ulang regulasi (re-regulasi) dan memposisikan undang-undang sebagai alat untuk mengakselerasi pembangunan diharapkan menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi di bidang kinerja perdagangan dan investasi, maupun kinerja sosial dalam hal pelayanan kebutuhan dasar masyarakat baik dibidang pendidikan maupun kesehatan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian 2017 dan 2018

Dengan situasi perekonomian yang terjadi pada tahun 2014 menuju tahun 2015, serta proyeksi perekonomian tahun 2016 maka tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:



1. *Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)* pada akhir 2015 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Jawa Timur. Pasar tunggal ASEAN akan mengakibatkan terjadinya persaingan antar anggota MEA dalam merebut pasar. Potensi demografi Jawa Timur yang cukup besar akan mendapatkan penawaran yang beragam dari negara-negara anggota MEA, dan pada saat yang bersamaan produsen-produsen lokal harus mengalami persaingan dengan produsen dari negara lain. Sebagai basis produksi Jawa Timur akan mengalami persaingan dengan negara-negara anggota MEA dalam memberikan layanan dan kemudahan dalam berinvestasi.
2. *Globalisasi* perekonomian menuntut Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi, daya saing serta meningkatkan kinerja perdagangan internasional melalui *international trade friendship*. Berakhirnya era buruh murah dan kenaikan biaya energi akan sangat mempengaruhi efisiensi dari sektor industri pengolahan. Untuk mampu berkompetisi di level global, daya saing baik sektoral maupun kewilayahan merupakan hal mutlak yang harus dipersiapkan. Industri yang berkembang di Jawa Timur seyogyanya mampu masuk ke dalam rantai produksi global (*global production chain*) sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.
3. *Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif*
Tantangan Jawa Timur bukan hanya pertumbuhan yang tinggi, namun juga pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif, pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur, merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku lokal dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar serta berbasis padat karya (*labour intensive industry*). Pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas dan pengurangan pengangguran merupakan instrumen korelatif dari



percepatan pertumbuhan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu basis investasi dan ekspor merupakan variabel penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan pendapatan dengan distribusi pendapatan yang merata dan mampu mengurangi disparitas.

4. *Penanganan Bencana Alam*

Kejadian bencana alam memang tidak dapat diprediksi (*un-predictable*), namun bisa juga diprediksi untuk kejadian tertentu dan kesemuanya dapat menimbulkan dampak/resiko baik sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan (untuk bencana tertentu yang diakibatkan oleh distorsi fungsi sumberdaya alam), manajemen penanggulangan, manajemen resiko/dampak, maupun manajemen pemulihan dari bencana.

3.1.2.2. **Prospek Ekonomi Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2016 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan yang tinggi untuk tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan review akademis dan kondisi perekonomian terkini maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 5,47 % – 5,50 % dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 5,50 % - 6,00 %. Faktor-faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal, semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi global yang oleh IMF diperkirakan tumbuh 3,5 % pada tahun 2017 dan disertai peningkatan volume perdagangan berdampak pada membaiknya neraca perdagangan Jawa Timur. Dari sisi domestik, berbagai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang antara lain terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, pelabuhan dan prasarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Langkah-langkah tersebut juga akan mendorong perbaikan iklim usaha dan aktivitas investasi oleh pihak swasta dan pada gilirannya kapasitas produksi nasional. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih



menjadi modal dasar kuatnya konsumsi domestik. Pada saat yang sama, semakin terjaga dan menurunnya laju inflasi juga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan permintaan agregat.

Dengan membaiknya kondisi global, kinerja perdagangan Jawa Timur akan mendapatkan imbas positif dengan naiknya permintaan. Ekspor luar negeri ke negara-negara konvensional diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di negara-negara tersebut. Nilai importasi juga diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan adanya pemenuhan terhadap barang yang sebelumnya diimpor (substitusi impor).

Kinerja investasi juga diperkirakan mengalami peningkatan. Ketersediaan kawasan industri, listrik, energi untuk industri, selesainya proyek-proyek infrastruktur, insentif penanaman modal baik fiskal maupun nonfiskal menjadi daya tarik bagi investor. Pelayanan perijinan yang akuntabel, profesional dan transparan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, kepastian hukum dan fasilitasi potensi permasalahan antara investor dengan tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan investasi pada tahun 2017 dan 2018.

Laju inflasi diharapkan dapat tetap terkendali pada tahun 2017 dan 2018. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas melalui TPID, penyediaan informasi suplai dan demand yang lebih luas, perbaikan infrastruktur dan kapasitas produksi, serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian Jawa Timur diharapkan mampu berperan signifikan dalam menekan laju inflasi pada tahun 2017 dan 2018.

3.1.3. Kebijakan Ekonomi

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif serangkaian kebijakan makro maupun mikro ekonomi telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain melalui derivasi strategi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019 kedalam tiga (3) aspek ekonomi utama sebagai berikut :



Gambar 3.11
Derivasi Strategi Umum RPJMD 2014-2019 pada Kebijakan
Pembangunan Ekonomi 2017



1. **Aspek Produksi UMKM dan Besar**, pada prinsipnya adalah bagaimana peran Pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain aspek peningkatan produksi pada berbagai komoditas dalam skala usaha UMKM dan Besar menghasilkan produk yang berdaya saing lebih tinggi serta terjaga baik dari aspek harga yang kompetitif, kualitas serta kecepatan pengiriman.
2. **Aspek pembiayaan yang Kompetitif dan efisien**, pada prinsipnya adalah peran Pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain kebijakan fiskal kedalam sistem perbankan untuk pembiayaan yang kompetitif dan efisien khususnya bagi UMKM serta sektor riil lainnya, sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan lebih efisien yang dengan demikian akan memiliki daya saing yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui upaya antara lain :
 - a. Mendorong perbankan untuk mengoptimalkan skema-skema kredit yang kompetitif untuk sektor riil;



- b. Skema kredit dari kebijakan Pemerintah Provinsi melalui fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil baik dengan skema pinjaman bunga murah 6%, Apex bank Jatim & BPR di Jawa Timur, Penjaminan Kredit oleh PT Jamkrida, Pembiayaan sektor pertanian melalui penempatan modal di PT Bank UMKM, serta *loan agreement* Pemprov Jatim dan Bank Jatim serta *Linkage Program* dengan BPR Kab/Kota dalam pengembangan Industri Primer.
 - c. Mengoptimalkan pola-pola kerjasama pemerintah-swasta.
 - d. Mendorong peran Perseroan maupun BUMN dalam mengalokasikan pemanfaatan CSR/PKBL untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil
3. **Aspek Pemasaran, prinsipnya adalah** peran pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain pemasaran yang kompetitif serta skala pasar yang lebih luas yang memungkinkan produk UMKM khususnya dan usaha besar memiliki kepastian tujuan pasar. Optimalisasi peran 26 Kantor Perwakilan Dagang Provinsi Jawa Timur di Provinsi Mitra serta peningkatan kapasitas 6 Etalase Perdagangan Jawa Timur di 5 Negara menjadi pendorong & bentuk fasilitasi yang lebih riil pada pengembangan aspek pemasaran untuk utamanya menguasai pasar domestik dan juga pasar global.

Disamping itu perlu juga dukungan pengembangan infrastruktur, terutama melalui :

- 1) Bidang Transportasi, melakukan percepatan pembangunan moda transportasi darat, laut dan udara untuk mengoptimalkan konektivitas baik di internal maupun Jawa Timur dengan kawasan eksternal untuk efektivitas mobilisasi barang dan jasa.
- 2) Bidang Kebinamargaan, melakukan koordinasi untuk percepatan pembangunan ruas-ruas trans tol Jawa, pemeliharaan dan peningkatan jalan arteri dan jembatan nasional, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan provinsi, serta stimulasi melalui kemampuan keuangan daerah terhadap peningkatan jalan-jalan kabupaten/kota.



- 3) Bidang Pengairan, diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan waduk dan bendungan untuk peningkatan Indeks Pertanian dari 1,86 menjadi 2,3 sehingga akan terdapat tambahan areal tanam dalam jangka panjang sebesar 345.775 Ha.
- 4) Bidang Energi, melalui koordinasi dengan Pemerintah, untuk tetap menjaga surplus pasokan listrik baik untuk peningkatan elektrifikasi maupun untuk kebutuhan industri, maupun mempercepat realisasi proses eksplorasi Pembangkit-pembangkit Listrik tenaga panas bumi, maupun dari sumber-sumber energi yang terbarukan lainnya seperti mikro hidro dan sebagainya.
- 5) Infrastruktur Regulasi diarahkan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam menerbitkan kebijakan lokal (perda/peraturan kepala daerah) untuk stimulus kinerja pembangunan ekonomi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.



Disisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung pemerintah daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sebagaimana APBD pemerintah daerah hanya untuk belanja pegawai (gaji), sehingga pemerintah daerah kurang leluasa di dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah



3.2.1. Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,86% lebih tinggi dari rata-rata Nasional ini menunjukkan bahwa Perekonomian di Jawa Timur lebih kondusif, diproyeksikan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh sekitar 6,04-6,11%, dan tahun 2016 tumbuh sekitar 6,26%-6,33%, dan tahun 2017 ditargetkan tumbuh sekitar 6,48%-6,55%. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan potensi sumber penerimaan daerah baik dari sektor pajak, retribusi maupun sumber pendapatan lain yang sah.

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi kontribusi BUMD.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak



daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup : a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari : a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b). Jasa giro, c). Pendapatan bunga, d). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, f). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan denda pajak, i). Pendapatan denda retribusi, j). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k). Pendapatan dari pengembalian, l). Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, n). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil yang ditransfer langsung ke daerah, serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan yang merupakan program/kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*".

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu



daerah. Atau dengan kata lain, ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin kecil.

Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2015-2019, tercantum pada tabel 3.9 berikut:



Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2018

NO. URUT	URAIAN	REALISASI APBD 2014*)	TARGET RKPD 2015	TARGET APBD2015	TARGET RKPD 2016	TARGET RKPD 2017	TARGET RKPD 2018
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.462.753.136.957,30	14,558,856,495,752.70	14,771,139,275,000.00	15.967.974.754.130,50	17.486.035.907.305,00	19.016.890.049.709,90
1.1	Pajak Daerah	11.517.684.926.168,60	12.541.000.000.000,00	12,591,000,000,000.00	13.807.000.000.000,00	15.173.000.000.000,00	16.539.000.000.000,00
1.2	Retribusi Daerah	148.638.035.645,33	104,823,449,246.12	136,337,487,000.00	109.041.722.098,80	111.656.597.233,87	115.697.093.937,11
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	342.920.271.075,28	353,566,454,883.20	351,344,506,000.00	367.709.113.078,53	382.417.477.601,67	397.714.176.705,74
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.453.509.904.068,12	1,559,466,591,623.35	1,692,457,282,000.00	1.684.223.918.953,22	1.818.961.832.469,48	1.964.478.779.067,04
2.	DANA PERIMBANGAN	3.485.336.767.166,00	3,407,812,754,445.26	4,345,684,182,500.00	3.458.769.937.424,29	3.510.746.264.062,90	3.563.762.117.234,28



2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.516.912.612.166,00	1,503,933,605,745.26	2,692,383,285,500.00	1.516.813.205.750,29	1.529.950.397.755,42	1.543.350.333.600,65
2.2	Dana Alokasi Umum	1.866.548.185.000,00	1.903.879.148.700,00	1,587,261,707,000.00	1.941.956.731.674,00	1.980.795.866.307,48	2.020.411.783.633,63
2.3	Dana Alokasi Khusus	101.875.970.000,00	-	66,039,190,000.00	-	-	-
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.844.930.590.606,00	2.800.570.060.000,00	3,746,714,308,000.00	2.800.570.060.000,00	2.800.570.060.000,00	2.800.570.060.000,00
3.1	Pendapatan Hibah	45.478.647.460,00	23.150.000.000,00	45,141,281,000.00	23.150.000.000,00	23.150.000.000,00	23.150.000.000,00
3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	2.799.451.943.146,00	2.777.420.060.000,00	3,701,573,027,000.00	2.777.420.060.000,00	2.777.420.060.000,00	2.777.420.060.000,00
	PENDAPATAN DAERAH	20.793.020.494.729,30	20,767,239,310,197.90	22,863,537,765,500.00	22.227.314.751.554,80	23.797.352.231.367,90	25.381.222.226.944,20

Keterangan : Data Realisasi tahun 2014 (Unaudit Februari 2015), Target RKPD 2015, 2016 dan Perkiraan Maju 2017,2018 sesuai RPJMD Tahun 2014-2019)



Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2018

NO. URUT	URAIAN	REALISASI APBD 2014*)	TARGET RKPD 2015	TARGET APBD 2015	TARGET RKPD 2016	TARGET RKPD 2017	TARGET RKPD 2018
2	BELANJA DAERAH	20.006.881.302.741,00	21.329.789.585.840,50	23.720.919.803.000,00	22.890.877.751.554,80	24.386.821.772.701,40	26.297.375.854.517,60
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.700.106.999.440,50	13.763.001.285.133,50	15.405.542.296.023,00	15.508.039.649.412,80	16.265.699.860.345,40	18.176.253.942.161,40
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.623.569.154.916,00	2.187.983.072.744,00	2.172.654.877.700,00	2.011.772.000.000,00	2.655.718.240.087,07	2.920.410.685.032,68
2.1.2	BELANJA BUNGA	3.921.186.921,11	0,00	2.829.351.760,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	BELANJA HIBAH	4.673.473.429.005,38	4.527.420.060.000,00	5.270.776.500.000,00	5.512.711.000.000,00	5.227.420.060.000,00	5.670.112.751.026,25
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.434.380.000,00	50.000.000.000,00	7.009.544.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH/PROVINSI/KAB UPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	4.934.876.837.720,00	5.066.078.813.909,53	5.020.519.196.563,00	5.512.586.649.412,84	5.988.899.560.258,31	6.465.384.506.102,50
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN	2.362.512.570.627,00	1.831.519.338.480,00	2.856.752.826.000,00	2.320.970.000.000,00	2.243.662.000.000,00	2.970.346.000.000,00



NO. URUT	URAIAN	REALISASI APBD 2014*)	TARGET RKPD 2015	TARGET APBD 2015	TARGET RKPD 2016	TARGET RKPD 2017	TARGET RKPD 2018
	PEMERINTAHAN DESA						
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	93.319.440.251,00	100.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	6.306.774.303.300,49	7.566.788.300.707,00	8.315.377.506.977,00	7.382.838.102.142,00	8.121.121.912.356,00	8.933.234.103.591,00
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	656.596.864.003,00	1.362.021.894.127,00	779.474.111.957,00	1.328.910.858.385,00	1.461.801.944.223,00	1.607.982.138.646,00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.442.720.805.923,69	4.313.069.331.403,00	4.969.939.249.341,00	4.208.217.718.220,00	4.629.039.490.043,00	5.091.943.439.046,00
2.2.3	BELANJA MODAL	1.207.456.633.373,80	1.891.697.075.177,00	2.565.964.145.679,00	1.845.709.525.537,00	2.030.280.478.090,00	2.233.308.525.899,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	20.006.881.302.741,00	21.329.789.585.840,50	23.720.919.803.000,00	22.890.877.751.554,80	24.386.821.772.701,40	26.297.375.854.517,60

Keterangan : Data Realisasi tahun 2014 (Unaudit Februari 2015), Target RKPD 2015, 2016 dan Perkiraan Maju 2017,2018 sesuai RPJMD Tahun 2014-2019)

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2018

NO. URUT	URAIAN	REALISASI APBD 2014*)	TARGET RKPD 2015	TARGET APBD 2015	TARGET RKPD 2016	TARGET RKPD 2017	TARGET RKPD 2018
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.846.787.127.477,63	838.410.350.960,00	1.193.115.370.895,00	863.562.661.488,80	889.469.541.333,46	1.516.153.627.573,47



NO. URUT	URAIAN	REALISASI APBD 2014*)	TARGET RKPD 2015	TARGET APBD 2015	TARGET RKPD 2016	TARGET RKPD 2017	TARGET RKPD 2018
3.1.1	SISA LEBIH PERH. ANGG. TA SEBELUMNYA (SiLPA)	1.846.787.127.477,63	838.410.350.960,00	1.193.115.370.895,00	863.562.661.488,80	889.469.541.333,46	916.153.627.573,47
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	162.733.333.333,36	0	0	0	0	600.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN DAERAH	152.000.000.000,00	200.000.000.000,00	335.733.333.334,00	300.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	10.733.333.333,36	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	200.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0
3.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	1.684.053.794.144,27	100.000.000.000,00	225.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	1.846.787.127.477,63	0	10.733.333.334,00	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	1.846.787.127.477,63	638.410.350.960,00	857.382.037.561,00	563.562.661.488,80	489.469.541.333,46	1.416.153.627.573,47

Keterangan : Data Realisasi tahun 2014 (Unaudit Februari 2015) , Target RKPD 2015, 2016 dan Perkiraan Maju 2017,2018 sesuai RPJMD Tahun 2014-2019)



3.2.1 Arah Kebijakan Sumber dan Penggunaan Pembiayaan Pembangunan Daerah

3.2.1.1 Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dihadapkan pada beberapa tantangan sebagai berikut:

- a) Keleluasaan pemerintah daerah yang relatif terbatas di dalam menggali sumber-sumber penerimaan karena sistem *close list* di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan daerah melalui perwujudan kemandirian fiskal daerah;
- c) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pembayaran pajak daerah.
- d) Meningkatnya kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah melalui Perwujudan Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan unuk memenuhi beberapa Tuntutan sebagai berikut:
 - 1) Mendukung Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, dalam mewujudkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - 2) Pengembangan Program Pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan masyarakat Jawa Timur;
 - 4) Pengembangan Program Pendidikan;
 - 5) Pemenuhan terhadap Peningkatan Kebutuhan Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- e) Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
- f) Tuntutan terhadap Pemenuhan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain yang memiliki Potensi Besar untuk dikembangkan menjadi sumber Penerimaan Daerah baru, sehingga mengurangi ketergantungan Pendanaan yang berasal dari Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara "*Limitative/ Closed List*" oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.
- h) Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan yaitu Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang dibagihasilkan (PPh 25/ 29 badan, PPh Pasal



4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, di dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan pendapatan daerah maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2017 diarahkan pada :

1. *Melakukan peningkatan intensifikasi pajak daerah* dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi pajak daerah. Langkah ini akan mampu meningkatkan Pajak Daerah sehingga meminimalkan *gap* antara target dan potensi pajak daerah.
2. *Optimalisasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah.* penataan ulang (restrukturisasi asset) asset daerah perlu dilakukan agar asset daerah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Harapannya dengan pengelolaan asset yang baik akan menghasilkan pendapatan daerah melalui retribusi maupun sistem perjanjian sewa.
3. *Peningkatan kerjasama dan sinergi* dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, Kabupaten/kota, SKPD Penghasil, dan POLRI dalam rangka peningkatan Pajak daerah dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan dan asset daerah.
4. *Meningkatkan kualitas pelayanan* kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal. Selain itu, aparatur dan SKPD penghasil harus didukung dengan *rewards* yang memadai dan *punishment* yang jelas ketika tidak sesuai target dan aturan yang berlaku.
5. *Optimalisasi pengelolaan BUMD.* BUMD sebagai kepanjangan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian, dan sebagai sumber pendapatan daerah harus menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga BUMD akan mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah.

3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kerangka belanja daerah tahun 2017, mengacu pada program prioritas RPJMD Jawa Timur tahun 2014-2019. Selain itu, kerangka belanja daerah juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Pada tahun 2017, pemerintah pusat telah menetapkan tema RKP pada tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Sedangkan, prioritas



pembangunan dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia

Adapun sasaran dari dimensi pembangunan nasional ini adalah sebagai berikut:

- a. Revolusi Mental
- b. Pembangunan Pendidikan
- c. Pembangunan Kesehatan
- d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Sasaran dimensi pembangunan sektor unggulan ini sebagai berikut:

- a. Kedaulatan Pangan
- b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- c. Kemaritiman dan Kelautan
- d. Pariwisata
- e. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Sasaran dimensi pemerataan dan kewilayahan ini sebagai berikut:

- a. Pemerataan Antar kelompok Pendapatan
- b. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- d. Pengembangan Konektivitas Nasional

4. Stabilitas Pedukung Pembangunan

Dalam rangka mendukung terselenggaranya program-program pemerintahan sesuai dengan target dan sasaran, maka perlu didukung oleh stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Pada tahun 2017 perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur orientasi bergeser dari *money follow function* menuju ***money follow program***. Program disini yang dimaksudkan adalah program prioritas daerah, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan system perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. **Holistik- Tematik**

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai kedaulatan pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, Perdagangan serta Pemerintah Daerah.



2. Integratif

Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian kedaulatan pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (Kombinasi berbagai program atau kegiatan)

3. Spasial

Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan

Dengan menyeleraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
3. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan *earmarking* untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20% dan kesehatan sekitar 10%.
4. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
6. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;



7. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.
9. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.
10. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah di arahkan kepada badan /lembaga /organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

3.2.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2017, APBD Provinsi Jawa Timur diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan



kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya.

Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

3.2.2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pencapaian target kinerja pembangunan daerah dari tahun ketahun diharapkan terus mengalami peningkatan dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk mengatasi hal tersebut maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate*



Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional. Dalam upaya merealisasikan kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan daerah diarahkan pada :

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :
 1. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pemerintah daerah. hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership (PPP)* atau telah diregulasi dengan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU), dan sebagai penjabaran pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pelibatan sector *private* dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai skema kerjasama antara lain *build operate and transfer (BOT)*, *build transfer operate (BTO)*, *leases*, *concessions* diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas layanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
 2. Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pemerintah daerah harus menyediakan daftar bidang-bidang yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan, baik pada level provinsi maupun Kabupaten/kota.



SINERGITAS PROGRAM CSR/PKBL



Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, bahwa program Tanggungjawab Sosial Perusahaan meliputi Bina Lingkungan dan Sosial, Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dan Program Langsung pada masyarakat, yang dalam pelaksanaannya meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Penanganan Bencana Alam, Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan lain-lain.

Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis.

Realisasi pelaksanaan TSP tahun 2013, 2014 dan 2015 yang dilaporkan kepada Sekretariat Tim Fasilitasi TSP Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 3.15. dan 3.16. berikut :



Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan CSR/PKBL yang dilaksanakan Perusahaan di Jawa Timur
Tahun 2014-2015

No	Nama Perusahaan	Realisasi Dana CSR / PKBL (Rp.)	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1	PT. Pelindo III Probolinggo	-	100,000,000
2	PT. Pamolite Adhesive Industry	-	144,750,000
3	PT. Paiton Energy	5,313,155,052	4,199,028,013
4	PT. Kutai Timber	-	731,133,300
5	PT. Eastern Tex	-	180,633,610
6	PT. NPR	-	12,000,000
7	PT. NIC	-	34,175,000
8	PT. FCI	-	6,700,000
9	PT. Saorini Agro Asia Corporindo	-	868,650,962
10	PT. Hou Tech	-	15,000,000
11	PT. Karyadibya	-	36,000,000
12	PT. Du Pont	-	11,000,000
13	PT. PQ Silicas Indonesia	-	246,600,000
14	PT. Indolakto Pandaan	-	288,140,850
15	PT. IST	-	55,455,000
16	PT. Matesu Gotty Abady	-	93,000,000
17	PT. Sasana Cita Husada	-	40,000,000
18	PT. Cipta Motor Utama	-	124,200,000
19	PT. Antamoa Indonesia	-	90,000,000
20	PT. Kometech	-	12,000,000
21	PT. Rollent Indonesia	-	12,500,000
22	PT. Sika Indonesia	-	12,000,000
23	PT. GD Indonesia	-	29,000,000
24	PT. Petrokimia	32,504,831,890	110,975,731,890
25	PT. Semen Indonesia	-	5,135,000,000
26	PT. INKA	2,823,778,658	27,120,166,140
27	PT. Bank Pembangunan Daerah	-	377,500,000
28	CIMB Niaga	-	20,000,000
29	Astra International Auto 2000	-	13,583,000
30	PT. Gudang Garam	3,800,891,000	274,000,000
31	Bank Indonesia	-	50,000,000
32	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	-	48,600,000
33	PT. Artha Wenasala Gemilang	-	134,500,000
34	PT. Hyang Seri	-	5,000,000
35	PT. Bank Mandiri	-	1,000,000,000
36	PT. Bank BRI Cab. Malang	-	6,725,000,000
37	PT. Bank BCA Cab. Malang	-	300,000,000



38	Malang Town Square	-	195,500,000
39	Jasa Tirta	-	3,029,000,000
40	PT. Anugerah Citra Abadi	-	8,000,000,000
41	PT. Beiersdorf Indonesia	-	3,000,000,000
42	PT. Telkom Malang	-	1,400,000,000
43	PT. Bentoel Prima	-	2,000,000,000
44	PT. Greenfields Indonesia	753,250,000	1,360,558,780
45	PT. Bank Bukopin	-	2,500,000
46	PT. BPD Jatim	-	680,000,000
47	PT. BTN	353,237,000	130,000,000
48	PT. Telekomunikasi Indonesia	-	8,154,500,000
49	Bank Indonesia	-	200,000,000
50	Bank Jatim	15,473,627,500	225,000,000
51	KUD Tani Bahagia Gudang Mojokerto	-	93,490,000
52	PT. Ittihad Rahmat Utama	-	28,700,000
53	PT. Ridlatama Bahtera Confunction	-	614,383,300
54	PT. Sopanusa Tissue	-	31,950,000
55	Perusahaan Gas Negara	-	4,465,000,000
56	PT. PP Tbk	-	13,500,000
57	PT. Hotel Santika	-	18,456,800
58	PT. ASDP Indonesia Fevy	-	89,000,000
59	PT. Pelindo III	22,169,937,371	350,000,000
60	PT. Pertamina	-	1,301,922,500
61	PT. Semen Basowa	-	110,100,000
62	PT. Telkom	63,590,531,000	1,000,000,000
63	Perhutani	1,950,000,000	562,684,295
64	PT. Jara Silica	-	43,066,000
65	MPS PT Warahma Biki Makmur	-	4,900,000
66	PT Holcim Indonesia	-	6,563,540,809
67	PT Pentawira Agrahasakti	-	102,011,500
68	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-Pabrik	-	749,875,000
69	Perhutani KPH Jatirogo	-	70,870,000
70	Perhutani KPH Kebonharjo	-	130,755,620
71	PT Multicon Indrajaya Terminal	-	148,000,000
72	PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak	-	18,863,037,571
73	PTPN X	-	10,000,000,000
74	PT HM Sampoerna	32,000,000,000	2,805,000,000
75	PT PAL Indonesia	4,110,160,000	1,950,000,000
76	PT Sucofindo	4,054,254,000	1,300,000,000
77	Bank Jatim Cabang Surabaya	-	50,000,000,000



78	Jasa Marga	129,196,860,000	3,532,554,680
79	Petrogas Jatim Utama	-	491,475,500
80	Petrogas Wira Jatim	-	120,306,990
81	Petrogas Jatim Hilir	-	8,225,000
82	Petrogas Jatim Utama Cendana	-	140,000,000
83	Bank BNI Cabang Surabaya	-	3,000,000,000
84	PT. Sidomuncul Tbk	-	250,000,000
85	PTPN X	88,409,792,514	425,000,000,000
86	BNI	5,792,003,075	481,400,332,481
87	Pelindo III Surabaya	22,169,937,371	109,770,000,000
88	BCA	-	4,100,000,000
89	PT. Telkom	-	13,000,000,000
90	BRI Kanwil	1,513,935,225	4,732,560,200
91	PT. SIER	3,174,313,700	4,144,160,370
92	PT Waskita Karya	1,427,500,000	-
93	PG Krebbe Baru	866,268,700	-
94	PG Kebon Agung Malang	2,262,990,670	-
95	PT Kertas Leces	210,405,418	-
96	PT Jamkrindo	422,906,800	-
97	PT Garam	4,264,725,000	-
98	PT CJI	2,555,436,500	-
99	PT Pegadaian Persero	2,709,562,000	-
100	PTPN XI	18,025,524,125	-
101	PT Taspen	315,223,548	-
102	Bank UMKM Jatim	109,100,000	-
103	PT Bukit Asam	20,000,000	-
104	PT Petrogas	489,681,424	-
105	PTPN XII	9,994,781,000	-
106	PT Unilever Indonesia	452,291,800	-
TOTAL		461,110,954,970	1,338,997,965,161

Sumber data : Bappeda Provinsi Jatim (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2014 pelaksanaan TSP di Jawa Timur mencapai Rp. 461,111,054,970,- jumlah tersebut yang dilaporkan oleh 33 Perusahaan di Jawa Timur, sedangkan pada tahun 2015 pelaksanaan TSP yang dilaporkan 91 Perusahaan mencapai Rp.1.338.997.965.161,- sehingga apabila seluruh Perusahaan baik BUMS maupun BUMN dan BUMD melaporkan kegiatan CSR atau PKBL yang dilaksanakan maka jumlahnya akan jauh lebih besar.

Berdasarkan tabel 3.13 Realisasi anggaran program dan kegiatan CSR/TJSL yang dilakukan Perusahaan di Jawa Timur tahun 2014 dan 2015, per



bidang dan kegiatan meliputi : Bidang UMKM atau Kemitraan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Sosial, Sarana Umum, Sarana Ibadah atau Keagamaan, Bencana Alam, Kebudayaan, dan Olah Raga sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan CSR/TJSL pada Bidang yang dilaksanakan Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Bidang	2013		2014		2015	
		Jumlah (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
1	Pendidikan	19,160,309,037	6.05	59,151,362,895	14.7	29,209,562,260	2.18
2	Kesehatan	8,281,056,409	2.62	9,326,304,337	1.99	4,508,803,509	0.34
3	Sarana Umum	6,150,500,693	1.94	57,147,262,349	14.5	24,445,803,344	1.83
4	Lingkungan	2,114,920,947	0.67	5,921,032,500	1.45	25,709,810,305	1.92
5	Sosial	9,197,266,625	2.91	5,301,320,149	1.32	24,650,078,702	1.84
6	Kemitraan	252,968,414,228	79.9	273,282,126,318	53.2	1,222,951,684,041	91.33
7	Sarana Ibadah/ Keagamaan	10,227,904,488	3.23	8,038,506,393	1.91	5,874,693,150	0.44
8	Bencana Alam	185,234,000	0.06	4,933,996,977	1.13	1,405,221,850	0.10
9	Kebudayaan	41,800,000	0.01	552,308,000	0.14	51,750,000	0
10	Olahraga	0		116,080,000	0.03	28,000,000	0
11	Lain-Lain	8,264,832,370	2.61	37,340,655,052	9.55	162,558,000	0.01
	Total	316,592,238,797	100	461,111,054,970	100	1,338,997,965,161	100
	Jumlah Perusahaan	31		33		91	

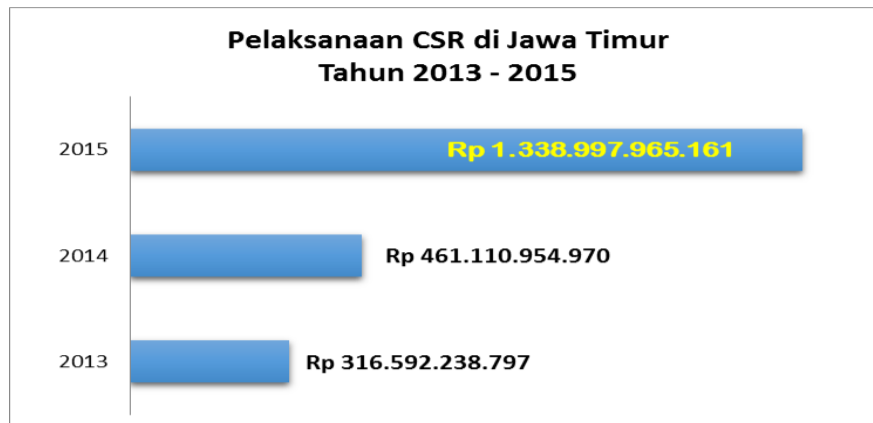
Sumber data : Bappeda Provinsi Jatim (diolah)

Tabel 3.17
Usulan Program CSR Melalui Musrenbang Provinsi Jawa Timur

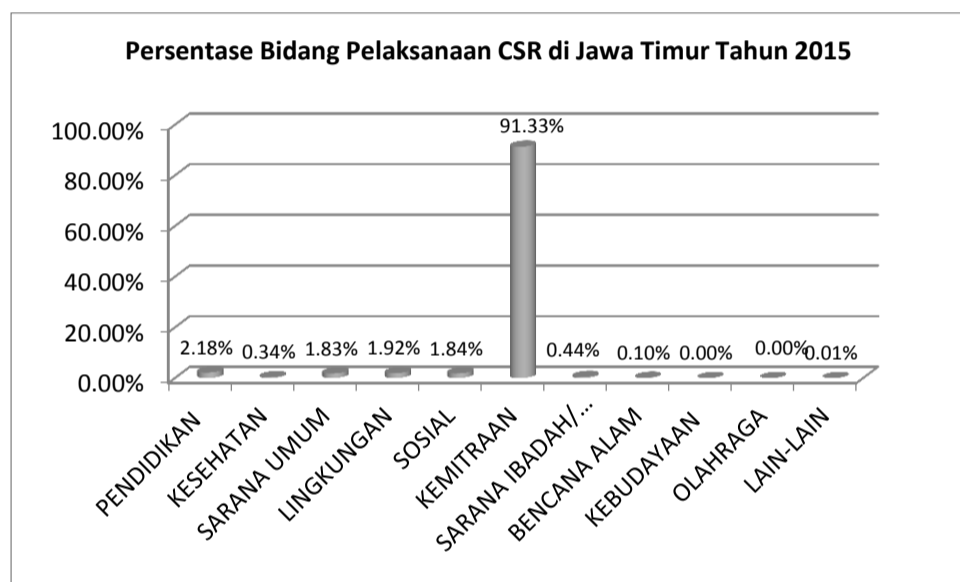
Usulan Program CSR	Jumlah Usulan Kegiatan	Dana Usulan
34 Kabupaten/Kota	1,039	Rp 497,944,585,962
6 SKPD Provinsi	348	Rp 581,366,290,000
Total	1,387	Rp 1.079.310.875.962



Gambar 3.18



Gambar 3.19



2. Arah Kebijakan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, melalui kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 13 dan 363-367 tersirat adanya regulasi kerja sama daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dan Lembaga baik dalam provinsi maupun luar provinsi.

Kerja sama daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kerja sama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerja sama daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah, provinsi akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi.

Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi terutama daerah yang wilayahnya berbatasan secara administratif dengan daerah yang lain bahkan mitra luar negeri dan lembaga/pihak. Untuk itu sangat diperlukan sebuah kerjasama daerah dengan memperhatikan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Terlebih ketika didalamnya adalah pelaksanaan kerjasama yang melibatkan mitra bukan saja antar pemerintah daerah dalam negeri, namun mitra dari luar negeri maupun pihak ketiga.

Isu dan gejala-gejala negatif termasuk egosentris daerah tersebut, tentunya patut mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah baik ditingkat provinsi maupun pusat. Guna melihat kepentingan yang lebih luas bahwa kerjasama daerah bertujuan untuk perekat bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia khususnya Jawa Timur serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapat perhatian serius.

3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta maupun kemitraan dengan lembaga non pemerintah merupakan terobosan yang



bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat (*civil society*).

Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan daerah. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang beraktivitas di wilayah Jawa Timur sehingga program-program dari lembaga donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di masing-masing daerah.

Sementara ini lembaga non pemerintah atau lembaga donor dan NGO yang mempunyai program dan kegiatan yang tercatat di Provinsi Jawa Timur sekitar 22 lembaga non pemerintah atau lembaga donor, namun sesuai catatan dari Kementerian Dalam Negeri sekitar 54 lembaga yang ada di Jawa Timur, sehingga diperlukan kebijakan agar semua lembaga non pemerintah atau NGO yang melakukan kegiatan di Jawa Timur tercatat dan mematuhi peraturan sesuai Petunjuk Umum bagi lembaga Internasional yang akan melakukan kegiatan di Provinsi Jawa Timur, serta melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 bahwa untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan dapat dilaksanakan kerjasama daerah dengan lembaga non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, potensi daerah dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah. Sesuai surat Kemendagri nomor 135/8898/SJ tanggal 20 Desember 2014 bahwa daerah agar membentuk Forum Koordinasi Mitra Pembangunan diwilayah dengan surat keputusan Gubernur, sedangkan tugas dan fungsinya sepenuhnya diserahkan ke masing-masing provinsi lokasi program, dengan dasar surat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/272/KPTS/013/2015 tentang Forum Koordinasi Kemitraan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, isinya menugaskan kepada anggota tim forum koordinasi kemitraan pembangunan, diantaranya melaksanakan sosialisasi forum koordinasi mitra pembangunan, dan



koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dan Integrasi program / kegiatan pembangunan, dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan atau rencana tindak lanjut lembaga internasional / lembaga non pemerintah atau NGO di Jawa Timur.

4. Arah Kebijakan Pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kebijakan pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri diarahkan untuk digunakan pada bidang-bidang yang mempunyai derajat *certainty* yang tinggi utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah. Dalam mendorong kesiapan daerah untuk dapat melakukan pinjaman daerah, misalnya melalui obligasi daerah, dimana peruntukannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan fasilitas yang bersifat *cost recovery*. Misalnya, pinjaman daerah untuk membangun infrastruktur bandara, rumah sakit dan jalan tol.



BAB IV

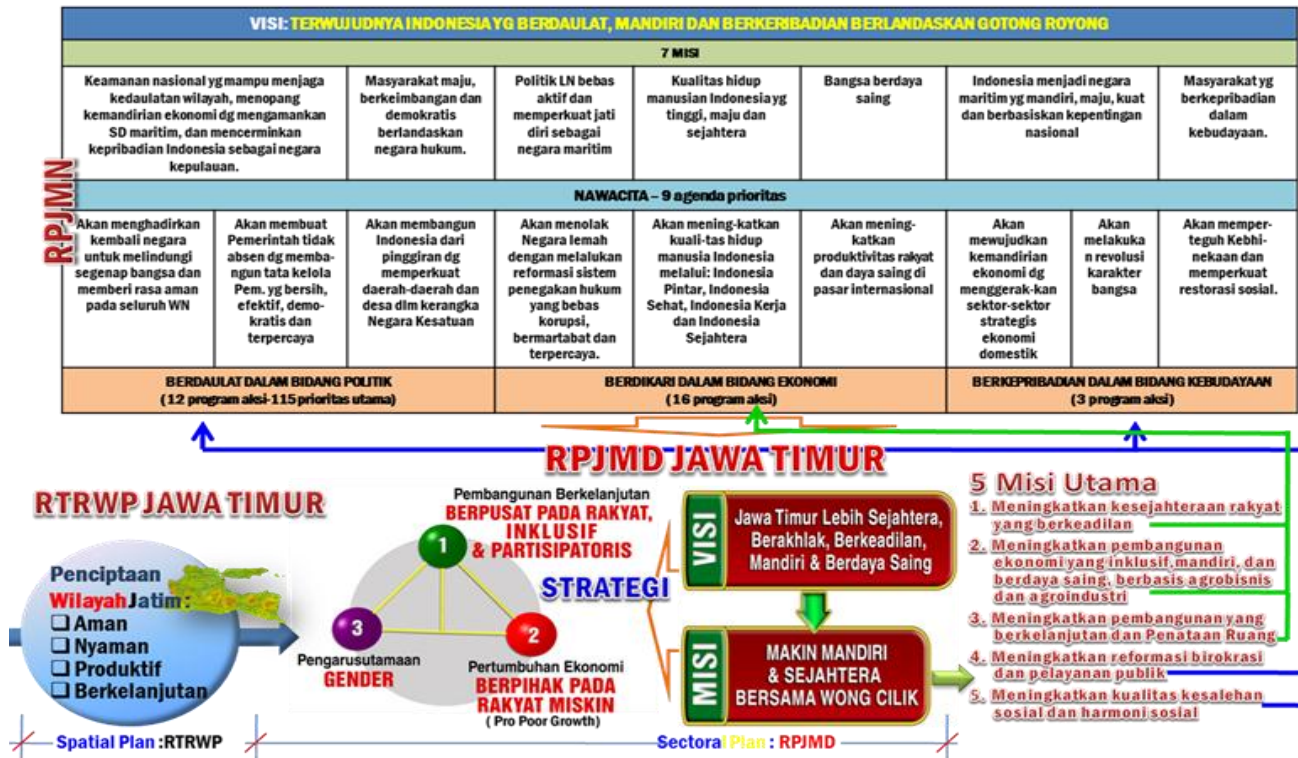
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan nasional merupakan serangkaian program/kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat nasional. Dalam merealisasikannya untuk tujuan tertentu perlu harmonisasi perencanaan karena pada hakekatnya pembangunan nasional juga merupakan agregat dari pembangunan daerah.

Mengingat periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur lebih dahulu (2014-2019) dari perencanaan pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) maka dalam pelaksanaan tahun 2017 perlu dilakukan harmonisasi prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur yang sinergis dengan pembangunan nasional. Penyelarasan prioritas tersebut dilakukan mulai dari pemahaman Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nasional yang kemudian menjadi acuan pendekatan pembangunan daerah. Keselarasan perencanaan tersebut dapat digambarkan dalam tabulasi dan grafik keterkaitan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Harmonisasi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

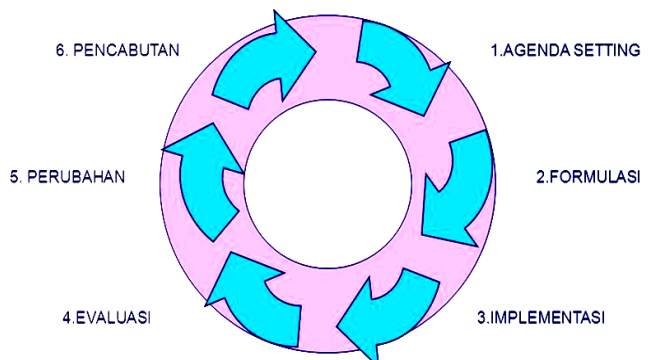


Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 adalah berdasarkan permasalahan yang belum terselesaikan di tahun 2016 dan berkembangnya isu strategis yang urgen untuk segera diselesaikan.

❖ **Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan pada acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan hadir untuk menyelesaikan urusan public (*public affair*), dimana urusan ini menyangkut kepentingan
2. Kebijakan proses dinamis. Kebijakan (Tesis) merupakan Jawaban (Solusi) atas masalah publik (Problem). Input, berupa respon masyarakat (antitesis) merupakan masalah baru sebagai dasar perumusan kebijakan baru (sintesis) dan hal



Gambar 4.2. Siklus Kebijakan (lester and stewart, 2000)



tersebut terus berlanjut membentuk sebuah lingkaran. (SIKLUS KEBIJAKAN).

3. Solusi atas Problem/Isi Kebijakan dapat berupa kebijakan mainstream/Inkremental, dan Inovatif.
4. Inovasi sangat urgen dalam formulasi kebijakan.
5. Indonesia khususnya Jatim belum sepenuhnya siap menghadapi MEA. Indikasinya daya saing produk-produk dalam negeri masih belum siap bersaing secara global. Sedangkan 40% pasar ASEAN terletak di Indonesia.
6. Tingkat Pengangguran terbuka mengalami kenaikan pada tahun 2015, terhambat pada sertifikasi SDM/Profesional/Keahlian tenaga kerja dalam menghadapi MEA
7. Aksesibilitas Infrastruktur transportasi darat dari panjang jalan provinsi Jatim sepanjang 1.760,912 km. Masih terdapat 186,09 km panjang jalan dalam kondisi buruk
8. Perlunya antisipasi perlambatan ekonomi sebagai akibat gejolak perekonomian global maupun penurunan daya beli konsumen.
9. Penguatan UMKM karena Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Jatim cukup besar. Yaitu sebesar 54,98 persen atau senilai Rp. 825 triliun. Dari 6,8 juta UMKM yang ada di Jatim dapat menyerap tenaga kerja sebesar 11,12 juta orang. Sejauh ini, di tengah kondisi krisis ekonomi yang masih berkejang, kondisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Jatim relatif stabil.
10. Perlunya segera menyelesaikan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)
11. Pembangunan inklusif untuk mereduksi potensi radikalisme.
 - a) Variabel, ekonomi, sosial, politik dan budaya sebagai penyebab seseorang untuk bergabung dalam jaringan radikalisme
 - b) Tidak hanya jalur represif, tetapi pendekatan holistik yang meliputi inklusifitas pembangunan agar para penganut radikalisme kegamaan tersebut tidak melakukan resistensi
12. Pendidikan Inklusi
 - a) Eksklusi sosial, terutama pendidikan, masih terjadi di beberapa daerah, seperti pada anak-anak buruh perkebunan Kabupaten Jember, anak buruh migran di Tulungagung dan Trenggalek, pekerja rumah rumah tangga dan anak serta anak yang dilacurkan di Surabaya, maupun kepulauan di Madura.
 - b) Perlu desain pendidikan inklusi, yang mengakomodasi semua anak-anak dari segala lapisan, terutama anak-anak yang tereksklusi (terpinggirkan), baik



karena keterbatasan ekonomi (kemiskinan) maupun keterbatasan fisik (anak dengan kebutuhan khusus/disable).

13. Balita Gizi Buruk, berdasarkan data Dinas Kesehatan
 - a) Pada tahun 2013, balita status gizi buruk sebesar 2,2 persen,
 - b) Pada tahun 2014 menjadi 2,0 persen,
 - c) Pada tahun 2015, meningkat menjadi 2,2 persen, artinya dalam 100 balita terdapat 2 balita lebih yang mengalami gizi buruk.
14. Secara Yuridis Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang juga berpedoman pada RPJMN. Oleh karena itu, Musrembang kali ini, yang salah satu pedomannya adalah RPJMD Jawa Timur tahun 2014-2019, harus menginternalisasi nilai-nilai Nawa Cita yang menjadi roh RPJMN 2015-2019.
15. Piranti Hukum Kewenangan Provinsi
 - a) Bidang Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas
 - b) Bidang Kehutanan; pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi
 - c) Energi; Ijin usaha pertambangan
 - d) Perikanan dan Kelautan; Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan
 - e) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Fasilitasi kerjasama kawasan perdesaan antar kabupaten .
16. Perlu menghidupkan kembali budaya gotong royong.

Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jawa Timur serta realita tuntutan perkembangan maka isu strategis pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2017 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) terkendala penambahan kewenangan/urusan .

Pendidikan dan Kesehatan merupakan urusan dasar kebutuhan manusia yang wajib diusahakan lebih sistematis untuk mencapai masyarakat yang maju, cerdas dan mandiri. Setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, memiliki hak



yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan jaminan kesehatan yang lebih layak. Mengingat saat ini telah memasuki periode liberalisasi perdagangan ASEAN (AFTA), maka tingkat pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan lebih baik. Di tahun 2017 beban pelayanan dasar untuk urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi bertambah banyak dengan tambahan urusan SMA/SMK. Wilayah pelayanan dasar juga dituntut makin mendekati kepada masyarakat, bahkan dalam cakupan wilayah terkecil di perdesaan.

2. Daya saing kualitas SDM yang relatif masih rendah

Dalam rangka mewujudkan daya saing SDM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kualitas tenaga kerja Jawa Timur yang didominasi sekitar 70 % lulusan pendidikan SD & SMP akan menghadapi masalah serius jika sejak dini tidak dicarikan solusi antisipatif. Keterampilan yang dapat memenuhi tuntutan dunia kerja serta standarisasi keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikasi terstandart internasional menjadi kebutuhan yang mendesak untuk disegerakan di samping pemenuhan pendidikan inklusi di Jawa Timur.

3. Kemiskinan yang stagnan dan Pengangguran yang cenderung meningkat

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu hal yang kompleks serta multidimensi karena menyangkut berbagai faktor, yaitu: sosial, budaya, agama, pola pikir masyarakat, semangat juang, psikologi masyarakat, gaya hidup dan lain-lain. Penanggulangan kemiskinan juga erat kaitannya dengan faktor tuna usaha atau pengangguran. Oleh karena itu pengentasan penduduk miskin layak disinergikan dengan pengurangan tingkat pengangguran yang di akhir tahun 2015 mulai terlihat trend yang meningkat. Solusi multi dimensi menjadi tuntutan di era globalisasi yang membutuhkan tenaga kerja lebih produktif serta kesetaraan gender.

4. Momentum Industri dan Perdagangan yang mulai membaik.

Gejolak perekonomian global berimbas pada melambannya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kinerja sektor Industri pengolahan yang juga melamban. Kondisi tersebut terjadi sampai dengan triwulan III – 2015. Ada momentum yang berbeda ketika memasuki Triwulan IV – 2015 dimana indek



tendensi konsumen mulai menaik (akselerasi) dan kinerja sektor perdagangan tumbuh akselerasi bahkan melebihi total pertumbuhan PDRB induknya. Fenomena ini mengindikasikan adanya pasar yang mulai bergairah yang menuntut supply industrialisasi (bahkan IKM) yang cenderung meningkat pula. Mengingat kewenangan Pemerintah Provinsi lebih kepada pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), maka inovasi terkait potensi ketenagakerjaan yang masih didominasi di sektor pertanian dan elastisitas yang lebih tinggi di sektor industry menjadi urgen untuk disolusikan.

5. Pengembangan Koperasi dan UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena keberadaannya dalam situasi kondisi global saat ini yang penuh ketidakpastian masih mampu sebagai penopang ekonomi, disamping itu keberadaannya sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku terhadap total PDRB yang cukup baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur yaitu sebesar 54,98%. Disisi lain, perkembangan Koperasi sebagai salah satu entitas ekonomi di Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik, total koperasi tumbuh dari 19.369 unit pada tahun 2009 menjadi 30.053 unit pada tahun 2015. Diperlukan solusi konkrit pada upaya peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM dalam rangka menghadapi liberalisasi perdagangan yang sudah di depan mata.

6. Peningkatan kedaulatan pangan di tengah kondisi alih fungsi lahan yang meningkat dan minat bertani berkurang

Produksi dan ketersediaan komoditas pangan Jawa Timur hampir semuanya telah melebihi kebutuhan konsumsi seluruh penduduk, namun sebagai lumbung pangan pangan Nasional upaya peningkatan produksi dan produktivitas



komoditas pangan harus terus dilakukan mengingat kebutuhan pokok manusia tidak pernah akan berkurang dikondisi alih fungsi lahan yang terus mengalami peningkatan dan minat masyarakat untuk berbudidaya di sektor pertanian yang terus menurun.

7. Peningkatan infrastruktur masih terkendala pembebasan lahan

Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran akan kemampuan tingkat produksi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak tersedia infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah kunci bagi perkembangan ekonomi. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional.

8. Kinerja Kemaritiman dan Kelautan yang belum optimal

Sebagian besar wilayah Jawa Timur berada di wilayah pesisir, yaitu sebanyak 22 dari 38 Kabupaten/Kota mempunyai wilayah pesisir, namun produksi perikanan tangkap masih dibawah potensi, tingkat kesejahteraan nelayan masih rendah dan pembangunan kemaritiman belum optimal. Kondisi ini ditandai dengan (1) Sarana prasarana perhubungan laut (pelabuhan, Transportasi/Kapal Penyeberangan) masih belum memadai (2) Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan Belum pula memadai (3) Sarana Prasarana tangkap yang dimiliki nelayan masih sangat kurang sehingga jangkauan area melaut menjadi sangat terbatas; akibatnya hasil penangkapan ikan menjadi rendah. Ditandai pula dengan belum adanya jaminan keselamatan bagi nelayan, masih Rendahnya Akses Permodalan serta Belum berkembangnya Wisata Bahari.

9. Harmonisasi sosial yang terdegradasi globalisasi

Penguatan jiwa bangsa yang dimulai dari jiwa manusia/masyarakatnya menjadi sebuah modal yang kuat untuk lebih maju dimana bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Keanekaragaman tersebut juga



menjadi perhatian di dalam Nawa Cita dimana menyebutkan memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial. Memperteguh kebhinekaan merupakan sebuah upaya lebih keras bangsa dan negara untuk jauh lebih mampu menghargai keberagaman dan keanekaragaman masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, upaya dalam memperteguh kebhinekaan adalah dengan memperkuat restorasi sosial. Perwujudan keadaan harmoni sosial menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merepresentasikannya menjadi salah satu misi pembangunan jangka menengah. Fokus perhatian salah satu misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut masih terkendalam permasalahan sosio kultural yang beraneka ragam.

Memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional yang untuk tahun 2017 mengambil tema : “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”, maka tema RPPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah “Pembangunan Yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia Dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik”.

Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan capaian tahun 2015 beserta analisis keterkaitan antar capaian indikator kinerja utama tahun-tahun sebelumnya (analisis Bab III) maka ditetapkan target kinerja pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Indikator Kinerja Utama RPPD 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Hasil Analisis BAB III	RPPD 2017
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,5 – 8,0	5,47	5,5 – 6,0
2	Indeks Gini	0,351-0,348	0,32	0,35 – 0,40



3	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah)	20,96 - 21,08	-		
4	Tingkat Kemiskinan (%)	11,21 – 10,71	11,50	11,5 – 12,0	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,02 – 3,43	4,25	4,02 – 4,25	
6	Indeks Pembangunan Manusia	75,53 – 76,29	68,52	68,5 – 70,0	
7	Indeks Pembangunan Gender	69,01 – 69,61	-	69,0 - 69,6	
8	Kualitas Air Sungai	a. BOD (mg/l)	3,56 – 3,54	-	3,56 – 3,54
		b. COD (mg/l)	10,84 – 10,80	-	10,84 -10.80

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 disusun sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD 2014-2019 yang memuat Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019: "**Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak** "

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 tersebut, maka didukung dengan misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah: "**Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik**". Lima misi "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik" untuk mewujudkan visi "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak," adalah sebagai berikut:



Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia..

RKPD 2017 merupakan penjabaran pelaksanaan pelaksanaan RPJMD 2014-2014 tahun ketiga. Strategi dan arah kebijakan RKPD 2017 harus selaras dengan RPJMD 2014-2019. Hubungan antara Strategi dan arah kebijakan RKPD 2017 terhadap visi, misi dan strategi, arah kebijakan RPJMD disajikan pada Tabel 4.2.



Tabel 4.2.

Keterkaitan Strategi dan arah kebijakan RKPD 2017 terhadap Visi, Misi dan Strategi, Arah Kebijakan RPJMD 2014-2019

RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak	MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja	1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, <i>job fair</i> , magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, <i>job fair</i> , magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta keterampilan tenaga kerja	1. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri dan produktif	2. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta keterampilan tenaga kerja	1. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri dan produktif
					2. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas		2. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				3. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi	Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa	3. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi	Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa
				4. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif	Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif	4. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif	Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif
				5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar	Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu	5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar	Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				negeri		negeri	
			2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	1. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru 2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	1. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru 2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif
		2. Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan	1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus		2. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus
				2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan	1. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan	1. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.		2. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.
					3. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (<i>bridging program</i>) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi		3. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (<i>bridging program</i>) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
			2. Meningkatkan	1. Meningkatkan aksesibilitas, dan	Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu	1. Meningkatkan aksesibilitas, dan	Pengembangan PAUD secara holistik dan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	kualitas PAUD		kualitas PAUD	terpadu
					Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan		Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan
			3. Meningkatkan mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan	2. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan	1. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata	2. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan	1. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata
					2. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas		2. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas
					3. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi		3. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					4. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta		4. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta
				3. Meningkatkan minat baca masyarakat	Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu	3. Meningkatkan minat baca masyarakat	Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu
			4. Meningkatkan kualitas peran pemuda, dan	1. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	1. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			prestasi olahraga	2. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS	2. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS
				3. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	3. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			merata	2. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai dengan standar	2. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai dengan standar
				3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis serta obat-obatan secara merata sesuai dengan standar kesehatan	3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis serta obat-obatan secara merata sesuai dengan standar kesehatan
			2. Menurunkan angka kematian bayi, dan angka kematian	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			ibu melahirkan		mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).		desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).
			3. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata	1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata
				2. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif	2. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu	Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu	Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur
				2. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin	Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan	2. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin	Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Meningkatkan akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi	Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan	Peningkatan dan penguatan revitalisasi program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga	Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan	Peningkatan dan penguatan revitalisasi program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga
		4. Mempercepat dan perluas penanggulangan kemiskinan	1. Menurunkan persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan	1. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-fokus")	1. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program	1. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-fokus")	1. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Kemiskinan		2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin		2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin
					3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin		3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan	Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah	2. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan	Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah
				3. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)	Peningkatan kualitas manajemen Kube yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun ekonomi	3. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)	Peningkatan kualitas manajemen Kube yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun ekonomi



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				4. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial	4. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial
				5. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin	1. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah	5. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin	1. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							suku bunga rendah
					2. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin		2. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin
			2. Menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			aan sosial (PMKS)				
			3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan
	MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis	1. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	1. Meningkatkan volume usaha UMKM, dan kualitas	1. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-	1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan	1. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-	1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi		kelembagaan koperasi	perbankan	usaha	perbankan	pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha
					2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan <i>idle money</i>		2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan <i>idle money</i>
					3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM		3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							kemudahan akses permodalan bagi UMKM
				2. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran	2. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran
					2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi		2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi
					3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional		3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional
					4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin		4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					memadai		produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai
					5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil		5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil
					6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.		6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							Kopwan dan Koppontren.
			3. Meningkatkan jumlah wirausaha baru (WUB)	Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
			4. Meningkatkan volume usaha ekonomi kaum perempuan	Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi	1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan	Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi	1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			n	feminisasi kemiskinan		feminisasi kemiskinan	lembaga keuangan non-perbankan
					2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan		2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan
					3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan		3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							ekonomi kaum perempuan
					4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan		4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan
		2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan)	1. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)	1. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			n, peternaka n, perikanan, dan kehutanan)				baku industri pengolahan (agroindustri)
				2. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	2. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
				3. Mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan	3. Mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				4. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat	Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan	4. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat	Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan
			2. Meningkatkan nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan	1. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	1. Peningkatan nilai tambah (<i>value added</i>) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang (<i>backward linkage</i>) dan ke depan (<i>forward linkage</i>) pada sebaran lokasi potensial yang merata	1. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	1. Peningkatan nilai tambah (<i>value added</i>) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang (<i>backward linkage</i>) dan ke depan (<i>forward linkage</i>) pada sebaran lokasi



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			peternakan)				potensial yang merata
					2. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja		2. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi	Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan	2. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi	Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan
			3. Meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu	Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu	Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi				permodalan
		3. Meningkatkan ketahanan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat (<i>food availability</i>)	Meningkatkan stok pangan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung	Meningkatkan stok pangan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung
			2. Meningkatkan penyerapan pangan (<i>food utilization</i>)	1. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan	Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal	1. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan	Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							lokal
				2. Meningkatkan penanganan keamanan pangan	Pengembangan pengawasan keamanan pangan	2. Meningkatkan penanganan keamanan pangan	Pengembangan pengawasan keamanan pangan
			3. Meningkatkan akses pangan (<i>food acces</i>)	1. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan	1. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan	1. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan	1. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan
					2. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat		2. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat
					3. Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan		3. Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Menjaga stabilitas harga pangan	Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)	2. Menjaga stabilitas harga pangan	Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)
		2. Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	1. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang	1. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang
				2. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional	Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional	2. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional	Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017		
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				3. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	1. Revitalisasi Puspa Agro menjadi <i>trading house</i> produk pertanian Jawa Timur	3. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	1. Revitalisasi Puspa Agro menjadi <i>trading house</i> produk pertanian Jawa Timur	
					2. Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional			2. Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional
					3. Peningkatan performa standarisasi Industri			3. Peningkatan performa standarisasi Industri
		3. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri	Meningkatnya kontribusi sektor industri	1. Meningkatkan pengembangan sektor industri	1. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> yang tinggi	1. Meningkatkan pengembangan sektor industri	1. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki	



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							<i>backward dan forward linkage yang tinggi</i>
					2. Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil		2. Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil
					3. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro		3. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro
				2. Mengembangkan bahan baku substitusi impor	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi	2. Mengembangkan bahan baku substitusi impor	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					impor		bahan pengganti/substitusi impor
		4. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	1. Meningkatkan kunjungan wisata	Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global	1. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan	Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global	1. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan
					2. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional		2. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional
					3. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata		3. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					4. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing		4. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing
					5. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif		5. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					bagi komunitas masyarakat		kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat
					5. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar		5. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar
			2. Meningkatkan kualitas seni budaya lokal	Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal	1. Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional	Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal	1. Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional
					2. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal		2. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							lokal
					3. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air		3. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air
		7. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri, serta investasi daerah	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah	1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	1. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA	1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	1. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan		2. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan
				2. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi	Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	2. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi	Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
				3. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional	3. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara	1. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal	1. Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota	1. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal	1. Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2. Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan Madura, dan pulau-pulau lainnya		2. Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan Madura, dan pulau-pulau lainnya
					3. Pengembangan jalur komuter perkeretapiannya, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (<i>double track</i>)		3. Pengembangan jalur komuter perkeretapiannya, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (<i>double track</i>)
					4. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan		4. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif	1. Pengembangan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel	2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif	1. Pengembangan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel
					2. Pengembangan terminal tipe A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas		2. Pengembangan terminal tipe A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas
					3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum		3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum
					4. Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus		4. Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus
					5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman		5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					Saleh Malang		Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang
					5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan untuk penerbangan antar-kota (city link)		5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan untuk penerbangan antar-kota (city link)
			3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi	1. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak	1. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah	2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
			3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi	1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan	1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam, dan embung	1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan	1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam, dan embung



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			dan pendayagu naan sumber daya air serta pengendali an daya rusak air				
					2. Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) dan sumber air		2. Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) dan sumber air
					3. Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun		3. Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.	2. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2. Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan		2. Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan
					3. Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)		3. Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					4. Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan		4. Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan
			3. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi	1. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	1. Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan	1. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	1. Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan pengelolaan pertambangan/SD Mineral dan Migas	2. Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas	2. Meningkatkan pengelolaan pertambangan/SD Mineral dan Migas	2. Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas
				3. Meningkatkan pengelolaan air tanah	3. Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah	3. Meningkatkan pengelolaan air tanah	3. Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah
				4. Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi	4. Peningkatan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan Early Warning System (EWS) bencana geologi	4. Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi	4. Peningkatan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan Early Warning System (EWS) bencana geologi
			5. Meningkatkan infrastruktur	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan	Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi informasi dan pemberdayaan kelompok	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan	Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi informasi



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			teknologi informasi dan komunikasi	komunikasi	informasi masyarakat	komunikasi	dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
	MISI 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya	1. Meningkatkan luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi	Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek	Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek
			2. Meningkatkan sumber daya air terkonservasi	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi	Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasokan sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigasi pertanian rakyat	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi	Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasokan sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							air irigasi pertanian rakyat
			B. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama	Meningkatkan partisipasi aktif seluruh <i>stakeholder</i> dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut	L. Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup	Meningkatkan partisipasi aktif seluruh <i>stakeholder</i> dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut	L. Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			sumber daya air, DAS, dan wilayah pesisir, serta laut		2. Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, merehabilitasi ekosistem yang rusak, serta menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut		2. Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, merehabilitasi ekosistem yang rusak, serta menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
			4. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1. Peningkatan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah	Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1. Peningkatan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	2. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah	Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah	2. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah	Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah
				3. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur	3. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
				4. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang	4. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				5. Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur	Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	5. Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur	Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
	MISI 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), dan bersih (<i>clean government</i>), serta profesionalisme pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya	1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik	2. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik
			3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	1. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
				2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i>	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i>
			3. Meningkatkan kualitas perencanaan,	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	secara terpadu antar dan lintas SKPD		secara terpadu antar dan lintas SKPD	dan lintas SKPD
			4. Meningkatkan peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan
			5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			daerah	pengelolaan keuangan dan aset daerah		pengelolaan keuangan dan aset daerah	
			5. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan	1. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip pemerintah daerah didukung sistem kearsipan yang komprehensif	1. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip pemerintah daerah didukung sistem kearsipan yang komprehensif
				2. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid	Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan <i>up to date</i>	2. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid	Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan <i>up to date</i>



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			berkualitas				
			3. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	1. Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel.	1. Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel.
				2. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan	Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	2. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan	Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				bencana		bencana	penanggulangan bencana
					Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam		Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam
				3. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)	Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana	3. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)	Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	MISI 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	1. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan	Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah	1. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.	Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah	1. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing					2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing		
3. Peningkatan revitalisasi dan perbaikan situs-situs religi					3. Peningkatan revitalisasi dan perbaikan situs-situs religi		



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan komunikasi antar-umat beragama	Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	<p>1. Peningkatan dan penguatan kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati</p> <p>2. Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial ekonomi</p>	Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	<p>1. Peningkatan dan penguatan kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati</p> <p>2. Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial ekonomi</p>



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					3. Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi agama, suku, ras maupun antar-golongan		3. Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi agama, suku, ras maupun antar-golongan
		3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib	4. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme	4. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme <i>community policing</i>	5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme <i>community policing</i>
				5. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambunga	Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur	5. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambunga	Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				n		n	
		4. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>)	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal	Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal	Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		5. Meningkatkan penegakan supremasi hukum, dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan	7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum
		8. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum, dan penghormatan	8. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum, dan penghormatan	Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM	Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM	Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan



RPJMD 2014 - 2019						RKPD 2017	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			terhadap HAM				
			9. Meningkatkan penguatan <i>civil society</i> dalam bidang hukum dan HAM	Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM	Peningkatan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan <i>civil society</i>	Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM	Peningkatan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan <i>civil society</i>



4.2. Prioritas Pembangunan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan, isu strategis terkini, tema RKPD 2017, strategi, arah kebijakan RPJMD dan RKPD 2017 maka ditetapkan sembilan prioritas dalam RKPD 2017 yang mempertimbangkan pula program prioritas tahun rencana dalam RPJMD 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2) Program Pendidikan Menengah 3) Program Pendidikan Non Formal 4) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7) Program Pendidikan Tinggi 8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 9) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 11) Program Upaya Kesehatan Perorangan 12) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan 13) Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 14) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 15) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 16) Program Upaya Kesehatan Perorangan 17) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 18) Program Pengendalian Penyakit 19) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2) Program Pemberdayaan Sosial 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 5) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan)



<p>6) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian</p> <p>7) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan</p> <p>8) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan</p> <p>9) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>11) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan</p> <p>12) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>13) Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur</p> <p>14) Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur</p> <p>15) Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur</p>	<p>2. Pengembangan kualitas SDM</p>
<p>1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja</p> <p>2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>3) Program Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>4) Program Ketrasmigrasian</p> <p>5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>6) Program Perluasan dan Penempatan Kerja</p> <p>7) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</p> <p>8) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja</p> <p>9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p> <p>10) Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>11) Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan</p>	<p>3. Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran</p>
<p>1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>2) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor</p> <p>3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>4) Program Peningkatan Standarisasi Industri</p> <p>5) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor</p> <p>6) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>7) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri</p> <p>8) Program Penataan Struktur Industri</p>	<p>4. Pengembangan industri dan perdagangan</p>



<p>9) Program Peningkatan Standarisasi Industri</p> <p>10) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam</p> <p>11) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>12) Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata</p> <p>13) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>14) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>15) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>16) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</p> <p>17) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>18) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat</p> <p>2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> <p>3) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro</p> <p>4) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</p> <p>5) Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi</p> <p>6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</p> <p>7) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <p>1) Program peningkatan Produksi Pertanian</p> <p>2) Program peningkatan Produksi Perkebunan</p> <p>3) Program peningkatan Produksi Peternakan</p> <p>4) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian</p> <p>5) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan</p> <p>6) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan</p> <p>7) Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan</p> <p>8) Program Peningkatan Ketahanan pangan</p> <p>9) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan</p> <p>10) Program Konservasi Sumber Daya Air</p> <p>11) Program Pendayagunaan Sumber Daya Air</p> <p>12) Program Pengendalian Daya Rusak Air</p> <p>1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA</p> <p>2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan</p>	<p>5. Pengembangan Koperasi dan UMKM</p> <p>6. Peningkatan kedaulatan pangan</p> <p>7. Peningkatan infrastruktur</p>
---	--



<p>Jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 8) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut 9) Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi 10) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian 11) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 12) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 13) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 14) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 15) Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi 16) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut 17) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara 18) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi 19) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum 20) Program Pengembangan Perumahan 21) Program Pengelolaan Air Tanah 22) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan 23) Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas 24) Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi 25) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 26) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 27) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 28) Program Perencanaan Tata Ruang 	
--	--



<p>29) Program Pemanfaatan Ruang 30) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan 2) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 7) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 8) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9) Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan</p>	<p>8. Kemaritiman dan kelautan</p>
<p>1) Program Pengembangan Nilai Budaya 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4) Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi 5) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 6) Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 7) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 8) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 9) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 10) Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana 11) Program Pembentukan Produk Hukum 12) Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum 13) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian 14) Program Peningkatan Kerjasama 15) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 16) Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 17) Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum 18) Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat 19) Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi</p>	<p>9. Harmonisasi sosial</p>



- 20) Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi
- 21) Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan
- 22) Program Dukungan Pelayanan Umum
- 23) Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI
- 24) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran
- 25) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi
- 26) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 27) Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik
- 28) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 29) Program Pengembangan Teknologi Informatika
- 30) Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)
- 31) Program Pos dan Telekomunikasi
- 32) Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi
- 33) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 34) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 35) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 36) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
- 37) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
- 38) Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan
- 39) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 40) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA
- 41) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 42) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 43) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 44) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
- 45) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
- 46) Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan



<p>Pembangunan</p> <p>47) Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional</p> <p>48) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan</p> <p>49) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>50) Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa Timur</p> <p>51) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan</p> <p>52) Program pengembangan Data Informasi</p> <p>53) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>54) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>55) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</p> <p>56) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</p> <p>57) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</p> <p>58) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama</p> <p>59) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>60) Program Perbaikan Proses Politik</p> <p>61) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>62) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>63) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</p> <p>64) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM</p> <p>65) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>66) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</p>	
--	--



Tabel 4.4

KETERKAITAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPd DENGAN TUJUAN SASARAN DAN PRIORITAS RKP 2017

No	RKPd 2017			RKP 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Prioritas
	1. Peningkatan mutu pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan)	1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan 3. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD 4. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan 5. Meningkatkan minat baca masyarakat 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa,	1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus 3. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan	- Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, membaiknya status gizi masyarakat, serta menurunnya penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya akses secara finansial maupun geografis terhadap pelayanan	- Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat - Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular - Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesehatan (sedang dikembangkan) - Meningkatkannya Jumlah Dokter yang Meresepkan Obat Rasional kepada	- Penguatan Upaya Promotif dan Preventif: "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat" - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan - Perbaikan Gizi Masyarakat - Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi



	<p>dan wilayah kepulauan</p> <p>7. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan</p> <p>8. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan</p> <p>9. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita</p> <p>10. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan</p>	<p>Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah</p> <p>4. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.</p> <p>5. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi</p>	<p>kehatan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan</p> <p>– Menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, toleran, disiplin, serta menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nirkekerasan di setiap satuan pendidikan.</p>	<p>Pasien</p> <p>– Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun</p> <p>– Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun</p> <p>– Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B</p> <p>– Persentase SD/MI berakreditasi minimal B</p> <p>– Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal</p> <p>– Persentase SMA/MA berakreditasi minimal BB</p>	<p>– Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata</p> <p>– Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</p> <p>– Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif</p> <p>– Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas</p> <p>– Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter</p> <p>– Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas</p> <p>– Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi</p> <p>– Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi dan Daya Saing Perguruan Tinggi</p> <p>– Peningkatan Relevansi</p>
--	---	--	--	---	---



		<p>jaringannya</p> <p>11. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif</p> <p>12. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin</p> <p>13. Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan</p>	<p>6. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu</p> <p>7. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan</p> <p>8. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata</p> <p>9. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas</p> <p>10. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi</p> <p>11. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B - Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya - Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya - Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya - Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogi (<i>subject knowledge</i> dan <i>Pedagogical</i>) 	<p>Pendidikan</p>
--	--	---	---	---	-------------------



			<p>penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta</p> <p>12. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu</p> <p>13. Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan</p> <p>14. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai</p>	<p><i>knowledge</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, - sertifikasi palsu, plagiarisme) - Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi serta kekerasan - (<i>bullying-free environment</i>) - Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman - Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang 	
--	--	--	---	---	--



			<p>dengan standar</p> <p>15. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis serta obat-obatan secara merata sesuai dengan standar kesehatan</p> <p>16. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).</p> <p>17. Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan</p>	menumbuhkan akhlak mulia	
--	--	--	---	--------------------------	--



			<p>jaringannya secara merata</p> <p>18. Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitative</p> <p>19. Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur</p> <p>20. Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan</p> <p>21. Peningkatan dan penguatan revitalisasi program KB untuk</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			meningkatkan kualitas hidup keluarga.			
	2. Pengembangan kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta keterampilan tenaga kerja 2. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif 3. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri dan produktif 2. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas 3. Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk 	Revolusi Mental merupakan upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan yang religius. Revolusi Mental harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa yang ditempuh melalui peningkatan peran dan efektivitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan serta pranata sosial-	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Integritas - Meningkatnya Etos Kerja - Meningkatnya Gotong Royong 	Pembangunan Revolusi Mental dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, yaitu setiap sasaran revolusi mental dicapai melalui pelaksanaan program prioritas secara sinergis, melibatkan seluruh aspek terkait dan terpadu.



	<p>Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu</p> <p>5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya</p> <p>7. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan</p>	<p>melakukan usaha produktif</p> <p>4. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu</p> <p>5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</p> <p>6. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan</p>	<p>budaya di masyarakat dengan mengubah pola pikir dan perilaku lama yang tidak sesuai dengan cita-cita membangun bangsa yang maju, modern, dan mandiri.</p> <p>Revolusi Mental mendorong Indonesia tumbuh menjadi bangsa unggul, yang berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan Revolusi Mental bertumpu pada pilar Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari</p>		
--	---	---	--	--	--



		keuangan dan aset daerah		secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.		
	3. Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-fokus") Meningkatkan keberlangsungan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan lapangan kerja Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja Peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil, penguatan koperasi, serta pengembangan Kewirausahaan Akses terhadap pelayanan dasar Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah Penciptaan Lapangan Kerja dan Keahlian Tenaga Kerja



		<p>usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan</p> <p>5. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin</p> <p>6. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS</p> <p>7. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan</p>	<p>3. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program</p> <p>4. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin</p> <p>5. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan</p>			
--	--	---	---	--	--	--



			<p>masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin</p> <p>6. Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah</p> <p>7. Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar social</p> <p>8. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah</p> <p>9. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan</p> <p>10. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan</p> <p>11. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan</p> <p>12. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan</p> <p>13.</p>			
	4. Pengembangan industri dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif 2. Memperkuat dan memperluas pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru 2. Peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi dunia yang mulai pulih menjadi momentum yang baik bagi pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%) - Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB (%) - Kontribusi produk 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor - Peningkatan realisasi investasi berorientasi ekspor - Peningkatan ekspor



		<p>dalam dan luar negeri</p> <p>3. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional</p> <p>4. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal</p> <p>5. Meningkatkan pengembangan sektor industri</p> <p>6. Mengembangkan bahan baku substitusi impor</p> <p>7. Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global</p> <p>8. Meningkatkan pengembangan kualitas, dan</p>	<p>perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif</p> <p>3. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang</p> <p>4. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional</p> <p>5. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri</p>	<p>usaha dalam negeri untuk beralih dari pasar dalam negeri menjadi berorientasi ekspor, khususnya untuk produk nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada peningkatan konsumsi masyarakat.</p> <p>– Pada tahun 2017, investasi tetap</p>	<p>manufaktur terhadap total ekspor (%).</p> <p>– Peringkat Indonesia pada EoDB</p> <p>– Pertumbuhan</p>	<p>produk KUMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor – Penguatan <i>marketintelligence</i>, promosi, dan asistensi ekspor – Peningkatan efektivitas kerjasama perdagangan internasional (<i>MARKET ACCESS</i>) – Pengembangan fasilitasi ekspor <p>– Peningkatan kemudahan</p>
--	--	--	---	--	--	--



	<p>pelestarian warisan seni budaya lokal</p> <p>9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi</p> <p>11. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi</p> <p>12. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu</p>	<p>kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi</p> <p>6. Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil</p> <p>7. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro</p> <p>8. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor</p> <p>9. Peningkatan pengembangan</p>	<p>didorong sebagai penggerak ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih produktif. Dalam rangka pencapaian target investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha menjadi prasyarat mutlak untuk mendorong investasi tumbuh</p>	<p>Investasi (PMTB) (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)* - Kontribusi PMDN (%) 	<p>berusaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Deregulasi dan Harmonisasi - Regulasi Perizinan Investasi Pusat dan Daerah - Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu - Peningkatan Persaingan Usaha Yang Sehat - Percepatan Fasilitasi - Penyelesaian Masalah Investasi - Pembenahan Iklim Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial Yang Harmonis - Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Strategis
--	--	---	---	---	---



			<p>destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan</p> <p>10. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional</p> <p>11. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata</p> <p>12. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk</p>	<p>dengan laju yang tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomiu di luar Pulau Jawa terwujud dalam kebijakan pembentukan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Percepatan Pertumbuhan Industri - Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan Industri/ KEK - Penumbuhan Populasi Industri - Penguatan pertumbuhan Ekonomi Kreatif SDM Industri yang kompeten dan Disiplin - Produktivitas dan daya saing Industri - Ketersediaan Infrastruktur dan - Ketersediaan dan Energi - Kualitas Bahan Baku bagi Industri - Hubungan Industrial yang Harmonis - Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis - Pembiayaan dengan akses
--	--	--	---	---	---	---



			<p>meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing</p> <p>13. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat</p> <p>14. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar</p> <p>15. Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan</p>	<p>Sulawesi, Maluku dan Papua.</p> <p>Pembentukan KI dan KEK ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berlandaskan kepada penciptaan nilai tambah pada produk industri berbasis hasil bumi (hilirisasi).</p>	<p>dan biaya yang kompetitif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Investasi di Bidang Industri Manufaktur - Peningkatan Akses ke Pasar Global (Ekspor)
--	--	--	--	--	--



			<p>internasional</p> <p>16. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya local</p> <p>17. eningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air</p> <p>18. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA</p> <p>19. Pengembangan hilirisasi industri untuk</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan</p> <p>20. Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan</p> <p>21. Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional</p> <p>22.</p>			
	5. Pengembangan Koperasi dan UMKM	<p>1. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)</p> <p>2. Memperluas akses permodalan bagi</p>	<p>1. Peningkatan kualitas manajemen Kube yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun ekonomi</p> <p>2. Perluasan jaringan akses permodalan</p>	– Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga	<p>– Penciptaan lapangan kerja</p> <p>– Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja</p> <p>– Peningkatan produktivitas usaha</p>	<p>– Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah</p> <p>– Penciptaan lapangan kerja dan Keahlian Tenaga Kerja</p> <p>– Perhatian khusus pada usaha mikro dan kecil</p>



		<p>UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan</p> <p>3. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi</p> <p>4. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru</p>	<p>UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha</p> <p>3. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan idle money</p> <p>4. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM</p> <p>5. Perluasan cakupan</p>	<p>pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Perbaikan distribusi ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.</p> <p>- Pertumbuhan ekonomi dunia yang mulai pulih</p>	<p>mikro dan kecil, penguatan koperasi, serta pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewirausahaan - Akses terhadap pelayanan dasar - Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan <p>- Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB (%) - Kontribusi produk 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kewirausahaan - Perkuatan basis perekonomian perdesaan - Perluasan pelayanan dasar - Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan <p>- Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor</p>
--	--	---	---	--	---	---



			<p>kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran</p> <p>6. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi</p> <p>7. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri,</p>	<p>menjadi momentum yang baik bagi pelaku usaha dalam negeri untuk beralih dari pasar dalam negeri menjadi berorientasi ekspor, khususnya untuk produk nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada peningkatan konsumsi masyarakat.</p>	<p>manufaktur terhadap total ekspor (%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan realisasi investasi berorientasi ekspor - Peningkatan ekspor produk KUMKM - Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor - Penguatan <i>market intelligence</i>, promosi, dan asistensi ekspor - Peningkatan efektivitas kerjasama perdagangan internasional (<i>MARKET ACCESS</i>) - Pengembangan fasilitasi ekspor
--	--	--	---	---	---	--



			<p>selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional</p> <p>8. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai</p> <p>9. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil</p> <p>10. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.</p> <p>11. Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan</p> <p>12.</p>			
	6. Peningkatan kedaulatan pangan	<p>1. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)</p> <p>2. Meningkatkan</p>	<p>1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi</p>	<p>Pembangunan kedaulatan pangan akan menyelaraskan kebijakan produksi pangan dengan pergeseran permintaan. Dari sisi konsumsi, kebijakan pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi Dalam Negeri untuk Kedaulatan Pangan - Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain - Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat - Penanganan Gangguan terhadap Produksi Pangan - Peningkatan, Mutu Pangan, Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi



		<p>pengendalian alih fungsi lahan pertanian</p> <p>3. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat</p> <p>4. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)</p> <p>5. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan,</p>	<p>dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)</p> <p>2. Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</p> <p>3. Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan</p> <p>4. Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan</p>	<p>diarahkan pada perbaikan kualitas konsumsi gizi masyarakat, ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga pangan. Pada sisi produksi, kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas, diversifikasi, dan penanganan gangguan terhadap produksi pangan. Selain itu, efisiensi rantai pasokan dan distribusi yang didukung oleh peningkatan pendidikan dan pengetahuan di bidang pertanian serta data yang</p>		Masyarakat
--	--	--	--	--	--	------------



	<p>perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi</p> <p>6. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu</p> <p>7. Meningkatkan stok pangan masyarakat</p> <p>8. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan</p> <p>9. Meningkatkan penanganan keamanan pangan</p> <p>10. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan</p> <p>11. Menjaga stabilitas harga pangan</p> <p>12. Meningkatkan</p>	<p>(forward linkage) pada sebaran lokasi potensial yang merata</p> <p>5. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja</p> <p>6. Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan</p> <p>7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan</p>	<p>akurat dari tingkat petani hingga konsumen menjadi bagian dari kebijakan kedaulatan pangan ini.</p>		
--	--	---	--	--	--



		<p>konservasi sumber daya air secara berkelanjutan</p> <p>13. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>14. Meningkatkan pengelolaan air tanah</p> <p>15. Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan</p> <p>16. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi</p>	<p>masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung</p> <p>8. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan local</p> <p>9. Pengembangan pengawasan keamanan pangan</p> <p>10. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan</p> <p>11. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat</p> <p>12. Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan</p> <p>13. Pengendalian harga</p>			
--	--	---	--	--	--	--



			<p>pangan pokok, dan pengembangan sistem infomasi pasar (pasokan, harga dan akses)</p> <p>14. Revitalisasi Puspa Agro menjadi trading house produk pertanian Jawa Timur</p> <p>15. Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional</p> <p>16. Peningkatan performa standarisasi Industri</p> <p>17. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam, dan embung</p> <p>18. Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) dan</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>sumber air</p> <p>19. Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun</p> <p>20. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan antara lain melalui kegiatan pengembangan dan</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>pengelolaan sistem irigasi partisipatif.</p> <p>21. Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan</p> <p>22. Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)</p> <p>23. Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>mengantisipasi bencana kekeringan</p> <p>24. Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah</p> <p>25. Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasokan sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigasi pertanian rakyat</p> <p>26.</p>			
	7. Peningkatan infrastruktur	1. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang	1. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) - Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda (Km) - Terbangunnya jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Laut - Pembangunan dan pengembangan alan untuk Aksesibilitas dan Daya Saing Wilayah



	<p>memadai dan handal</p> <p>2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif</p> <p>3. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi</p> <p>4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>5. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan</p>	<p>pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin</p> <p>2. Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota</p> <p>3. Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di</p>	<p>nasional di seluruh Indonesia, dengan menitikberatkan pada wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil. Konektivitas nasional meliputi pembangunan jaringan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika secara terpadu untuk memperlancar distribusi</p>	<p>baru (Km)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jalan tol (Km) - Terbangunnya bandara baru / peningkatan bandara yang ada - Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) - Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek) - Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek) - Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek) - Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas)\ - Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Bandara Pengumpul dan Pengumpan - Pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran pembangunan dan Pengembangan Transportasi Perkeretaapian - Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Sabuk Penyeberangan serta Angkutan Sungai dan Danau (<i>Inland Waterway</i>) - Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Umum Massal Perkotaan Peningkatan
--	--	---	--	--	---



	<p>ketenagalistrikan</p> <p>6. Meningkatkan pengelolaan pertambangan/ SD Mineral dan Migas</p> <p>7. Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi</p> <p>8. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi</p> <p>9. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah</p> <p>10. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai</p>	<p>wilayah Kepulauan Madura, dan pulau-pulau lainnya</p> <p>4. Pengembangan jalur komuter perkeretaapian, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track)</p> <p>5. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan</p> <p>6. Pengembangan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel</p> <p>7. Pengembangan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel</p> <p>8. Peningkatan pembangunan dan pengembangan</p>	<p>barang dan informasi, menekan biaya transportasi dan biaya logistik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan memperkuat daya saing nasional</p>	<p>Pangsa pasar angkutan umum (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya jaringan kereta api perkotaan (kota) - Berkembangnya sistem BRT dan Transit (kota) - Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api) - Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline) - Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota 	<p>Kualitas dan Kuantitas SDM Transportasi</p>
--	---	---	--	---	--



		<p>pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi</p> <p>11. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur</p> <p>12. Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur</p>	<p>9. Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus</p> <p>10. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang</p> <p>11. Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan untuk penerbangan antar-kota (city link)</p> <p>12. Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak</p> <p>13. Peningkatan pemenuhan</p>	<p>- Pengurangan</p>	<p>kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman (termasuk Kawasan Kumuh) - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi - Peningkatan Ketersediaan Air Baku - Fasilitasi Penyediaan
--	--	--	--	----------------------	-----------------------	--



			<p>perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>14. Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan</p> <p>15. Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas</p> <p>16. Peningkatan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan Early Warning System (EWS) bencana geologi</p> <p>17. Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi</p>	<p>kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dimaknai pula dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan atau kota di luar Jawa-Bali. Urbanisasi desa-kota akan semakin meningkat, demikian pula kesenjangan yang menyertainya apabila</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali - Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada - Optimalisasi kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/ PKW dan penyangga urbanisasi di Luar 	<p>Hunian Layak Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan Sistem Perkotaan Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) - Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana - Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK - Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota
--	--	--	---	---	--	--



			<p>informasi dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat</p> <p>18. Peningkatan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah</p> <p>19. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah</p> <p>20. Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur</p>	<p>pembangunan hanya terfokus pada kota-kota atau pada kota-kota di Jawa-Bali. Pembangunan dan penguatan perkotaan di luar Jawa-Bali menjadi fokus pembangunan perkotaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tersebut. Kota-kota perlu disiapkan menjadi Kota Masa Depan yang Berkelanjutan, yang mampu mengelola urbanisasi agar</p>	<p>Jawa</p> <p>– Pembangunan 10 Kota Baru</p>	
--	--	--	---	--	---	--



			21. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang 22. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang	bermanfaat untuk perkembangan kota dan kesejahteraan seluruh masyarakat kota secara berkeadilan		
--	--	--	--	---	--	--



	<p>8. Kemaritiman dan kelautan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir 2. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut 3. Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan 2. Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup 3. Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, merehabilitasi ekosistem yang rusak, serta menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam 	<p>Kemaritiman dan kelautan merupakan salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang menekankan peran laut sebagai sumber kesejahteraan dan kepentingan bangsa ke depan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan posisi geografis dan geo-ekonomi yang strategis memiliki kandungan sumber daya laut yang besar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim - Pemberantasan IUU Fishing - Membangun Konektivitas Nasional - Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> - Konektivitas (tol) laut dan industri maritim - Peningkatan industri perikanan dan hasil laut - Penataan Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari - Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam - Penanggulangan dan penyelesaian <i>Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing</i> dan keamanan laut - Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil
--	------------------------------------	---	--	---	--	---



			pengelolaan sumber daya pesisir dan laut			
	9. Harmonisasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas 2. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda 3. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 4. Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan 5. Meningkatkan efektivitas kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan 2. Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS 3. Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan social 4. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak 	<ul style="list-style-type: none"> - Defi nisi Reformasi Regulasi tersebut merupakan defi nisi umum yang digunakan pada berbagai negara. Tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan kualitas regulasi. Sementara secara jangka panjang, Reformasi Regulasi bertujuan untuk mewujudkan Sistem Regulasi 	Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Otonomi Daerah - Perizinan dan Investasi - Penataan Ruang



	<p>pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan</p> <p>6. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional</p> <p>7. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara</p>	<p>kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan</p> <p>5. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya</p> <p>6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan public</p> <p>7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran</p>	<p>Nasional (SRN) yang berkualitas, sederhana, dan tertib sehingga secara efektif dan efisien akan lebih mampu mendukung upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana ditetapkan di dalam</p> <p>Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.</p> <p>– Prioritas nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah kejadian terorisme – Jumlah operasi terpadu keamanan laut – Laju Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%) – Penyelesaian Kasus 	<ul style="list-style-type: none"> – Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorism – Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali – Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba
--	--	--	---	---	--



	<p>8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif</p> <p>9. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD</p> <p>10. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal</p> <p>11. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid</p> <p>12. Memperkuat tata kelola</p>	<p>8. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</p> <p>9. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date</p> <p>10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD</p> <p>11. Peningkatan koordinasi, integrasi dan</p>	<p>Stabilitas Keamanan dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi</p>	<p>Tindak Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan MEF TNI (%) - Potensi kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%) - Persentase institusi yang melaksanakan pengamanan informasi - Penciptaan birokrasi efektif dan efisien - Penciptaan birokrasi yang melayani 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Prima Kepolisian - Postur Pertahanan Berdaya Gantar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman - Keamanan Data dan Informasi (Keamanan Siber) - Pelaksanaan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 - Penerapan Standar Pelayanan Publik dan
--	---	--	--	--	---



		<p>kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)</p> <p>13. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana</p> <p>14. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)</p> <p>15. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku</p>	<p>sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD</p> <p>12. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan</p> <p>13. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu</p> <p>14. Peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip pemerintah daerah didukung sistem kearsipan yang komprehensif</p> <p>15. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan up to date</p> <p>16. Mengembangkan</p>	tersebut	– Penciptaan birokrasi bersih dan akuntabel	<p>Sistem Informasi Perijinan</p> <p>Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan</p>
--	--	---	--	----------	---	--



		<p>kepentingan dan pemerintah</p> <p>16. Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi</p> <p>17. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban</p> <p>18. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga</p>	<p>sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel.</p> <p>17. Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</p> <p>18. Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam</p> <p>19. Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya</p>			
--	--	--	--	--	--	--



		<p>keamanan lingkungan komunitas</p> <p>19. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan</p> <p>20. Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal</p> <p>21. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum</p>	<p>dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana</p> <p>20. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.</p> <p>21. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing</p> <p>22. Peningkatan revitalisasi dan</p>			
--	--	---	--	--	--	--



		<p>dan HAM</p> <p>22. Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM</p> <p>23. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM</p>	<p>perbaikan situs-situs religi</p> <p>23. Peningkatan dan penguatan kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati</p> <p>24. Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial ekonomi</p> <p>25. Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>agama, suku, ras maupun antar-golongan</p> <p>26. Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme</p> <p>27. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme community policing</p> <p>28. Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur</p> <p>29. Peningkatan fasilitas aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur</p> <p>30. Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas</p> <p>31. Pengembangan dan</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat</p> <p>32. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum</p> <p>33. Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>34. Peningkatan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan civil society			
--	--	--	---	--	--	--



Strategi pembangunan nasional dirumuskan dalam Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan RKPD 2017 harus mempedomani RKP 2017 maka dalam RKPD 2017 Provinsi Jawa Timur disusun prioritas untuk melaksanakan strategi tersebut. Strategi dan arah kebijakan sembilan prioritas provinsi akan saling mendukung untuk mencapai tujuan pada masing-masing dimensi dan kondisi perlu.

Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Manusia

Dimensi Pembangunan Manusia dalam RKPD Jawa Timur 2017 dilaksanakan melalui Prioritas Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan & Kesehatan), Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Kualitas SDM dan Harmonisasi Sosial. Strategi dan arah kebijakan pencapaian dimensi pembangunan manusia disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.5

Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Dimensi Pembangunan Manusia

No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
	1. Peningkatan mutu pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan)	1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan 3. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD 4. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan 5. Meningkatkan minat baca masyarakat 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan 7. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar	1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus 3. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah 4. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah. 5. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi 6. Pengembangan PAUD secara holistik



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>kesehatan</p> <p>8. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan</p> <p>9. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita</p> <p>10. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya</p> <p>11. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif</p> <p>12. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin</p> <p>13. Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan</p>	<p>dan terpadu</p> <p>7. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan</p> <p>8. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata</p> <p>9. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas</p> <p>10. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi</p> <p>11. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta</p> <p>12. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu</p> <p>13. Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan</p> <p>14. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai dengan standar</p> <p>15. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis serta obat-obatan secara merata sesuai dengan standar kesehatan</p> <p>16. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).</p> <p>17. Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata</p> <p>18. Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitative</p> <p>19. Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur</p> <p>20. Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk</p>



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>miskin dan rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan</p> <p>21. Peningkatan dan penguatan revitalisasi program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga</p>
	2. Peningkatan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi 2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak 2. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
	3. Pengembangan kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta keterampilan tenaga kerja 2. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif 3. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu 5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri 6. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya 7. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri dan produktif 2. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas 3. Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu 5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 6. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
		kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	
	4. Harmonisasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas 2. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda 3. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 4. Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan 5. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan 6. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional 7. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten 8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan 2. Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS 3. Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan social 4. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan 5. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi , sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya 6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan public 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat 8. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 9. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date 10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD 11. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>secara efisien dan efektif</p> <p>9. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD</p> <p>10. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal</p> <p>11. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid</p> <p>12. Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)</p> <p>13. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana</p> <p>14. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)</p> <p>15. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah</p> <p>16. Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi</p> <p>17. Memelihara kewaspadaan</p>	<p>pembangunan antar dan lintas SKPD</p> <p>12. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan</p> <p>13. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu</p> <p>14. Peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip pemerintah daerah didukung sistem kearsipan yang komprehensif</p> <p>15. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan up to date</p> <p>16. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel.</p> <p>17. Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</p> <p>18. Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam</p> <p>19. Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana</p> <p>20. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.</p> <p>21. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing</p> <p>22. Peningkatan revitalisasi dan perbaikan situs-situs religi</p> <p>23. Peningkatan dan penguatan kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati</p> <p>24. Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial</p>



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban</p> <p>18. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas</p> <p>19. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan</p> <p>20. Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal</p> <p>21. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM</p> <p>22. Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM</p> <p>23. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM</p>	<p>ekonomi</p> <p>25. Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi agama, suku, ras maupun antar-golongan</p> <p>26. Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme</p> <p>27. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme community policing</p> <p>28. Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur</p> <p>29. Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur</p> <p>30. Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas</p> <p>31. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat</p> <p>32. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum</p> <p>33. Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>34. Peningkatan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan civil society</p>



❖ Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dalam RKPJ Jawa Timur 2017 dilaksanakan melalui Prioritas Peningkatan Kedaulatan Pangan, Peningkatan Infrastruktur, Kemaritiman dan Kelautan, Pengembangan Industri & Perdagangan, Pengembangan Koperasi dan UMKM. Strategi dan arah kebijakan pencapaian dimensi Pembangunan Sektor Unggulan disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

No	RKPJ 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
	1. Peningkatan kedaulatan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) 2. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian 3. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat 4. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) 5. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi 6. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu 7. Meningkatkan stok pangan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri) 2. Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 3. Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan 4. Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (forward linkage) pada sebaran lokasi potensial yang merata 5. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja 6. Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan 7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>8. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan</p> <p>9. Meningkatkan penanganan keamanan pangan</p> <p>10. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan</p> <p>11. Menjaga stabilitas harga pangan</p> <p>12. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan</p> <p>13. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>14. Meningkatkan pengelolaan air tanah</p> <p>15. Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan</p> <p>16. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi</p>	<p>8. Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan local</p> <p>9. Pengembangan pengawasan keamanan pangan</p> <p>10. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan</p> <p>11. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat</p> <p>12. Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan</p> <p>13. Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)</p> <p>14. Revitalisasi Puspa Agro menjadi trading house produk pertanian Jawa Timur</p> <p>15. Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional</p> <p>16. Peningkatan performa standarisasi Industri</p> <p>17. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam, dan embung</p> <p>18. Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) dan sumber air</p> <p>19. Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun</p> <p>20. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.</p> <p>21. Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor</p>



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pertanian dan wilayah pedesaan</p> <p>22. Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)</p> <p>23. Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan</p> <p>24. Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah</p> <p>25. Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasokan sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigasi pertanian rakyat</p>
	2. Peningkatan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan 2. Meningkatkan pengelolaan pertambangan/ SD Mineral dan Migas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan 2. Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah
	3. Kemaritiman dan kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir 2. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut 3. Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan 2. Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup 3. Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, merehabilitasi ekosistem yang rusak, serta menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
	4. Pengembangan	1. Meningkatkan iklim	1. Peningkatan investasi melalui



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
	industri dan perdagangan	<p>investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif</p> <p>2. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri</p> <p>3. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional</p> <p>4. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal</p> <p>5. Meningkatkan pengembangan sektor industri</p> <p>6. Mengembangkan bahan baku substitusi impor</p> <p>7. Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global</p> <p>8. Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal</p> <p>9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi</p> <p>11. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi</p> <p>12. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu</p>	<p>perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru</p> <p>2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif</p> <p>3. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang</p> <p>4. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional</p> <p>5. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi</p> <p>6. Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil</p> <p>7. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro</p> <p>8. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor</p> <p>9. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan</p> <p>10. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional</p> <p>11. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata</p> <p>12. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung</p>



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>wisatawan nusantara serta wisatawan asing</p> <p>13. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat</p> <p>14. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar</p> <p>15. Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional</p> <p>16. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya local</p> <p>17. eningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air</p> <p>18. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA</p> <p>19. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan</p> <p>20. Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan</p> <p>21. Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional</p>
	5. Pengembangan Koperasi dan UMKM	<p>1. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)</p> <p>2. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan</p>	<p>1. Peningkatan kualitas manajemen Kube yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun ekonomi</p> <p>2. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran</p>



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>3. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi</p> <p>4. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru</p>	<p>pembiayaan usaha</p> <p>3. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan idle money</p> <p>4. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM</p> <p>5. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran</p> <p>6. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi</p> <p>7. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional</p> <p>8. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai</p> <p>9. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil</p> <p>10. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.</p> <p>11. Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan</p>



Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Pemerataan Dan Kewilayahan
Dimensi Pembangunan Pemerataan Dan Kewilayahan dalam RKPD Jawa Timur 2017 dilaksanakan melalui Prioritas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran serta Peningkatan Infrastruktur. Strategi dan arah kebijakan pencapaian dimensi Pembangunan Pemerataan Dan Kewilayahan disajikan dalam **Tabel 4.5**.

Tabel 4.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Dimensi Pembangunan
Pemerataan Dan Kewilayahan

No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan 2. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi 3. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-fokus") 4. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan 5. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin 6. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS 7. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 2. Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa 3. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program 4. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin 5. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin 6. Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah 7. Peningkatan keberdayaan



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar social</p> <p>8. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah</p> <p>9. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan</p> <p>10. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan</p> <p>11. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan</p> <p>12. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan</p>
	8. Peningkatan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal 2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif 3. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah 4. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin 2. Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota 3. Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan Madura, dan



No	RKPD 2017		
	Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
		ruang provinsi 5. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur 6. Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur	pulau-pulau lainnya 4. Pengembangan jalur komuter perkeretapian, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track) 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan 6. Pengembangan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel 7. Pengembangan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel 8. Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum 9. Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus 10. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang 11. Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan untuk penerbangan antar-kota (city link) 12. Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi informasi dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat 13. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah 14. Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur 15. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang 16. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada tahun 2017 mendatang didasari pada derivasi harmonisasi Program RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta RKP tahun 2017. Dilakukan pula dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan isu strategis yang berkembang, Aspirasi Masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD yang berkembang di Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Dipertimbangkan pula bahwa program dan kegiatan prioritas yang direncanakan nantinya merupakan stimulus yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama di tahun 2017.

Gambar 5.1 Skema Pencapaian target Indikator Kinerja Utama Jawa Timur
Tahun 2017



Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut 9 Program dan kegiatan terfokus yang didesain dengan pendekatan holistik, tematik dan terintegrasi antar SKPD serta keselarasannya dengan antar tingkatan pemerintahan sebagai berikut :



a) Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan)

Provinsi Jawa Timur mengambil peran menunjang prioritas nasional pada Dimensi Pembangunan Manusia untuk prioritas program Pendidikan dan Kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan prioritas antara lain :

- Peningkatan Rasio SMK 70% dan SMA 30% untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dalam mewujudkan Jatim sebagai Provinsi



Industri dan mempersiapkan intervensi tenaga kerja terampil dari ASEAN yang bebas masuk ke Jawa Timur. Kondisi eksisting hingga tahun 2015, jumlah SMK yang belum mendapatkan akreditasi sebanyak 1.511 program keahlian. Diperlukan upaya yang konkrit dan cepat agar dapatnya mewujudkan kesiapan tenaga terampil

serta akreditasi kelembagaan pengelolanya. Diperlukan pula bantuan sarana penunjang untuk 200 SMK

- Jawa Timur juga dikenal mempunyai cukup banyak sekolah yang berdasar keagamaan (Diniah-Salafiah) dan sebagian diantaranya dalam penyelenggaraan proses belajar mengajarnya belum terdani baik di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Adalah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda untuk memberikan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Diniah dan Salafiah serta Guru Swasta (BPPDGS)/BOSDA MADIN. Ke depan tersisa permasalahan lulusan Sekolah Diniah Salafiah yang masih belum bisa tertampung di lembaga pendidikan tinggi formal. Fenomena ini membutuhkan regulasi dari Pemerintah Pusat yang layan didukung Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Bantuan khusus siswa miskin untuk 61.000 siswa, beasiswa 1.150 Guru MADIN serta stimulan bagi penghafal Al Qur'an merupakan bentuk lain dari prioritas Pemerintah Jawa Timur mewujudkan inklusifnya pelayanan pendidikan.



- Dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Jatim mempunyai 5.700 Ponkesdes sebagai upaya preventif dalam kesehatan hingga menjangkau wilayah terkecil/perdesaan.
- Selain itu, Jatim juga mempunyai JAMKESDA sebagai solusi permasalahan-permasalahan pelayanan kesehatan, antara lain :
 - 1) masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum tercover jaminan kesehatan
 - 2) masih ada masyarakat miskin yang tidak tercover menjadi penerima bantuan iuran (PBI) – jaminan kesehatan nasional (JKN)
 - 3) terdapat pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS kesehatan termasuk untuk pasien PBI
- Guna menyiapkan generasi unggul, inovasi upaya preventif program kesehatan yang dilakukan sedini mungkin dari usia Balita, baik melalui penguatan & pengembangan 130 dari 12.357 Taman Posyandu termasuk Pos PAUD
- Kegiatan lainnya yang juga menjadi prioritas meliputi bebas pasung, pengendalian dan pemberantasan penyakit Kusta, Frambusia , TBC serta pengendalian HIV AIDS dan AIDS.



b) Pengembangan Kualitas SDM

Penunjang dimensi Pembangunan Manusia utamanya pada prioritas revolusi mental dan pendidikan guna menghasilkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDMI ini di Jawa Timur direncanakan melalui kegiatan :

- Untuk meningkatkan Standar lulusan sekolah menengah serta memberikan ketrampilan (skill) praktis yang diminati dunia kerja dilakukan pula inovasi crash program SMK Mini, terutama bagi santri pondok pesantren, yang menunjang program nasional Santri Go Industri serta dalam menyongsong diberlakukannya MEA. Kegiatan ini disinergikan pula dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna mendapatkan sertifikasi sesuai standart dunia kerja (professional). Bidang Keahlian yang dikembangkan meliputi :



- a) Teknologi dan Rekayasa
 - b) Teknik Informatika & Komunikasi
 - c) Kesehatan
 - d) Agribisnis & Agroteknologi
 - e) Perikanan & Kelautan
 - f) Bisnis & Manajemen
 - g) Pariwisata
 - h) Seni Rupa & Kriya
 - i) Seni Pertunjukan
- Peningkatan SDM juga dilakukan di BLK-BLK bahkan beberapa diantaranya sudah menerapkan standart Internasional. Khusus untuk pegawai melalui diklat teknis dan kepemimpinan yang di tahun 2017 akan dilakukan kepada 1.040 orang dan Assessment Komplek (Job target) terhadap 120 pegawai.
 - Agar terwujudnya good government dilakukan melalui reformulasi konsep Reformasi Birokrasi ala Jawa Timur yang tidak sekedar pembenahan pada sisi administrasi saja, namun juga pada revolusi mental manusia dan perangkat pendukungnya seperti skema berikut :

Gambar 5.2 Formula Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur



- Dilakukan pula kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah agar pertanggung-jawaban kinerja dapat mencapai standart nilai tertinggi (Sangat memuaskan/A); Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur serta Fasilitasi dalam rangka Inovasi Pelayanan Publik.



c) Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas program dan kegiatan yang direncanakan bisa mengurangi tingkat prosentase kemiskinan dan pengangguran sudah dimulai sejak tahun 2009 yang terintegrasi dari program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam kluster ruang serta kluster program. Keberhasilan Program JALINKESRA di tahun



2009-2014 dilanjutkan dengan merubah menjadi Program JALINMATRA dimana pola integrasi diantara kegiatan dalam program ini lebih banyak dan saling terkait yang diharapkan agar dampak pengurangan-nya bisa mengena pada akar masalah yang lebih multidimensi. Kegiatan-kegiatan tersebut di tahun 2017 antara lain :

- JALINMATRA Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (B-RTSM) untuk 11.054 RTSM di 69 desa pada 22 Kecamatan di 12 Kabupaten.
- JALINMATRA Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk 24.008 KRT (Kepala Rumah Tangga Perempuan) di 668 desa pada 176 Kecamatan di 35 Kabupaten
- JALINMATRA penanggulangan kerentanan kemiskinan (PK2) untuk 250 DESA di 29 Kabupaten.
- Program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Anti Poverty Program (APP), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Rusunawa serta pembangunan prasarana MCK Komunal

Sedangkan pada kegiatan yang lebih mengarah kepada pengurangan pengangguran disamping dari memperbanyak peluang kesempatan kerja, juga dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- Penguatan BLK menjadi BLK Internasional juga dicapai melalui pola-pola magang dan inkubator.
- Pengembangan inovasi pelayanan penempatan kerja
- Pelayanan informasi magang dan pelatihan kerja berbasis kompetensi
- Gerakan Cegah PHK, serta
- Pengawasan penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja.

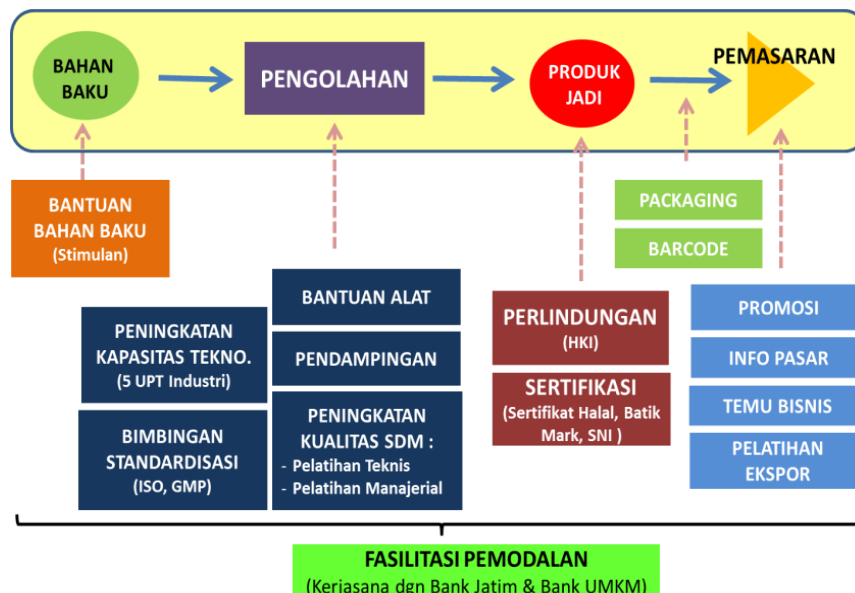


d) Pengembangan Industri dan Perdagangan

Guna menunjang dimensi Sektor Unggulan utamanya pada sektor Industri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Himpunan Kawasan Industri pada prinsipnya telah menyiapkan lahan untuk kawasan Industri besar dengan luasan 27.084 Ha pada 10 Kabupaten/Kota, dimana 2.220 Ha diantaranya sudah terpakai. Sedangkan untuk IKM pengembangannya dilakukan melalui sentra industri dengan segala fasilitas infrastrukturnya.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih besar kepada pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan melalui Program Pengembangan 2.629 IKM agro Paripurna. Program ini dilakukan holistic baik dari jaminan ketersediaan bahan baku, pengolahan hingga tersedianya produk jadi serta fasilitas pemasaran.

Gambar 5.3 Skema Pengembangan IKM Paripurna

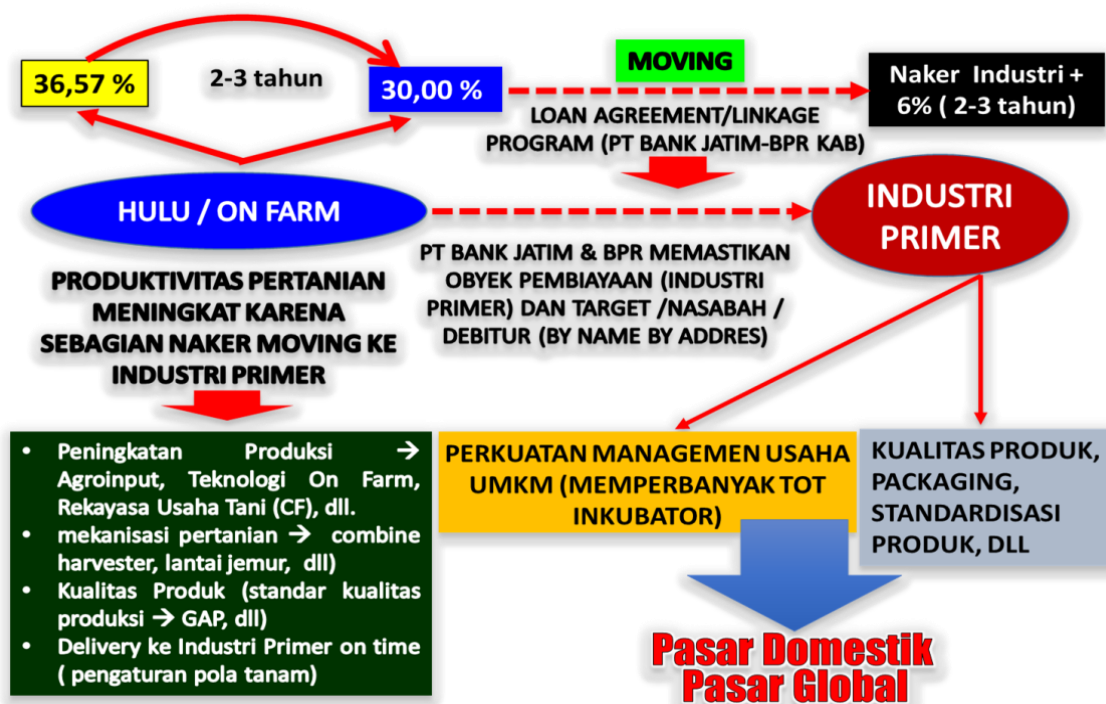


- Konsepsi ini diperkuat dengan standardisasi 1.500 produk IKM Jawa Timur.
- Inovasi pengembangan produktivitas wirausaha agro industri juga dilakukan Pemerintah Provinsi mulai tahun 2016 dengan berupaya mengkonkritkan 3 Aspek Utama Ekonomi baik melalui (1) penyediaan bahan baku dengan peningkatan produksi/produktivitas bahan baku terutama pada Industri Agro (2) mensinergikan dengan aspek pembiayaan melalui system perbankan seperti APEX Bank dan/atau *loan agreement* antara Pemerintah Provinsi, Bank Jatim, Bank UMKM dan BPR Kabupaten/Kota dalam memberikan kredit dengan bunga murah 9% kepada Industri Primer; jika yang akan melakukan



kredit usahanya *feasible* namun tidak *bankable* karena tidak memiliki agunan maka diselesaikan dengan ikut serta pada skema pembiayaan jaminan kredit daerah melalui PT. JAMKRIDA (3) menyediakan fasilitasi pemasaran baik melalui pasar local setempat atau Pasar lelang agribis (jika dimanage kelompok dan berorientasi ekspor antar wilayah) di Pasar Induk Agrobisnis (Puspa Agro) serta bisa pula melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur di Provinsi mitra. Konsep penyediaan pasar dan penguasaan pasar domestik dari output sektor Pertanian dan IKM di Jawa Timur ini jika di skemakan dapat dilihat seperti gambar berikut :

Gambar 5.4 Skema Pengembangan Industri Primer



e) Pengembangan Koperasi dan UMKM, serta Kelembagaan Pembiayaan.

Program/Kegiatan prioritas yang mendukung dimensi Pemerataan dan Kewilayahan utamanya pada program Pemerataan antar Kelompok Pendapatan yang di Jawa Timur kelembagaannya dilakukan melalui Program Pengembangan Koperasi dan UMKM ini diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang antara lain meliputi :



- Pengembangan koperasi dan UMKM dilakukan melalui penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (untuk usaha mikro) antara lain dengan penguatan 2.000 Koperasi Wanita, Kopontren, Koperasi Karyawan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan pengembangan LKM berbasis Fungsional yang setiap tahun dialokasikan bantuan penguatan permodalan untuk 2.000 LKM @ 25 juta dan guna merealisasikan gerakan syariah lebih nyata, dilakukan melalui pembentukan Koperasi Wanita Syariah.



- Spin Off pada unit usaha Bank Jatim menjadi Bank Jatim Syariah, dilakukan untuk memantapkan gerakan ekonomi syariah di Jawa Timur.
- Membangun BPR Kabupaten/kota Menjadi linkage dengan Provinsi dengan pemberian suku bunga murah untuk memperkuat perekonomian, karena dari 20 juta tenaga kerja di Jawa Timur 906.000 masih menganggur, 92 % diserap UMKM. Apabila tidak difasilitasi kredit murah maka beban pengangguran akan bertambah besar.
- Dilakukan pula pengembangan Inkubator Bisnis untuk 3.000 UKM, Pemagangan 1.000 UKM ke Profesional UKM Ekspor dan 250 UKM diikuti pada promosi/akses pasar UKM Dalam & Luar Negeri serta penguatan SMESCO Business Development Centre.

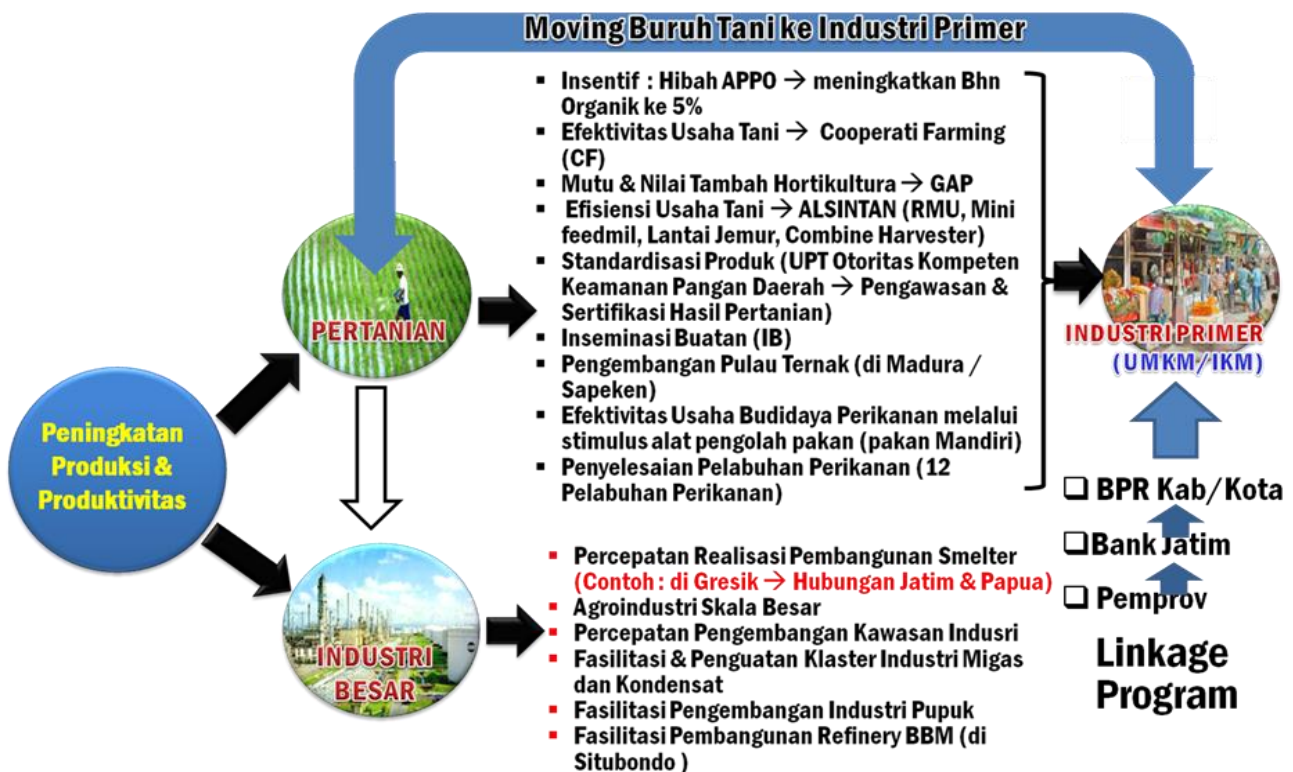
f) Peningkatan Kedaulatan Pangan

Penopang pada dimensi Sektor Unggulan utamanya program Kedaulatan Pangan ini, dilakukan di Jawa Timur melalui prioritas kegiatan antara lain :

- Peningkatan Produksi/Produktivitas tanaman pangan strategis. Dari target Jatim menopang 50 % target surplus pangan nasional (padi 10 juta Ton), di tahun 2015 surplus komoditas utama di Jawa Timur telah tercapai kinerja :
 - Padi mengalami surplus 4,94 Juta ton
 - Jagung mengalami surplus 3,4 juta ton
 - Kedelai defisit 46,9 Ribu ton
- Prioritas kegiatan lainnya adalah Stimulus Peningkatan Produksi sektor primer dan sekunder, seperti tergambar pada skema berikut :



Gambar 5.5 Stimulasi Peningkatan Produksi Sektor Primer dan Sekunder di Jawa Timur



- Stimulasi melalui konsep peningkatan produksi dan produktivitas di sektor pertanian akan memberikan dampak keterkaitan ke depan (forward linkage) kemudahan bahan baku industri agro yang mendominasi struktur industri di Jawa Timur.
 - Untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian tanaman pangan ini alat mesin pertanian yang dibantu meliputi 175 unit transplanter, 47 unit cultivator, pompa air 22 unit , 32 unit hand traktor. Sedangkan untuk meningkatkan nilai tambah alat mesin yang diperbantukan meliputi 150 unit combine harvester, 10 unit pembangunan packing house, 10 unit sarana packing house, 3 unit vacuum frying.
 - Sertifikasi bibit unggul pertanian di tahun 2017 direncanakan untuk 27.500 ton benih tanaman pangan , 300.000 pohon benih hortikultura dan 12.000 ton benih sayuran.
 - Pengembangan Cooperative Farming dilakukan pada 28 Kelompok yang tersebar se Jawa Timur serta penerapan Good Agricultural Practices (GAP) hortikultura direncanakan untuk 62 unit (pembinaan & pengawalan proses budidaya sampai dengan sertifikasi produksi hortikultura)



- Dalam konteks yang lebih makro untuk meningkatkan kedaulatan pangan, dilakukan peningkatan Indeks Pertanian (IP) melalui Pembangunan Waduk beserta jejaring irigasi yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut kewenangannya masing-masing. Waduk yang telah terbangun meliputi : Waduk Bajulmati di Banyuwangi, Nipah di Sampang, Jabung Ring Dyke (tuban), Bendung Gerak Sembayat di Gresik, Upaya ini telah berhasil meningkatkan IP : 1,86 menjadi 2,31 di tahun 2015 dan diharapkan bisa mencapai IP : 2,86 di tahun 2019.
- Kegiatan lainnya adalah pemanfaatan kebun dan pekarangan melalui pengembangan Karang Kitri di 200 desa dan Kawasan Rumah Pangan Lestari di 114 desa.
- Di ranah perkebunan dilakukan intensifikasi tanaman tembakau (kualitas Kadar TAR rendah) pada lahan 7.000 Ha; Pengembangan Tanaman Kakao 4.000 Ha dan Pengembangan Kopi Arabika seluas 2.000 Ha serta pengembangan kebun bibit Tebu seluas 48 Ha (kebun bibit datar 40 Ha; kebun bibit induk 7 Ha; kebun bibit nenek 1 Ha).
- Untuk Peternakan dilakukan :
 - Optimalisasi Inseminasi Buatan guna mendukung Swasembada Daging Nasional melalui 1.300.000 akseptor (Pemeriksaan kebuntingan, asistensi teknologi reproduksi, dan maintenance Inseminasi Buatan dan penyediaan N2 Cair 350.000 liter).
 - Pengadaan bibit ternak ditahun 2017 dilakukan pada Sapi PO : 127 ekor betina, 10 ekor jantan; Sapi Madura : 16 ekor betina, 2 ekor jantan; Domba Sapudi 80 ekor betina, 10 ekor jantan; Kambing Senduro : 80 ekor betina, 10 ekor jantan.
 - Untuk peningkatan populasi ternak dilakukan dengan pengadaan Sapi PO : 660 ekor betina; Sapi Perah : 120 ekor betina; Kambing Senduro 300 ekor betina, 30 ekor jantan, Kambing Kacang : 500 ekor betina, 60 ekor jantan; kelinci 440 ekor.
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membantu dengan memberikan suku bunga yang murah (4%) yang nantinya dilaksanakan dengan kerjasama berbagai pihak seperti penggunaan lahan nganggur Kodam dan angkatan laut untuk peternakan sapi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan persentase pertumbuhan Sapi Potong dari semula 6,18% per tahun pada periode 2009-2013 menjadi 6,26% pada periode 2014 - 2018.



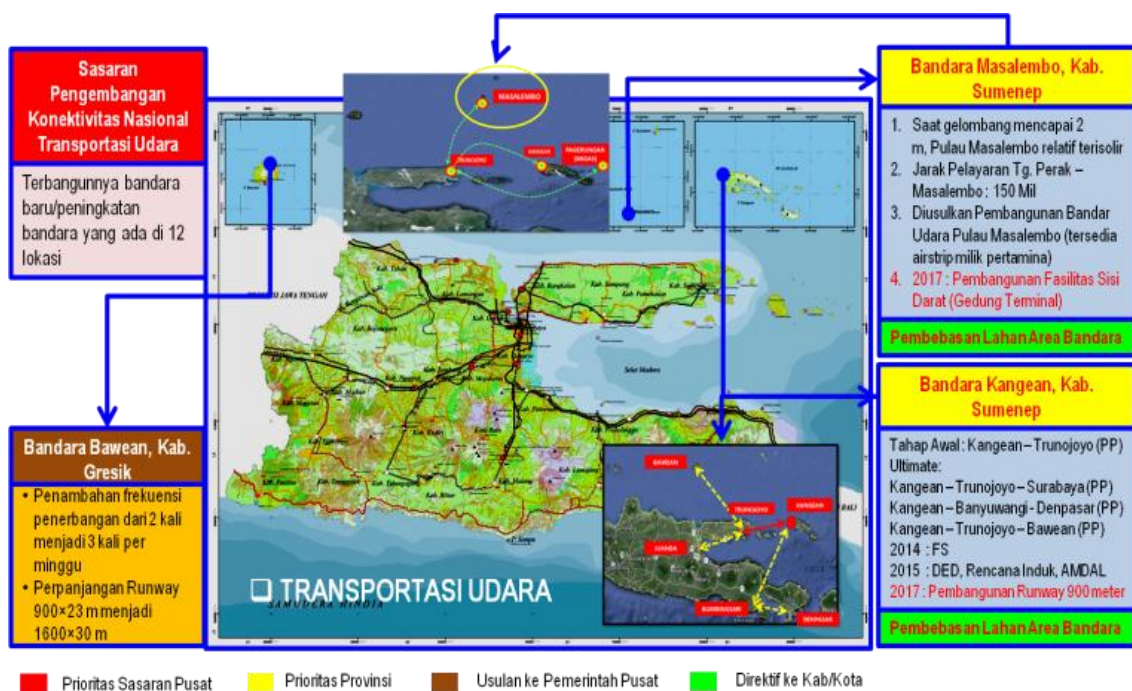
g) Peningkatan infrastruktur

Peningkatan Infrastruktur dalam rangka mendukung Konektivitas Nasional dan antar wilayah di Jawa Timur dilakukan guna memacu kembali terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi disparitas antar wilayah. Infrastruktur yang diprioritaskan meliputi :

o Transportasi Udara :

Terbangunnya bandara baru/peningkatan bandara yang ada di 12 lokasi. Kegiatan ini juga diikuti dengan pembangunan akses baru/peningkatan jalan akses menuju bandara.

Gambar 5.6. Peta Tematik Rencana Pengembangan Transportasi Udara 2017

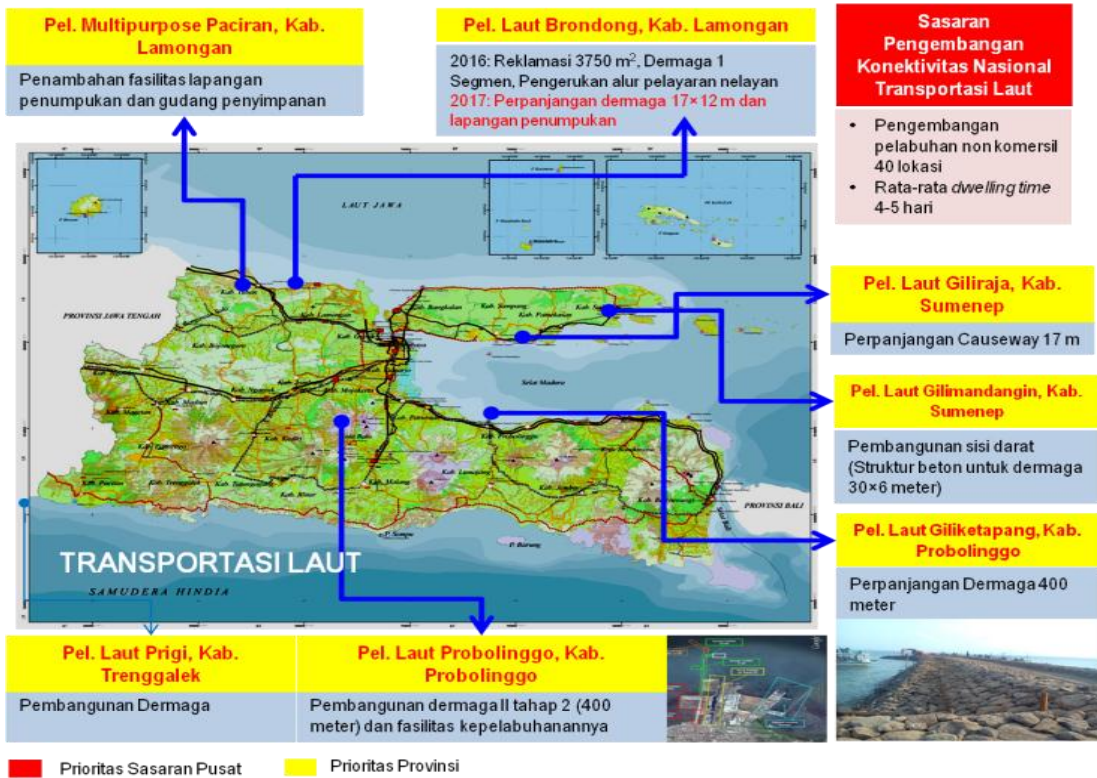


o Transportasi Laut :

- Pengembangan pelabuhan non komersil 40 lokasi dengan rata-rata *dwelling time* 4-5 hari untuk pelabuhan Tanjung Perak.
- Pembangunan Dermaga
- Penambahan lapangan penumpukan barang
- Pembangunan/peningkatan akses jalan menuju pelabuhan



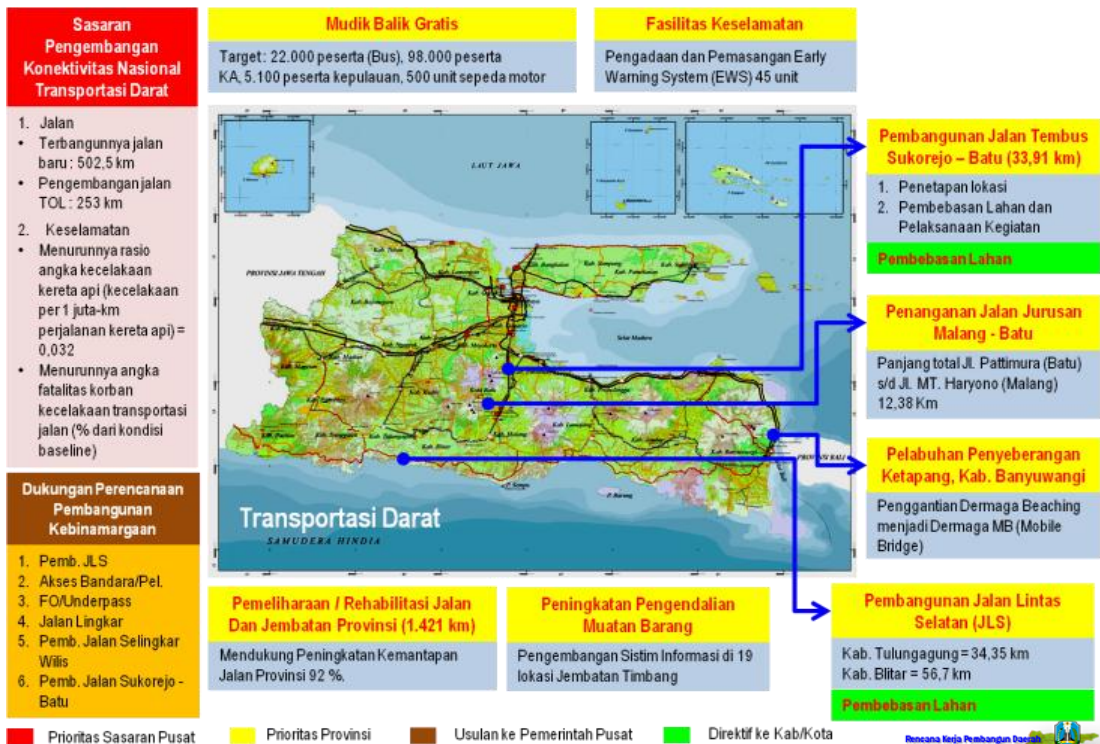
Gambar 5.7 Peta Tematik Rencana Pengembangan Transportasi Laut 2017



○ Transportasi darat :

- Terbangunnya jalan baru : 502,5 km
- Pengembangan jalan Tol : 253 km,
- Peningkatan dan Perbaikan jalan & Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, seperti tergambar pada peta Tematik berikut :

Gambar 5.8 Peta Tematik Rencana Pengembangan Transportasi Darat 2017



- Percepatan pembangunan JLS dengan realisasi fisik 365,28 km (53,97%). Didorong tahun ini di Popoh hingga Malang. Diperlukan anggaran Rp 2,09 Triliun. Tahun depan akan disusun DED untuk pembangunan akses jalan dari Pacitan ke Malang guna mendukung bandara yang ada di Malang
- Pembangunan Fly Over/Underpass di Kota Besar dan Metropolitan
- Jalan Lingkar di Kota Besar – Sedang.
- Pembangunan Jalan Regional Selingkar Wilis
- Pembangunan Jalan Sukorejo - Batu (mengatasi kemacetan Megapolitan Surabaya – Malang Raya)
- Peningkatan infrastruktur Kangean dan Masalembu.
- Fasilitasi pembangunan Kilang Minyak & Gas Bumi di Kabupaten Tuban untuk minyak dan gas.
- Pembangunan pelabuhan Prigi untuk pelabuhan nusantara.
- Pembangunan Jalur KA Double track Surabaya sampai Banyuwangi.
- Melanjutkan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

h) Kemaritiman dan Kelautan

Penopang dimensi Sektor Unggulan Nasional, utamanya pada program Kemaritiman dan Kelautan ini dilakukan di Jawa Timur melalui Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pada Program Perikanan Tangkap dilakukan melalui prioritas :

- Pemulihan Sumber Daya Ikan melalui :
 - Pembangunan 20 paket Rumah Ikan di Banyuwangi, Probolinggo dan Situbondo,
 - Under Water Restocking Laut 300.000 ikan Kerapu di Banyuwangi, Situbondo, Kab. dan Kota Probolinggo, Tuban ; dan
 - Restocking 5 Juta Benih Ikan Tobro, Tawes, Wader di Perairan Umum Darat
 - Rehabilitasi Mangrove 85 Ha dan terumbu karang 12 Ha.
- Pemberian bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang ramah lingkungan kepada nelayan di 22 Kabupaten/Kota berpantai;
- Pembangunan dan penyempurnaan Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Popoh dan Pancer.
- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
- Fasilitasi, eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap



- Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI
- Pengembangan Budidaya Perikanan melalui pengembangan alat pakan mandiri sebanyak 100 paket pakan mandiri yang terdiri dari mesin extruder (pengapung pelet) pencampur, pengaduk, dan formulasi bahan baku pakan ikan.
- Pengembangan Minapolitan, seperti tergambar pada peta berikut :

Gambar 5.9 Peta Pengembangan Kawasan Minapolitan di Jawa Timur



i) Harmonisasi Sosial

Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur melalui fasilitasi FKDM, FKUB dan FPK dengan kegiatan :

- Antisipasi Perkembangan gerakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila di Jawa Timur
- Pembinaan karakter bangsa (pemuda) berbasis kualitas moral dan nasionalisme (character building)
- Membangun Kembali Karakter Bangsa dan Membersihkan Diri Sendiri dari Berbagai Prasangka Sosial-Kultural-Politik
- Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- Membangun Kembali Karakter Bangsa dan Membersihkan Diri Sendiri dari Berbagai Prasangka Sosial-Kultural-Politik



- Sinergi dengan TNI/POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa dalam rangka pencegahan meluasnya gerakan yg meresahkan masyarakat
- Revitalisasi budaya dan kearifan local.

Selengkapnya terkait detail uraian Program dan kegiatan Prioritas beserta sinergisitasnya dengan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, tersaji pada ***lampiran***.

5.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial Pemerintah Daerah Provinsi antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.

Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.

❖ **Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah**

Arah kebijakan spasial dan prioritas spasial pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) prioritas utama Provinsi Jawa Timur dengan berbasis telaah pendekatan spasial / keruangan. Arah kebijakan spasial dan prioritasnya diderivasi dari pendekatan spasial. Pendekatan spasial tidak hanya menelaah daya dukung ruang dan kesesuaian dengan amanat regulasi spasial saja. Lebih jauh, pendekatan spasial diintegrasikan atas 3 (tiga) unsur pendekatan yaitu : (1) amanat regulasi spasial, (2) pendekatan Teknokratik spasial, dan (3) pendekatan Top down – Bottom Up sektoral. Masing-masing unsur pendekatan memiliki lokus-



lokus program dan kegiatan pengembangan yang diselaraskan menjadi satu pendekatan spasial dengan memetakan prioritas-prioritas spasial. Arah kebijakan dan prioritas spasial diharapkan mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya.

Pendekatan amanat regulasi spasial didasarkan antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Substansi utama yang diacu dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur adalah (1) perwujudan struktur ruang, (2) perwujudan pola ruang, dan (3) indikasi program pembangunan jangka menengah. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, substansi utama yang diacu adalah Kebijakan Kluster Kewilayahan.

Pendekatan teknokratik spasial mengacu pada telaah atas update dinamika kluster-kluster kewilayahan yang diproyeksikan untuk tahun 2017. Sedangkan Pendekatan Top down – Bottom Up sektoral didasarkan atas (1) penyelarasan atas 9 (sembilan) prioritas Provinsi Jawa Timur dan hasil telaah sinkronisasi internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas prioritas program dan kegiatan, serta (2) hasil rekap usulan-usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur.

Kerangka pendekatan spasial digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.10 Kerangka Pendekatan Spasial



Usulan Kabupaten/Kota yang diakomodasi untuk pembangunan tahun 2017 berdasarkan 9 prioritas pembangunan meliputi :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan & Kesehatan)



DINAS SOSIAL

1. Pemutakhiran data Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan data kemiskinan
2. Tanggap Darurat penanganan penyebaran HIV dan AIDS pasca ditutupnya Lokalisasi dan penanganan bahaya penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Revitalisasi kawasan Mojopahit
2. Revitalisasi situs-situs religi

DINAS KESEHATAN

1. Pemutakhiran data Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan data kemiskinan
2. Tanggap Darurat penanganan penyebaran HIV dan AIDS pasca ditutupnya Lokalisasi dan penanganan bahaya penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)
3. Peningkatan kualitas ponkesdes
4. Pengembangan taman posyandu
5. Penataan jaminan kesehatan nasional (sistem rujukan)
6. Penurunan AKI, AKB serta prevansi kurang gizi dan stunting
7. Pengendalian penyakit kusta, HIV, TB, malaria
8. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa (pasung)
9. Pendayagunaan Dan Pemerataan Tenaga Kesehatan Yang Bermutu
10. Akreditasi puskesmas dan rumah sakit pemerintah

DINAS PENDIDIKAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta
2. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah
3. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah

RS/RSU/RSK/RSP

1. Peningkatan Pelayanan RS

Gambar 5.11 Peta Persebaran Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan, Dan Prioritas Pembangunan Budaya Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

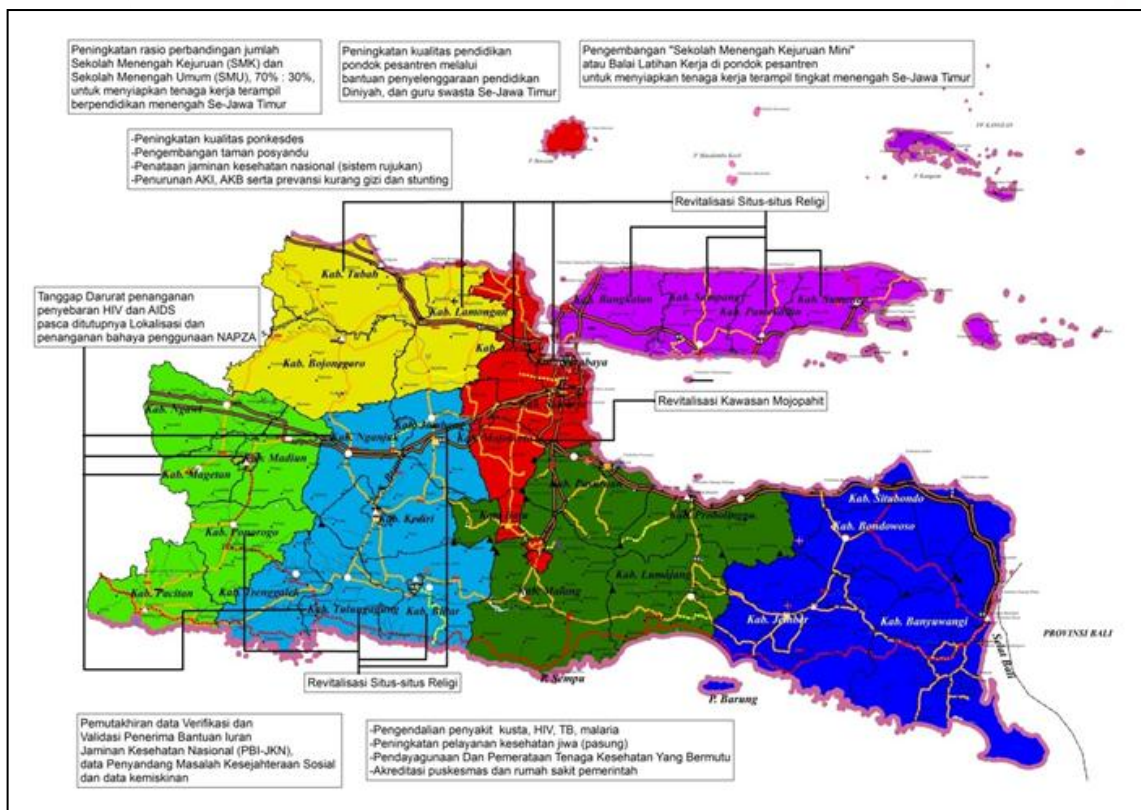
Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016



Kegiatan prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan, Dan Prioritas Pembangunan Budaya Dan Pariwisata ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut :

- Lokus program dan kegiatan prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan tersebar secara merata. Sektor kesehatan dan pendidikan merupakan sektor pelayanan untuk seluruh masyarakat sehingga lokusnya menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan lokus program dan kegiatan prioritas Pembangunan Budaya Dan Pariwisata terfokus pada pusat dan peninggalan budaya dan pariwisata. Prioritas sektor budaya dan pariwisata bersifat lokus dan fokus pada revitalisasi kawasan majapahit dan situs-situs religi.
- Arahan RTRW Provinsi untuk prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan, dan prioritas Pembangunan Budaya Dan Pariwisata diwujudkan pada seluruh wilayah pengembangan (WP).
- Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Peningkatan Mutu Pendidikan merupakan fungsi pengembangan yang terdapat dalam seluruh Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Timur.
- Sinergi Antar Kegiatan: Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren – Peningkatan Jumlah Rasio SMK dan SMU – Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren ☐ sinergi tahapan dan pendanaan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan – Kegiatan Penyehatan Masyarakat dan Lingkungan – Pengembangan Jaminan kesehatan ☐ sinergi tahapan dan pendanaan.
- Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kemenko Pembangunan Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa; (v) Dana non-pemerintah.



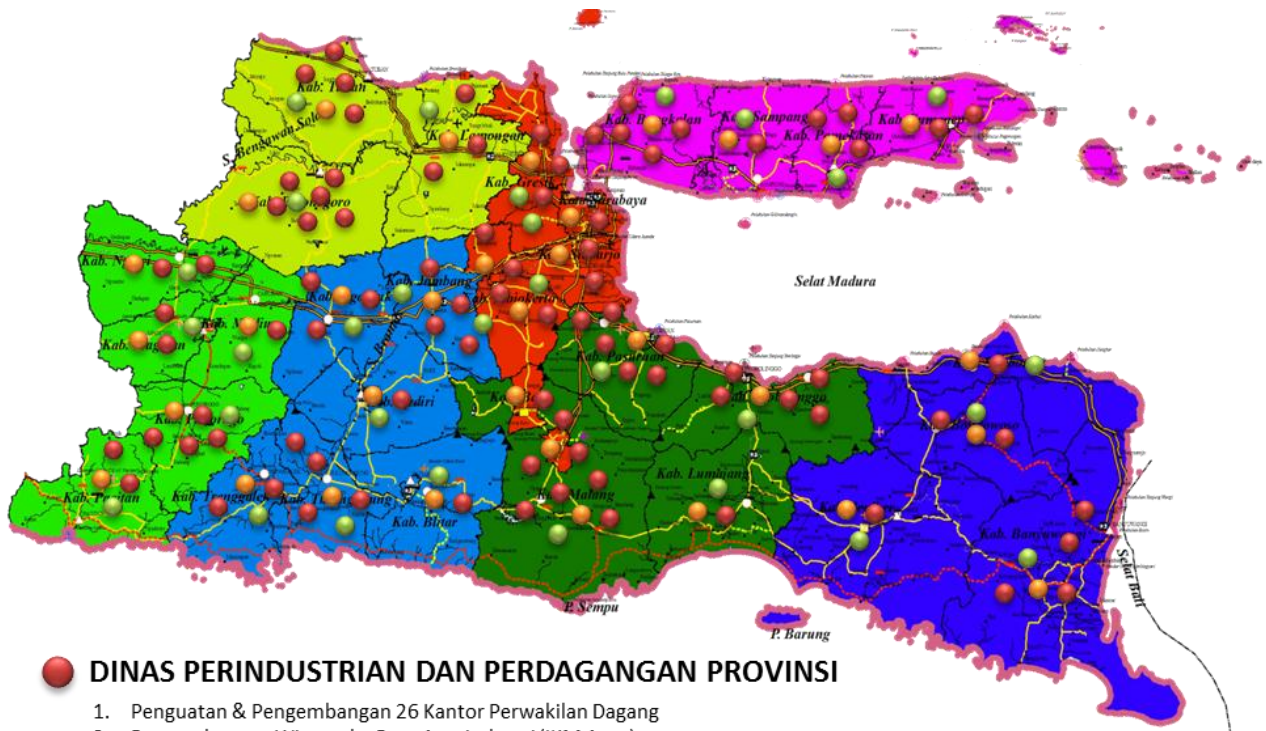


Gambar 5.12 Peta Sinergitas Prioritas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Prioritas Pengembangan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : Hasil analisa, 2016



2. Pengembangan Industri & Perdagangan, Pengembangan Koperasi dan UMKM



● DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI

1. Penguatan & Pengembangan 26 Kantor Perwakilan Dagang
2. Pengembangan Wirausaha Baru Agroindustri (IKM Agro)
3. Pengembangan Wirausaha Baru Non Agroindustri (IKM Non-Agro)
4. Pengembangan Standardisasi
5. Pengendalian & Pengawasan Produk Impor
6. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG)
7. Pengendalian harga

● DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI

1. Peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembentukan kelompok fungsional dan kelompok lainnya (Kopwan, LMDH, Kopkar)
2. Inkubator ToT
3. Magang UKM ekspor;
4. Penguatan Peran Klinik UMKM dan Koperasi
5. Peningkatan Akses Pasar Dalam dan Luar Negeri
6. Fasilitasi legalitas, standarisasi
7. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM

● BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI

1. Perbaikan iklim investasi sehingga tercipta kesempatan kerja baru
2. Mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan serta kapasitas SDM pelayanan

Gambar 5.13 Peta Persebaran Prioritas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Prioritas Pengembangan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016

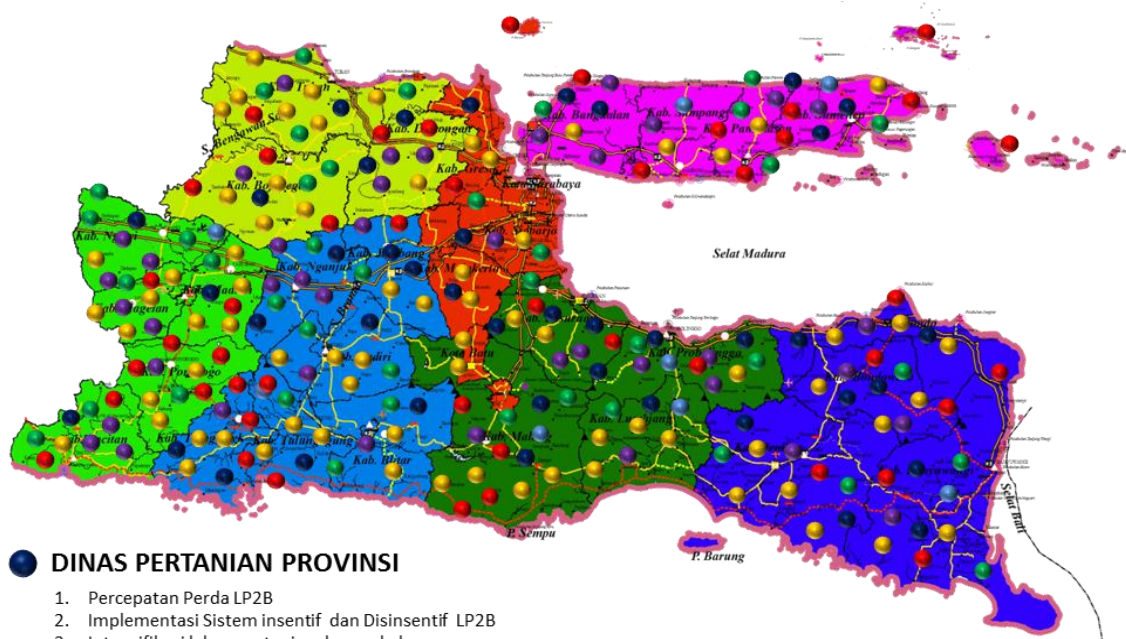


Kegiatan prioritas Kedaulatan Pangan ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut :

- Lokus program dan kegiatan prioritas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Prioritas Pengembangan Koperasi Dan UMKM tersebar mengikuti ketersediaan infrastruktur pendukung dan input produksi industri.
- Arahan RTRW Provinsi atas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM dicapai dengan Pengembangan industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, manajemenproduksi yangmemperhatikan dayadukung lingkunganhidup, Pengembangan infrastruktur pendukung industri, delineasi wilayah industri (Kawasan Industri, peruntukan industri dan sentra industri), pengembangan orientasi ekspor yang memanfaatkan sumber daya lokal, dan pengembangan investasi dan permodalan, dengan alokasi ruang yang telah ditentukan dilaksanakan pada PJM I (2012-2016) dilanjutkan pada PJM II (2017-2021).
- Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM merupakan aspek pendukung dalam pengembangan klaster wilayah yang berada pada klaster Metropolitan, Agropolitan Bromo Tengger Semeru, Agropolitan Wilis, Regional Kelud, Agropolitan Madura dan Agropolitan Ijen.
- Sinergi Antar Kegiatan: pengembangan input industri on-farm sesuai potensi wilayah ☐ Kawasan Strategis Agropolitan dan Agroindustri ☐ pengembangan Kawasan dan Sentra Industri, pengembangan Koperasi dan UMKM ☐ pengembangan paska produksi, pemasaran, teknologi.
- Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria Tata Ruang; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa; (v) Dana non-pemerintah.



3. Peningkatan Kedaulatan Pangan



DINAS PERTANIAN PROVINSI

1. Percepatan Perda LP2B
2. Implementasi Sistem insentif dan Disinsentif LP2B
3. Intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan
4. Optimalisasi Sar-Prasarana Pertanian
5. Peningkatan Nilai Tambah dan akses pasar (Teknologi Pengelolaan Pasca Panen) Combine Harvester, RMU, Lantai Jemur dan Alsin Pasca Panen.
6. Peningkatan jaringan irigasi, (JITUD, JIDES)
7. Perbaikan dan rehabilitasi Embung
8. Pengembangan GAP Tanaman Hortikultura
9. sertifikasi Benih padi dan hortikultur

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI

1. Intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan
2. Optimalisasi Sar-Prasarana Pertanian
3. Peningkatan Kualitas & Ketersediaan Agro input : Benih/ Bibit/Indukan, pakan ternak, pakan ikan
4. Perbaikan varietas dan perluasan areal tanam tebu
5. Peningkatan Nilai Tambah dan akses pasar (Teknologi Pengelolaan Pasca Panen) Combine Harvester, RMU, Lantai Jemur dan Alsin Pasca Panen.
6. Pengembangan GAP Tanaman perkebunan
7. Sertifikasi benih tanaman perkebunan

DINAS KEHUTANAN PROVINSI

1. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (Kawasan Hutan Lahan Bawah Tegakan, KRPL di 252 Desa, Karang Kitri 279 Desa, dll)

DINAS PETERNAKAN PROVINSI

1. Peningkatan Kualitas & Ketersediaan Agro input & Benih/ Bibit/Indukan, pakan ternak, pakan ikan
2. Peningkatan Nilai Tambah dan akses pasar (Teknologi Pengelolaan Pasca Panen) Combine Harvester, RMU, Lantai Jemur dan Alsin Pasca Panen.
3. Pengembangan Biogas/limbah peternakan
4. Peningkatan Inzeminasi Buatan (IB)
5. Sertifikasi benih / bibit ternak

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI

1. Peningkatan Kualitas & Ketersediaan Agro input & Benih/ Bibit/Indukan, pakan ternak, pakan ikan
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Peningkatan Teknologi & sarana Prasarana Usaha Garam (Geo Membran), Jalan Produksi

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

1. Peningkatan Kualitas & Ketersediaan Agro input & Benih/ Bibit/Indukan, pakan ternak, pakan ikan
2. Pengembangan sistem Tunda Jual
3. Optimalisasi Lumbung pangan
4. Pasar murah/bazar Ramadhan
5. Operasi Pasar pangan strategis

Gambar 5.15 Peta Persebaran Prioritas Kedaulatan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

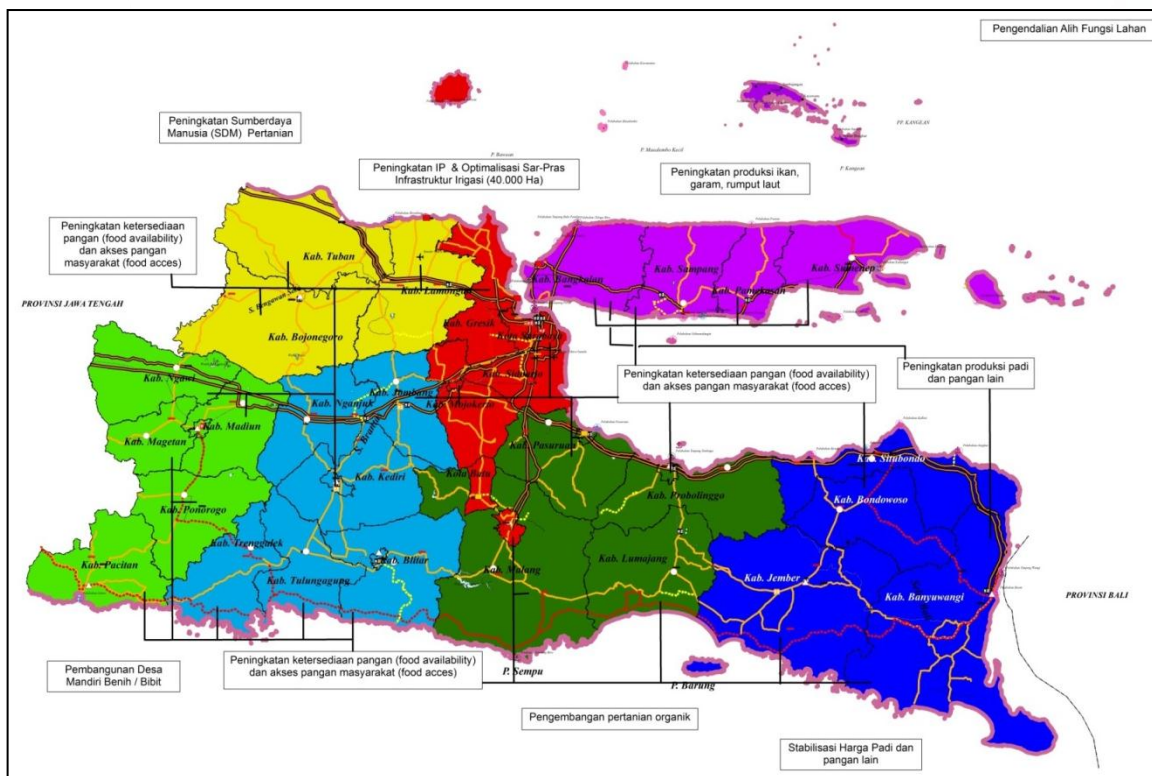
Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016



Kegiatan prioritas Kedaulatan Pangan ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut :

- Lokus program dan kegiatan prioritas Kedaulatan Pangan tersebar hampir secara merata pada seluruh wilayah Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan potensi pengembangan agropolitan dan minapolitan sektor pendukung pangan (pertanian – perkebunan – peternakan – perikanan) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.
- Arahan RTRW Provinsi atas Kedaulatan Pangan dicapai dengan Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian – perkebunan – peternakan – perikanan – kehutanan, Optimalisasi pemanfaatan teknologi, Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, Pengembangan perdagangan dan pasar yang efisien, Pengembangan pendukung agropolitan – minapolitan, dengan alokasi ruang yang telah ditentukan dilaksanakan pada PJM I (2012-2016) dilanjutkan pada PJM II (2017-2021).
- Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Kedaulatan Pangan merupakan aspek fokus dalam pengembangan klaster wilayah yang berada pada klaster Agropolitan Bromo Tengger Semeru, Agropolitan Wilis, Regional Kelud, Agropolitan Madura dan Agropolitan Ijen.
- Sinergi Antar Kegiatan: Kawasan dan Sentra Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan → pengembangan budidaya dan pemasaran → Kawasan Strategis Agropolitan → Pembangunan Agroindustri.
- Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria Tata Ruang, Kementerian LHK; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa; (v) Dana non-pemerintah.



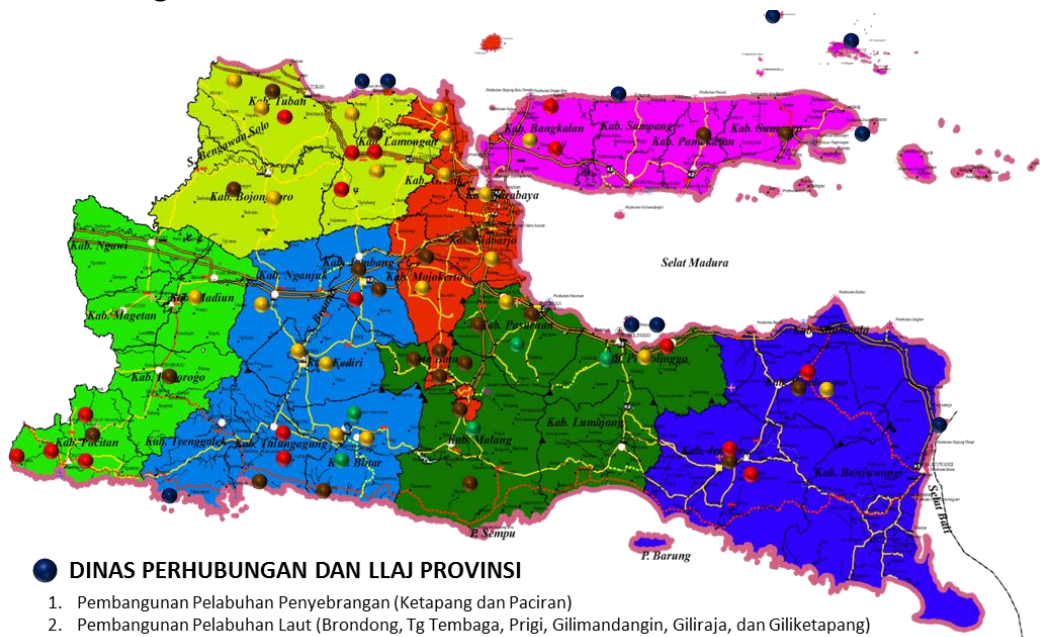


Gambar 5.16 Peta Sinergitas Prioritas Kedaulatan Pangan dengan Kebijakan Spasial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : Hasil analisa, 2016



4. Peningkatan Infrastruktur



● DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI

1. Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan (Ketapang dan Paciran)
2. Pembangunan Pelabuhan Laut (Brondong, Tg Tembaga, Prigi, Gilimandangin, Giliraja, dan Giliketapang)
3. Pembangunan Bandara Kangean dan Masalembo

● DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI

1. Operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi (176 DI Provinsi luas 164.823 Ha)
2. Pembangunan rehabilitasi dan normalisasi sarana/prasarana Pengendali Banjir dengan 5 WS Provinsi.

● DINAS PU BINA MARGA PROVINSI

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan
2. Pembebasan Lahan Jalan tembus Sukorejo-Batu
3. Peningkatan Jalan Malang-Pendem-Batu
4. Penanganan Rekonstruksi Jalan (18 ruas jalan, 85.838 Km)

● DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI

1. Penyelenggaraan SPAM Regional
2. Pembangunan Rusun
3. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 10 Kabupaten
4. Pembangunan SPAM di Daerah Rawan Air (Kekeringan)
5. Fasilitasi Pengembangan TPA Regional di Malang Raya
6. Pengembangan Kawasan Agropolitan
7. Percepatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
8. Percepatan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang

● BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

1. Penerapan SPM Lingkungan Hidup
2. Pelayanan Uji Kualitas Air dan Udara
3. Pemantauan Kualitas Air, Udara, dan Tanah
4. Demplot Pelestarian Sumber Mata Air dengan Vegetasi pada 5 lokasi
5. Demplot Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Kawasan Pesisir pada 5 lokasi

● DINAS ESDM PROVINSI

1. Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan (Rekator Biogas, PLTS SHS (Solar House System) dan Komunal, PLTMH) dan Pemasangan Listrik Sambungan Rumah (SR)
2. Pembangunan Sumur Bor pada Daerah Rawan Air

Gambar 5.17 Peta Persebaran Prioritas Peningkatan Infrastruktur Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

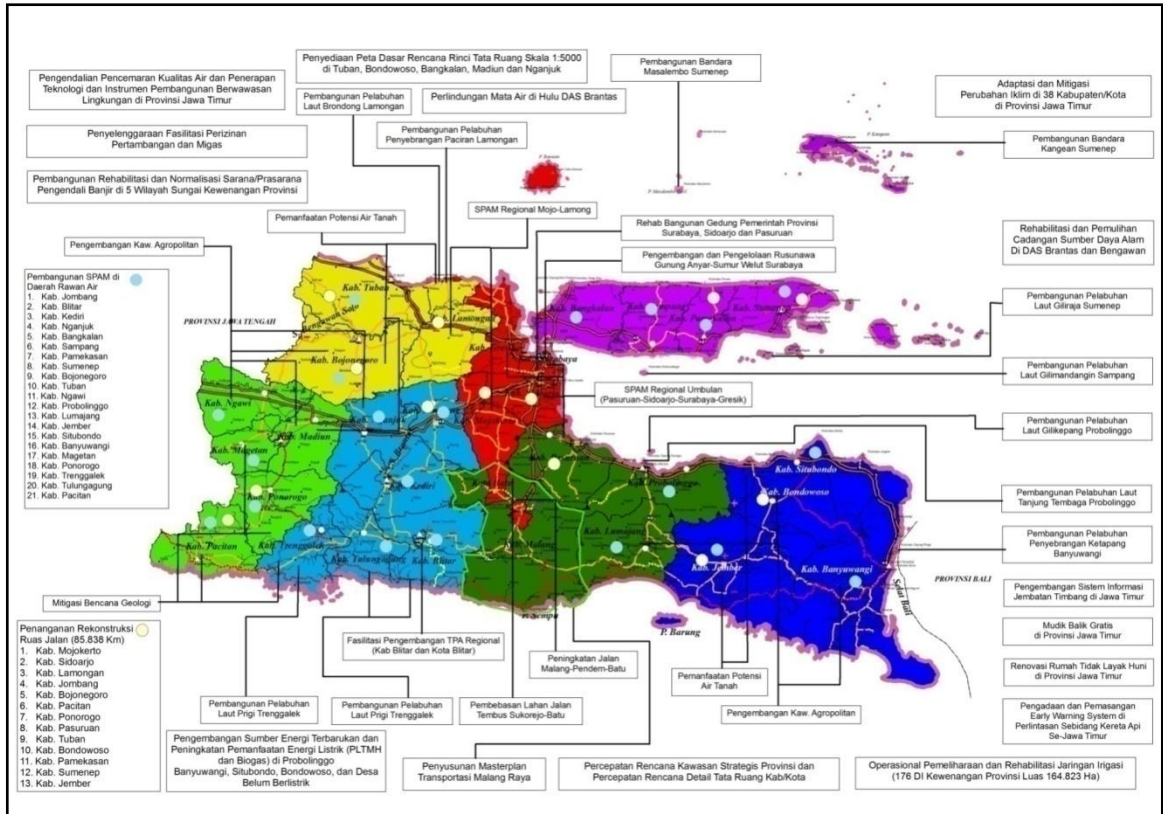
Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016



Kegiatan prioritas peningkatan infrastruktur ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut :

- Lokus program dan kegiatan prioritas Peningkatan Infrastruktur tersebar dengan pola mengikuti struktur ruang berupa jalur pantura, jalur Surabaya-Malang (KSN Gerbangkertasusila dan KSN Malang Raya), dan menyebar sebagian pada wilayah selatan dan wilayah timur dalam rangka pemerataan pembangunan.
- Arahan RTRW Provinsi Peningkatan Infrastruktur dicapai dengan Pemantapan Jaringan Jalan, Pengembangan Bandara dan Pelabuhan, Pengembangan Energi, Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Prasarana Lingkungan dengan alokasi ruang yang telah ditentukan dilaksanakan pada PJM I (2012-2016) dilanjutkan pada PJM II (2017-2021).
- Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Peningkatan Infrastruktur merupakan aspek pendukung dalam pengembangan kluster wilayah yang berada pada kluster Agropolitan Wilis, Regional Kelud, Segitiga Emas, Metropolitan, Agropolitan Bromo, Agropolitan Madura dan Agropolitan Ijen.
- Sinergi Antar Kegiatan: Bandara – Pelabuhan – Jalan – Energi – Rusun – RTLH ☐ sinergi tahapan dan lokasi. SPAM – Rawan Kekeringan – Kawasan Strategis ☐ sinergi tahapan tahapan dan lokasi. Sinergi lingkungan hidup dan penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementerian PU Pera, Kementerian LHK, Kementerian Agraria Tata Ruang; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa.



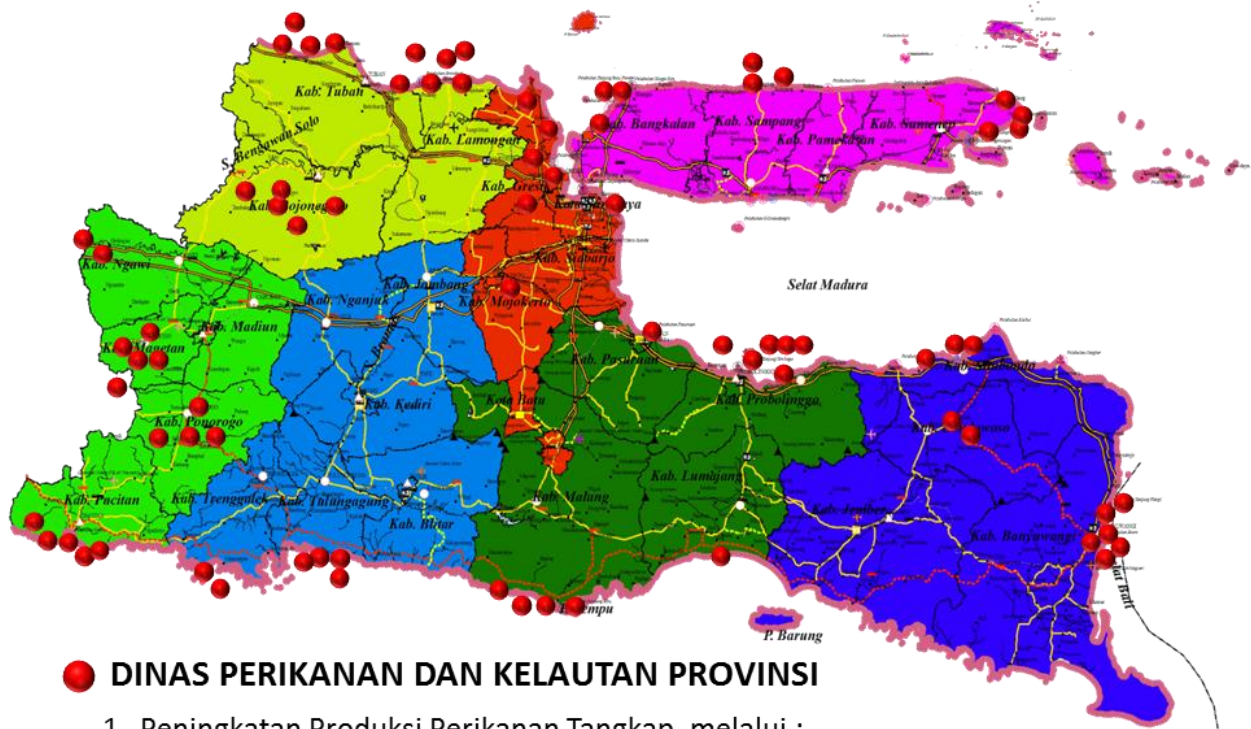


Gambar 5.18 **Peta Sinergitas Prioritas Peningkatan Infrastruktur dengan Kebijakan Spasial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

Sumber : Hasil analisa, 2016



5. Kemaritiman dan Kelautan



● DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, melalui :
 - a. Rehabilitasi Mangrove 40 Ha dan Terumbu Karang 14 Ha.
 - b. Pemulihan dan Peningkatan Potensi Sumberdaya Ikan/Restocking/Rumah Ikan 10 unit.
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Penangkapan Ikan
2. Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Sentra Perikanan Terpadu melalui Optimalisasi sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan (11 PP)
3. Pengembangan Industri Maritim
4. Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - a. Pemberantasan ilegal, *unregulated* dan unreported fishing (IUU)
 - b. Peningkatan Taraf Hidup Nelayan
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6. Peningkatan Budaya Bahari, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan IPTEK Kelautan.

Gambar 5.19 Peta Persebaran Prioritas Pembangunan Kemaritiman & Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016

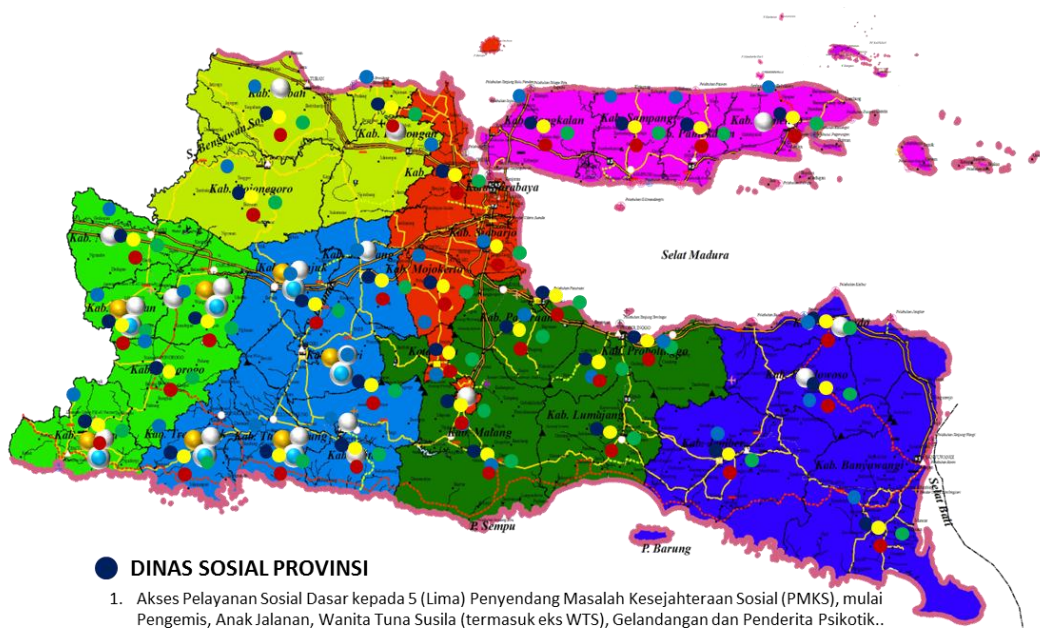


Kegiatan prioritas peningkatan Prioritas Pembangunan Kemaritiman & Kelautan ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut :

- Lokus program dan kegiatan prioritas Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan tersebar mengikuti ketersediaan infrastruktur pendukung kemaritiman dan wilayah dengan potensi kemaritiman dan perikanan.
- Arahan RTRW Provinsi untuk prioritas Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan diwujudkan dengan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan peruntukan perikanan tangkap yaitu Pengembangan Komoditas, Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) serta peningkatan sarana dan prasarana untuk pengembangan perikanan dan teknologi penangkapan ikan dengan alokasi ruang yang telah ditentukan dilaksanakan pada PJM I (2012-2016) dilanjutkan pada PJM II (2017-2021).
- Arahan dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara umum yaitu mengembangkan kegiatan budidaya yang bersinergi dengan potensi sumber daya perikanan dan melindungi ekosistem pesisir dan laut.
- Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan termasuk dalam klaster pesisir dan pulau-pulau kecil dengan fokus pada peningkatan kontribusi sektor perikanan (sektor primer) yang didukung dengan infrastuktur pendukung perikanan dan peningkatan sosial kemasyarakatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Sinergi Antar Kegiatan: Peningkatan Komoditas-Sarpras Pelabuhan Perikanan-Industri Maritim-Rehabilitasi ? sinergi tahapan, pelaksanaan dan lokasi. Peningkatan Budaya Bahari-Peningkatan Taraf hidup nelayan-Peningkatan SDM dan Iptek? sinergi tahapan dan lokasi. Pemberantasan ilegal fishing bersinergi dengan TNI AL upaya dalam pertahanan dan keamanan. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai regulasi pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil



6. Harmonisasi Sosial



● DINAS SOSIAL PROVINSI

1. Akses Pelayanan Sosial Dasar kepada 5 (Lima) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mulai Pengemis, Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila (termasuk eks WTS), Gelandangan dan Penderita Psikotik..
2. Optimalisasi penanganan korban pasung.
3. Optimalisasi penanggulangan bencana akibat kekeringan, longsor, banjir dan banjir lahar dingin.
4. Pemutakhiran Data Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran dan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Data Kemiskinan.
5. Tanggap Darurat Penanganan HIV dan AIDS Pasca ditutupnya Lokalisasi dan Penanganan Bahaya Penggunaan NAPZA
6. Perlindungan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, yang meliputi:
 - a. Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
 - b. Pembangunan Daerah Tertinggal

● BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI

1. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui:
 - a. Penguatan Permodalan dan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa
 - b. Penguatan Permodalan dan Usaha Ekonomi Produktif melalui Program Jalinmatra
2. Mengembangkan Kemitraan dengan Stakeholder Privat dan Masyarakat secara Proporsional (*partnership building*)

● DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

1. Revitalisasi/Penguatan Sarpras UPT Pelatihan Kerja
2. Pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat
3. Magang dalam negeri dan magang ke jepang (diawali dengan pembekalan calon peserta seleksi magang jepang)
4. Pemetaan tenaga kerja ter PHK untuk diarahkan kepada PAKER (Pelatihan Alih Kerja)
5. Penempatan AKL, AKAD, AKAN, AKSUS (Antar Kerja Khusus Untuk Pengoptimalisasi muda, Wanita, Penyandang Disabilitas, Lansia
6. Optimalisasi jejaring info lowongan kerja melalui program "ayo kerja"
7. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal
8. Harmonisasi hub industrial
9. Kondisi ketenagakerjaan kondusif
10. Gerakan cegah PHK melalui pemetaan pekerja ter PHK

● DINAS KESEHATAN

1. Optimalisasi penanggulangan bencana akibat kekeringan, longsor, banjir dan banjir lahar dingin

● BAKESBANGPOL PROVINSI

1. Pengembangan Resolusi Konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi SARA
2. Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan (mencegah terorisme dan Narkoba)

● BPBD

1. Optimalisasi penanggulangan bencana akibat kekeringan, longsor, banjir dan banjir lahar dingin

● SATPOL PP PROVINSI

1. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat.

Gambar 5.21 Peta Persebaran Prioritas Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Mulia Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

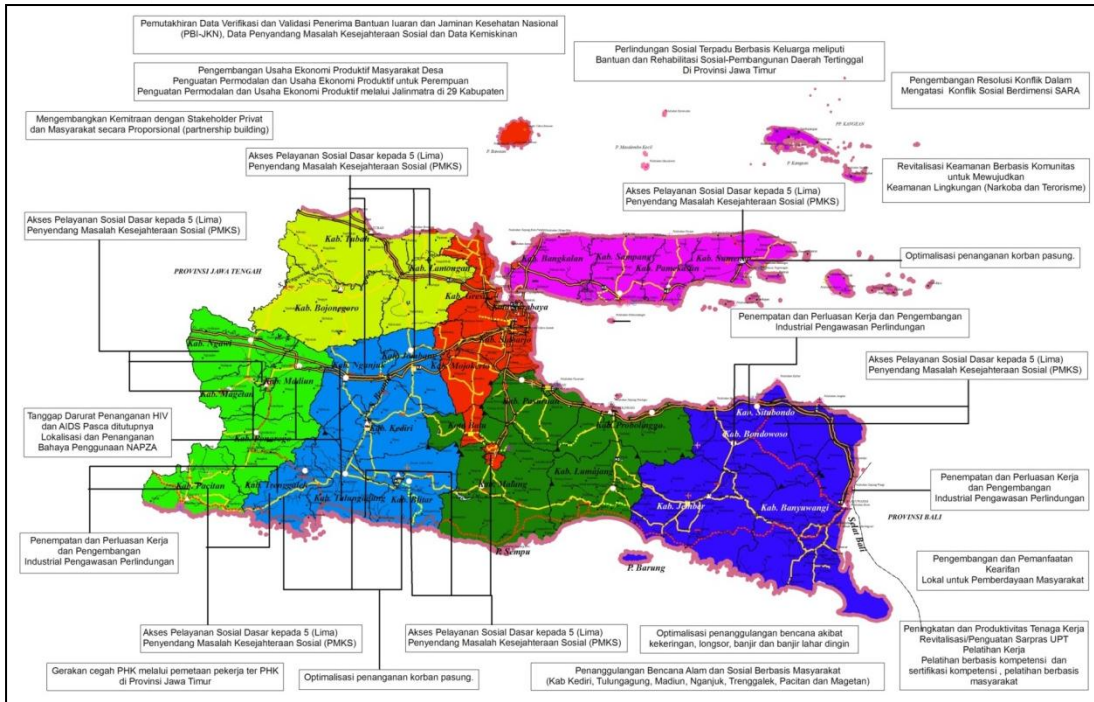
Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016



Kegiatan prioritas peningkatan Prioritas Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Mulia ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut :

- Lokus program dan kegiatan prioritas Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Mulia tersebar hampir secara merata. Sektor sosial, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, dan ketenagakerjaan merupakan sektor pelayanan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat sehingga lokusnya menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Arahan RTRW Provinsi kaitannya dengan Harmonisasi Sosial yang berakhlak mulia adalah dalam rangka mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi.
- Arahan Pengembangan Wilayah dalam rangka mewujudkan harmonisasi sosial yang berakhlak mulia diprioritaskan pada klaster wilayah agropolitan wislis, klaster regional kelud, klaster agropolitan bromo tengger semeru, klaster agropolitan madura, klaster segitiga emas, klaster metropolitan dan klaster pesisir dan kepulauan.
- Sinergi Antar Kegiatan: Penanggulangan Kemiskinan-Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka – Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak – Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial – Penanggulangan Bencana → sinergi tahapan, lokasi dan pendanaan. Harmonisasi Sosial yang berakhlak mulia sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Jawa Timur.
- Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa; (v) Dana non-pemerintah.





Gambar 5.22 Peta Sinergitas Prioritas Pembangunan Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Mulia dengan Kebijakan Spasial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

5.3 Rencana Holistik Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah tahun 2017 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembanPegunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 terutama memperhatikan target kinerja agregat Tahun 2017, maka program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



BAB VI

PENUTUP

Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2017, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada 9 (sembilan) program prioritas. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pelaku pembangunan di Jawa Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperanserta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya.
4. RKPD Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. RKPD ini disusun sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan Renja-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota di Jawa Timur.



Hal-hal lain yang secara substansial terjadi perubahan pada tahun berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2017, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada amanat Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

